



BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR
PROVINSI MALUKU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR
NOMOR 2 TAHUN 2017

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR 2016-2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah Kepala Daerah terpilih dilantik;
- b. bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2016 – 2021 merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2016 – 2021;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat, dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4350);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
19. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
22. Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 09 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2012 - 2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2012 Nomor 114 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 91);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 14 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2010 Nomor 69, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 65);

Dengan persetujuan bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SERAM BAGIAN TIMUR
dan
BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN
TIMUR TAHUN 2016 -2021.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Seram Bagian Timur;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur;

3. Bupati adalah Bupati Seram Bagian Timur;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur;
5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 yang selanjutnya disebut RPJPN adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025;
6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2005-2025 yang selanjutnya disebut RPJPD adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 20 (duapuluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025;
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disebut RPJMN adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional untuk periode 5 (lima) tahunan, yaitu RPJMN Tahun 2015-2019;
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur yang selanjutnya disebut RPJMD adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahunan;
9. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra PD adalah Dokumen Perencanaan Strategis Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahunan;
10. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun; dan
11. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

BAB II RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

Pasal 2

- (1) Dokumen RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN.
- (2) Dokumen RPJMD sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas, dijadikan sebagai landasan untuk menyusun dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD), dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD).

Pasal 3

- (1) Dokumen RPJMD sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 di atas, dijabarkan kedalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahunan untuk selama 5 (lima) tahun kedepan.
- (2) Tahapan dan tatacara penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah dan dokumen perencanaan perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas, akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Daerah.
- (3) Dokumen RKPD sebagaimana dimaksud pada Pasal (1) di atas, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah paling lama pada minggu ke 4 (empat) setiap tahunannya.

Pasal 4

- (1) Dokumen RPJMD sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 di atas, dijabarkan kedalam dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) untuk selanjutnya dijadikan landasan untuk penyusunan Rencana Kerja Tahunan Perangkat Daerah (Renja PD) untuk selama 5 (lima) tahun kedepan
- (2) Dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah dan dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas, ditetapkan dengan

Surat Keputusan Kepala Daerah paling lama 7 (tujuh) hari setelah Dokumen RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 5

- (1) Dokumen RPJMD Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2016 – 2021 disusun dengan sistematika :
 - Bab I Pendahuluan;
 - Bab II Gambaran Umum Kondisi Daerah;
 - Bab III Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan;
 - Bab IV Analisis Isu-Isu Strategis;
 - Bab V Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran;
 - Bab VI Strategi dan Arah Kebijakan;
 - Bab VII Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah;
 - Bab VIII Indikasi Rencana Program Prioritas Yang Disertai Kebutuhan Pendanaan;
 - Bab IX Penetapan Indikator Kinerja Daerah; dan
 - Bab X Pedoman Transisi dan Kaidah Pelaksanaan.
- (2) Dokumen RPJMD Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2016 – 2021 adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

- (1) Dokumen RPJMD sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) dapat dirubah minimal 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (2) Perubahan dokumen RPJMD sebagaimana dimaksud ayat (1), didasarkan pada :
 - a. Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan, bahwa proses perumusan dokumen RPJMD tidak sesuai dengan tahapan dan tatacara penyusunan rencana pembangunan daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
 - b. Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan, bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai sebagaimana substansi yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan
 - c. Terjadi perubahan yang mendasar, seperti antara lain : terjadinya bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, dan perubahan kebijakan nasional.
 - d. Merugikan kepentingan nasional, yaitu apabila perumusan kebijakan dalam dokumen RPJMD bertentangan dengan kebijakan nasional.
- (3) Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (4) Dalam hal terjadi perubahan yang tidak mendasar yang bersifat parsial dan/atau perubahan capaian sasaran, tetapi tidak mengubah target pencapaian sasaran akhir periode RPJMD, maka perubahan RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (5) Tahapan dan tatacara pengendalian dan evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 7

- (1) Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan untuk menghindari kekosongan pelaksanaan rencana pembangunan daerah, Bupati yang sedang menjabat pada tahun terakhir pemerintahannya, diwajibkan menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah untuk tahun pertama periode pemerintahan Bupati berikutnya.
- (2) Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman untuk menyusun KUA, PPAS dan RAPBD tahun pertama periode pemerintahan Bupati berikutnya.

**BAB III
PENGENDALIAN DAN EVALUASI**

Pasal 8

- (1) Bupati melaksanakan pengendalian perumusan kebijakan dan pengendalian pelaksanaan, serta melakukan evaluasi hasil pelaksanaan RPJMD.
- (2) Pengendalian dan evaluasi dokumen RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas, dilakukan oleh Kepala Bappeda.
- (3) Kepala Perangkat Daerah sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsinya melakukan pengendalian perumusan kebijakan dan pengendalian pelaksanaan, serta evaluasi hasil pelaksanaan Renstra PD dan Renja PD.
- (4) Hasil pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatas, dilaporkan kepada Kepala Daerah melalui Kepala Bappeda.

**BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 9


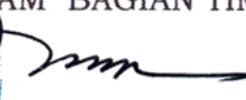
Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang pernah diterbitkan sebelumnya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

**BAB V
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur.

Ditetapkan di Bula
pada tanggal 26 Juli 2017


BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR,

ABDUL MUKTI KELIOBAS

Diundangkan di Bula
pada tanggal 26 Juli 2017


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR,

SYARIF MAKMUR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR
TAHUN 2017 NOMOR 176

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR
NOMOR 2 TAHUN 2017

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR TAHUN 2016 – 2021

I. Penjelasan Umum :

Dalam Pasal 258 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah diamanatkan, bahwa pembangunan daerah merupakan perwujudan dari pelaksanaan urusan pemerintahan yang telah diserahkan ke daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional. Berkaitan dengan hal tersebut, maka daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Penyusunan, pengendalian Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dimaksud, dikoordinasikan, diintegrasikan dan diharmonisasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 260 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

Terkait dengan hal tersebut diatas, maka dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2016 – 2021 yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur paling lama 6 (enam) bulan setelah Kepala Daerah terpilih dilantik.

Selanjutnya dokumen RPJMD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah dijabarkan kedalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahunan untuk selama 5 (lima) tahun kedepan dan dijabarkan pula kedalam dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) untuk masa 5 (lima) tahun kedepan. Dokumen Renstra PD selanjutnya dijabarkan kedalam dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 263 ayat (4) dan Pasal 273 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Untuk optimalisasi pencapaian target kinerja pelaksanaan RPJMD, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsi sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 260, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, berkewajiban melakukan pembinaan, fasilitasi pemantuan dan supervisi kepada seluruh perangkat daerah dalam melakukan penyusunan dokumen rencana pembangunan perangkat daerah dan melaporkan hasilnya kepada Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah.

Dalam implementasi selanjutnya, dokumen RPJMD Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2016 - 2021 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah menjadi landasan bagi seluruh pemangku kepentingan, antara lain : seluruh perangkat daerah, masyarakat, para tokoh

agama, tokoh masyarakat, para pakar dan akademis, serta kalangan dunia dalam permumusan kebijakan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian, serta pemantauan dalam upaya terwujudnya pelaksanaan pembangunan yang transparan, adil, demokratis, efektif, efisien dan akuntabel, melalui beberapa langkah antara lain yaitu ::

- a. Menjadi pedoman bagi seluruh pelaku pembangunan baik Pemerintah daerah, masyarakat dan *stakeholder* dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, serta penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah dan dokumen rencana perangkat daerah dalam upaya pencapaian target Visi, Misi dan program kerja pemerintahan daerah;
- b. Mendorong tercapainya konsistensi, sinkronisasi dan sinergi, serta keselarasan baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintahan daerah, maupun antara pusat, provinsi dan pemerintah kabupaten;
- c. Mendorong tercapainya keserasian, konsistensi dan keselarasan antara perencanaan, penganggaran, pembinaan dan pengawasan;
- d. Mendorong terlaksananya pengendalian pemanfaatan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan; dan
- e. Mendorong terwujudnya peran serta dan partisipasi masyarakat secara optimal dalam pengendalian, pengawasan pelaksanaan pembangunan.

Dokumen RPJMD yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN. Perumusan Visi dan Misi dimaksudkan dalam upaya memberdayakan secara efektif, efisien dan sinergis semua modal dasar yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur untuk mengelola dan menyelesaikan permasalahan pembangunan jangka menengah.

Visi Pemerintahan Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2016-2021 yang dituangkan kedalam dokumen RPJMD Tahun 2016-2021 adalah **"Terwujudnya Seram Bagian Timur Yang Sejahtera, Mandiri Dan Berdaya Saing Berbasis Sumberdaya Lokal"**. Untuk tercapainya secara maksimal target yang telah dicanangkan kedalam Visi, maka perlu dirumuskan kedalam Misi, yaitu :

1. Mengembangkan Aktivitas Ekonomi Lokal Berbasis Komoditi Unggulan dan Kelembagaan Lokal di Daerah Perdesaan;
2. Menjalankan Reformasi Birokrasi Dalam Tata Kelola Birokrasi, Serta Reformasi Agraria Dalam Tata Ruang Wilayah;
3. Mengembangkan Jejaring Kerjasama Multi Level Stakeholder Untuk Pengembangan Perekonomian Daerah yang Kuat dan Kompetitif;
4. Mendorong Penguatan Demokrasi dan Partisipasi Publik Dalam Sistem Tata Kelola Pemerintahan yang Terbuka, Akuntabel dan Bertanggungjawab;
5. Mendorong Pengembangan Sektor Unggulan Kelautan dan Perikanan;
6. Mengembangkan Aksesibilitas Infrastruktur Serta Akses Luas Terhadap Iptek, Permodalan, Keuangan dan Pasar; dan
7. Memperkuat Kapasitas SDM dan Kelembagaan Lokal Dalam Integrasi Pasar Bebas dan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA).

Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2016 - 2021 terdiri dari 5 (lima) Bab dan 10 (sepuluh) Pasal yang menguraikan tentang (1) ketentuan Umum; (2) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; (3) Pengendalian dan Evaluasi; (4) Ketentuan Peralihan; dan (5) Ketentuan Penutup.

Untuk menjamin agar dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) ini ada kesinambungan dengan dokumen RPJMD berikutnya, maka selama belum ada kebijakan baru dari pemerintah pusat, peraturan daerah ini masih dapat dijadikan pedoman untuk perumusan kebijakan penyusunan Dokumen RPJMD periode Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih berikutnya. Hal ini dalam upaya untuk menjamin agar Visi dan Misi yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2005–2025 dengan target utama untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Seram Bagian Timur dapat dicapai secara maksimal.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1 : Cukup jelas.

Pasal 2 : Cukup jelas.

Pasal 3 : Cukup jelas.

Pasal 4 : Cukup jelas.

Pasal 5 : Cukup jelas.

Pasal 6 : Cukup jelas.

Pasal 7 : Cukup jelas.

Pasal 8 : Cukup jelas.

Pasal 9 : Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR
TAHUN 2017 NOMOR 138



RANCANGAN AKHIR

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENEGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR TAHUN 2016 – 2021



**PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR
TAHUN 2016**



PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR

BABI PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan daerah pada hakekatnya merupakan upaya sistematis dan terencana oleh masing-masing stakeholder daerah untuk mengubah keadaan menjadi lebih baik dengan memanfaatkan berbagai potensi sumberdaya yang tersedia secara berkeadilan, transparan, efisien, efektif dan akuntabel, dengan fokus utama dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, untuk mewujudkan pencapaian tujuan tersebut maka diperlukan suatu instrument perencanaan yang berisi upaya sistematis yang dilengkapi dengan langkah-langkah strategis, taktis dan praktis serta perumusan langkah-langkah dan tatacara, sertaprioritas yang perlu mendapatkan perhatian berdasarkan pada kebutuhan dan ketersediaan sumberdaya yang dimiliki dan tantangan yang sedang dihadapi, baik dalam lingkup internal maupun eksternal.

Berkaitan dengan tujuan pembangunan sebagaimana telah diuraikan diatas, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional telah mengamanatkan Pemerintah Daerah untuk menyusun rencana pembangunan yang sistematis, terarah, terpadu dan berkelanjutan dengan mempertimbangkan keunggulan komparatif wilayah dan kemampuan sumberdaya keuangan daerah.

Sejalan dengan amanat tersebut diatas, dalam pasal 258 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah pula ditentukan, bahwa Daerah melaksanakan pembangunan untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah. Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud merupakan perwujudan dari pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang telah diserahkan ke Daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional.

Selanjutnya dalam pasal 260 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 juga telah diamanatkan, bahwa Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan



PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR

pembangunan nasional. Dokumen rencana pembangunan daerah sebagaimana dimaksud terdiri dari (i) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), yaitu rencana pembangunan 20 (dua puluh) tahun daerah; (ii) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), yaitu rencana pembangunan 5 (lima) tahunan; dan (iii) rencana pembangunan tahunan daerah (RKPD), yaitu rencana pembangunan tahunan. Selain itu, juga ada dokumen rencana strategis perangkat daerah (Renstra PD), yaitu rencana pembangunan 5 (lima) tahunan Perangkat Daerah dan rencana kerja Perangkat Daerah (RenjaPD), yaitu rencana pembangunan tahunan perangkat daerah.

Terkait dengan penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dalam Pasal 263 ayat (3) Pasal Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 telah ditetapkan antara lain, bahwa Bupati dan Wakil Bupati terpilih menyusun Dokumen RPJMD yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN, serta memperhatikan kondisi lingkungan strategis di daerah dan hasil evaluasi pelaksanaan RPJMD 5 (lima) tahun yang lalu.

Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur pada tanggal 9 Desember 2015 telah melaksanakan Pemilukada serentak sebagaimana telah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015. Dalam Pemilukada tersebut telah terpilih secara jujur, transparan, adil dan demokratis Bapak **Abdul Mukti Keliobas** sebagai Bupati Seram Bagian Timur dan Bapak **Fachri Husni Alkatiri** sebagai Wakil Bupati Seram Bagian Timur untuk periode masa jabatan Tahun 2016-2021 yang telah dilantik pada tanggal 17 Februari 2016 oleh Gubernur Maluku sebagai wakil pemerintah pusat, di Ambon.

Periodisasi Dokumen RPJMD Kabupaten Seram Bagian Timur adalah Tahun 2016 - 2021 dan dapat dilakukan perubahan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun. evaluasi dilakukan dengan mempertimbangkan (i) hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusantidak sesuai dengan tahapan dan tatacara



PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR

penyusunan rencana pembangunan daerah yang diatur dalam regulasi; (ii) hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan regulasi; (iii) terjadi perubahan yang mendasar, antara lain terjadinya bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional; dan (iv) merugikan kepentingan nasional, yaitu bertentangan dengan kebijakan nasional.

Selanjutnya Rancangan Akhir RPJMD Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2016 - 2021 ditetapkan dengan Peraturan Daerah paling lama 6 (enam) bulan setelah Bupati dan Wakil Bupati Seram Bagian Timur dilantik. Dokumen RPJMD yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah dijabarkan kedalam dokumen Rencana Strategis 5 (lima) tahunan Perangkat Daerah (Renstra PD), dokumen Rencana Pembangunan Tahunan Daerah (RKPD) untuk 5 (lima) tahun kedepan dan Rencana Kerja Tahunan Perangkat Daerah (Renja PD) untuk 5 (lima) tahun kedepan.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan.

Beberapa regulasi terkait yang dijadikan sebagai pedoman untuk penyusunan Rancangan akhir dokumen RPJMD Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2016-2021, meliputi :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat, dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 155 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4350);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);



PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara



PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR

Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara /Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan



PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR

- Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
 26. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
 27. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);
 28. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019;
 29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Dalam Penyusunan Atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah; dan
 32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyusunan Produk Hukum Daerah;
 33. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 21 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Maluku Tahun 2014 – 2019;



PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR

- 34. Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2005 – 2025;
- 35. Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 09 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2012 – 2032;

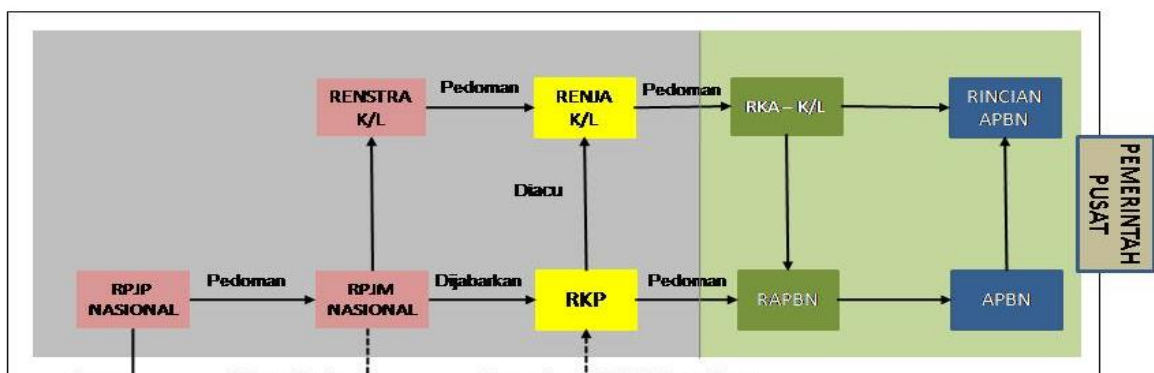
1.3. Keterkaitan RPJMD Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya.

1.3.1. Hirarki Perencanaan Pembangunan Daerah

Tahapan dan tatacara penyusunan rencana pembangunan daerah sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, telah dijadikan sebagai pedoman Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur dalam menyusun dokumen RPJMD Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2016 - 2021. Dalam merumuskan kebijakan juga telah mengacu pada dokumen RPJM Nasional Tahun 2015-2019, RPJMD Provinsi Maluku Tahun 2014 - 2019, dokumen RTRW Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2012 - 2032, serta memperhatikan dokumen RPJMD dan RTRW Kabupaten/Kota terdekat. Oleh karena itu, RPJMD merupakan bagian yang terintegrasi dengan rencana pembangunan nasional, rencana pembangunan Provinsi Maluku dan rencana pembangunan Kabupaten/Kota terdekat lainnya. Dengan demikian, dokumen RPJMD Kabupaten Seram Bagian Timur telah sinkron, selaras dan bersinergi antar daerah, antar waktu, antar ruang dan antar fungsi pemerintah, serta menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi pembangunan daerah.

Untuk memberikan gambaran keterkaitan antara Perencanaan dengan Penganggaran dan dokumen RPJMD Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2016 - 2021 dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya, dibawah ini disajikan gambar tentang bagan alur yang memperlihatkan keterkaitan dimaksud.

Gambar 1.1
Bagan Alir Keterbuhungan antara RPJMD Dengan Penganggaran
Dan Dokumen Perencanaan Pembangunan Lainnya.





PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR

Penyusunan dokumen RPJMD yang telah memuat visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih untuk periode 2016-2021 yang dalam penyusunannya berpedoman pada RPJPD Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2005-2025, tahap berikutnya melakukan penyelarasan dan mensinkronkan dengan tujuan dan sasaran RPJMD dengan arah kebijakan dan sasaran pokok yang telah ditetapkan dalam dokumen RPJPD untuk periode 5 (lima) tahunan ketiga (2015-2019) dan periode 5 (lima) tahunan keempat (2020-2025). Selanjutnya dokumen RPJMD Kabupaten Seram Bagian Timur dijadikan sebagai landasan dalam perumusan rencana pembangunan 5 (lima) tahunan seluruh Perangkat Daerah (Renstra PD), perumusan kebijakan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan perumusan kebijakan rencana perangkat daerah tahunan oleh seluruh Perangkat Daerah (Renja PD) sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsinya masing-masing.

1.3.2. Keterkaitan RPJMD Dengan Penganggaran.

Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dengan tegas telah menetapkan, bahwa Tahun Anggaran meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Sementara itu, program prioritas daerah dan alokasi pagu anggaran yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2016 - 2021, merupakan program dan anggaran yang masih



PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR

bersifat indikatif dan untuk dapat dioperasional setiap tahunnya, maka perlu dijabarkan kedalam RKPD sebagai rencana pembangunan tahunan daerah. Setelah dokumen RKPD dimaksud ditetapkan dengan Keputusan Bupati, selanjutnya dijadikan sebagai pedoman bagi penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA), perumusan PPAS dan terakhir perumusan kebijakan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Seram Bagian Timur tahunan untuk selama 5 (lima) tahun. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 17 dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

1.3.3. Keterkaitan RPJMD Dengan Evaluasi Hasil RPJMD Sebelumnya dan Dokumen KLHS.

Untuk menjamin adanya kesinambungan dalam perumusan kebijakan Dokumen RPJMD Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2016-2021 yang merupakan penjabaran dari RPJPD Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2005-2025 dan memuat visi, misi dan program kerja Bupati dan Wakil Bupati terpilih, mengacu pada RPJMD Provinsi Maluku, mengacu pada RPJMN Tahun 2015 - 2019, maka perumusan berbagai kebijakan yang tertuang dalam Rancangan dokumen RPJMD ini, telah mengacu pada hasil evaluasi pelaksanaan RPJMD Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2010 -2015. Selanjutnya agar dalam mengimplementasikan RPJMD dapat sejalan dengan kebijakan pemanfaatan sumber daya alam sesuai dengan kapasitas daya dukungnya, maka disinergikan dengan data dan informasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang disusun oleh Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan lingkungan hidup daerah.

Dengan demikian, setiap perumusan kebijakan yang terkait dengan pemanfaatan sumber daya alam untuk kegiatan pembangunan, harus sudah bersinergi dengan data dan informasi tentang daya dukung sumber daya alam yang telah tersedia. Hal ini penting dalam rangka menjaga kelestarian ekosistem lingkungan hidup dan sumber daya alam dari kepunahan. Oleh karena itu, dalam perumusan kebijakan pembangunan daerah baik untuk 5 (lima) tahunan maupun tahunan sudah saatnya dipertimbangkan melalui pendekatan prinsip pembangunan berkelanjutan (*development sustainable*).

1.3.4. Keterkaitan Dengan Pendekatan Perencanaan Pembangunan.



PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR

Penyusunan Dokumen RPJMD Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2016-2021 dilakukan melalui pendekatan :

1. Pendekatan Politik.

Pemilihan Langsung Bupati/Wakil Bupati Seram Bagian Timur menghasilkan rencana pembangunan hasil proses politik (*public choice theory of planning*) khususnya penjabaran Visi dan Misi dalam RPJMD.

2. Pendekatan Teknokratik.

Perencanaan dilakukan oleh perencana professional atau oleh pakar dari kalangan akademisi, serta praktisi yang telah berpengalaman atau oleh Lembaga/Unit Organisasi yang secara fungsional melakukan perencanaan khususnya dalam pemantapan peran, fungsi dan kompetensi lembaga perencana.

3. Pendekatan Partisipatif.

Perencanaan yang melibatkan partisipasi seluruh lapisan masyarakat (*stakeholders*). Partisipasi masyarakat dimaksud antara lain dapat melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) mulai tingkat desa, kabupaten, provinsi dan nasional.

4. Pendekatan *Bottom Up* dan *Top Down*.

Perencanaan yang aliran prosesnya dimulai dari bawah keatas dan dari atas kebawah atau dalam hirarki pemerintahan.

1.4. Sistematika Penulisan.

Sesuai dengan amanat dalam Pasal 40 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomo 8 Tahun 2008 dan ketentuan pada Pasal 64 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, sistematika penulisan Rancangan RPJMD Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2016 – 2021 terdiri dari :

Bab I. Pendahuluan.

Bab ini menguraikan tentang latar belakang, dasar hukum, keterkaitan RPJMD dengan dokumen perencanaan lainnya. Oleh karena itu, sistematika penulisan Bab I RPJMD meliputi :

- 1.1. Latar Belakang;
- 1.2. Dasar Hukum Penulisan;
- 1.3. Keterkaitan RPJMD dengan dokumen perencanaan lainnya;



PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR

- 1.4. Sistematika Penulisan;
- 1.5. Maksud dan Tujuan.

Bab II. Gambaran Umum Kondisi Daerah.

Bab ini menguraikan gambaran kondisi daerah dari aspek Geografi, Demografi, Kesejahteraan Masyarakat, Aspek Pelayanan Umum dan Aspek Daya Saing Daerah. Oleh karena itu, sistematika penulisan pada Bab II , meliputi:

- 2.1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah (Luas dan Batas Wilayah Administrasi; Letak dan Kondisi Geografis; Topografi; Geologi; Hidrologi; Klimatologi; dan Penggunaan Lahan); Potensi Pengembangan Wilayah; Wilayah Rawan Bencana; dan Kondisi Demografi.
- 2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat.
 - 2.2.1. Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi;
 - 2.2.2. Kesejahteraan Masyarakat; dan
 - 2.2.3. Seni Budaya dan Olahraga.
- 2.3. Aspek Pelayanan Umum.
 - 2.3.1. Bidang Urusan Wajib Terkait dengan Layanan Dasar;
 - 2.3.2. bidang Urusan Wajib Tidak Terkait dengan Layanan Dasar; dan
 - 2.3.3. Bidang Urusan Pilihan.
- 2.4. Aspek Daya Saing Daerah.
 - 2.4.1. Kemampuan Ekonomi Makro;
 - 2.4.2. Kemampuan Keuangan Daerah;
 - 2.4.3. Iklim Investasi;
 - 2.4.4. Fasilitas Wilayah/Infrastruktur; dan
 - 2.4.5. Kondisi Sumber Daya Manusia.

Bab III. Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan.

Bab ini menguraikan hubungan kinerja keuangan masa lalu, kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu dan kerangka pendanaan untuk 5 (lima) tahun kedepan, meliputi :

- 3.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu
 - 1.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBD; dan
 - 1.1.2. Neraca Daerah.
- 3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu.



PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR

- 3.2.1. Proporsi Penggunaan Anggaran;
- 3.2.2. Analisis Pembiayaan;
- 3.3. Kerangka Pendanaan
 - 3.3.1. Belanja Untuk Pemenuhan Kebutuhan Aparatur;
 - 3.3.2. Analisis Pengeluaran Periodik, Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama;
 - 3.3.3. Proyeksi Data Masa Lalu;
 - 3.3.4. Penghitungan Kerangka Pendanaan; dan
 - 3.3.5. Penghitungan kapasitas riil keuangan daerah.

Bab IV. Analisis Isu-Isu Strategis

Bab ini menguraikan hubungan antara permasalahan pembangunan dengan isu-isu strategis, meliputi :

- 4.1. Permasalahan Pembangunan; dan
- 4.2. Isu-isu Strategis.

Bab V. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran.

Bab ini menguraikan hubungan antara Visi dengan Misi, Tujuan dan Sasaran, meliputi :

- 5.1. Visi;
- 5.2. Misi;
- 5.3. Tujuan dan Sasaran.

Bab VI. Strategi dan Arah Kebijakan

Bab ini menguraikan hubungan antara Strategi dengan Arah Kebijakan, meliputi :

- 6.1. Strategi; dan
- 6.2. Arah Kebijakan.

Bab VII. Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah.

Bab ini menguraikan rumusan kebijakan umum dan program pembangunan daerah yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun yang bersifat indikatif.

Bab VIII. Indikasi Rencana Program Prioritas yang Disertai Kerangka Pendanaan



PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR

Bab ini menguraikan tentang indikasi rencana program prioritas yang disertai dengan kerangka pendanaan untuk selama 5 (lima) tahun kedepan.

Bab IX. Penetapan Indikator Kinerja Daerah.

Bab ini menguraikan tentang penetapan indikator kinerja pemerintah daerah untuk selama 5 (lima) tahun kedepan.

Bab X. Pedoman Transisi dan Kaidah Pelaksanaan.

1.5. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan dokumen RPJMD Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2016 - 2021 adalah untuk menjadi pedoman bagi seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur, masyarakat, dunia usaha, dan para pemangku kepentingan lainnya dalam melaksanakan pembangunan daerah untuk mewujudkan visi, misi dan program pembangunan Bupati dan Wakil Bupati Seram Bagian Timur dalam rangka mendorong terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Seram Bagian Timur khususnya, serta masyarakat di kabupaten/kota terdekat lainnya.

Sedangkan tujuan disusunnya dokumen RPJMD Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2016 - 2021, antara lain :

1. Merumuskan gambaran umum kondisi daerah sebagai dasar untuk perumusan permasalahan dan isu strategis daerah, serta sebagai dasar penentuan prioritas program pembangunan daerah 5 (lima) tahun kedepan;
2. Merumuskan gambaran pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan yang bersifat indikatif, untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar proyeksi kemampuan riil kapasitas pendanaan tahunan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan;
3. Menerjemahkan visi dan misi kepala daerah ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah tahun 2016 - 2021, yang disertai dengan program prioritas untuk masing-masing Perangkat Daerah dari tahun 2016 - 2021, dengan berpedoman pada RPJPD Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2005 - 2025;
4. Menetapkan berbagai program prioritas yang disertai dengan indikasi pagu anggaran dan target indikator kinerja yang akan dilaksanakan pada tahun 2016 - 2021;



PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR

5. Menetapkan indikator kinerja perangkat daerah dan indikator kinerja kepala daerah, sebagai dasar penilaian keberhasilan penyelenggaraan pemerintah daerah periode tahun 2016 - 2021;
6. Mendukung koordinasi untuk menjamin terwujudnya integrasi, sinkronisasi dan sinergitas pembangunan antar daerah, antar waktu, antar fungsi pemerintahan daerah maupun antara Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timurdengan Pemerintah Pusat dan antara Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timurdengan Pemerintah Provinsi Maluku, serta menyediakan pedoman bagi seluruh perangkat daerah dalam penyusunan Renstra PD, Renja PD sesuai kewenangan, tugas dan fungsinya masing-masing, sekaligus merupakan landasan dalam menentukan program-program unggulan yang terkait langsung dengan pencapaian visi dan misi pembangunan daerah;
7. Menjadi landasan untuk mengintegrasikan dan mensinergikan perencanaan dengan penganggaran serta sinergi antara pengendalian, pelaksanaan, dan evaluasi hasil rencana pembangunan di Kabupaten Seram Bagian Timur;
8. Memudahkan seluruh jajaran aparatur pemerintah daerah dan DPRD untuk memahami dalam menentukan program-program pembangunan yang ditindak lanjuti dengan kegiatan yang nantinya diukur dengan indikator; dan
9. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Dengan demikian, maka kandungan nilai strategis dari dokumen RPJMD Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2016 -2021 antara lain sebagai pedoman dalam penyusunan dokumen Renstra PD, RKPD, dan Renja PD dalam upaya mewujudkan pencapaian target visi dan misi kepala daerah terpilih periode masa jabatan tahun 2016-2021 untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Seram Bagian Timur.



PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Dalam peta Indonesia, Kabupaten Seram Bagian Timur secara administrasi wilayah berada di Provinsi Maluku. Kabupaten yang memiliki motto "Mufakat Untuk SBT Lebe Bae" ini memiliki kekayaan alam yang melimpah sebagai potensi sumber daya sekaligus modal dasar pelaksanaan pembangunan daerah. Kabupaten yang beribukota sementara di Bula ini memiliki suatu tatanan masyarakat yang cukup berbudaya dimana kerukunan hidup masyarakat berjalan beriringan dengan dinamika, kekayaan budaya sekaligus kemandirian budaya yang berkembang termasuk juga kemajuan sosial ekonomi daerah.

Berbagai program pembangunan daerah yang telah dilaksanakan selama ini telah menghantarkan Kabupaten Seram Bagian Timur berada pada posisi kesejahteraan rakyat yang lebih meningkat dibandingkan pada periode-periode yang telah lalu. Keberhasilan pelaksanaan pembangunan periode masa lalu akan tergambar dalam penjabaran bab ini melalui kajian dan analisis umum terkait data dan informasi sebagai "potret" fenomena pembangunan secara mikro maupun makro. Pembahasan gambaran umum kondisi Kabupaten Seram Bagian Timur akan dijabarkan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, yang terdiri dari Aspek Geografi dan Demografi, Aspek Kesejahteraan Rakyat, serta Aspek Pelayanan Umum dan Aspek Daya Saing Daerah, sebagai berikut

2.1. Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah

1. Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat, dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku telah ditetapkan, bahwa secara administrasi kewilayahan Kabupaten Seram Bagian Timur yang memiliki luas wilayah seluas 20.656,894 Km², terdiri dari luas wilayah perairan 14.877.771 km² dan luas wilayah daratan 5.779,123 Km², merupakan salah satu kabupaten yang secara administrasi wilayah menjadi bagian dari Provinsi



PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR

Maluku dari hasil pemekaran Kabupaten Maluku Tengah. Kabupaten Seram Bagian Timur terdiri dari 15 kecamatan yang tersebar pada 50 (lima puluh) buah pulau besar dan pulau kecil.

Sebaran luas wilayah kecamatan se Kabupaten Seram Bagian Timur, dapat dilihat sebagaimana data yang tersaji pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.1.
Luas Wilayah Daratan Kabupaten Seram Bagian Timur
Berdasarkan Kecamatan Tahun 2013

No	Nama Kecamatan	Luas Wilayah (Km ²)	Prosentase (%)
1.	Pulau Gorom	91,303	1,58
2.	Wakate	37,58	0,65
3.	Teor	23,41	0,41
4.	Gorom Timur	29,29	0,51
5.	Pulau Panjang	20,53	0,36
6.	Seram Timur	73,35	1,27
7.	Tutuk Tolu	330,09	5,71
8.	Kilmury	837,62	14,49
9.	Kian Darat	129,23	2,24
10.	Lian Vitu	172,37	2,98
11.	Werinama	993,84	17,20
12.	Siwalalat	847,19	14,66
13.	Bula	643,36	11,13
14.	Bula Barat	880,29	15,23
15.	Teluk Weru	669,67	11,59
	Jumlah	5.799,123	100,00

Sumber data : Profil Kabupaten Seram Bagian Timur, Tahun 2014.

Sedangkan untuk menjelaskan posisi letak geografis dari Kabupaten Seram Bagian Timur, dapat dilihat sebagaimana peta pada gambar dibawah ini.



Gambar 2.1.
Peta Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2014



PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR

2. Letak dan Kondisi Geografis.

a. Posisi Astronomis.

Secara astronomis Kabupaten Seram Bagian Timur terletak antara $129^{\circ} 50'00''$ - $131^{\circ} 50'00''$ Bujur Timur dan $02^{\circ} 50'00''$ - $04^{\circ} 50'00''$ lintang selatan.

b. Posisi geografis.

Secara geografis, luas wilayah Kabupaten Seram Bagian Timur sekitar $20.656,894 \text{ km}^2$ yang terdiri dari wilayah laut seluas $14.877,771 \text{ km}^2$ dan wilayah daratan seluas $5.779,123 \text{ km}^2$. Sebagian besar luas wilayah Kabupaten Seram Bagian Timur berupa (i) deretan pulau yang berjumlah 40 buah pulau; (ii) sungai/kali sebanyak 79 buah yang terdapat pada 12 kecamatan.

c. Kondisi Topografi.

Ditinjau dari kondisi topografi wilayah Kabupaten Seram Bagian Timur berada pada ketinggian rata-rata antara 0-500 m s.d 500-1000 m diatas permukaan laut (mdpl) dengan kemiringan lahan antara 0 s/d 3 %, 8 s/d 15 %, 30 s/d 50 % dan > 50 %. Data dan informasi mengenai kondisi topografi dimaksud, dapat dilihat sebagaimana terdapat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.2
Data Topografi Kabupaten Seram Bagian Timur
Tahun 2014

No	Uraian	Luas
1	Kemiringan lahan	Rata-rata antara 0 s/d 3 %, 8 s/d 15 %, 30 s/d 50 % dan > 50 %
2	Ketinggian lahan	Rata-rata antara 0-500 m dan antara 500-1000 m diatas permukaan laut (mdpl)

Sumber data : Profil Kabupaten Seram Bagian Timur, Tahun 2014.

d. Kondisi Hidrologi

Kondisi hidrologi Kabupaten Seram Bagian Timur terdiri dari air laut, air tanah dan air permukaan tanah. Sumber air laut, air tanah dan air permukaan tanah selain berasal laut, dari dasar tanah dan permukaan tanah juga berasal dari danau, sungai dan kali, seperti Sungai Arewan, Kian, Kilaba, Aruan, Masiwang, Kadar, Bitorik, Bemo, Bobot, Kian Laut, Tunsai, Salas, Balifar dan Sungai Bulawa, serta Sungai Waimiran.



PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR

e. Kondisi Klimatologi.

Dari aspek klimatologi, iklim yang terdapat di Kabupaten Seram Bagian Timur adalah iklim laut tropis dan iklim musim. Hal ini disebabkan sebagian besar wilayah Kabupaten Seram Bagian Timur dikelilingi oleh laut yang luas, sehingga iklim yang terjadi sangat dipengaruhi perkembangan cuaca laut yang berlangsung seiring dengan musim yang ada.

Data perkembangan cuaca sepanjang tahun 2013 di Kabupaten Seram Bagian Timur adalah, temperatur rata-rata sekitar 27,7⁰ Celsius. Dimana temperatur tertinggi rata-rata pada kisaran 30,8⁰ Celsius dan temperatur terendah rata-rata pada kisaran 25,2⁰ Celsius. Sedangkan tekanan udara rata-rata setahun 1 009,8 Milibar dan kelembaban nisbi rata-rata 84,5%.

Sementara itu, kecepatan angin rata-rata 6,2 knot, sedangkan jumlah hari hujan yang terjadi sepanjang tahun 2013, adalah dalam bulan Maret sebanyak 12 hari hujan dan dalam bulan Juli sebanyak 24 hari hujan.

f. Penggunaan Lahan

Berdasarkan data dan informasi tahun 2012 dan tahun 2013, penggunaan lahan di Kabupaten Seram Bagian Timur diperuntukan untuk beberapa kegiatan, antara lain yaitu (i) untuk kegiatan usaha bidang pertekstilan sebanyak 3 perusahaan; (ii) untuk kegiatan usaha bidang makanan dan minuman sebanyak 45 perusahaan; (iii) untuk kegiatan usaha bidang pertambahan umum (seperti: batu kali, pasir pasang, pasir urug, kerikil dan batu karang) dengan produksi dalam tahun 2012 sebanyak 237.723,40m³ dan tahun 2013 sebanyak 282.469,85m³; (iv) untuk kegiatan pembangkit listrik dengan kapasitas produksi dalam tahun 10.243.081 KWH; (v) untuk kegiatan usaha bidang pertanian dalam arti luas, seperti : kepala, cengkeh, pala, kakao, kopi dan jambu mete; (vi) untuk kegiatan usaha bidang pariwisata; dan (vii) untuk perkantoran pemerintahan dan swasta, untuk perumahan/komplek pemda/fasilitas umum/fasilitas sosial lainnya dan untuk sarana dan prasarana pertahanan/keamanan.

3. Potensi Pengembangan Wilayah.

Sebagai salah satu kabupaten di Provinsi Maluku yang sebagian besar wilayahnya perairan, maka memiliki 2 aspek yang satu dengan yang lain saling



PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR

memiliki peluang, tantangan dan ancaman. Pada satu sisi pembangunan yang dilakukan di Kabupaten Seram Bagian Timur banyak terkendala oleh kondisi geografi, demografi dan kondisi keterbatasan infrastruktur, terutama infrastruktur laut. Pada sisi lain, memiliki potensi unggulan yang dapat dijadikan sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah jika dikelola secara profesional, seperti potensi wisata laut dan potensi wilayah daratan dengan pemandangan yang indah. Oleh karena itu, dalam mendorong terwujudnya percepatan pembangunan di Kabupaten Seram Bagian Timur, maka pendekatan terkait dengan pengembangan wilayah untuk kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan, dapat dipertimbangkan dengan mendorong berbagai kawasan untuk dikembangkan sebagai pusat-pusat pertumbuhan. Pengembangan kawasan-kawasan dimaksud, antara lain terdiri dari :

- a. Kawasan untuk pengembangan pertanian;
- b. Kawasan untuk pengembangan perikanan;
- c. Kawasan untuk pengembangan peternakan
- d. Kawasan untuk pengembangan perkebunan;
- e. Kawasan untuk pengembangan industri;
- f. Kawasan untuk pengembangan pariwisata;
- g. Kawasan untuk permukiman;
- h. Kawasan untuk pengembangan aktivitas lainnya.

Penanganan pengelolaan kawasan potensial tersebut dilakukan, dengan titik fokus pada pengembangan komoditi unggulan yang selama ini berkontribusi pada penerimaan pendapatan Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur, karena memiliki nilai ekonomis yang diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yaitu :

1) Kawasan Pertanian.

Pengembangan pertanian diarahkan dalam rangka mendorong terwujudnya kedaulatan pangan khususnya, umumnya mewujudkan kedaulatan pangan di Provinsi Maluku. Dalam 5 (lima) tahun kedepan lahan yang disiapkan untuk penanaman padi dan palawija agar diupayakan tersedia lahan persawahan yang relatif luas sesuai kebutuhan.



PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR

2) Kawasan Perikanan.

Pengembangan bidang perikanan terfokus pada pengembangan ikan laut. Namun demikian potensi perikanan air tawar juga dipertimbangkan tetap dapat dikembangkan. Berdasarkan analisis data 5 (lima) tahun yang lalu, maka untuk mendorong terwujudnya potensi perikanan laut yang melimpah, maka perlu untuk dipertimbangkan berbagai langkah kebijakan, antara lain sarana/prasarana dan infrastruktur kelautan yang memadai, pengembangan dan penguatan kelembagaan nelayan, dan mendekatkan serta memudahkan akses pada permodalan, informasi dan pasar.

3) Kawasan Peternakan.

Pengembangan peternakan merupakan salah satu bidang yang mempunyai peluang untuk terus dikembangkan dalam 5 (lima) tahun kedepan. Tujuan dari pengembangan bidang peternakan adalah agar peningkatan tambahan pendapatan masyarakat, terutama para petani mengingat jenis ternak yang ditenak dan dikembang biakan dari jenis ternak yang terbiasa dipelihara seperti ternak sapi, kerbau, kambing, ayam dan bebek.

4) Kawasan Perkebunan.

Memperhatikan data dan informasi perkembangan bidang urusan perkebunan periode 5 (lima) tahun yang lalu, maka pengelolaan bidang urusan perkebunan untuk 5 (lima) tahun kedepan akan menjadi salah satu fokus yang akan didorong untuk terus dikembangkan. Terkait dengan hal tersebut, maka Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur akan terus mendorong mewujudkan bidang ini yang diharapkan bisa menjadi salah satu sumber peningkatan pendapatan masyarakat. Oleh karena itu, lahan yang disiapkan untuk kegiatan dimaksud relatif cukup luas. Dengan langkah ini, diharapkan masyarakat terpacu untuk mengembangkan bidang urusan perkebunan sebagai usaha dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya.

5) Kawasan Perindustrian.

Bidang industri, merupakan salah satu bidang yang terus berkembang dari waktu ke waktu. Data dan informasi dalam 5 (lima) tahun yang lalu menunjukkan, bahwa kontribusi berbagai bidang perindustrian terhadap kesejahteraan masyarakat relatif cukup signifikan. Oleh karena itu, untuk



PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR

pengembangan industri kedepan, Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah, supaya mempertimbangkan kiranya dapat menyiapkan lahan yang sesuai dengan kebutuhan.

6) Kawasan Pengembangan Pariwisata.

Dari data yang ada diketahui, bahwa pengelolaan potensi pariwisata dalam 5 (lima) tahun yang lalu belum mendapatkan dukungan sarana dan prasarana yang memadai sesuai kebutuhan, padahal potensi dan jenis wisata yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur yang dapat dikembangkan untuk menarik kunjungan wisatawan nusantara (wisnus), maupun wisatawan manca negara (wisman) sangat potensial. Oleh karena itu, dalam rangka mendorong potensi pariwisata sebagai salah satu unggulan yang diharapkan akan berkontribusi secara signifikan terhadap pendapatan asli daerah, maka pengembangan dan pengelolaan pariwisata dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan perlu didukung dengan berbagai regulasi dan penganggaran yang memadai.

7) Kawasan Permukiman.

Berdasarkan hasil registrasi data yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Seram Bagian Timur menunjukkan, bahwa sampai dengan akhir tahun 2013 jumlah penduduk Kabupaten Seram Bagian Timur berjumlah 104.902 jiwa yang tersebar di 15 (lima belas) kecamatan. Pertumbuhan penduduk yang relatif cepat dibandingkan pertumbuhan penduduk dalam tahun 2012 membawa konsekuensi logis, yaitu pertumbuhan penduduk dapat dimaknai sebagai bonus demografi, yang jika dikelola secara baik akan menjadi pendorong percepatan pembangunan. Namun dalam dimensi lain pertumbuhan penduduk akan menimbulkan problem yang terkait dengan ruang lingkup sosial, ekonomi dan politik pada satu sisi. Pada sisi lain pertumbuhan penduduk juga secara paralel memerlukan tersedianya lahan yang memadai untuk berbagai aktivitas, seperti perumahan, fasilitas sosial, fasilitas umum, pasar, rumah sakit dan terminal.



8) Kawasan untuk Pengembangan Aktivitas Lainnya.

Untuk memenuhi berbagai aktivitas diluar aktivitas sebagaimana telah diuraikan pada angka 1 sampai dengan 7 diatas, maka dalam pelaksanaan pembangunan dan kemasyarakatan untuk 5 (lima) tahun kedepan, supaya juga dipertimbangkan untuk menambah luasan lahan yang akan diperuntukan bagi permukiman penduduk dan berbagai aktivitas lainnya, antara lain (i) kawasan untuk perdagangan dan jasa; (ii) kawasan untuk rumah sakit, pendidikan dan ruang terbuka hijau; dan (iii) kawasan untuk fasilitas terminal, pelabuhan dan bandara.

4. Kawasan Rawan Bencana.

Dalam Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana telah ditetapkan ruang lingkup rawan bencana adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.

Dengan karakteristik wilayah Kabupaten Seram Bagian Timur sebagai wilayah perairan yang kelilingi oleh laut, maka ada beberapa kawasan yang kadangkala terjadi bencana walaupun dalam skala yang relatif kecil. Bencana alam dan jenis bencana alam yang kadang terjadi di wilayah Kabupaten Seram Bagian Timur, antara lain banjir, angin puting beliung, kebakaran dan gelombang pasang yang sangat berpengaruh pada aktivitas nelayan dan penangkatan ikan laut.

5. Demografi.

Berdasarkan hasil sensus pendudukan, sampai dengan akhir tahun 2013 penduduk Kabupaten Seram Bagian Timur berjumlah 104.902 jiwa, dengan rincian penduduk laki-laki berjumlah 53.371 jiwa dan penduduk perempuan berjumlah 51.531 jiwa, dengan pertumbuhan penduduk rata-rata 0,31%. Sedangkan kepadatan penduduk adalah 18,09% jiwa/km². Rincian jumlah penduduk per kecamatan per jenis kelamin, dapat dilihat pada data yang terdapat dalam tabel dibawah ini.



PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR

Tabel 2.3
Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Per Kecamatan
Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2013

No.	Kecamatan	Jenis Kelamin Penduduk (jiwa)		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Pulau Gorom	9.998	9.948	19.946
2	Wakate	3.598	3.580	7.178
3	Teor	1.351	1.393	2.744
4	Gorom Timur	3.573	3.431	7.004
5	Pulau Panjang	982	1.020	2.002
6	Seram Timur	5.374	5.393	10.767
7	Tutuk Tolu	2.409	2.377	4.786
8	Kilmury	2.269	2.166	4.435
9	Werinama	2.687	2.547	5.234
10	Siwalalat	2.511	2.391	4.902
11	Bula	8.274	7.272	15.546
12	Bula Barat	3.345	3.061	6.406
13	Kian Darat	2.495	2.454	4.949
14	Lian Vitu	2.483	2.481	4.964
15	Teluk Weru	2.022	2.017	4.039
	Jumlah	53.371	51.531	104.902

Sumber data : Profil Kab. Seram Bagian Timur, Tahun 2014.

Dengan mengamati data pada tabel diatas dapat diketahui, bahwa sebaran penduduk di Kabupaten Seram Bagian Timur tidak merata, dimana penduduk terbanyak berada di Kecamatan Bula dengan penduduk berjumlah 15.546 jiwa, Kecamatan Seram Timur dengan penduduk berjumlah 10.767 jiwa, Kecamatan Pulau Gorom dengan penduduk berjumlah 7.004 jiwa. Sedangkan beberapa kecamatan yang penduduknya relatif sedikit yaitu di Kecamatan Teluk Weru dengan penduduk berjumlah 4.039 jiwa dan Kecamatan Teor dengan penduduk berjumlah 2.744 jiwa.

Sementara itu dari aspek pertumbuhan penduduk, terjadi pertumbuhan penduduk yang cukup signifikan sepanjang kurun waktu dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2013, dimana jumlah penduduk pada akhir tahun 2010 masih berjumlah 99.065 jiwa (50.576 laki-laki dan 48.489 perempuan), namun sampai dengan akhir tahun 2013 telah tumbuh menjadi 104.902 jiwa (53.371 laki-laki dan 51.531 perempuan). Pertumbuhan penduduk yang relatif tinggi ini, kiranya dapat dijadikan masukan dalam merumuskan berbagai strategi, kebijakan dan program/kegiatan yang dapat dirasakan manfaatnya oleh seluruh masyarakat.

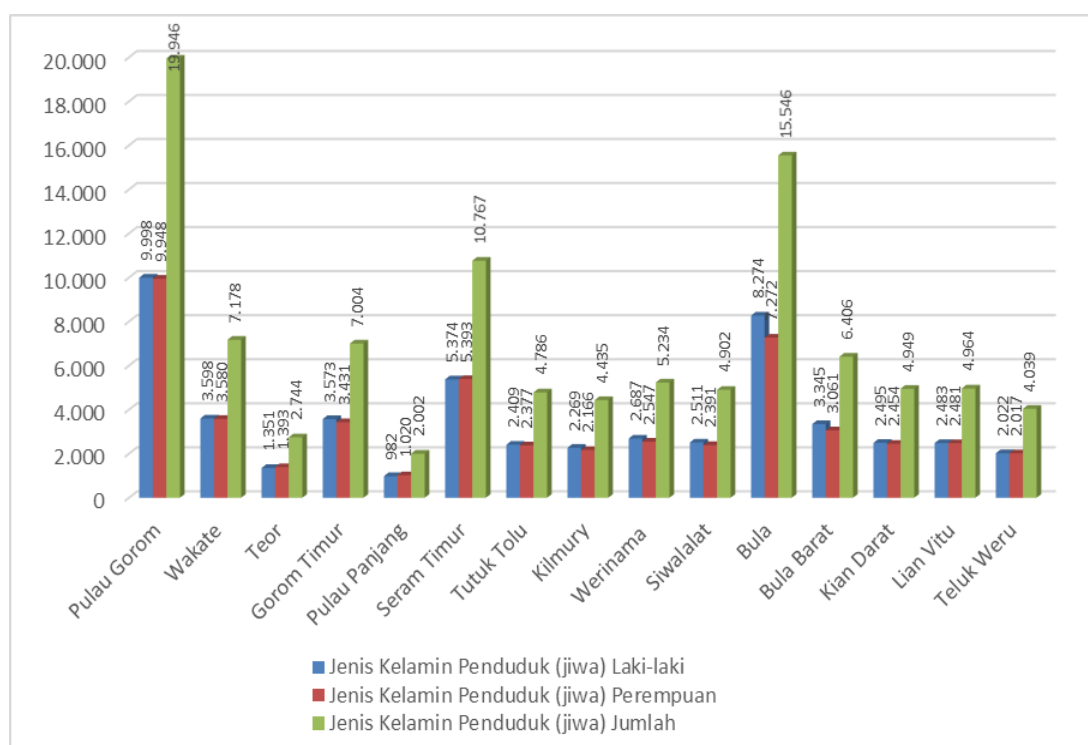


PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR

Optimalisasi pemanfaatan program/kegiatan oleh seluruh masyarakat dapat terjadi jika dokumen perencanaan pembangunan daerah berkualitas.

Gambaran tentang pertumbuhan penduduk dalam periode tahun 2013, dapat dilihat sebagaimana gambar dibawah ini.

Gambar 2.2
Pertumbuhan Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin
Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2013



Sementara itu, data tentang karakteristik penduduk Kabupaten Seram Bagian Timur berdasarkan kelompok umur, tingkat pendidikan, jenis kelamin, jenis pekerjaan dalam tahun 2013, dapat dilihat sebagaimana data yang terdapat pada tabel dibawah ini.



PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR

Tabel 2.4
Data Karakteristik Penduduk
Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2013

No.	Uraian	Jenis Kelamin Penduduk (jiwa)		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah
I.	Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur			
1	0 – 4	6.757	6.521	13.278
2	5 – 9	7.318	6.792	14.110
3	10 – 14	6.078	5.489	11.567
4	15 – 19	4.762	4.393	9.155
5	20 – 24	3.459	3.663	7.122
6	25 – 29	4.315	4.524	8.839
7	30 – 34	3.590	3.671	7.261
8	35 – 39	3.394	3.469	6.863
9	40 – 44	2.827	2.635	5.462
10	45 – 49	2.377	2.255	4.362
11	50 – 54	1.906	1.708	3.614
12	55 – 59	1.360	1.133	2.493
13	60 – 64	1.035	934	1.969
14	65 – 69	772	675	1.477
15	70 – 74	427	411	838
16	>75	419	436	855
	Jumlah penduduk			
II	Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan			
1	Tidak/belum tamat sekolah	-	-	1.126
2	Tidak/belum tamat SD	-	-	5.110
3	Tamat SD	-	-	11.092
4	Tamat SLTP	-	-	5.219
5	Tamat SLTA	-	-	9.150
6	Tamat D-I/D-II/D-III/D-IV/S-1/S-2.	-	-	2.859
III	Penduduk Berdasarkan Jenis Pekerjaan			
1	Bidang pertanian	15.180	4.367	19.547
2	Bidang industri	3.788	767	4.555
3	Bidang jasa lainnya	5.232	5.222	10.454
	Jumlah	24.200	10.356	34.556

Sumber data : Profil Kab. Seram Bagian Timur, Tahun 2014.

Dari tabel di atas berdasarkan kelompok usia, penduduk Kabupaten Seram Bagian Timur dapat digolongkan ke dalam penduduk usia wajib belajar tingkat dasar (SD dan SLTP). Sedangkan Penduduk usia produktif adalah kelompok penduduk usia 15 - 65 tahun relatif cukup besar. Oleh karena itu, langkah kebijakan yang mendesak untuk dipertimbangkan adalah terkait dengan lapangan

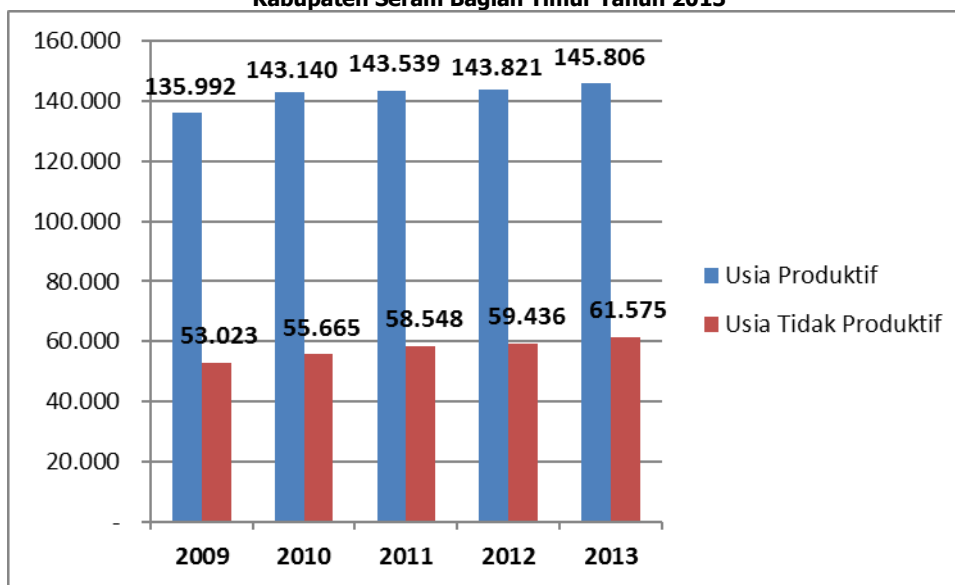


PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR

kerja. Demikian demiiian, maka kebijakan yang perlu dijadikan program prioritas adalah mengundang investor, baik dalam negeri maupun luar negeri untuk dapat berinvestasi di Kabupaten Seram Bagian Timur. Strategi dan program yang mendesak terkait dengan makssud tersebut diatas, adalah pembangunan dan pengembangan berbagai infrastruktur fisik dan non fisik dalam upaya menarik investor untuk mau menanamkan investasinya.

Untuk memberikan informasi lebih lengkap mengenai gambaran karakteristik berdasarkan usia penduduk Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2013 yang masuk kelompok produktif dan kelompok pendudukan yang tidak produktif lagi, dapat dilihat sebagaimana data yang terdapat dalam gambar dibawah ini

Gambar 2.3
Penduduk Usia Produktif dan Tidak Produktif
Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2013



Dari data yang terdapat dalam gambar 2...diatas diketahui, bahwa jumlah penduduk yang masih produktif masih besar, yaitu sebanyak 59,140 jiwa (laki-laki 29.025 jiwa dan perempuan 30.115 jiwa), dibandingkan dengan jumlah penduduk yang tidak produktif yaitu sebanyak 42.125 jiwa (laki-laki 21.771 jiwa dan perempuan 20.354 jiwa). Sedangkan dari sisi jenis kelamin, jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dibandingkan jumlah penduduk perempuan, dengan perbandingan penduduk laki-laki 50.796 jiwa dan perempuan 50.469 jiwa.



PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR

2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat.

2.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi.

1. Pertumbuhan PDRB.

Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi perekonomian secara makro adalah data produk domestik regional bruto (PDRB). Terdapat 2 (dua) jenis penilaian produk domestik regional bruto (PDRB) dibedakan dalam dua jenis penilaian yaitu atas dasar harga berlaku (ADHB) dan atas dasar harga konstan (ADHK). Sedangkan untuk mengetahui tingkat pertumbuhan ekonomi adalah dengan melihat data tentang pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan. Pertumbuhan PDRB menurut lapangan usaha Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) pada masing-masing sektor di Kabupaten Seram Bagian Timur, dapat dilihat sebagaimana data yang terdapat pada tabel di bawah ini.

Persentase pertumbuhan PDRB di Kabupaten Seram Bagian Timur dalam tahun 2013 yang tumbuh sebesar sebesar 5,13% sesungguhnya mengalami penurunan jika disandingkan dengan PDRB dalam tahun 2012 yang tumbuh 6,68%. Oleh karena itu, PDRB Kabupaten Seram Bagian Timur jika disandingkan dengan PDRB kabupaten/kota se Provinsi Maluku, maka berada pada peringkat kesepuluh dari 11 (sebelas), dengan pertumbuhan sebesar 3,28% atau sebesar Rp.434.427.000.000,00. Tiga besar PDRB di Provinsi Maluku adalah, peringkat pertama Kota Ambon dengan PDRB sebesar Rp.5.888.824.000.000,00. Peringkat kedua Kabupaten Maluku Tengah, dengan PDRB sebesar Rp.1.909.831.000.000,00 dan peringkat ketiga Kabupaten Seram Bagian Barat, dengan PDRB sebesar Rp.921.498.000.000,00.

Capaian kinerja PDRB ADHK Kabupaten Seram Bagian Timur sepanjang tahun 2009-2013, dapat dilihat sebagaimana yang terdapat dalam tabel dibawah ini.



PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR

Tabel 2.5
Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan
Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2009-2013

No.	Sektor	2009	2010	2011	2012	2013
1	Pertanian	47,75	45,35	43,98	42,35	41,42
2	Pertambangan dan Penggalian	9,24	8,76	8,97	8,75	8,69
3	Industri Pengolahan	6,64	6,99	6,99	6,91	6,83
4	Listrik dan Air minum	0,21	0,20	0,19	0,17	0,17
5	Bangunan dan Konstruksi	1,32	1,91	1,95	1,96	1,97
6	Perdagangan, Hotel dan Restoran	23,76	25,21	26,00	27,80	28,79
7	Angkutan & Komunikasi	3,50	3,59	3,47	3,36	3,37
8	Keuangan, persewaan dan Jasa perusahaan	1,57	1,65	1,59	1,58	1,58
9	Jasa-jasa	6,02	6,33	6,86	7,12	7,12
	P D R B	3,51	3,42	3,34	3,30	3,28

Sumber data : Profil Kab. Seram Bagian Timur, Tahun 2010-2014.

Berdasarkan data PDRB Atas Dasar Harga Konstan tersebut diatas dapat diketahui, bahwa selama 5 (lima) tahun terakhir tingkat pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Seram Bagian Timur, relatif stabil yaitu pada kisaran 11,11%.

Sedangkan Pertumbuhan PDRB menurut lapangan usaha Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) pada masing-masing sektor di Kabupaten Seram Bagian Timur, dapat dilihat sebagaimana data yang terdapat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.6
Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku
Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2009-2013

No.	Sektor	2009	2010	2011	2012	2013
1	Pertanian	129.721	125.039	140.870	160.345	179.943
2	Pertambangan dan Penggalian	23.159	24.201	28.743	33.109	37.752
3	Industri Pengolahan	16.643	19.311	22.393	26.160	29.682
4	Listrik dan Air minum	516	563	611	659	725
5	Bangunan dan Konstruksi	3.312	5.278	6.242	7.422	8.564
6	Perdagangan, Hotel dan Restoran	59.570	69.660	83.268	105.261	125.069
7	Angkutan & Komunikasi	8.773	9.928	11.104	12.719	14.652
8	Keuangan, persewaan dan Jasa perusahaan	3.946	4.553	5.101	5.976	6.870
9	Jasa-jasa	15.097	17.482	21.961	26.939	31.164
	P D R B	250.743	276.289	320.298	378.592	434.427

Sumber data : Profil Kab. Seram Bagian Timur, Tahun 2010-2014.

Dari data yang tersaji sebagaimana terlihat pada tabel 2.6 diatas, dapat diketahui tingkat pertumbuhan PDRB dari sektor pertanian berkontribusi



PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR

secara signifikan, yaitu sebesar Rp.250.743,- pada tahun 2009. Sedangkan pada tahun-tahun berikutnya adalah, tahun 2010 sebesar Rp.276.289,-, tahun 2011 sebesar Rp.320.298,- dan tahun 2012 sebesar Rp.378.592,- serta pada tahun 2013 sebesar Rp.434.427,-

Sementara itu, jika dibandingkan antara pertumbuhan PDRB Kabupaten Seram Bagian Timur dengan pertumbuhan PDRB Kabupaten dan Kota di Provinsi Maluku sepanjang tahun 2009 sampai dengan tahun 2013, dapat dilihat sebagaimana data yang terdapat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.7
Perbandingan PDRB Antar Daerah Atas Dasar Harga Berlaku
Dan Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten Seram Bagian Timur
Tahun 2009-2013

No	Kabupaten/Kota	Tahun				
		2009	2010	2011	2012	2013
1	Kab. Maluku Tenggara Barat: a. ADHB; b. ADHK	487.665	541.847	723.717	735.108	834.911
		271.992	285.908	300.917	323.012	340.018
2	Kab. Maluku Barat Daya : a. ADHB; b. ADHK	329.240	370.886	425.500	498.913	569.897
		181.278	191.208	201.269	215.703	226.818
3	Kab. Maluku Tenggara : a. ADHB; b. ADHK	368.250	417.292	496.307	587.002	670.466
		209.890	221.873	235.432	252.454	269.082
4	Kota Tual : a. ADHB; b. ADHK	246.840	279.194	329.084	392.890	455.685
		140.178	144.842	157.693	170.742	182.033
5	Kab. Maluku Tengah : a. ADHB; b. ADHK	1.046.801	1.186.965	1.409.091	1.678.464	1.909.831
		592.964	621.693	662.387	712.572	749.988
6	Kab. Buru : a. ADHB; b. ADHK	292.883	329.164	389.179	463.553	521.748
		166.709	173.381	187.573	199.408	209.769
7	Kab. Buru Selatan : a. ADHB; b. ADHK	211.195	232.963	272.058	325.784	370.196
		116.447	121.816	128.200	137.196	144.506
8	Kab. Kepulauan Aru : a. ADHB; b. ADHK	364.612	404.364	458.766	532.287	600.793
		197.283	208.751	220.518	234.899	247.229
9	Kab. Seram Bagian Barat : a. ADHB; b. ADHK	532.152	595.906	695.873	815.216	921.498
		306.840	319.804	338.907	360.177	378.668
10	Kab. Seram Bagian Timur : a. ADHB; b. ADHK	250.743	276.289	320.299	378.593	434.427
		139.325	145.576	154.937	165.285	173.764
11	Kota Ambon : a. ADHB; b. ADHK	3.003.452	3.441.676	4.179.215	5.060.959	5.888.824
		1.690.271	1.802.668	1.921.334	2.089.902	2.198.557

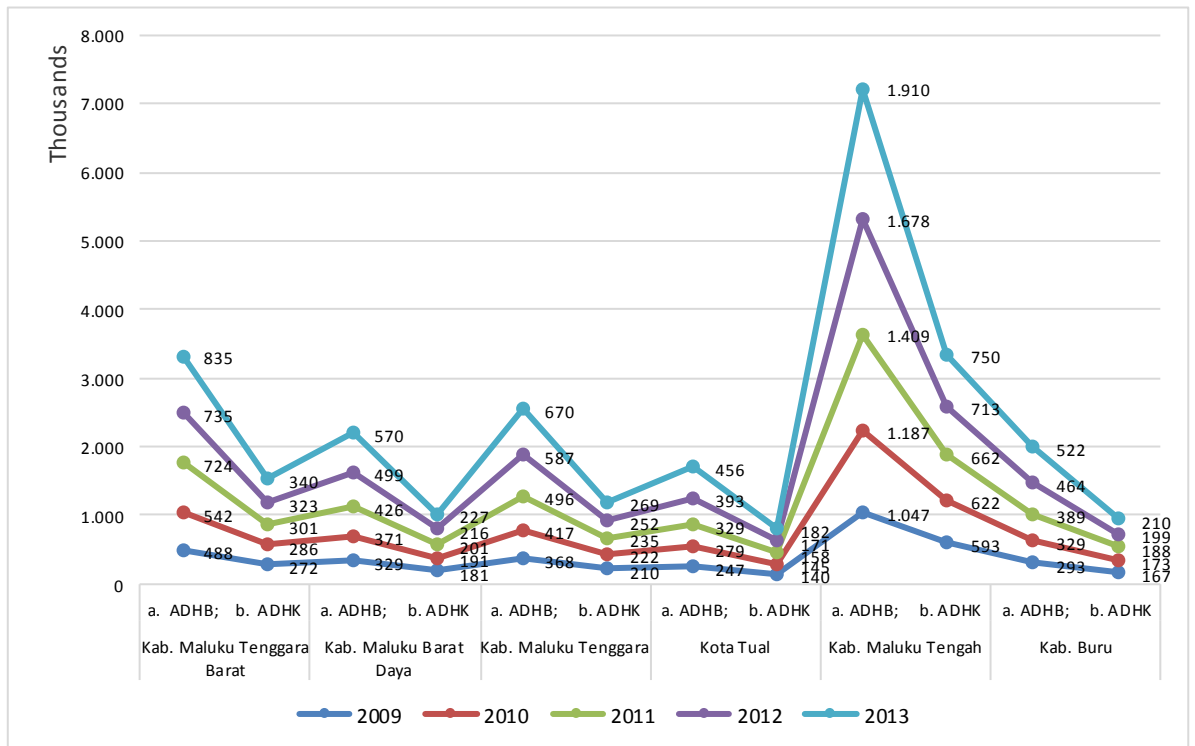
Sumber data : 1. Indikator Pertumbuhan Ekonomi Kab. Seram Bagian Timur, Tahun 2010-2014.
2. Profil Kab. Seram Bagian Timur, Tahun 2010-2014.



PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR

Selanjutnya dari hasil perbandingan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) antar daerah se Provinsi Maluku tersebut, dapat diketahui posisi Kabupaten Seram Bagian Timur. Data tentang pertumbuhan PDRB kabupaten/kota se Provinsi Maluku yang berada pada 6 (enam) peringkat atas, dapat dilihat sebagaimana data yang terdapat pada grafik dibawah ini.

Grafik 2.1
Pertumbuhan PDRB Enam Kabupaten/Kota
Provinsi Maluku Tahun 2009-2013



Sumber data : 1. Profil Pemkab. Seram Bagian Timur, Tahun 2010-2014
 2. Indikator Pertumbuhan Ekonomi Pemkab SBT, Tahun 2014

2. Pertumbuhan PDRB Perkapita.

PDRB per kapita dihitung berdasarkan pendapatan regional netto atas dasar biaya faktor dibagi dengan jumlah penduduk regional pertengahan tahun. Oleh karena itu, jika asumsi bahwa pendapatan faktor produksi dan transfer yang mengalir ke luar sama dengan pendapatan faktor produksi dan transfer yang masuk, maka nilai pendapatan regional diasumsikan sama besar



PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR

dengan nilai PDRB. Angka pendapatan per kapita diperoleh dengan cara membagi PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan tahun.

Data tentang pertumbuhan PDRB Perkapita Kabupaten Seram Bagian Timur selama kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir, dapat dilihat sebagaimana terdapat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.8
Pertumbuhan PDRB Perkapita Kabupaten Seram Bagian Timur
Tahun 2011-2013

No.	Uraian	Tahun		
		2011	2012	2013
1	PDRB Perkapita	9.252.444	7.963.032	9.857.700

Sumber data : Profil Kab. Seram Bagian Timur, Tahun 2012-2014.

Dari sajian data sebagaimana terdapat dalam tabel diatas dapat diketahui, bahwa dalam kurun waktu selama 3 (tahun) terakhir PDRB per kapita masyarakat Kabupaten Seram Bagian Timur mengalami pertumbuhan yang fluktuatif, dinamakan dalam tahun 2011 pertumbuhan PDRB Perkapita pertahun masih sebesar Rp.9.252.444,-, maka dalam tahun 2012 mengalami penurunan hingga menjadi sebesar Rp.7.963.032,-. Namun sepanjang tahun 2013 PDRB Perkapita pertahun mengalami peningkatan hingga menjadi sebesar Rp.9.857.700,-. Hal ini menandakan, bahwa berbagai program/kegiatan pembangunan yang dirumuskan bersama dengan seluruh pemangku kepentingan telah dapat dinikmati manfaatnya oleh seluruh masyarakat.

3. Kemiskinan.

Angka Kemiskinan di Kabupaten Seram Bagian Timur dalam 3 (tiga) tahun terakhir, yakni tahun 2011 sampai dengan tahun 2013 dapat dilihat sebagaimana data yang terdapat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.9
Penduduk Miskin Kabupaten Seram Bagian Timur
Tahun 2011 – 2013

No	Uraian	2011	2012	2013
1.	Penduduk miskin	234.377	243.687	253.367

Sumber data : Profil Kab. Seram Bagian Timur, Tahun 2012-2014.

4. Angka Kriminalitas Yang Tertangani.

Untuk mengetahui tingkat kesejahteraan dan pemerataan ekonomi pada suatu pemerintah daerah adalah dengan mengkaji dan menganalisis



PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR

kejahatan yang terjadi dan dapat ditangani oleh pemerintah daerah. Semakin banyak terjadi tindakan kriminalitas di suatu daerah menunjukkan adanya kesenjangan ekonomi di antara penduduknya. Berdasarkan hal tersebut, maka data dan informasi tentang kriminalitas yang dapat ditangani oleh Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur selama 3 (tiga) tahun yang lalu, dapat dilihat sebagaimana data yang terdapat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.10
Angka Kriminalitas yang Tertangani
Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2009 – 2013

No	Tahun	Jumlah Kriminalitas		
		Lapor	Tertangani	Rasio (%)
1	2011	14	14	100
2	2012	65	65	100
3	2013	29	29	100

Sumber data : Profil Kab. Seram Bagian Timur, Tahun 2010-2014.

Dari data yang terdapat pada tabel di atas dapat diketahui, bahwa perumusan program dan kegiatan yang dilaksanakan selama 3 (tiga) tahun terakhir, telah memberi manfaat yang signifikan dalam menekan angka kriminalitas di Kabupaten Seram Bagian Timur. Hal ini ditunjukkan dengan angka-angka sebagai berikut, pada tahun 2011 angka kriminalitas yang dilaporkan sebanyak 14 perkara, tertangani sebanyak 14 perkara. Demikian pula dalam tahun 2012 kriminalitas yang dilaporkan sebanyak 65 perkara, dapat ditangani sebanyak 65 perkara. Pada tahun 2013 angka kriminalitas yang dilaporkan sebanyak 29 perkara, dapat ditangani sebanyak 29 perkara. Jadi walaupun jumlah kriminalitas dari tahun ke tahun meningkat, tetapi seluruhnya dapat tertangani dan diselesaikan.

2.2.2. Fokus Kesejahteraan Masyarakat

1. Bidang Pendidikan.

Mengukur kualitas penduduk suatu daerah dapat dilakukan dengan mengetahui tingkat kemampuan dalam setiap individu dalam mengakses ilmu pengetahuan dalam rangka memperluas cakrawala ilmu dan wawasan berfikir. Oleh karena itu, landasan dasar suatu masyarakat untuk dapat mengakses pengetahuan dimaksud dapat dilakukan antara lain dengan mengukur capaian



PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR

bidang pendidikan yang dapat dicapai oleh suatu pemerintah daerah dalam kurun waktu tertentu.

Data tentang perkembangan bidang pendidikan yang dapat dicapai di Kabupaten Seram Bagian Timur sepanjang tahun 2011 sampai dengan tahun 2013 yang lalu, dapat dilihat sebagaimana data dan informasi yang disajikan pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.11
Capaian Bidang Pendidikan Kabupaten Seram Bagian Timur
Tahun 2011 – 2013.

No.	Uraian	Tahun		
		2011	2012	2013
1	Rata-rata Angka Melek Huruf	94,91%	95,32%	96,96%
2	Rata-Rata lama Sekolah	7,07	7,14	7,62
3	Angka Partisipasi Sekolah :			
	- SD/MI	96,79	98,74	99,60
	- SLTP/MTs	90,64	89,75	88,59
	- SMA/SMK/MA	59,87	63,99	69,45

Sumber data : Profil Kab. Seram Bagian Timur, Tahun 2012-2014.

2. Bidang Kesehatan.

Mengukur keberhasilan pencapaian kinerja bidang kesehatan, dapat dilihat dengan pencapaian yang meliputi antara lain pencapaian indikator pencapaian angka usia harapan hidup dan prosentase balita gizi buruk.

Angka usia harapan hidup merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Idealnya angka harapan hidup dihitung berdasarkan angka kematian menurut umur (Age Specific Death Rate/ASDR) yang datanya diperoleh dari catatan registrasi kematian secara bertahun-tahun sehingga dimungkinkan dibuat tabel kematian. Tetapi karena sistem registrasi penduduk di Indonesia belum berjalan dengan baik, maka untuk menghitung angka harapan hidup digunakan dengan mengutip angka yang diterbitkan BPS.

Demikian pula program dan kegiatan bidang urusan gizi, dalam 3 (tiga) tahun terakhir telah memberikan dampak yang positif bagi pertumbuhan balita di Kabupaten Seram Bagian Timur.



PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR

Sepanjang kurun waktu tahun 2010 sampai dengan tahun 2012, pencapaian kinerja Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur terhadap pencapaian target indikator dimaksud, dapat disajikan sebagaimana data yang terdapat pada tabel-tabel dibawah ini.

Tabel 2.12
Angka Usia Harapan Hidup
Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2010 – 2012

Angka Usia Harapan Hidup		
Tahun 2010	Tahun 2011	Tahun 2012
65,86	66,07	66,28

Sumber Data : Profil Kab. Seram Bagian Timur, Tahun 2011-2013.

Dari data diatas terlihat, bahwa usia harapan hidup masyarakat Kabupaten Seram Bagian Timur mengalami peningkatan, yaitu jika pada tahun 2010 usia harapan hidup masih adalah 65,86 tahun, maka pada akhir tahun 2011 angka usia harapan hidup meningkat menjadi 66,07 tahun. Sedang pada tahun 2012 angka usia harapan hidup meningkat menjadi 66,28 tahun. Hal ini menandakan, bahwa program dan kegiatan bidang kesehatan yang dilaksanakan dalam 3 (tiga) tahun terakhir, dirasakan manfaatnya oleh seluruh masyarakat di Kabupaten Seram Bagian Timur.

Sementara itu, data tentang prosentase balita gizi buruk sepanjang tahun 2011 sampai dengan tahun 2013 di Kabupaten Seram Bagian Timur, dapat dilihat sebagaimana tersaji pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.13
Prosentase Balita Gizi Buruk
Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2011 - 2013

No	Tahun	Jumlah Balita Gizi Buruk	Jumlah Balita	Persentase (%)
1	2011	2	2.288	0,09
2	2012	5	1.813	0,28
3	2013	5	1.685	0,30

Sumber data : Profil Kab. Seram Bagian Timur, Tahun 2012-2014.

3. Bidang Pertanian.

Kepemilikan tanah oleh masyarakat maupun non masyarakat, baik tanah tersebut untuk kegiatan perdagangan, jasa, industri, maupun untuk fasilitas sosial (fasos) dan fasilitas umum (fasum), harus dibuktikan kepemilikannya dengan sertifikat tanah, sebagai dasar kepemilikan.



PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR

Dalam kurun waktu periode tahun 2010 sampai dengan tahun 2012 yang lalu, Badan Pertanahan Nasional (BPN Kabupaten Seram Bagian Timur telah menerbitkan bukti kepemilikan tanah, dengan rincian sebagaimana data yang terdapat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.14
Sertifikat Tanah Yang telah Diterbitkan Oleh BPN
Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2011 – 2013

No	Uraian	Tahun		
		2010	2011	2012
1	Tanah Hak Milik	702	1.161	1.230
2	Tanah Hak Guna Bangunan	5	5	-
3	Tanah Hak Guna Usaha	-	-	-
4	Tanah Hak Pakai	31	4	11
	Jumlah	708	1.170	1.241

Sumber data : BPN Kab. Seram Bagian Timur, Tahun 2012-2014.

4. Ketenagakerjaan.

Data dan informasi tentang rasio penduduk yang bekerja dalam konteks bidang ketenagakerjaan dapat dimaknai sebagai jumlah penduduk yang bekerja diberbagai jenis pekerjaan dari berbagai tingkat pendidikan dalam kurun waktu tertentu disandingkan dengan jumlah total penduduk pada tahun yang sama di Kabupaten Seram Bagian Timur. Sepanjang 5 (lima) tahun terakhir rasio penduduk yang bekerja di Kabupaten Seram Bagian Timur adalah sebagai berikut : Tahun 2009 penduduk yang bekerja berjumlah 33.872 jiwa, bersanding dengan jumlah penduduk pada tahun 2009 yang berjumlah 86.709 jiwa, sehingga rasio perbandingannya adalah 39,06%. Tahun 2010 penduduk yang bekerja berjumlah 37.362 jiwa, bersanding dengan jumlah penduduk pada tahun 2010 yang berjumlah 99.065 jiwa, sehingga rasio perbandingannya adalah 37,71%.

Pada tahun 2011 penduduk yang bekerja berjumlah 48.751 jiwa, bersanding dengan jumlah penduduk pada tahun 2011 yang berjumlah 101.436 jiwa, sehingga rasio perbandingannya adalah 48,06%. Pada tahun 2012 penduduk yang bekerja berjumlah 36.977 jiwa, bersanding dengan jumlah penduduk pada tahun 2012 yang berjumlah 103.196 jiwa, sehingga rasio perbandingannya adalah 35,83%. Sedangkan pada tahun 2013 penduduk yang bekerja berjumlah 34.556 jiwa, bersanding dengan jumlah

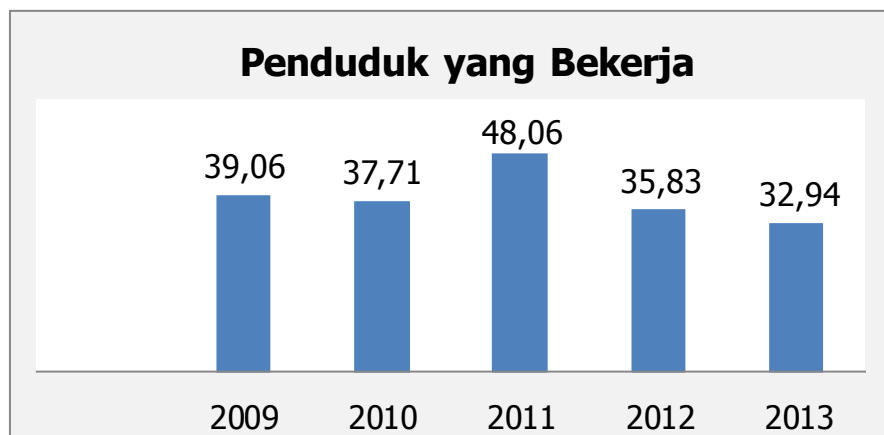


PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR

penduduk pada tahun 2013 yang berjumlah 104.902 jiwa, sehingga rasio perbandingannya adalah 32,94%.

Rincian data dan informasi tentang prosentase antara rasio penduduk yang bekerja diberbagai jenis lapangan kerja sebagai hasil dari persandingan dengan data jumlah penduduk di Kabupaten Seram Bagian Timur pada tahun yang sama, dapat dilihat sebagaimana terdapat dalam gambar dibawah ini.

Gambar 2.4
Rasio Penduduk Yang Bekerja
Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2011-2013



Dari data dan informasi yang disajikan sebagaimana terdapat dalam gambar diatas dapat diketahui, bahwa rasio jumlah penduduk yang bekerja di berbagai jenis lapangan kerja kecuali pada tahun 2014, bergerak menurun dari tahun ke tahun. Dinama pada tahun 2009 prosentase rasio sebesar 39,06%, pada tahun 2010 bergerak menurun menjadi 37,71%. Tahun 2011 prosentase rasio juga bergerak turun menjadi 37,71%. Sementara pada tahun 2011 meningkat menjadi 48,06%. Namun dalam tahun 2012 dan tahun 2013 bergerak turun menjadi 35,83% dan 32,94%.

2.3. Aspek Pelayanan Umum

2.3.1. Fokus Layanan Urusan Wajib.

1. Urusan Pendidikan.

a. Pendidikan Dasar.

1) Angka Partisipasi Sekolah (APS).

Angka Partisipasi Sekolah (APS), merupakan ukuran daya serap sistem pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. Angka tersebut



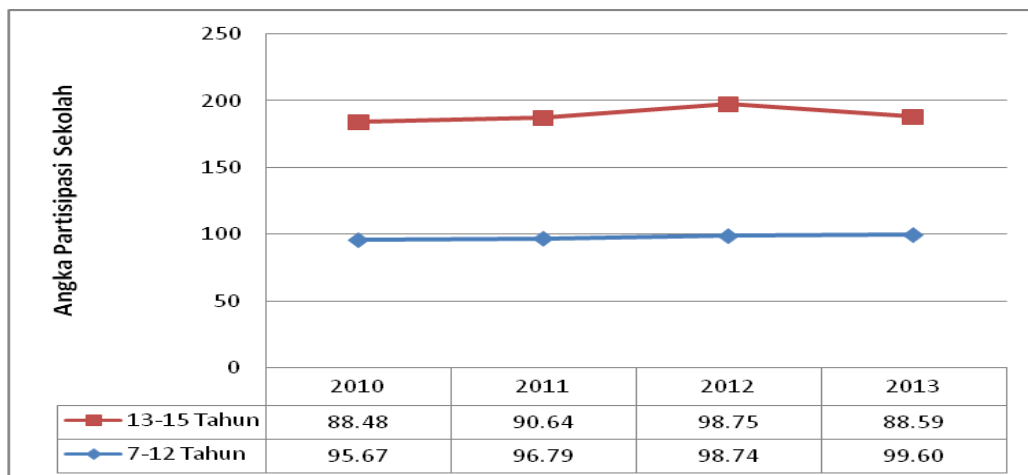
PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR

memperhitungkan adanya perubahan penduduk terutama usia muda. Ukuran yang banyak digunakan di sektor pendidikan seperti pertumbuhan jumlah murid lebih menunjukkan perubahan jumlah murid yang mampu ditampung di setiap jenjang sekolah. Sehingga, naiknya persentase jumlah murid tidak dapat diartikan sebagai semakin meningkatnya partisipasi sekolah. Kenaikan tersebut dapat pula dipengaruhi oleh semakin besarnya jumlah penduduk usia sekolah yang tidak diimbangi dengan ditambahkan infrastruktur sekolah serta peningkatan akses masuk sekolah sehingga partisipasi sekolah seharusnya tidak berubah atau malah semakin rendah.

Dengan demikian, APS adalah jumlah murid kelompok usia pendidikan dasar (7-12 tahun dan 13-15 tahun) yang masih menempuh pendidikan dasar per 1.000 jumlah penduduk usia pendidikan dasar. Angka Partisipasi Sekolah Kabupaten Seram Bagian Timur dalam 4 (empat) tahun terakhir, adalah (i) kelompok umur 7-12, tahun 2010, 95,67, tahun 2011, 96,79, tahun 2012, 98,74 dan tahun 2013, 99,60; (ii) dan kelompok umur 13-15, tahun 2010, 88,48, tahun 2011 90,64, tahun 2012 89,75 dan tahun 2013 88,59.

Data dan informasi dimaksud, dapat dilihat sebagaimana terdapat dalam grafik dibawah ini.

Grafik 2.2
Angka Partisipasi Sekolah Menurut Kelompok Umur
Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2010-2013



Sumber data : Profil Kab.Seram Bagian Timur, Tahun 2011-2014.



PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR

2) Rasio Ketersediaan Sekolah/Murid Usia Sekolah.

Rasio ketersediaan sekolah adalah jumlah sekolah tingkat pendidikan dasar per 10.000 jumlah penduduk usia pendidikan dasar. Rasio ini mengindikasikan kemampuan untuk menampung semua penduduk usia pendidikan dasar.

Pemahaman Jumlah ketersediaan sekolah dan Jumlah Penduduk Usia Sekolah adalah kemampuan untuk menampung semua penduduk usia pendidikan dasar. Data Jumlah ketersediaan sekolah dan penduduk usia sekolah selama 5 (lima) tahun terakhir di Kabupaten Seram Bagian Timur, dapat dilihat sebagaimana pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.15
Rasio Ketersediaan sekolah dan penduduk usia sekolah
Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2012-2013

No.	Tahun	Jumlah Sekolah	SD/MI	SLTP/MTs	SMA/SMK/ MAN	Rasio (%)
1	2012	254	21.184	7.752	5.434	0,74
2	2013	255	37.024	10.716	14.173	0,41

Sumber data : Profil Kab. Seram Bagian Timur, Tahun 2013-2014.

3) Rasio Guru Permudid.

Indikator rasio guru terhadap murid adalah jumlah guru tingkat pendidikan dasar per 1.000 jumlah murid pendidikan dasar. Indikator rasio murid terhadap guru mengindikasikan ketersediaan tenaga pengajar berbanding jumlah murid disuatu sekolah. Untuk mengetahui dan mengukur jumlah yang paling ideal antara jumlah murid untuk satu guru agar tercapai target kualitas pembelajaran, maka perlu dihitung prosentase rasio perbandingan dimaksud.

Data dan informasi rasio antara murid dengan guru di Kabupaten Seram Bagian Timur dalam 2 (dua) tahun terakhir, dapat dilihat sebagaimana terdapat pada tabel dibawah ini.



PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR

Tabel 2.16
Rasio Guru Dengan Murid Jenjang pendidikan SD/MI, SLTP/MTs,
SMA/SMK/MA Kab Seram Bagian Timur Tahun 2012-2013

No	Tahun	Uraian	SD/MI	SLTP/MTs	SMA/SMK /MA
1	2012	Jumlah Murid	21.184	7.752	5.434
		Rasio Guru dengan Murid	17,07	15,23	5,69
2	2013	Jumlah Murid	37.024	10.716	14.173
		Rasio Guru dengan Murid	24,31	18,17	31,34

Sumber data : Profil Kab. Seram Bagian Timur, Tahun 2013-2014.

2. Urusan Kesehatan.

a. Rasio Posyandu Per Satuan Balita.

Pengertian posyandu adalah suatu wadah komunikasi alih teknologi dalam pelayanan kesehatan masyarakat dan Keluarga Berencana dari masyarakat, oleh masyarakat dan untuk masyarakat dengan dukungan pelayanan serta pembinaan teknis dari petugas kesehatan dan keluarga berencana yang mempunyai nilai strategis untuk pengembangan sumber daya manusia sejak dini.

Tujuan disenyelenggarakannya posyandu:

- 1) Menurunkan Angka Kematian Bayi (AKB), Angka Kematian Ibu (ibu Hamil, melahirkan dan nifas).
- 2) Membudayakan NKKBS.
- 3) Meningkatkan peran serta dan kemampuan masyarakat untuk mengembangkan kegiatan kesehatan dan KB serta kegiatan lainnya yang menunjang untuk tercapainya masyarakat sehat sejahtera.
- 4) Berfungsi sebagai Wahana Gerakan Reproduksi Keluarga Sejahtera, Gerakan Ketahanan Keluarga dan Gerakan Ekonomi Keluarga Sejahtera.

Pada implementasinya posyandu merupakan wadah peran serta masyarakat untuk menyampaikan dan memperoleh pelayanan kesehatan dasarnya, maka diharapkan pula strategi operasional pemeliharaan dan perawatan kesejahteraan ibu dan anak secara dini, dapat dilakukan di setiap posyandu. Pembentukan posyandu sebaiknya tidak terlalu dekat dengan Puskesmas agar pendekatan pelayanan kesehatan kepada



PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR

masyarakat lebih tercapai dan idealnya satu posyandu melayani 100 balita.

Perkembangan posyandu di Kabupaten Seram Bagian Timur kurun waktu tahun 2009 sampai dengan tahun 2013, dapat dilihat sebagaimana data yang terdapat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.17
Perkembangan Posyandu Per Satuan Penduduk
Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2009-2013

No	Uraian	Tahun				
		2009	2010	2011	2012	2013
1	Jumlah Posyandu	162	162	163	163	191
2	Jumlah Balita	12.464	9.473	9.468	5.208	9.717
	Rasio (%)	1,30	1,71	1,72	3,13	1,97

Sumber Data : Dinas Kesehatan Kabupaten Seram Bagian Timur, Tahun 2010-2014.

b. Rasio Puskesmas, Poliklinik dan Puskesmas Pembantu.

Beberapa sarana dan prasarana kesehatan yang sering dipergunakan untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat adalah puskesmas, poliklinik dan puskesmas pembantu (pustu). Perkembangan puskesmas, poliklinik dan puskesmas pembantu (pustu) tahun 2009 sampai dengan tahun 2013 di Kabupaten Seram Bagian Timur, dapat dilihat sebagaimana data yang terdapat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.18
Rasio Puskesmas, Poliklinik dan Pustu
Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2009-2013

No	Uraian	Tahun				
		2009	2010	2011	2012	2013
1.	Jumlah Puskesmas	14	16	16	16	18
2.	Jumlah Poliklinik	1	1	1	1	1
3.	Jumlah Pustu	162	162	163	163	191
4.	Jumlah Penduduk	86.709	99.065	101.436	103.196	104.902
5.	Rasio Puskesmas persatuan penduduk	0,016	0,016	0,016	0,016	0,017
6.	Rasio Poliklinik persatuan penduduk	0,001	0,001	0,0009	0,000	0,0000
7.	Rasio Pustu persatuan penduduk	0,19	0,16	0,16	0,16	0,18

Sumber data : Profil Kab. Seram Bagian Timur, Tahun 2010-2014.

c. Rasio dokter per satuan penduduk.

Indikator rasio dokter dan tenaga medis per jumlah penduduk menunjukkan tingkat pelayanan yang dapat diberikan oleh dokter dan tenaga medis dibandingkan jumlah penduduk yang ada. Apabila dikaitkan



PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR

dengan standar sistem pelayanan kesehatan terpadu, idealnya satu orang dokter dan tenaga melayani 2.500 penduduk.

Data tentang Rasio Dokter dan Tenaga Paramedis di Kabupaten Seram Bagian Timur dalam kurun waktu tahun 2012 sampai dengan tahun 2013, dapat dilihat sebagaimana terdapat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.19
Rasio Dokter dan Tenaga Paramedis
Per Satuan Penduduk Kabupaten Seram Bagian Timur
Tahun 2012-2013

No	Uraian	2012	2013
1	Jumlah Dokter	30	27
	Jumlah Penduduk	103.196	104.902
	Rasio	0,03	0,03
2	Jumlah Perawat	162	294
	Jumlah Penduduk	103.196	104.902
	Rasio	0,16	0,28
3	Jumlah Bidan	63	97
	Jumlah Penduduk	103.196	104.902
	Rasio	0,06	0,09
4	Jumlah Ahli Gizi	21	25
	Jumlah Penduduk	103.196	104.902
	Rasio	0,02	0,02

Sumber Data : Profil Kab.Seram Bagian Timur, Tahun 2013-2014.

d. Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit.

Cakupan penemuan dan penanganan penyakit menular seperti diare, TB dan Malaria merupakan suatu penyakit yang tergolong dalam infeksi yang disebarkan oleh gigitan nyamuk dan lingkungan tempat tinggal. Penyakit Diare, TB dan Malaria dapat menyerang pada siapa saja tanpa terkecuali pria, wanita, tua, muda, kaya dan miskin serta dimana saja.

Data tentang cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit Diare, TB dan Malaria sepanjang 3 (tiga) tahun terakhir di Kabupaten Seram Bagian Timur, dapat dilihat sebagaimana terdapat pada tabel dibawah ini.



Tabel 2.20
Data Kondisi Penyakit Menular Yang Terdeteksi
Kab. Seram Bagian Timur Tahun 2011-2013

Tahun	Diare (orang)	TB (orang)	Malaria (orang)	Jumlah
2011	3.495	142	2.895	6.532
2012	1.061	163	1.254	2.478
2013	1.251	95	2.227	3.573
Jumlah	5.807	400	6.376	12.583

Sumber Data : Profil Kab.Seram Bagian Timur, Tahun 2012-2014.

e. Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan.

Kinerja Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur dalam memberikan pelayanan terhadap balita gizi buruk dari waktu ke waktu terus di tingkatkan kualitas dan kuantitasnya. Hal tersebut sejalan dengan sasaran indikator visi dan misi Pemerintah Daerah. Oleh karena itu, untuk mendorong terwujudnya target indikator sasaran dimaksud, maka alokasi pagu anggaran untuk bidang kesehatan dari tahun ke tahun terus ditingkatkan.

Perkembangan mengenai balita gizi buruk selama 5 (lima) tahun terakhir, dapat dilihat sebagaimana terdapat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.21
Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan
Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2009-2013

No.	Uraian	Tahun				
		2009	2010	2011	2012	2013
1	Balita Gizi Buruk	5	3	2	5	5

Sumber data : Profil Kab.Seram Bagian Timur, Tahun 2010-2014.

f. Cakupan Balita Yang Pernah Mendapatkan Vaksinasi.

Salah satu program prioritas pemerintah daerah terus dilaksanakan dari waktu ke waktu, dengan alokasi pagu anggaran yang terus ditingkatkan adalah mendorong terwujudnya sumber daya manusia yang handal, sehat dan berkualitas. Untuk itu, sejak awal pemerintah daerah sangat konsen dengan melakukan vaksinasi kepada seluruh balita.



PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR

Perkembangan balita mendapatkan vaksinasi di Kabupaten Seram Bagian Timur sepanjang tahun 2012 sampai dengan tahun 2013, dapat dilihat sebagaimana data yang terdapat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.22
Cakupan Balita Yang Pernah Mendapatkan Vaksinasi
Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2009-2013

No.	Uraian	Jenis Vaksinasi				
		BCG	DPT	Polio	Hepatitis	Campak
1	2012	1.526	1.495	1.524	1.693	1.581
2	2013	2.429	2.506	2.024	929	5.542

Sumber data : Profil Kab.Seram Bagian Timur, Tahun 2010-2014

g. Prosentase Cakupan Pertolongan Persalinan.

Data perkembangan cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi sepanjang kurun waktu tahun 2009 sampai dengan tahun 2013, dapat dilihat sebagaimana terdapat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.23
Prosentase Pertolongan Persalinan
Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2009-2013

No.	Penolong Kelahiran	Tahun				
		2009	2010	2011	2012	2013
1	Dokter	2,89	3,30	2,46	2,76	1,56
2	Bidan	15,18	21,01	22,57	19,67	14,87
3	Tenaga medis lainnya	0,64	0,82	0,96	0,99	0,54
4	Dukun	78,10	70,60	69,45	74,24	83,03
5	Famili	3,19	4,07	4,56	2,35	0,00
6	lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sumber data : Profil Kab.Seram Bagian Timur, Tahun 2010-2014.

h. Cakupan Kunjungan Ibu Hamil.

Data perkembangan cakupan kunjungan ibu hamil sepanjang kurun waktu tahun 2009 sampai dengan tahun 2013, dapat dilihat sebagaimana terdapat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.24
Cakupan Kunjungan Ibu Hamil
Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2009-2013

No.	Penolong Kelahiran	Tahun				
		2009	2010	2011	2012	2013
1	Jumlah ibu hamil	3.040	3.189	2.517	2.559	2.559
2	Melakukan kunjungan K-1	1.202	2.361	2.284	2.399	2.543
3	Melakukan kunjungan K-4	768	2.077	1.864	2.217	2/019

Sumber data : Profil Kab.Seram Bagian Timur, Tahun 2010-2014.



PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR

3. Urusan Pekerjaan Umum.

a. Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik.

Kinerja jaringan jalan berdasarkan aspek kemantapan, merupakan kinerja gabungan dari aspek kondisi dan aspek pemanfaatan/kapasitas. Kinerja jaringan jalan dinyatakan sebagai mantap sempurna, mantap marginal dan tidak mantap, dimana hal tersebut lebih merupakan definisi secara kualitatif. Untuk keperluan teknis operasional diperlukan suatu definisi atau batasan/kriteria teknis ("engineering criteria") yang lebih jelas dan bersifat kuantitatif.

Kinerja jaringan jalan berdasarkan kemantapan dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) kategori yaitu :

- a. Mantap sempurna, adalah semua ruas jalan dengan kondisi sedang sampai baik dan lebarnya memenuhi ketentuan lebar minimum perkerasan (berdasarkan LHR yang ada), atau semua ruas jalan yang mantap baik dari aspek kondisi maupun aspek pemanfaatan/kapasitas;
- b. Mantap marginal, adalah semua ruas jalan dengan kondisi sedang sampai baik tetapi lebarnya kurang dari ketentuan berdasarkan jumlah LHR yang ada, atau sebaliknya yaitu jalan dengan lebar yang cukup tetapi kondisi rusak sampai rusak berat. Dapat dikatakan juga sebagai semua ruas jalan yang mantap dari aspek kondisi tetapi tidak mantap dari aspek pemanfaatan/kapasitas atau sebaliknya; dan
- c. Tidak mantap, adalah semua ruas jalan baik secara kondisi maupun kapasitas tidak mantap.

Perkembangan jenis jalan di Kabupaten Seram Bagian Timur dalam kondisi baik selama 3 (tiga) tahun terakhir, dapat dilihat sebagaimana data yang terdapat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.25
Panjang Jaringan Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Baik
Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2010–2013

No	Tahun	Panjang Jenis Jalan (km)				Jumlah
		Aspal	Kerikil	Tanah	Lain-lain	
1	2010	2	8.191	55	-	8.248
2	2011	27	145	48	245,17	465,17
3	2012	29,50	178,20	298,50	52,50	532,20

Sumber data : Profil Kab.Seram Bagian Timur, Tahun 2011-2014.



PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR

Selain ruas jalan dalam kondisi baik sebagaimana telah diuraikan pada tabel diatas, jumlah jembatan yang ada di Kabupaten Seram Bagian Timur sampai dengan akhir tahun 2012 sebanyak 188 buah jembatan dengan total panjang bentangan jembatan seluruhnya berjumlah 8.562 meter. Sedangkan jembatan darat yang terdapat pada jalan antar wilayah dan lingkaran pulau sebanyak 143 unit dengan panjang bentangan jembatan seluruhnya berjumlah 4.127 meter.

Sementara itu, panjang jaringan jalan provinsi yang berada di Kabupaten Seram Bagian Timur dalam kondisi baik, dapat dilihat sebagaimana data yang terdapat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.26
Panjang Jaringan Jalan Provinsi Dalam Kondisi Baik
Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2010–2013

No	Tahun	Panjang Jenis Jalan (km)				Jumlah
		Aspal	Kerikil	Tanah	Lain-lain	
1	2010	0,9	-	-	-	0,9
2	2011	15	80	-	20	115
3	2012	-	-	132,55	-	132,55

Sumber data : Profil Kab.Seram Bagian Timur, Tahun 2011-2014.

b. Rasio Tempat Ibadah Per Satuan Penduduk

Sarana dan prasarana ibadah bagi setiap pemeluk agama apapun, merupakan bagian yang sangat penting dan mendasar yang dibutuhkan dan harus tersedia pada setiap permukiman penduduk. Demikian pentingnya sarana dan prasarana ibadah, maka salah satu indikator untuk menentukan tingkat kesejahteraan masyarakat adalah seberapa banyak tersedianya sarana dan prasarana ibadah pada suatu komunitas masyarakat.

Data dan informasi tentang sarana dan prasarana ibadah di Kabupaten Seram Bagian Timur sepanjang tahun 2011 sampai dengan tahun 2013, dapat dilihat sebagaimana yang terdapat pada tabel dibawah ini.



PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR

Tabel 2.27
Sarana dan Prasarana Tempat Ibadah
Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2011-2013

No.	Tahun	Jumlah Sarana Ibadah/Tahun				
		Masjid	Langgar/ Mushola	Gereja protestan	Gereja Khatolik	Pura
1	2011	252	17	8	6	2
2	2012	255	26	9	7	2
3	2013	265	87	10	7	3
	Jumlah	772	130	27	20	7

Sumber data : Profil Kab.Seram Bagian Timur, Tahun 2012-2014.

c. Cakupan Rumah Layak Huni.

Rasio rumah layak huni adalah perbandingan jumlah rumah layak huni dengan jumlah penduduk. Beberapa kriteria yang dapat dijadikan sebagai tolok ukur rumah layak huni, antara lain adalah jenis atap rumah, dinding rumah dan lantai rumah,serta luas lantai.

Pertumbuhan prosentase rumah layak huni di Kabupaten Seram Bagian Timur dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir, dapat dilihat sebagaimana data yang terdapat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.28
Rasio Rumah Layak Huni Kabupaten Seram Bagian Timur
Tahun 2009 – 2013

No.	Kriteria	Tahun				
		2009	2010	2011	2012	2013
1	Atap Rumah:					
	a. Seng	49,33	66,03	66,98	62,08	64,59
	b. Ijuk/rumbia	37,33	23,14	16,98	13,31	15,28
	c. Lainnya	13,34	10,83	16,17	24,61	20,13
2	Dinding Rumah:					
	a. Tembok	79,88	61,20	59,71	62,24	65,96
	b. Kayu	20,66	34,11	31,64	32,10	28,22
	c. lainnya	8,46	4,69	8,65	5,66	5,73
3	Lantai Rumah:					
	a. Tanah	21,33	17,78	11,50	13,00	10,60
	b. Bukan tanah	78,67	82,22	88,50	87,00	89,40
4	Luas Lantai (M ²):					
	a. <20	56,53	4,53	3,48	2,24	3,37
	b. 20-49	50,20	39,98	44,56	51,70	40,13
	c. 50-99	40,04	42,40	41,08	37,99	46,05
	d. 100>	4,23	13,09	10,98	8,07	10,45

Sumber data : Profil Kab.Seram Bagian Timur, Tahun 2010-2014.



PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR

4. Urusan Perumahan.

Penyediaan air bersih layak minum merupakan salah satu kebutuhan hidup yang sangat mendasar bagi masyarakat. Oleh karena itu, peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana penunjang terhadap ketersediaan air bersih harus segera diwujudkan. Namun lembaga yang bertanggung jawab mengelola air bersih dimaksud saat ini belum terbentuk, atau walaupun sudah ada namun belum dapat berfungsi secara maksimal.

Demikian juga sarana dan prasarana jaringan listrik bagi masyarakat yang berasal dari PT. PLN yang disalurkan melalui unit-unit pembangkit tenaga diesel yang terdapat di Werinama, Bula, Geser, Gorom, Tutuk Tolu dan Wakate. Pelayanan listrik kepada masyarakat masih sangat terbatas, baru dapat diberikan penerangan listrik diwaktu malam hari saja. Sedangkan di Kota Bula pelayanan penerangannya sejak tahun 2007 dapat diberikan selama 24 jam.

Keberhasilan pencapaian target urusan perumahan diukur dengan indikator rumah tangga pengguna air bersih, rumah tangga pengguna listrik. Data capaian target indikator rumah tangga pengguna air bersih, rumah tangga pengguna listrik, rumah tangga bersanitasi di Kabupaten Seram Bagian Timur sepanjang tahun 2013, dapat dilihat sebagaimana terdapat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.29
Rumah Tangga Pengguna Air Bersih, Rumah Tangga Pengguna Listrik, Rumah Tangga Bersanitasi Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2013

Tahun	Rumah Tangga pengguna Air Bersih	Rumah Tangga Pengguna Listrik	Rumah Tangga Bersanitasi	Lingkungan Pemukiman Kumuh	Rumah Layak Huni
2013	37,47	53,56	36,24	-	28,34

Sumber Data : Profil Kab.Seram Bagian Timur, Tahun 2014.

5. Urusan Perencanaan Pembangunan.

Dalam pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan dan Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah telah ditetapkan, bahwa dokumen rencana pembangunan daerah terdiri dari RPJPD, RPJMD dan RKPD. Tahapan dan tatacara penyusunan rencana pembangunan daerah dimaksud



PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR

harus saling terkait, selaras dan bersinergi. Oleh karena itu, dalam menyusun RPJMD harus berpedoman pada RPJPD dan dalam menyusun RKPd harus berpedoman pada RPJMD. Selanjutnya RPJPD dan RPJMD ditetapkan dengan peraturan daerah, sedangkan RKPd ditetapkan dengan peraturan kepala daerah.

Data tentang ketersediaan dokumen RPJPD, RPJMD dan RKPd yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah dan Keputusan Bupati dalam kurun waktu tahun 2009 sampai dengan tahun 2013, dapat dilihat sebagaimana terdapat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.30
Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang Telah Ditetapkan Dengan Perda dan Perkada Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2009 – 2013

Indikator	Tahun				
	2009	2010	2011	2012	2013
1. Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan Perda	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2. Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dengan Perda	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
3. Tersedianya Dokumen Perencanaan: RKPd yang telah ditetapkan dengan Perwal	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
4. Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPd (%)	tad	tad	tad	84,80	85,69

Sumber data : Bappeda Kab. Seram Bagian Timur, Tahun 2010-2014.

6. Urusan Perhubungan.

Salah satu indikator pengukuran capaian target urusan perhubungan adalah banyak Bandara, Pelabuhan laut dan Terminal bis yang ada pada suatu daerah. Pelabuhan laut diartikan sebagai sebuah fasilitas di ujung samudera, sungai, danau untuk menerima kapal dan memindahkan barang kargo maupun penumpang ke dalamnya. Pelabuhan Udara/bandara bisa diartikan sebagai sebuah fasilitas untuk menerima pesawat dan memindahkan barang kargo maupun penumpang ke dalamnya.



PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR

Moda transportasi yang saat ini sedang dikembangkan oleh Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur adalah transportasi jenis pelayaran baik yang dikelola oleh pemerintah maupun oleh swasta. Saat ini pelayaran yang sedang dikelola oleh swasta adalah pelayaran untuk rute Ambon – Bula – Geser – Gurom, sebanyak 3 kali pelayaran dalam 1 bulan. Sedangkan pelayaran yang dikelola oleh pemerintah untuk rute Geser – Bula untuk sementara 1 kali pelayaran dalam seminggu.

Sedangkan terminal bus dapat diartikan sebagai prasarana transportasi jalan untuk keperluan menurunkan dan menaikkan penumpang, perpindahan intra dan/atau antar moda transportasi serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum.

Pertumbuhan pelabuhan laut dan bandara di Kabupaten Seram Bagian Timur dalam kurun waktu tahun 2008 sampai dengan tahun 2012, dapat dilihat sebagaimana data yang terdapat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.31
Bandara, Pelabuhan Laut
Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2013

No.	Uraian	Spesifikasi				
		lokasi	Kelas	Kapasitas	Ukuran	konstruksi
1	Bandara	Bula	Lapter Swasta	50 seat	SD-360	Gravel
2	Pelabuhan Laut:					
	a. Sesar.	Bula	-	-	50 m	Beton
	b. Geser	Seram Timur	-	-	50 m	Beton
	c. Penyeberangan ASDP	Seram Timur	-	-	50 m	Beton
	d. Air Kasar	Tutuk Tolu	-	-	250 m	Beton dan Kayu
	e. Suar	Wakate	-	-	50 m	Beton
	f. Gorom	Gorom	-	-	100 m	Beton

Sumber data : Profil Kab.Seram Bagian Timur, Tahun 2014.

7. Urusan Lingkungan Hidup.

Bidang urusan lingkungan hidup merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pembangunan di era otonomi



PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR

daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, telah membawa perubahan hubungan dan kewenangan antara pemerintah dan pemerintah daerah, termasuk di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Terkait dengan uraian diatas, maka dalam menjaga dan mengelola lingkungan hidup agar tetap lestari dan berkesinambungan, Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur telah melakukan berbagai langkah kebijakan sebagaimana telah ditentukan dalam regulasi peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan, maka indikator capaian target pengelolaan bidang lingkungan hidup yang dapat dijadikan tolok ukur, diantaranya prosentase penduduk berakses air minum.

Pertumbuhan prosentase penduduk berakses air minum sepanjang tahun 2009 sampai dengan tahun 2013 di Kabupaten Seram Bagian Timur, dapat dilihat sebagaimana data yang terdapat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.32
Persentase Penduduk Berakses Air Minum
Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2009-2013

No.	Jenis Airminum	Tahun/Prosentase				
		2009	2010	2011	2012	2013
1	Air dalam kemasan	1,84	0,30	0,27	4,86	5,89
2	Air PDAM	1,84	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Air pompa	0,43	1,74	2,07	1,82	2,86
4	Air sumur terlindung	52,50	60,86	52,84	53,34	42,86
5	Air sumur tak terlindung	13,50	8,21	1,68	3,46	14,31
6	Mata air terlindung	17,36	8,21	12,63	19,45	18,53
7	Mata air tak terlindung	5,15	9,20	6,39	5,10	8,05
8	Air sungai	4,51	2,48	4,73	2,64	3,18

Sumber data : Profil Kab.Seram Bagian Timur, Tahun 2010-2014.

8. Urusan Pertanahan.

Salah satu indikator untuk mengetahui indikator capaian target dalam penyelenggaraan bidang pertanaan, adalah prosentase luas lahan bersertifikat adalah proporsi jumlah luas lahan bersertifikat. Lahan bersertifikat dimaksud terdiri dari lahan dengan status kepemilikan pertama, "Hak Milik (HM)", adalah



PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR

merupakan hak turun-menurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah. Sifat-sifat hak milik yang membedakannya dengan hak-hak lainnya adalah hak yang "terkuat dan terpenuh", maksudnya untuk menunjukkan bahwa diantara hak-hak atas tanah yang dipunyai orang, hak miliklah yang paling kuat dan penuh.

Kedua, "Hak Guna Usaha (HGU)" adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara dalam jangka waktu paling lama 25 tahun. Hak Guna Usaha merupakan hak khusus untuk mengusahakan tanah yang bukan miliknya sendiri guna perusahaan, pertanian, perikanan dan peternakan.

Ketiga, Hak Guna Bangunan (HGB) adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan- bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri, dengan jangka waktu paling lama 30 tahun. Tidak mengenai tanah pertanian, oleh karena itu dapat diberikan atas tanah yang dikuasai langsung oleh negara maupun tanah milik seseorang. Keempat, Hak Pengelolaan Lahan (HPL) adalah hak untuk mengelola lahan yang hanya diberikan atas tanah negara yang dikuasai oleh Badan Pemerintah, BUMN (Badan Usaha Milik Negara) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) .

Perkembangan penerbitan sertifikat tanah di Kabupaten Seram Bagian Timur sepanjang tahun 2008 sampai dengan tahun 2012, dapat dilihat sebagaimana data yang terdapat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.33
Prosentase Tanah Yang Bersertifikat
Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2008-2012

No	Status Kepemilikan	Tahun				
		2008	2009	2010	2011	2012
1	Tanah Hak Milik	431	79	702	1.161	1.230
2	Tanah Hak Guna Bangunan	-	1	5	5	-
3	Tanah Hak Guna Usaha	-	-	-	-	-
4	Tanah Hak Pengelolaan Lahan	-	31	1	4	11
	Jumlah	431	111	708	1.170	1.241

Sumber data : Profil Kab.Seram Bagian Timur, Tahun 2009-2013.

9. Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil.

Pertumbuhan penduduk akan selalu dikaitkan dengan tingkat kelahiran, kematian dan perpindahan penduduk atau migrasi baik perpindahan ke luar



PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR

maupun dari luar. Pertumbuhan penduduk adalah peningkatan atau penurunan jumlah penduduk suatu daerah dari waktu ke waktu.

Pertumbuhan penduduk yang minus berarti jumlah penduduk yang ada pada suatu daerah mengalami penurunan yang bisa disebabkan oleh banyak hal. Pertumbuhan penduduk meningkat jika jumlah kelahiran dan perpindahan penduduk dari luar ke dalam lebih besar dari jumlah kematian dan perpindahan penduduk dari dalam keluar.

Perkembangan penyelenggaraan urusan kependudukan dan catatan sipil di Kabupaten Seram Bagian Timur sepanjang tahun 2009 sampai dengan tahun 2013, dapat disajikan sebagaimana data yang terdapat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.34
Perkembangan Akte Kelahiran, Pernikahan dan Kematian
Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2009-2013

No	Jenis Akte	Tahun				
		2009	2010	2011	2012	2013
1	Akte Kelahiran	215	3.031	1.356	752	792
2	Akte Pernikahan	476	468	440	1.096	623
3	Akte Kematian	76	217	17	32	22
	Jumlah	767	3.816	1.813	1.880	1.437

Sumber data : Profil Kab.Seram Bagian Timur, Tahun 2010-2014.

10. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Dalam rangka pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak diperlukan akses seluas-luasnya terhadap perempuan untuk berperan aktif di semua bidang kehidupan dalam rangka pemberdayaan untuk menuju kesetaraan gender. Untuk mengetahui peran aktif perempuan dapat diukur antara lain, yakni prosentase jumlah tenaga kerja dibawah umur dan partisipasi angkatan kerja perempuan.

Perkembangan penyelenggaraan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Kabupaten Seram Bagian Timur sepanjang tahun 2009 sampai dengan tahun 2013, dapat disajikan sebagaimana data yang terdapat pada tabel dibawah ini.



PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR

Tabel 2.35
Prosentase Jumlah Tenaga Kerja Dibawah Umum
dan Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan
Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2009-2013

No	Uraian	Tahun				
		2009	2010	2011	2012	2013
1	Prosentase jumlah tenaga kerja dibawah umum	19.701	20.657	21.112	17.223	16.202
2	Partisipasi angkatan kerja perempuan	17.354	108	-	11	27
	Jumlah	37.055	20.765	21.112	17.234	16.229

Sumber data : Profil Kab.Seram Bagian Timur, Tahun 2010-2014.

11. Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera.

Keberhasilan pencapaian target indikator penyelenggaraan urusan keluarga berencana dan keluarga sejahtera, dapat dilihat dari beberapa tolok ukur, diantaranya cakupan peserta KB aktif dan keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I.

Perkembangan penyelenggaraan cakupan peserta KB aktif di Kabupaten Seram Bagian Timur sepanjang tahun 2011 sampai dengan tahun 2013, dapat disajikan sebagaimana data yang terdapat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.36
cakupan peserta KB aktif
Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2011-2013

No	Tahun	Peserta KB				
		Plus	IUD	MOW	MOP	Kondom
1	2011	22.045	73	-	22	334
2	2012	19.418	111	41	8	1.173
3	2013	20.000	111	21	3	1.459
	Jumlah	61.463	295	62	33	2.966

Sumber data : Profil Kab.Seram Bagian Timur, Tahun 2012-2014.

Sedangkan Perkembangan penyelenggaraan keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I di Kabupaten Seram Bagian Timur sepanjang tahun 2009 sampai dengan tahun 2013, dapat disajikan sebagaimana data yang terdapat pada tabel dibawah ini.



PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR

Tabel 2.37
Perkembangan Keluarga Pra Sejahtera Dan Keluarga Sejahtera I
Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2009-2013

No	Tahun	Keluarga Pra Sejahtera		Keluarga Sejahtera I		Jumlah
		AEK	Bukan AEK	AEK	Bukan AEK	
1	2009	16.697	-	-	-	16.697
2	2010	13.789	-	8.271	-	22.060
3	2011	-	-	-	-	-
4	2012	10.367	-	7.720	-	18.087
5	2013	-	-	-	-	-

Sumber data : Profil Kab.Seram Bagian Timur, Tahun 2010-2014.

12. Urusan Sosial.

a. Panti Asuhan, Panti Jompo dan Panti Rehabilitasi.

Keberhasilan pencapaian target indikator panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi pada urusan sosial di Kabupaten Seram Bagian Timur kurun waktu tahun 2009 sampai dengan tahun 2013, dapat dilihat sebagaimana data yang tersaji pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.38
Jumlah Panti Asuhan, Panti Jompo dan Panti Rehabilitasi
Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2009 – 2013

No	Tahun	Jumlah Panti Asuhan (unit)	Panti Jompo (unit)	Panti Rehabilitasi (unit)
1	2009	9	-	2 Rumah singgah
2	2010	10	-	2 Rumah singgah
3	2011	10	-	2 Rumah singgah
4	2012	13	-	3 Rumah Singgah
5	2013	13	-	3 Rumah Singgah

Sumber Data : Profil Kab.Seram Bagian Timur, Tahun 2010-2014

b. PMKS yang Mendapatkan Bantuan Sosial.

Keberhasilan pencapaian target indikator Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang mendapatkan bantuan sosial di Kabupaten Seram Bagian Timur kurun waktu tahun 2009 sampai dengan tahun 2013, dapat dilihat sebagaimana data yang tersaji pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.39
Perkembangan PMKS Yang Mendapatkan Bantuan Sosial
Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2009 – 2013

No	Tahun	Jumlah PMKS (orang)	Mendapat Bantuan Sosial	
			Jumlah (orang)	Rasio (%)
1	2009	811	340	12,09
2	2010	1.110	330	15,64
3	2011	1.398	431	17,97
4	2012	1.418	507	29,32
5	2013	2.125	816	27,39

Sumber data : Profil Kab.Seram Bagian Timur, Tahun 2010-2014.



PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR

13. Urusan Ketenagakerjaan.

Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama dan sesudah masa kerja. Tenaga kerja (man power) adalah penduduk dalam usia kerja (dalam literatur 15-64 tahun). Tenaga kerja adalah jumlah seluruh penduduk dalam usia kerja dalam suatu negara yang dapat memproduksi barang dan jasa, jika ada permintaan terhadap tenaga mereka dan jika mereka mau berpartisipasi dalam aktifitas tersebut.

Keberhasilan target capaian indikator penyelenggaraan urusan ketenagakerjaan di Kabupaten Seram Bagian Timur selama kurun waktu tahun 2009 sampai dengan tahun 2013, dapat dilihat sebagaimana data yang terdapat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.40
Angka Partisipasi Angkatan Kerja
Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2009-2013

No	Uraian	Tahun				
		2009	2010	2011	2012	2013
1	Angka partisipasi angkatan kerja	33.872	37.362	43.751	36.977	34.556

Sumber data : Profil Kab.Seram Bagian Timur, Tahun 2010-2014.

Sedangkan pencapaia target indikator tingkat pengangguran terbuka dan tingkat partisipasi angkatan kerja di Kabupaten Seram Bagian Timur sepanjang tahun 2009 sampai dengan tahun 2013, dapat dilihat sebagaimana data yang terdapat dalam tabel dibawah ini.

Tabel 2.41
Angka Pengangguran Terbuka dan Tingkat
Partisipasi Angkatan Kerja
Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2009-2013

No	Uraian	Tahun (%)				
		2009	2010	2011	2012	2013
1	Angka pengangguran terbuka	8,54	6,89	5,44	9,31	11,60
2	Tingkat partisipasi angkatan kerja	65,67	66,19	72,37	61,33	59,89

Sumber data : Profil Kab.Seram Bagian Timur, Tahun 2010-2014.

14. Urusan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah.

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip



PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR

koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas azas kekeluargaan.

Perkembangan jenis berdasarkan jenisnya di Kabupaten Seram Bagian Timur sepanjang tahun 2011 sampai dengan tahun 2013, dapat dilihat sebagaimana data yang terdapat dalam tabel dibawah ini.

Tabel 2.42
Perkembangan Koperasi Berdasarkan Jenisnya
Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2011-2013

No	Jenis Koperasi	Tahun		
		2011	2012	2013
1	KUD	15	21	21
2	KSU	-	80	83
3	KPN	5	6	6
4	KOPPERIK	-	5	6
5	KOPPAS	-	2	2
6	KOPWAN	2	2	2
7	KOPBUN I	-	2	3
8	Lainnya	60	26	27
	Jumlah	82	144	150

Sumber data : Profil Kab.Seram Bagian Timur, Tahun 2012-2014.

15. Urusan Kebudayaan

Pembangunan bidang urusan kebudayaan sangat terkait erat dengan kualitas hidup manusia dan masyarakat. Hal ini sesuai dengan 2 (dua) sasaran pencapaian pembangunan bidang sosial budaya dan keagamaan yaitu : (i) mewujudkan masyarakat Indonesia yang berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya dan beradab; dan (ii) mewujudkan bangsa yang berdaya saing untuk pencapaian masyarakat yang lebih makmur dan sejahtera.

Indikator keberhasilan pelaksanaan urusan kebudayaan dapat diukur dengan beberapa indikator, diantaranya pengelolaan benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan. Data tentang perkembangan pengelolaan benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan oleh Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur sepanjang tahun 2013, dapat dilihat sebagaimana yang terdapat dalam tabel dibawah ini.



Tabel 2.43
Benda, Situs Dan Kawasan Cagar Budaya
Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2009-2013

No	Nama Situs/ Bangunan Bersejarah	Lokasi Situs Bangunan Bersejarah		Pengelola
		Desa	Kecamatan	
1	Monumen Tulabeal Gorun Riun	Kataloka	P. Gorom	Pemerintah Daerah
2	Makam Pahlawan Mayor Abdullah	Geser	Seram Timur	Pemerintah Daerah
3	Masjid Tua Giro Gaja	kataloka	P. Gorom	Pemerintah Daerah
4	Kapal Tua Bakoka	Bati Kilwouw	Tutuk Tolu	Pemerintah Daerah
5	Masjid Tua Kilbaren	waru	Waru	Pemerintah Daerah

Sumber data : Profil Kab.Seram Bagian Timur, Tahun 2010-2014.

16. Urusan Kepemudaan dan Olahraga.

Organisasi pemuda adalah sekelompok pemuda yang bekerjasama dengan suatu perencanaan kerja dan peraturan, untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Jumlah organisasi pemuda dihitung dari jumlah organisasi pemuda yang aktif sampai dengan tahun pengukuran. Indikator keberhasilan pelaksanaan urusan kepemudaan dan olahraga dapat diukur melalui indikator (i) jumlah organisasi pemuda; (ii) jumlah organisasi olahraga; (iii) jumlah kegiatan kepemudaan; (iv) jumlah kegiatan olahraga; (v) jumlah gelanggang/balai remaja milik pemda; dan (vi) jumlah lapangan olahraga.

Keberhasilan pencapaian target urusan kepemudaan dan olahraga di Kabupaten Seram Bagian Timur sepanjang tahun 2009 sampai dengan tahun 2013, dapat dilihat sebagaimana data yang terdapat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.44
Pertumbuhan Urusan Kepemudaan dan Olah Raga
Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2009 – 2013

No	Uraian	Tahun				
		2009	2010	2011	2012	2013
1	Jumlah Organisasi Pemuda	7	7	7	6	6
2	Jumlah Organisasi Olahraga	12	12	14	15	15
3	Jumlah kegiatan Kepemudaan	5	5	6	6	6
4	Jumlah Kegiatan Olahraga	5	5	5	6	6
5.	Jumlah Gelanggang/balai remaja milik pemda.	3	3	4	2	4
6.	Jumlah lapangan olahraga	28	28	26	25	25

Sumber data : Profil Kab.Seram Bagian Timur, Tahun 2010-2014.



17. Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri.

Indikator keberhasilan penyelenggaraan urusan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri dapat diukur dengan indikator (i) kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP; dan (ii) kegiatan pembinaan politik daerah.

Penyelenggaraan urusan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri di Kabupaten Seram Bagian Timur sepanjang tahun 2009-2013, dapat dilihat sebagaimana data yang terdapat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.45
Perkembangan Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2009 – 2013

No	Uraian	Tahun				
		2009	2010	2011	2012	2013
1	Jumlah Kegiatan Pembinaan Terhadap LSM, Ormas dan OKP	3	5	8	9	9
2	Jumlah Kegiatan Pembinaan Politik Daerah	-	2	2	2	3

Sumber data : Profil Kab.Seram Bagian Timur, Tahun 2010-2014.

18. Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian.

Beberapa indikator keberhasilan pencapaian target penyelenggaraan urusan otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian, dapat diukur dengan indikator antara lain meliputi :

- a. Rasio jumlah polisi pamong praja per 1.000 penduduk, rasio pos siskamling per jumlah desa dan jumlah linmas per 10.000 penduduk, dapat dilihat sebagaimana data yang disajikan pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.46
Rasio Jumlah Pol PP Per 10.000 penduduk Rasio Pos Siskamling
Per Jumlah Desa dan Jumlah Linmas Per 10.000 Penduduk
Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2009 – 2013

No	Thn	Polisi PP			Pos Kamling			Linmas		
		Jml petugas	Jml Pnddk	Rasio	Jml Pos	Jml Kel.	Rasio	Jml	Jml Pnddk	Rasio
1	2009	182	86.709	0,21	-	-	-	256	86.709	0,30
2	2010	197	99.065	0,20	-	-	-	274	99.065	0,28
3	2011	207	101.436	0,21	-	-	-	299	101.436	0,29
4	2012	232	103.196	0,23	-	-	-	313	103.196	0,30
5	2013	232	104.902	0,22	-	-	-	334	104.902	0,32

Sumber data : Profil Kab.Seram Bagian Timur, Tahun 2010-2014.



PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR

- b. Sedangkan pencapaian target indikator sistem informasi pelayanan perijinan dan administrasi pemerintah, penegakan perda, cakupan patroli petugas satpol PP, tingkat penyelesaian pelanggaran k-3, jumlah petugas linmas, cakupan sarana dan prasarana perkantoran pemerintahan yang baik, sistem informasi manajemen pemda dan indeks kepuasan layanan masyarakat pada urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian, di Kabupaten Seram Bagian Timur kurun waktu tahun 2009 sampai dengan tahun 2013, dapat dilihat sebagaimana data yang disajikan pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.47
Bidang Urusan Otda, Pem Um, Adm Keuda, Perangkat Daerah,
Kepegawaian dan Persandian Kabupaten Seram Bagian Timur
Tahun 2009 – 2013

No	Uraian	Tahun				
		2009	2010	2011	2012	2013
1	Sistem Informasi Pelayanan Perijinan dan Administrasi Pemerintah	ada	ada	ada	ada	ada
2	Penegakan Perda	74	97	97	121	146
3	Jumlah Petugas Satpol PP	182	182	182	182	182
4	Penyelesaian Pelanggaran K-3	33	32	35	25	37
5.	Jumlah Petugas Linmas.	256	256	256	256	256
6.	Cakupan Sarana dan Prasarana Perkantoran Pemerintahan Yang Baik.	99,08	100	100	93,27	98,18
7.	Sistem Informasi Manajemen Pemda	62	63	63	67	67
8.	Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat	-	66,11	72,12	72,85	74,51

Sumber data : Profil Kab.Seram Bagian Timur, Tahun 2010-2014.

19. Urusan Ketahanan Pangan.

Ketahanan pangan merupakan bagian terpenting dari pemenuhan hak atas pangan sekaligus menjadi pilar utama hak azasi manusia. Selain itu, ketahanan pangan merupakan bagian sangat penting dari ketahanan nasional. Ketahanan pangan tidak hanya mencakup pengertian ketersediaan pangan yang cukup, tetapi juga mampu mengakses (termasuk membeli) pangan dan tidak terjadi ketergantungan kepada pihak manapun.



PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR

Petani memiliki kedudukan strategis dalam ketahanan pangan, karena petani adalah produsen pangan sekaligus sebagai kelompok konsumen yang terbesar. Pertanian sangat erat kaitannya dengan ketahanan pangan, karena pangan merupakan kebutuhan yang bersifat mendasar bagi setiap manusia. Setiap negara atau daerah selalu termotivasi untuk memiliki stok bahan pangan pokok dalam jumlah relatif aman untuk kebutuhan rakyatnya dalam jangka waktu tertentu.

Indikator keberhasilan pelaksanaan urusan ketahanan pangan, dapat diukur melalui beberapa indikator antara lain (i) regulasi ketahanan pangan; dan (ii) ketersediaan pangan utama, sebagaimana data yang tersaji pada tabel dibawah ini.

Tabel 2. 48
Indikator Urusan Ketahanan Pangan
Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2009 – 2013

No	Uraian	Tahun (%)				
		2009	2010	2011	2012	2013
1	Regulasi Ketahanan Pangan	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2	Ketersediaan Pangan Utama (Ton)	-	2.324	2.800	6.768	8.550

Sumber data : Profil Kab.Seram Bagian Timur, Tahun 2010-2014.

20. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Salah satu lembaga pelayanan masyarakat yang terdekat dengan masyarakat adalah Posyandu. Keaktifan pelayanan yang dilaksanakan oleh Posyandu akan memberikan tingkat kepuasan terhadap layanan pemerintah secara umum. Sebagai langkah nyata Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur dalam meningkatkan kapasitas para kader pemberdayaan masyarakat, dilakukan melalui berbagai program dan kegiatan yang dilakukan untuk melatih dan mengasah serta menguatkan wawasan dan kemampuan untuk menjadi kader pemberdayaan masyarakat.

Indikator keberhasilan pelaksanaan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa di Kabupaten Seram Bagian Timur sepanjang tahun 2009 sampai dengan tahun 2013, dapat dilihat sebagaimana data yang terdapat pada tabel dibawah ini.



PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR

Tabel 2.49
Perkembangan Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2009 – 2013

No	Uraian	Tahun				
		2009	2010	2011	2012	2013
1	Rata-rata Jumlah Kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)	30	30	30	35	35
2	Rata-rata Jumlah Kelompok Binaan PKK	375	375	400	400	430
3	Jumlah PKK Aktif	35	35	35	45	45
4	Jumlah Posyandu Aktif	162	162	163	163	191
5	Swadaya Masyarakat Terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat	-	-	-	-	-

Sumber data : Profil Kab.Seram Bagian Timur, Tahun 2010-2014.

21. Urusan Statistik.

Urusan statistik daerah, mempunyai tugas dan fungsi pengolahan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah. Hasil pengolahan data dan informasi, selanjutnya dijadikan sebagai dasar dalam penyusunan rencana kerja pemerintah daerah, yang mencakup data dan informasi gambaran umum kondisi daerah, data kondisi geografis dan demografis daerah, serta data terkait dengan indikator kinerja kunci penyelenggaraan pemerintahan daerah yang meliputi aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing daerah.

Indikator keberhasilan pelaksanaan urusan statistik, dapat diukur melalui indikator (i) tersedianya buku " Kabupaten Seram Bagian Timur Dalam Angka"; dan (ii) tersedianya buku "PDRB Kabupaten Seram Bagian Timur", sebagaimana data yang tersaji pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.50
Perkembangan Penyelenggaraan Urusan Statistik
Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2009-2013

No	Uraian	Tahun				
		2009	2010	2011	2012	2013
1	Buku " Kab Dalam Angka"	100	100	150	150	150
2	Buku "PDRB Kab"	100	100	150	150	150

Sumber data : Profil Kab.Seram Bagian Timur, Tahun 2010-2014.



PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR

22. Urusan Kearsipan.

Indikator keberhasilan pelaksanaan bidang urusan kearsipan, dapat diukur melalui indikator (i) pengelolaan arsip secara terpadu; dan (ii) peningkatan sumber daya manusia pengelola kearsipan, sebagaimana data yang terdapat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.51
Urusan Kearsipan Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur
Tahun 2009 – 2013

No	Uraian	Tahun				
		2009	2010	2011	2012	2013
1	Pengelolaan Arsip Secara Terpadu	15	15	18	18	20
2	Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan	15	15	14	24	20

Sumber data : Profil Kab.Seram Bagian Timur, Tahun 2010-2014.

23. Urusan Komunikasi dan Informatika.

a. Jumlah Jaringan Komunikasi.

Jumlah jaringan komunikasi adalah banyaknya jaringan komunikasi baik telepon genggam maupun stasioner. Jaringan komunikasi dihitung dari banyaknya jaringan komunikasi yang berada dalam wilayah suatu pemerintah daerah.

Sebuah operator jasa telekomunikasi dapat memiliki satu (1) jaringan dan sebaliknya, beberapa operator dapat menggunakan hanya satu (1) jaringan telekomunikasi di wilayah pemerintah daerah.

b. Jumlah wartel/warnet

Jumlah wartel/warnet, adalah ketersediaan wartel/warnet adalah jumlah wartel/warnet per 1.000 penduduk. Wartel (warung telekomunikasi), yaitu tempat usaha komersial yang dimiliki oleh perorangan atau badan hukum yang memberikan jasa sambungan telekomunikasi kepada masyarakat dan akan menerima pembayaran dari konsumen secara langsung setelah jasa diberikan.

Sedangkan warnet (warung internet), yaitu tempat usaha komersial yang dimiliki oleh perorangan atau badan hukum yang memberikan jasa sambungan internet kepada masyarakat dan akan



PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR

menerima pembayaran dari konsumen secara langsung setelah jasa diberikan. Terkait dengan hal tersebut, maka jaringan stasiun telepon seluler yang telah beroperasi telah ada di 4 kecamatan, yaitu Kecamatan Bula, Kecamatan Werinama, Kecamatan Seram Timur dan Kecamatan Pulau Gorom.

Sementara itu, untuk pelayanan kantor pos dan giro telah ada sebanyak 3 unit. Namun yang dapat beroperasi secara penuh baru 2 kantor, yaitu Kantor Pos di Kecamatan Bula dan Kantor Pos di kecamatan Seram Timur.

Indikator keberhasilan pelaksanaan bidang urusan komunikasi dan informatika, dapat diukur melalui indikator (i) jumlah jaringan komunikasi; (ii) jumlah warnet/wartel; (iii) jumlah web site milik pemda; dan (iv) pameran/expo per tahun, dapat dilihat sebagaimana data yang tersaji pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.52
perkembangan Urusan Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2009 – 2012

No	Uraian	Tahun				
		2009	2010	2011	2012	2013
1	Jumlah Jaringan Komunikasi	15	18	24	28	29
2	Jumlah Warnet/Wartel	35	43	50	65	
3	Jumlah Web Site Milik Pemda	1	2	12	12	13
4	Pameran/Expo Per tahun	1	1	1	1	1

Sumber data : Profil Kab.Seram Bagian Timur, Tahun 2010-2013.

Semakin banyak jumlah jaringan komunikasi, maka menggambarkan semakin besar ketersediaan fasilitas jaringan komunikasi sebagai pelayanan penunjang dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah. Sementara itu, Semakin besar jumlah wartel/warnet per 1000 penduduk akan menggambarkan semakin besar ketersediaan fasilitas jaringan internet dan fasilitas jaringan komunikasi data sebagai pelayanan penunjang dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah.

24. Urusan Perpustakaan.

Urusan perpustakaan, merupakan suatu wadah atau tempat yang di dalamnya terdapat bahan pustaka untuk masyarakat yang disusun menurut



PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR

sistem tertentu dengan tujuan untuk meningkatkan mutu kehidupan masyarakat serta sebagai penunjang kelangsungan pendidikan. Indikator keberhasilan penyelenggaraan urusan perpustakaan, dapat diukur antara lain dengan pencapaian target indikator (i) jumlah perpustakaan; (ii) jumlah koleksi buku perpustakaan; dan (iii) jumlah pengunjung perpustakaan.

Keberhasilan penyelenggaraan urusan perpustakaan di Kabupaten Seram Bagian Timur sepanjang tahun 2009 sampai dengan tahun 2013, dapat dilihat sebagaimana data yang terdapat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.53
Perkembangan Urusan Perpustakaan Daerah
Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2009 – 2013

No	Uraian Data	Tahun				
		2009	2010	2011	2012	2013
1	Jumlah Perpustakaan	21	21	21	21	21
2	Jumlah Koleksi Buku Perpustakaan	5.219	5.600	5.650	6.055	6.455
3	Jumlah Pengunjung Perpustakaan	6.800	7.070	7.400	7.20	7.700

Sumber data : Profil Kab.Seram Bagian Timur, Tahun 2010-2014.

2.3.2. Urusan Pilihan.

1. Urusan Pertanian.

Jumlah luas lahan potensial pertanian di Kabupaten Seram Bagian Timur 131.364 ha, terdiri dari (i) lahan tanaman pangan hortikultura seluas 27.096 ha atau 20,62%. Namun hingga saat ini yang baru dapat dikerlola seluas 9.500 ha atau 35,06%, dengan jenis komoditas tanaman berupa : padi, palawija, jagung, kacang tanah, sayur mayur dan buah-buahan; (ii) lahan untuk perkebunan seluas 99.212 ha 75,51%. Namun hingga saat ini yang baru dikelola seluas 34,013 ha, dengan jenis tanaman berupa : kelapa, cengkeh, coklat, kopi dan jambu mete.

Sedangkan untuk usaha peternakan, umumnya merupakan peternakan rakyat yang masih tradisional. Sampai dengan akhir tahun 2012 capaian kinerja bidang peternakan yang dilakukan oleh kelompok peternak tradisional telah mencapai 2.134 ekor sapi, 2.616 ekor kambing dan 5.418 ekor unggas.



PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR

Capaian kinerja urusan pertanian di Kabupaten Seram Bagian Timur sepanjang kurun waktu tahun 2009 sampai dengan akhir tahun 2013, dapat dilihat sebagaimana data yang tersaji pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.54
Produksi Padi dan Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya,
Serta Kontribusinya Terhadap PDRB
Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2009 - 2013.

No.	Uraian	Tahun				
		2009	2010	2011	2012	2013
1	Padi sawah (ton)	-	2.324	2.800	6.768	8.550
2	Padi ladang (ton)	-	-	200	770	1.627
3	Jagung (ton)	556	233	436	630	1.068
4	Ubi kayu (ton)	482	475	3.270	3.760	2.832
5	Ubi jalar (ton)	60	445	2.160	1.928	3.880
6	Kacang tanah (ton)	22	50	147	326	556
7	Kacang hijau (ton)	4	3	22	117	3
8	Kedelai (ton)	24	0,63	436	43	26
9	Daging (kg)	-	-	10.168	37.539	-
10	Ikan laut (ton)	-	8.050	6.402	7.452	70.326
11	Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB	45,75	45,35	43,98	42,35	41,42

Sumber data : Profil Kab.Seram Bagian Timur, Tahun 2010-2014.

Dari data yang terdapat pada tabel 2.54 diatas, diketahui produksi daging meningkat pesat pada tahun 2012 dibandingkan dengan produksi pada tahun-tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan, karena sejak tahun 2012 dasar perhitungan produksi daging adalah berdasarkan jumlah pemotongan yang tahun – tahun sebelumnya masih didasarkan pada populasi ternak.

Sementara itu, terhadap perkembangan data kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB dapat dijelaskan, bahwa walaupun besaran kontribusinya terhadap PDRB dalam 5 (lima) tahun terakhir mengalami penurunan, namun sektor pertanian masih tetap sebagai penyumbang terbesar dan menjadi andalan dalam mendorong perwujudnya pertumbuhan perekonomian di Kabupaten Seram Bagian Timur, dengan kontribusi terbesar dibandingkan sektor lainnya, yaitu sebesar 45,75 % dari total PDRB tahun 2009, sebesar



PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR

45,35 % dari total PDRB tahun 2010, sebesar 43,98 % dari total PDRB tahun 2011, sebesar 42,35 dari total PDRB tahun 2012 dan sebesar 41,42 dari total PDRB tahun 2013.

2. Urusan Kehutanan.

Hutan merupakan sumber daya alam yang memiliki multifungsi bagi kehidupan manusia. Salah satu fungsi hutan sebagai penyangga air dan udara bagi ekosistem dipersyaratkan minimal 30% dari total hamparan darat. Hal ini telah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.

Luas kawasan hutan di Kabupaten Seram Bagian Timur sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 871/Menhut-II/2013 tanggal 6 Desember 2013 per fungsi adalah seluas 512.646 ha, dengan rincian sebagai berikut (i) hutan konservasi seluas 1.217 ha atau 0,26%; (ii) hutan lindung seluas 107.880 ha atau 17,19%; (iii) hutan produksi terbatas seluas 260.525 ha atau 29,14%; (iv) hutan produksi seluas 24.757 ha atau 3,86%; dan (v) hutan produksi konversi seluas 118.269 ha atau 8,91%.

Selanjutnya keberhasilan pencapaian target indikator urusan kehutanan yang meliputi (i) rehabilitasi hutan dan lahan kritis; (ii) kerusakan kawasan hutan; dan (iii) kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB, pada urusan kehutanan di Kabupaten Seram Bagian Timur sepanjang tahun 2009 sampai dengan tahun 2013, dapat dilihat sebagaimana data yang tersaji pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.55
Perkembangan Urusan Kehutanan
Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2009 – 2013

No.	Uraian	Tahun (Ha)				
		2009	2010	2011	2012	2013
1	Rehabilitasi hutan dan lahan kritis	306	348	412	451	610
2	Kerusakan Kawasan Hutan	210	210	268	230	230
3	Kontribusi Sektor Kehutanan Terhadap PDRB	-	-	-	-	-

Sumber data : Profil Kab.Seram Bagian Timur, Tahun 2010-2014.



PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR

3. Urusan Energi dan Sumberdaya Mineral.

Jenis pertambangan yang ada di Kabupaten Seram Bagian Timur terdiri dari pertambangan umum dan pertambangan migas. Potensi pertambangan umum meliputi : batu bara, emas, tembaga, nikel, krom, kobalt, besi , magnesium, mangan dan zirconium. Sedangkan jenis pertambangan migas terdiri dari : minyak bumi dan nafta. Selain jenis pertambangan dimaksud, masih terdapat potensi pertambangan bahan galian C, dengan total produksi sampai akhir tahun 2013 sebanyak 237.723,399 M³.

Keberhasilan pencapaian target indikator (i) pertambangan tanpa ijin; dan (ii) kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB, pada urusan energi dan sumberdaya mineral di Kabupaten Seram Bagian Timur kurun waktu tahun 2009 sampai dengan tahun 2013, dapat dilihat sebagaimana data yang tersaji pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.56
Perkembangan Urusan Kehutanan
Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2009 – 2013

No.	Uraian	Tahun (Ha)				
		2009	2010	2011	2012	2013
1	Pertambangan tanpa ijin	-	-	-	-	-
2	Kontribusi sektor energi dan sumber daya mineral terhadap PDRB	9,24	8,34	6,50	6,93	4,72

Sumber data : Profil Kab.Seram Bagian Timur, Tahun 2010-2014.

4. Urusan Pariwisata.

Jumlah obyek wisata di Kabupaten Seram Bagian Timur pada tahun 2013 sebanyak 35 lokasi yang tersebar pada 13 kecamatan, dengan rincian di Kecamatan Seram Timur ada 4 lokasi, Kecamatan Werinama ada 6 lokasi, Kecamatan Bula ada 3 lokasi, Kecamatan Pulau Gorom ada 6 lokasi, Kecamatan Tutuk Tolu ada 2 lokasi, Kecamatan Siwalalat ada 4 lokasi, Kecamatan Kilmury ada 2 lokasi, Kecamatan Pulau Panjang ada 1 lokasi dan Kecamatan Wakate ada 2 lokasi.

Keberhasilan pencapaian target indikator (i) kunjungan wisata; (ii) perkembangan pengunjung obyek wisata; dan (iii) kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB, pada urusan pariwisata di Kabupaten Seram



PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR

Bagian Timur kurun waktu tahun 2009 sampai dengan tahun 2013, dapat dilihat sebagaimana data yang tersaji pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.57
Pertumbuhan Urusan Pariwisata
Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2009 – 2013.

No	Uraian	Tahun/orang				
		2009	2010	2011	2012	2013
1	Jumlah Kunjungan Wisata	3.400	2.600	2.464	4.476	3.371
2	Perkembangan Pengunjung Obyek Wisata : a. Pantai Englas; b. Pantai Gumumae.	750	200	50	2.325	2.214
		2.650	2.400	2.414	2.151	1.157
3	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	6,02	6,33	6,86	7,12	7,17

Sumber data : Profil Kab.Seram Bagian Timur, Tahun 2010-2014.

5. Urusan Kelautan dan Perikanan.

Potensi unggulan di sektor perikanan di Kabupaten Seram Bagian Timur terdiri dari ikan permukaan (pelagis) dan ikan dasar (demershal) yang diperkirakan berjumlah 128.692,2 ton/tahun. Namun hingga saat ini yang baru dapat dikelola sebanyak 9.340,6 ton atau 7,79% dengan nilai produksi sebesar Rp.13.561.250.000,00. Disamping potensi ikan permukaan, masih ada beberapa potensi unggulan dengan nilai ekonomis tinggi yang sampai saat ini juga belum dapat dikelola secara maksimal, seperti : teripang, lola, cumi-cumi, kepiting dan udang.

Capaian kinerja urusan perikanan sepanjang tahun 2008 sampai dengan tahun 2012 di Kabupaten Seram Bagian Timur dapat dilihat dapat dilihat sebagaimana data yang tersaji pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.58
Jumlah Produksi Perikanan Kabupaten Seram Bagian Timur
Tahun 2008 - 2012

No	Produksi	Tahun (Ton)				
		2008	2009	2010	2011	2012
1	Ikan laut	10.209	13.652	20.329	21.330	24.530
2	Ikan darat	-	-	-	-	-
	jumlah	10.209	13.652	20.329	21.330	24.530

3Sumber data : Profil Kab.Seram Bagian Timur, Tahun 2009-2013.



PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR

Sementara itu, keberhasilan pencapaian target indikator pendapatan perkapita nelayan, pada urusan kelautan dan perikanan di Kabupaten Seram Bagian Timur kurun waktu tahun 2008 sampai dengan tahun 2012, dapat dilihat sebagaimana data yang tersaji pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.59
Pendapatan Perkapita Nelayan
Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2008-2012

No	Tahun	Pendapatan Perkapita Rata-rata		
		Per Tahun (Rp.)	Per Bulan (Rp.)	Per Hari (Rp.)
1	2008	13.386.017	1.115.500	44.619
2	2009	12.486.017	917.636	36.705
3	2010	184.494.332	15.374.527	512.484
4	2011	194.176.706	25.545.911	1.123.532
5	2012	200.002.000	26.312.287	1.157.229

Sumber data : Profil Kab.Seram Bagian Timur, Tahun 2009-2013.

Sedangkan keberhasilan pencapaian target indikator produksi dan nilai produksi ikan laut hasil olahan dan awetan menurut jenis olahan, pada urusan kelautan dan perikanan di Kabupaten Seram Bagian Timur kurun waktu tahun 2010 sampai dengan tahun 2012, dapat dilihat sebagaimana data yang tersaji pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.60
Produksi dan Nilai Produksi Ikan Laut Hasil Olahan dan Awetan
Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2010-2012

No	Tahun	Olahan Kering		Olahan Asap	
		Volume (Ton)	Nilai (Rp.)	Volume (Ton)	Nilai (Rp.)
1	2010	673	16.325.000	508	19.500.000
2	2011	1.522	50.508.000	1.105	76.280.000
3	2012	1.628	54.007.560	1.105	38.140.000

Sumber data : Profil Kab.Seram Bagian Timur, Tahun 2011-2013.

6. Urusan Perdagangan.

Keberhasilan pencapaian target indikator (i) jumlah perusahaan menurut bentuk badan hukum; (ii) perkembangan penerbitan SIUP; (iii) perkembangan penerbitan TDP menurut bentuk perusahaan; (iv) jumlah sarana perdagangan menurut jenis; dan (v) jumlah pedagang menurut skalanya, pada urusan perdagangan di Kabupaten Seram Bagian Timur kurun waktu tahun 2009 sampai dengan tahun 2013, dapat dilihat sebagaimana data yang tersaji pada tabel dibawah ini.



PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR

Tabel 2.61
Perkembangan Indikator Urusan Perdagangan
Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2009 – 2013

No	Uraian	Tahun/ton/kelompok/Rp.000.				
		2009	2010	2011	2012	2013
1	Jumlah perusahaan menurut bentuk badan hukum :					
	a. PT ;	4	6	16	14	15
	b. CV/Firma;	23	15	14	16	16
	c. Koperasi;	5	2	5	10	21
	d. Perorangan;	31	4	19	43	79
e. lainnya	-	-	-	-	-	
2	Perkembangan penerbitan SIUP :					
	a. Perusahaan besar;	4	6	17	8	1
	b. Perusahaan menengah;	23	17	21	20	-
c. Perusahaan kecil	42	12	26	82	39	
3	Perkembangan penerbitan TDP menurut bentuk perusahaan :					
	a. PT;	4	7	17	8	1
	b. Koperasi;	5	2	3	7	11
	c. CV;	23	17	21	20	-
	d. Firma;	-	-	-	-	-
	e. P.O;	35	7	33	82	39
f. lainnya	2	3	-	-	-	
4	Jumlah sarana perdagangan menurut jenis:					
	a. Pasar umum;	-	-	1	1	1
	b. Pasar desa;	5	5	5	5	5
	c. Toko;	-	-	-	77	90
	d. Kios;	-	-	-	383	849
	e. Warung;	-	-	-	19	20
f. Rumah makan/restoran	-	-	-	48	49	
5	Jumlah pedagang menurut skalanya :					
	a. Pedagang kecil;	-	-	-	833	870
	b. Pedagang menengah;	-	-	-	71	72
c. Pedagang besar.	-	-	-	-	1	
6	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	23,76	25,21	26,00	27,80	28,79

Sumber data : Profil Kab.Seram Bagian Timur, Tahun 2010-2014.

7. Urusan Perindustrian.

Kemajuan sektor industri merupakan salah satu indikator kemajuan suatu daerah. Oleh karena itu, industrialisasi merupakan salah satu perhatian pemerintah yang utama. Sektor industri di Kabupaten Seram Bagian Timur mengalami kemajuan yang signifikan sejak awal terbentuknya Kabupaten Seram Bagian Timur. Sampai dengan akhir tahun 2012 sesuai data yang telah



PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR

dipublikasikan oleh Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan, terdapat 45 (empat puluh lima) perusahaan yang bergerak dibidang usaha makanan dan minuman, serta 3 (tiga) perusahaan yang bergerak dibidang pakaian jadi. Total tenaga kerja yang terserap dibidang perindustrian sebanyak 223 tenaga kerja.

Keberhasilan pencapaian target indikator (i) industri makanan; (ii) industri minuman; (iii) industri pakaian jadi; (iv) industri penerbitan dan percetakan; dan (v) kontribusi sektor perindustrian terhadap PDRB, pada urusan perindustrian di Kabupaten Seram Bagian Timur kurun waktu tahun 2010 sampai dengan tahun 2013, dapat dilihat sebagaimana data yang tersaji pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.62
Perkembangan Indikator Urusan Perindustrian
Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2010 - 2013

No	Tahun	Jenis Industri				Kontribusi terhadap PDRB
		Makanan	Minuman	Pakian Jadi	Penerbitan & Percetakan	
1	2010	-	-	-	-	6,99
2	2011	-	-	-	-	6,99
3	2012	20	25	3	-	6,91
4	2013	20	25	3	-	6,83

Sumber data : Profil Kab.Seram Bagian Timur, Tahun 2011-2014.

2.4. Aspek Daya Saing Daerah.

Daya saing daerah merupakan salah satu aspek tujuan penyelenggaraan otonomi daerah sesuai dengan potensi, kekhasan, dan unggulan daerah. Suatu daya saing (competitiveness) merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan pembangunan ekonomi yang berhubungan dengan tujuan pembangunan daerah dalam mencapai tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan. Pencapaian kinerja aspek daya saing daerah, dapat diukur melalui indikator kinerja antara lain

2.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah.

Kemampuan ekonomi daerah dalam kaitannya dengan daya saing daerah, adalah kapasitas ekonomi daerah harus memiliki daya tarik (attractiveness) bagi pelaku ekonomi yang telah berada dan akan masuk ke suatu daerah untuk menciptakan multiflier effect bagi peningkatan daya saing daerah.



PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR

Keberhasilan terhadap peningkatan kemampuan ekonomi daerah, dapat diukur dengan beberapa indikator, antara lain :

1. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian.
a. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita.

Indikator otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian, terdiri dari pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita dan pengeluaran konsumsi non pangan perkapita. Untuk mengetahui tingkat konsumsi rumah tangga perkapita, yang menjelaskan seberapa atraktif tingkat pengeluaran rumah tangga. Semakin besar rasio atau angka konsumsi RT semakin atraktif bagi peningkatan kemampuan ekonomi daerah.

Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita dapat diketahui dengan menghitung angka konsumsi RT per kapita. Angka ini dihitung berdasarkan pengeluaran penduduk untuk makanan dan bukan makanan per jumlah penduduk. Makanan mencakup seluruh jenis makanan termasuk makanan jadi, minuman, tembakau, dan sirih. Sedangkan bukan makanan mencakup perumahan, sandang, biaya kesehatan dan sekolah.

Total pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita untuk kelompok barang jenis pangan di Kabupaten Seram Bagian Timur dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir, dapat dilihat sebagaimana data yang tersaji pada tabel dibawah ini.



PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR

Tabel 2.63
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita
Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2012-2014

No	Kelompok Barang	Rata-Rata Pengeluaran per kapita/bulan/Rp.000.		
		2012	2013	2014
1	Padi-padian	46.049	53.826	56.700
2	Umbi-umbian	21.550	23.900	32.800
3	Ikan	47.792	42.332	54.300
4	Daing	35.520	50.231	44.300
5	Telur dan Susu	21.361	23.111	24.100
6	Sayur-sayuran	34.120	33.018	42.800
7	Kacang-kacangan	16.637	13.016	14.200
8	Buah-buahan	24.851	22.025	30.000
9	Minyak dan Lemak	16.516	15.479	13.900
10	Bahan Minuman	21.896	22.805	22.800
11	Bumbu-bumbuan	11.919	8.840	10.300
12	Konsumsi lainnya	10.042	10.312	12.000
13	Makanan dan Minuman jadi	66.247	50.542	33.600
14	Tembakau, sirih	48.501	49.411	52.600
	Jumlah	423.000	418.847	443.400
	Jumlah Rata-rata pengeluaran (Rp)	30214	299217	31671

Sumber data : Survei Sosek Nasional, BPS Kab. Seram Bagian Timur, Tahun 2013-2015.

b. Pengeluaran Konsumsi Non Pangan Perkapita.

Pengeluaran konsumsi non pangan perkapita (prosentase konsumsi rumah tangga untuk non pangan perkapita) dibuat untuk mengetahui pola konsumsi rumah tangga di luar pangan. Pengeluaran konsumsi non pangan per kapita dapat dicari dengan menghitung persentase konsumsi RT untuk non pangan, yaitu proporsi total pengeluaran rumah tangga untuk non pangan terhadap total pengeluaran. Total pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita untuk kelompok barang jenis non pangan di Kabupaten Seram Bagian Timur dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir, dapat dilihat sebagaimana data yang tersaji pada tabel dibawah ini.



PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR

Tabel 2.64
Pertumbuhan Pengeluaran Konsumsi Non Pangan Per Kapita
Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2012-2014

No	Kelompok Barang	Rata-Rata Pengeluaran per kapita/bulan		
		2012	2013	2014
1.	Perumahan, Bahan Bakar, Penerangan, Air	137.662	105.081	133.000
2.	Aneka Barang dan Jasa	96.891	58.436	68.100
3.	Pakaian, Alas kaki, Tutup kepala	32.756	26.771	24.100
4.	Barang Yang Tahan Lama	30.476	29.914	60.300
5.	Pajak dan Asuransi	11.476	2.026	4.175
6.	Keperluan Pesta	38.776	22.512	88.400
	Jumlah	348.037	244.739	378.075

Sumber data : Survei Sosek Nasional, BPS Kab. Seram Bagian Timur, Tahun 2013-2015.

2. Pertanian.

Untuk mengetahui capaian target sektor pertanian terkait dengan fokus kemampuan ekonomi daerah, maka tolok ukur yang dapat dijadikan acuan terhadap capaian dimaksud adalah tingkat kesejahteraan masyarakat petani pada umumnya. Tingkat kesejahteraan dimaksud dapat dihitung dengan menganalisis data dan informasi tentang Nilai Tukar Petani (NTP) yang didapat oleh setiap petani.

Terkait dengan hal tersebut diatas, kesejahteraan petani dengan mengukur kemampuan tukar produk (komoditas) yang dihasilkan/dijual petani dibandingkan dengan produk yang dibutuhkan petani baik untuk proses produksi (usaha) maupun untuk konsumsi rumah tangga. Jika NTP lebih besar dari 100 maka periode tersebut relatif lebih baik dibandingkan dengan periode tahun dasar, sebaliknya jika NTP lebih kecil dari 100 berarti terjadi penurunan daya beli petani.

Nilai Tukar Petani dapat dihitung dengan membandingkan faktor produksi dengan produk, yaitu perbandingan antara indeks yang diterima (It) petani dan yang dibayar (Ib) petani.

Keberhasilan Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur dalam upaya meningkatkan nilai tukar petani sepanjang tahun 2009 sampai dengan tahun 2013, dapat dilihat sebagaimana data yang tersaji pada tabel dibawah ini.



PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR

Tabel 2.65
Perkembangan Nilai Tukar Petani (NTP)
Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2009-2013

Uraian	Tahun/Rp.000				
	2009	2010	2011	2012	2013
Indeks Yang Diterima Petani :					
a. ADHB;	2.050.000	2.000.000	2.850.000	3.400.000	3.850.000
b. ADHK.	1.350.000	1.400.000	1.450.000	1.480.000	1.500.000
Indeks Yang Dibayar Petani :					
a. ADHB;	-	-	-	-	-
b. ADHK	-	-	-	-	-

Sumber data : Profil Kab.Seram Bagian Timur, Tahun 2010-2014.

2.4.2. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur.

Suatu fasilitas wilayah atau infrastruktur menunjang daya saing daerah dalam hubungannya dengan ketersediaannya (availability) dalam mendukung aktivitas ekonomi daerah di berbagai sektor di daerah dan antar-wilayah.

Keberhasilan terhadap penyediaan fasilitas wilayah/infrastruktur, dapat diukur dengan beberapa indikator, antara lain :

1. Perhubungan.

Sebagai tolok ukur untuk mengetahui keberhasilan pencapaian target indikator perhubungan, antara lain rasio panjang jalan per jumlah kendaraan, yaitu rasio panjang jalan per jumlah kendaraan dihitung untuk mengetahui tingkat ketersediaan sarana jalan dapat memberi akses tiap kendaraan. Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan adalah perbandingan panjang jalan terhadap jumlah kendaraan.

Pencapaian target indikator rasio panjang jalan per jumlah kendaraan di Kabupaten Seram Bagian Timur sepanjang tahun 2009 sampai dengan tahun 2013, dapat dilihat sebagaimana data yang terdapat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.66
Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan
Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2009-2013

Uraian	Tahun				
	2009	2010	2011	2012	2013
Panjang Jalan	-	66,09	580,17	841,72	-
Jumlah Kendaraan	45	84	142	192	75
Rasio	-	78,67	40,86	42,56	-

Sumber data : Profil Kab.Seram Bagian Timur, Tahun 2010-2014.



PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR

2. Fasilitas bank dan non bank.

Sebagai tolok ukur untuk mengetahui keberhasilan pencapaian target indikator fasilitas bank dan non bank, antara lain (i) jenis dan jumlah bank dan cabang-cabangnya; dan (ii) jenis dan jumlah perusahaan asuransi. Pencapaian target indikator jenis dan jumlah bank dan cabang-cabangnya, serta jenis dan jumlah perusahaan asuransi di Kabupaten Seram Bagian Timur sepanjang tahun 2009 sampai dengan tahun 2013, dapat dilihat sebagaimana data yang terdapat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.67
Jenis dan Jumlah Bank dan Cabangnya, Serta Asuransi dan Cabangnya
Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2009-2013

Tahun	Jenis Bank			
	Bank Pemerintah	Bank Daerah	Bank Swastal	Bank Syariah
2009	1	2	-	-
2010	1	2	-	-
2011	1	2	-	-
2012	2	2	-	-
2013	2	2	-	1

Sumber data : Profil Kab.Seram Bagian Timur, Tahun 2010-2014.

3. Jenis, Kelas dan Jumlah Hotel/Penginapan.

Ketersediaan hotel/penginapan merupakan salah satu aspek yang penting dalam meningkatkan daya saing daerah, terutama dalam menerima dan melayani jumlah kunjungan dari luar daerah. Semakin berkembangnya investasi ekonomi daerah akan meningkatkan daya tarik kunjungan ke daerah tersebut. Dengan semakin banyaknya jumlah kunjungan orang dan wisatawan ke suatu daerah perlu didukung oleh ketersediaan hotel/ penginapan. Dalam konteks uraian jenis, kelas dan jumlah hotel/penginapan, maka hotel/penginapan dapat dikelompokkan pada 2 kelas, yaitu :

a. Hotel Berbintang

Hotel berbintang, adalah suatu usaha jasa yang menggunakan suatu bangunan atau sebagian bangunan yang disediakan secara khusus, di mana setiap orang dapat menginap, makan, memperoleh pelayanan,



PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR

dan menggunakan fasilitas lainnya dengan pembayaran, dan telah memenuhi persyaratan sebagai hotel berbintang seperti yang telah ditentukan. Ciri khusus dari hotel berbintang adalah mempunyai restoran yang dikelola langsung di bawah manajemen hotel tersebut.

Untuk Hotel Berbintang, kriteria penggolongannya didasarkan pada persyaratan dasar dan penilaian teknis operasional. Persyaratan Dasar : Perijinan (persetujuan Prinsip, Ijin Usaha). Persyaratan Teknis : Unsur Fisik, Unsur Pengelolaan, Unsur Pelayanan. Penetapan penilaian golongan kelas hotel bintang dilakukan dengan penggabungan dari nilai persyaratan dasar dan persyaratan teknis. Penilaian penggolongan Hotel Bintang dilaksanakan oleh PHRI; dan

b. Hotel Melati

Hotel Melati, adalah suatu usaha yang menggunakan suatu bangunan atau sebagian bangunan yang disediakan secara khusus, di mana setiap orang dapat menginap, makan, memperoleh pelayanan dan menggunakan fasilitas lainnya dengan pembayaran, dan belum memenuhi persyaratan sebagai hotel berbintang.

keberhasilan pencapaian target indikator jenis, kelas dan jumlah hotel/penginapan di Kabupaten Seram Bagian Timur sepanjang tahun 2009 sampai dengan tahun 2013, dapat dilihat sebagaimana data yang terdapat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.68
Jenis, Kelas dan Jumlah Hotel/Penginapan
Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2009-2013

Uraian	Tahun				
	2009	2010	2011	2012	2013
Hotel Bintang 1	-	-	1	3	4
Hotel Non Bintang	-	-	2	5	9
Penginapan	-	-	-	106	154
Jumlah	-	-	3	114	167

4Sumber data : Profil Kab.Seram Bagian Timur, Tahun 2010-2014.



PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR

4. Lingkungan Hidup.

Salah satu indikator penyelenggaraan lingkungan hidup adalah persentase rumah tangga yang menggunakan air bersih (clean water), yaitu air yang digunakan untuk keperluan sehari-hari yang kualitasnya memenuhi syarat kesehatan dan dapat diminum setelah dimasak.

Air Minum (drinking water), adalah air yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum sebagaimana telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 907 Tahun 2002).

Berdasarkan sumbernya, air bersih dapat dibedakan, yaitu :

1. Air Hujan
2. Air Sungai dan Danau
3. Mata Air
4. Air Sumur Dangkal
5. Air Sumur Dalam

Keberhasilan Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur dalam menyediakan air bersih untuk rumah tangga selama kurun waktu tahun 2010 sampai dengan tahun 2014, dapat dilihat sebagaimana data yang terdapat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.69
Data Persentase Rumah Tangga Menggunakan Air Bersih
Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2012-2014

Uraian	Tahun				
	2010	2011	2012	2013	2014
Ledeng	-	-	0,00	0,00	0,00
Sumur Lindung	-	-	52,84	53,34	42,86
Sumur Tidak Terlindung	-	-	1,68	3,46	14,31
Mata Air Terlindung	-	-	12,63	19,45	18,53
Mata Air Tdk Terlindung	-	-	6,39	5,10	8,05
Sungai	-	-	4,73	2,64	3,18
Danau/Waduk	-	-	-	-	-
Air Hujan	-	-	-	-	-
Air Kemasan	-	-	0,27	4,86	5,89
Lainnya	-	-	-	-	-

Sumber data :Survei Sosek Nasional, BPS Kab. Seram Bagian Timur, Tahun 2013-2015.



PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR

5. Komunikasi dan Informatika.

Salah satu tolok ukur untuk melihat pencapaian target indikator komunikasi dan informatika adalah jumlah penduduk yang menggunakan HP/Telepon dalam 1 (satu) tahun tertentu. Hal ini penting, mengingat peningkatan daya saing daerah dapat dilihat dari perkembangan teknologi komunikasi dan informasi yang terjadi pada suatu daerah. Salah satu indikator dalam melihat perkembangan teknologi komunikasi adalah dengan melihat seberapa banyak penduduk suatu daerah telah memiliki perangkat komunikasi berupa hand-phone (HP) maupun telepon rumah biasa.

Jumlah penduduk yang menggunakan HP/telepon di Kabupaten Seram Bagian Timur kurun waktu tahun 2009 sampai dengan tahun 2013, dapat dilihat sebagaimana data yang terdapat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.70
Jumlah Penduduk Yang Menggunakan Telp/HP
Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2009-2013

Uraian	Tahun				
	2009	2010	2011	2012	2013
Jumlah Penduduk	86.709	99.065	101.436	103.196	104.902
Jumlah penduduk yang memiliki telp/HP	-	2.995	2.581	2.589	2.343
Rasio (%)	-	3,45	2,54	2,51	2,23

Sumber data : Profil Kab.Seram Bagian Timur, Tahun 2010-2014.

2.4.3. Fokus Iklim Investasi.

1. Keamanan dan ketertiban.

Salah satu indikator untuk mengukur keberhasilan penyelenggaraan keamanan dan ketertiban adalah angka kriminalitas yang terjadi pada suatu daerah. Angka Kriminalitas adalah rata-rata kejadian kriminalitas dalam satu bulan pada tahun tertentu. Artinya dalam satu bulan rata-rata terjadi berapa tindak kriminalitas untuk berbagai kategori seperti curanmor, pembunuhan, pemerkosaan, dan sebagainya.

Indikator ini berguna untuk menggambarkan tingkat keamanan masyarakat, semakin rendah tingkat kriminalitas, maka semakin tinggi tingkat keamanan masyarakat. Angka kriminalitas dihitung berdasarkan



PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR

delik aduan dari penduduk korban kejahatan dalam periode 1 (satu) tahun.

Angka kriminalitas yang terjadi di Kabupaten Seram Bagian Timur selama kurun waktu tahun 2009 sampai dengan tahun 2013, dapat dilihat sebagaimana data yang terdapat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.71
Perkembangan Angka Kriminalitas
Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2009-2013

Uraian	Tahun				
	2009	2010	2011	2012	2013
Pembunuhan	1	2	-	1	-
Penganiayaan	13	9	10	19	9
Perkosaan	2	1	-	1	1
Pencurian	1	9	7	5	1
Penggelapan	-	-	1	2	-
Perzinahan	-	-	-	1	1
Pengrusakan	-	-	2	2	-
Perjudian	-	-	-	-	3
Penipuan	2	5	8	8	3
Pemerasan	1	-	-	-	-
Jumlah Penduduk	86.709	99.065	101.436	103.196	104.902
Jumlah Angka Kriminal (%)	0,02	0,03	0,03	0,04	0,02

Sumber data : Profil Kab.Seram Bagian Timur, Tahun 2010-2014.

2.4.4. Fokus Sumber Daya Manusia.

Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan kunci keberhasilan pembangunan nasional dan daerah. Hal ini dapat disadari, oleh karena manusia sebagai subyek dan obyek dalam pembangunan. Mengingat hal tersebut, maka pembangunan Sumber Daya Manusia diarahkan agar benar-benar mampu dan memiliki etos kerja yang produktif, terampil, kreatif, disiplin dan profesional. Disamping itu juga mampu memanfaatkan, mengembangkan dan menguasai ilmu dan teknologi yang inovatif dalam rangka memacu pelaksanaan pembangunan nasional.

Kualitas sumberdaya manusia juga memiliki peranan penting dalam meningkatkan daya saing daerah dan perkembangan investasi di daerah. Indikator kualitas sumberdaya manusia dalam rangka peningkatan daya saing daerah dapat dilihat dari kualitas tenaga kerja dan tingkat



PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR

ketergantungan penduduk untuk melihat sejauhmana beban ketergantungan penduduk.

Peningkatan sumber daya manusia, dapat dikelompokkan kedalam 2 (dua) indikator, yaitu :

1. Kualitas tenaga kerja (Rasio lulusan S1/S2/S3)

Salah satu faktor penting yang tidak dapat diabaikan dalam kerangka pembangunan daerah adalah menyangkut kualitas sumber daya manusia (SDM). Kualitas SDM ini berkaitan erat dengan kualitas tenaga kerja yang tersedia untuk mengisi kesempatan kerja di dalam negeri dan di luar negeri. Kualitas tenaga kerja di suatu wilayah sangat ditentukan oleh tingkat pendidikan. Artinya semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditamatkan penduduk suatu wilayah maka semakin baik kualitas tenaganya. Kualitas tenaga kerja pada suatu daerah dapat dilihat dari tingkat pendidikan penduduk yang telah menyelesaikan S1, S2 dan S3.

Tabel 2.72
Pertumbuhan Ketenagakerjaan Berdasarkan Pendidikan
Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2009-2013

Uraian	Tahun				
	2009	2010	2011	2012	2013
Tenaga Kerja Pendidikan SLTP	6.640	7.498	8.307	6.869	5.219
Tenaga Kerja Pendidikan SLTA	4.791	5.648	9.077	8.042	9.150
Tenaga Kerja Pendidikan D-I/D-II/D-III/D-IV/S-1/S-2/S-3	856	2.116	2.793	3.763	2.859
Jumlah Tenaga Kerja Berpendidikan	12.287	15.262	20.177	18.674	17.228

Sumber data : Profil Kab.Seram Bagian Timur, Tahun 2010-2014.

2. Tingkat ketergantungan

Rasio ketergantungan digunakan untuk mengukur besarnya beban yang harus ditanggung oleh setiap penduduk berusia produktif terhadap penduduk yang tidak produktif.

Penduduk muda berusia dibawah 15 tahun umumnya dianggap sebagai penduduk yang belum produktif karena secara ekonomis masih tergantung pada orang tua atau orang lain yang menanggungnya. Selain itu, penduduk berusia diatas 65 tahun juga dianggap tidak produktif lagi sesudah melewati masa pensiun. Penduduk usia 15-64 tahun, adalah penduduk usia kerja yang dianggap sudah produktif. Atas dasar konsep



PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR

ini dapat digambarkan berapa besar jumlah penduduk yang tergantung pada penduduk usia kerja. Meskipun tidak terlalu akurat, rasio ketergantungan semacam ini memberikan gambaran ekonomis penduduk dari sisi demografi.

Rasio ketergantungan (dependency ratio) dapat digunakan sebagai indikator yang secara kasar dapat menunjukkan keadaan ekonomi suatu negara apakah tergolong negara maju atau negara yang sedang berkembang. Semakin tingginya persentase dependency ratio menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Sedangkan persentase dependency ratio yang semakin rendah menunjukkan semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi.

Rasio ketergantungan adalah perbandingan jumlah penduduk usia <15 tahun dan >64 tahun terhadap jumlah penduduk usia 15-64 tahun. Rasio ketergantungan di Kabupaten Seram Bagian Timur kurun waktu tahun 2010, dapat dilihat sebagaimana data yang tersaji pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.73
Perkembangan Rasio Ketergantungan
Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2010

Tahun	Jumlah Pddk Usia < 15 Tahun (jiwa)	Jumlah Pddk Usia > 64 Tahun (jiwa)	Jumlah Pddk Usia Tidak Produktif (Usia <15, 64>/jiwa)	Jumlah Pddk Usia 15 Th + 64 Th (jiwa)	Rasio Ketergantungan (%)
2010	38.855	3.000	41.855	56.940	42,25

Sumber data : Profil Kab.Seram Bagian Timur, Tahun 2011.

Dengan mencermati data yang terdapat pada tabel 2.72 diatas, maka dapat diketahui, bahwa sebagian besar penduduk di Kabupaten Seram Bagian Timur pada tahun 2010, yang masih produktif dengan usia antara > 15 tahun < 64 tahun sebanyak 56.940 jiwa. Sedangkan penduduk yang tergolong tidak produktif lagi dengan usia antara <15 tahun dan 64 > relatif cukup tinggi, yaitu sebanyak 41.855 jiwa atau setara dengan 42,25% dari total penduduk pada tahun 2010.



PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR

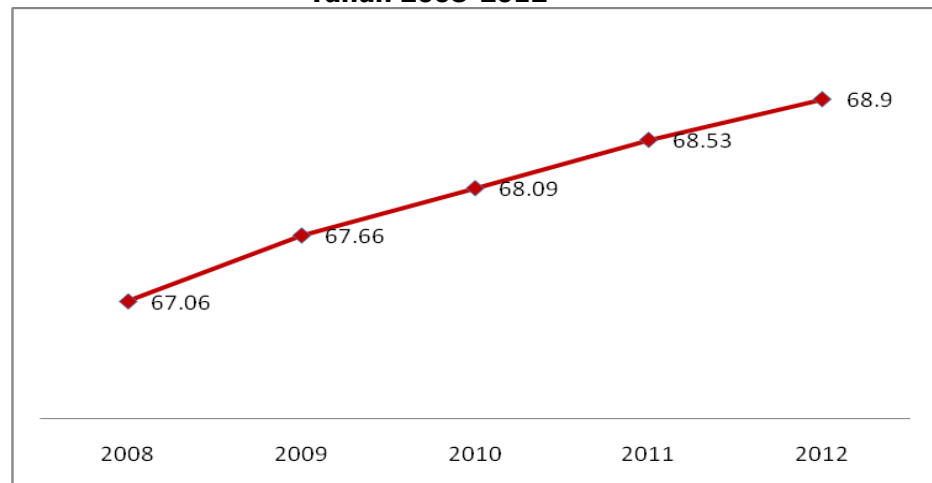
3. Indek Pembangunan Manusia.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator untuk mengetahui status kemampuan dasar penduduk, yang meliputi (i) angka harapan hidup (AHH) untuk mengukur peluang hidup; (ii) rata-rata lama sekolah; (iii) angka melek huruf untuk mengukur status tingkat pendidikan; (iv) pengeluaran riil per kapita untuk mengukur akses terhadap sumberdaya untuk mencapai standar hidup layak.

Indek Pembangunan Manusia Kabupaten Seram Bagian Timur sepanjang tahun 2008 sampai dengan tahun 2012, berkembang secara fluktuatif. Hal tersebut dapat dilihat dari perkembangan data, yaitu pada tahun 2008 IPM tercatat sebesar 67,06. Pada tahun 2009 IPM tercatat sebesar 67,66. Pada tahun 2010 IPM tercatat sebesar 68,09. Pada tahun 2011 IPM tercatat sebesar 68,53 dan pada tahun 2012 IPM tercatat sebesar 68,90.

Angka-angka capaian IPM Kabupaten Seram Bagian Timur tahun 2008 sampai dengan tahun 2012, dapat dilihat sebagaimana data yang terdapat pada grafik dibawah ini.

Grafik 2.3
Capaian IPM Kabupaten Seram Bagian Timur
Tahun 2008-2012



Sumber: 1. Profil Kab. Seram Bagian Timur, Tahun 2009-2013.
2. Survei Sosek Nasional, BPS Kab. Seram Bagian Timur, Tahun 2013.

Walaupun perkembangan angka IPM dalam 5 (lima) tahun terakhir terus mengalami kenaikan, namun secara kumulatif peringkat IPM



PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR

Kabupaten Seram Bagian Timur sampai dengan akhir tahun 2013 berada pada rangking ke 10 dari 11 kabupaten/kota se Provinsi Maluku. Peringkat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Seram Bagian Timur jika dibandingkan dengan kabupaten/kota se Provinsi Maluku kurun waktu 5 (lima) tahun yang lalu, dapat dilihat sebagaimana data yang terdapat pada tabel 2.74 dibawah ini.

Tabel 2.74
Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota Se Provinsi Maluku Tahun 2008 - 2012

No	Kabupaten/Kota	Tahun					Rangking
		2008	2009	2010	2011	2012	
1	Maluku Tenggara Barat	67,58	68,10	68,83	69,23	69,75	9
2	Maluku Tenggara	71,45	72,13	72,45	72,85	73,27	3
3	Maluku Tengah	69,63	70,32	70,86	71,25	71,55	4
4	Buru	68,03	68,70	69,36	69,75	70,54	6
5	Kepulauan Aru	69,36	69,93	70,09	70,33	70,91	5
6	Seram Bagian Barat	68,67	69,21	69,64	70,07	70,40	7
7	Seram Bagian Timur	67,06	67,66	68,08	68,53	68,90	10
8	Maluku Barat Daya	65,96	66,24	66,60	66,99	67,38	11
9	Buru Selatan	67,71	68,17	68,78	69,13	69,97	8
10	Ambon	77,86	78,25	78,56	78,97	79,41	1
11	Tual	75,90	76,20	76,51	77,10	77,62	1
	Prov. Maluku	70,38	70,96	71,42	71,87	72,42	

Sumber data : Profil Pemkab. Seram Bagian Timur, Tahun 2009-2013.

Sebagaimana telah diuraikan diatas, bahwa pembentuk IPM adalah hasil pencapaian pembangunan dalam bidang pendidikan, kesehatan dan perekonomian untuk jangka waktu tertentu. Oleh karena itu, dalam upaya untuk meningkatkan peringkat IPM kearah yang baik lagi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan, perlu diambil langkah kebijakan yang terencana, diantaranya mengupayakan perubahan pola pikir dan pola tindak setiap penduduk, untuk semakin berperilaku hidup bersih dan sehat (bidang kesehatan), meningkatkan kapasitas, kapabilitas dan intelektualitas (bidang pendidikan) dan meningkatkan kemampuan bersaing secara ekonomi (bidang ekonomi).

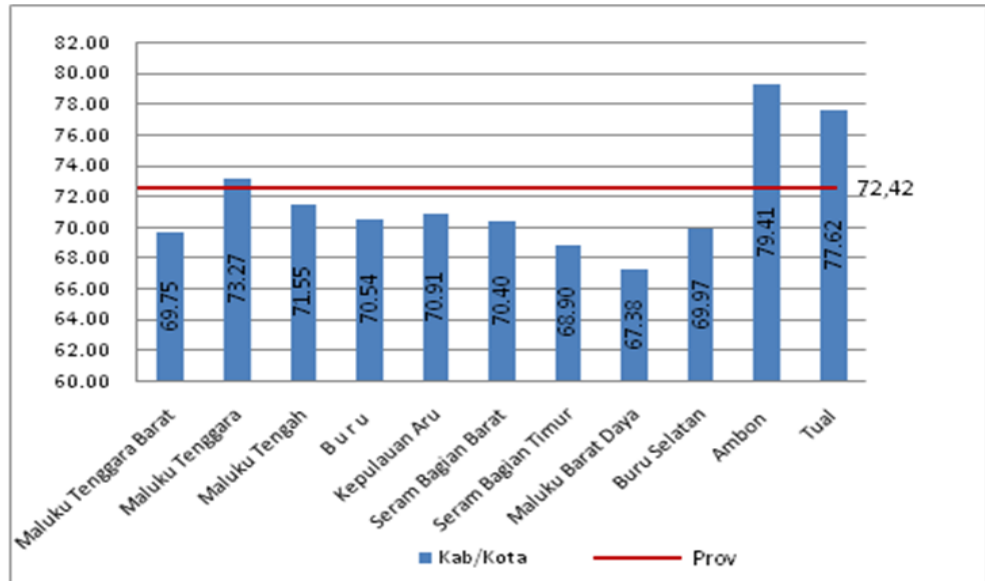
Selanjutnya data pencapaian Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Seram Bagian Timur pada tahun 2012 jika disanding dengan



PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR

kabupaten/kota lainnya se Provinsi Maluku, maka dapat dilihat sebagaimana terdapat pada gambar 2,5 dibawah ini.

Gambar 2.5
Peringkat IPM Kabupaten Seram Bagian Timur
Diantara Kab/Kota Lainnya di Provinsi Maluku
Tahun 2012



Sumber: 1. Profil Kab. Seram Bagian Timur, Tahun 2013.
2. Survei Sosek Nasional, BPS Kab. Seram Bagian Timur, Tahun 2013.

Dari data yang tersaji pada gambar diatas, dapat diketahui peringkat IPM Kabupaten Seram Bagian Timur, yaitu berada pada peringkat ke 10 dari 11 kabupaten/kota se Provinsi Maluku. Dimana Kota Ambon penempati peringkat pertama dengan angka sebesar 79,41. Peringkat kedua Kabupaten Tual dengan angka sebesar 77,62. Kabupaten Maluku Tenggara berada pada peringkat ketiga, dengan angka sebesar 73,27 dan peringkat keempat adalah Kabupaten Maluku Tengah, dengan angka sebesar 71,55, serta peringkat kelima adalah Kabupaten Kepulauan Aru, dengan angka 70,91.

Pada tabel dibawah ini disajikan indikator-indikator yang terkait langsung dalam pembentukan Indeks Pembangunan Manusia, yaitu : Angka Harapan Hidup, Angka Melek Huruf, Rata-rata Lama Sekolah, dan Pengeluaran Per Kapita.



PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR

Tabel 2.75
Perkembangan Capaian Indikator Pembentuk IPM
Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2009-2013

No	Indikator Pembentuk IPM	Tahun				
		2009	2010	2011	2012	2013
1	Angka Harapan Hidup (Tahun)	-	65,86	66,07	66,28	66,51
2	Angka Melek Huruf (%)	98,14	98,14	94,91	95,32	96,96
3	Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)	7,62	7,83	7,06	7,14	7,62
4	Pengeluaran Per Kapita/bulan (Rp.)	435.071	442.949	771.037	663.586	821.475

Sumber: Profil Kab. Seram Bagian Timur, Tahun 2010-2014.

Dari sajian data sebagaimana telah disajikan pada tabel 2.74 diatas, dapat diketahui bahwa perkembangan prosentase indikator Angka Melek Huruf walaupun bergerak pasang surut, namun cukup tinggi. Sementara itu, untuk indikator Angka Harapan Hidup dari tahun ke tahun berkembang meningkat. Dimana pada tahun 2010 angka harapan hidup masih 65,86 tahun, maka sampai dengan akhir tahun 2013 sudah berada pada 66,51 tahun.

Sedangkan untuk indikator Pengeluaran Perkapita/bulan, dari tahun ke tahun terus mengalami kenaikan. Jika pada tahun 2009 pengeluaran rata-rata perkapita perbulan masih pada kisaran Rp.435.071,-, maka pada akhir tahun 2013 pengeluaran rata-rata perkapita/bulan sudah sekitar Rp.821.475,- . Peningkatan pengeluaran rata-rata perkapita/bulan dapat dimaknai, bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Seram Bagian Timur terus meningkat.

Berdasarkan data IPM sebagaimana tersaji pada tabel 2.74 diatas, maka tantangan terberat yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur dalam pembangunan daerah dalam kurun waktu tahun 2016 sampai dengan tahun 2020, adalah pembangunan dalam kelompok pelayanan dasar masyarakat, yakni pembangunan bidang kesehatan, bidang pendidikan dan bidang perekonomian sebagaimana terdapat pada tabel 2,75 diatas.

Jika ketiga bidang dimaksud dapat didorong lebih cepat, maka



PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR

diharapkan akan berdampak positif pada terdongkraknya peringkat IPM Kabupaten Seram Bagian Timur yang lebih baik lagi dibandingkan kabupaten/kota se Provinsi Maluku dan itu maknanya, bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Seram Bagian Timur meningkat secara signifikan dibandingkan dengan pembangunan yang dilaksanakan sepanjang kurun waktu 5 (lima) tahun yang lalu.



PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR

BAB III

GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAN KERANGKA PENDANAAN

Perumusan perencanaan pembangunan daerah merupakan salah satu proses mendasar dalam tatanan tugas pokok dan fungsi pemerintah daerah sebagai penyambung kewenangan dari pemerintah pusat dalam kerangka menyejahterakan setiap Warga Negara Indonesia. Dalam setiap tahapan perumusan kebijakan teknis pembangunan harus disesuaikan dengan kemampuan pendanaan daerah sebagai pendukung utama pelaksanaan pembangunan. Oleh karena itu, perencanaan pengelolaan keuangan daerah merupakan bagian integral dari perencanaan pembangunan daerah, sehingga kebijakan pembangunan harus dioptimalkan pelaksanaannya sesuai dengan kemampuan pendanaannya.

Dalam penentuan pagu indikatif program prioritas, gambaran pengelolaan keuangan daerah dan kerangka pendanaannya menjadi dasar utama penentuan target sasaran maupun program pembangunan. Untuk mengetahui kemampuan pendanaan pembangunan dalam jangka menengah, diperlukan prediksi penerimaan daerah selama 5 (lima) tahun ke depan. Sebagai upaya untuk memprediksi dengan baik sumber-sumber penerimaan di masa datang, maka diperlukan gambaran umum kinerja keuangan melalui realisasi APBD sekurang-kurangnya dalam 3 (tiga) tahun yang lalu.

Salah satu pertimbangan yang mendasari perlunya diselenggarakan otonomi daerah adalah peningkatan kemandirian pemerintahan daerah yang mempunyai implikasi langsung terhadap kemampuan keuangan daerah, sumber daya manusia, dan sumber daya alam dalam menjalankan roda pemerintahan dan kelanjutan pembangunan. Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur adalah ujung tombak pelaksanaan pembangunan daerah karena pemerintah daerah lebih mengetahui kebutuhan dan potensi rakyat di daerahnya. Hasil dari pelaksanaan pembangunan berbasis otonomi tersebut pada akhirnya dapat meningkatkan *local accountability* pemerintah pusat terhadap rakyatnya melalui pemerintah daerah.

Pelaksanaan otonomi daerah secara langsung akan berpengaruh terhadap sistem pembiayaan, pengelolaan, dan pengawasan keuangan daerah. Sistem pembiayaan daerah dalam konteks otonomi daerah merupakan aspek yang sangat penting. Daerah diharapkan dapat meningkatkan kapasitas fiskal (*fiscal capacity*) agar mampu mencukupi kebutuhan



PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR

fiskalnya (*fiscal need*), sehingga tidak mengalami defisit fiskal (*fiscal gap*). Salah satu upaya untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah tersebut adalah dengan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Terkait dengan hal tersebut, pengelolaan keuangan daerah yang merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah adalah hal yang sangat penting dalam proses perencanaan suatu daerah secara keseluruhan. Tahapan-tahapan dalam pengelolaan keuangan daerah sangat krusial dalam memulai roda pemerintahan dan pembangunan setiap tahunnya. Oleh karena itu, perwujudan pelayanan dan kesejahteraan kepada masyarakat dari pengelolaan keuangan daerah harus melalui perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan yang terstruktur dengan baik.

Dalam satu dasawarsa terakhir ini, pengelolaan keuangan daerah yang dimulai dari perencanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pengawasan, telah mengalami perubahan yang sangat mendasar. Perubahan ini terkait dengan paket undang-undang keuangan negara yang dimulai dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan sampai Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, serta Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah. Dari paket undang-undang keuangan negara tersebut, maka terbitlah Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah. Dalam tataran teknis pun terbitlah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Permendagri Nomor 13 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Serta Penyampiannya.

3.1. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu.

Analisis terhadap kebijakan pengelolaan keuangan daerah masa lalu meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah. Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam pengelolaan keuangan daerah selalu diterapkan



PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR

prinsip dan pendekatan serta norma yang berlaku secara universal, yaitu dilaksanakan dengan tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, efektif, transparan serta dapat di pertanggung jawabkan dengan memperhatikan keadilan, kepatutan dan nilai manfaat yang dapat dirasakan oleh masyarakat. Laporan kinerja dalam pengelolaan keuangan daerah dimaksud terdiri dari, laporan kinerja pelaksanaan APBD tahun 2012 sampai dengan tahun 2014 termasuk gambaran kondisi neraca daerah.

Dari hasil analisis, diharapkan akan menghasilkan data dan informasi tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah. Mengingat, bahwa pengelolaan keuangan daerah diwujudkan dalam suatu APBD, maka analisis pengelolaan keuangan daerah dilakukan terhadap APBD dan laporan keuangan daerah pada umumnya. Menganalisis pengelolaan keuangan daerah dan kerangka pendanaan, seyogyanya terlebih dahulu memahami jenis obyek pendapatan, belanja dan pembiayaan sesuai dengan kewenangan, susunan/struktur masing-masing APBD.

Berdasarkan uraian diatas, maka fokus analisis terhadap keuangan daerah, meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah. Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam pengelolaan keuangan daerah selalu diterapkan prinsip dan pendekatan serta norma yang berlaku secara universal, yaitu dilaksanakan dengan tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, efektif, transparan serta dapat di pertanggung jawabkan dengan memperhatikan keadilan, kepatutan dan nilai manfaat yang dapat dirasakan oleh masyarakat.

Dalam kerangka kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu, juga diinformasi mengenai ruang fiskal yang merupakan suatu konsep untuk mengukur fleksibilitas yang dimiliki pemerintah daerah, dalam mengalokasikan APBD untuk membiayai kegiatan yang menjadi prioritas daerah. Landasan konsepsinya, adalah semakin luas/besar ruang fiskal yang dimiliki suatu daerah, semakin besar pula fleksibilitas yang dimiliki oleh pemerintah daerah dalam pengalokasian pagu anggaran untuk membiayai program dan kegiatan yang menjadi prioritas pemerintah daerah, terkait dengan dukungan untuk terwujudnya program dan kegiatan yang menjadi prioritas nasional sebagaimana telah diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 sebagai penjabaran dari NAWA CITA.



PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR

Kapasitas ruang fiskal yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur dalam kurun waktu tahun 2012 sampai dengan tahun 2014, dapat dilihat sebagaimana data yang terpada dalam tabel 3.1 dibawah ini.

Tabel 3.1
Kapasitas Ruang Fiskal Daerah
Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2012-2014

No	Uraian	Tahun 2012 (Rp.)	Tahun 2013 (Rp.)	Tahun 2014 (Rp.)
1	Pendapatan Daerah	470.291.867.373	536.627.563.265	599.936.636.939
	Dikurangi:			
2	Belanja Pegawai	175.912.276.225	189.003.590.822	191.908.736.248
3	Hibah	1.460.000.000	11.307.203.900	12.368.685.000
4	Belanja Bunga	-	-	-
	Kapasitas Fiskal	292.919.591.148	336.316.768.543	395.659.215.691

Sumber data : APBD Pemkab. Seram Bagian Timur, Tahun 2013-2015

Berdasarkan data dalam tabel 3.1 tersebut di atas dapat diketahui, bahwa sesungguhnya ruang fiskal Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur memiliki kapasitas yang cukup potensial. Hal ini ditunjukkan dengan pertumbuhan kapasitas yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Jika pada tahun 2012 kapasitas ruang fiskal sebesar Rp. 292.919.591.148,-, maka dalam tahun 2013 ada pertumbuhan hingga menjadi Rp.336.316.768.543,-. Demikian juga dalam tahun 2014, kapasitas ruang fiskal tumbuh cukup signifikan, hingga menjadi Rp.395.659.215.691,-

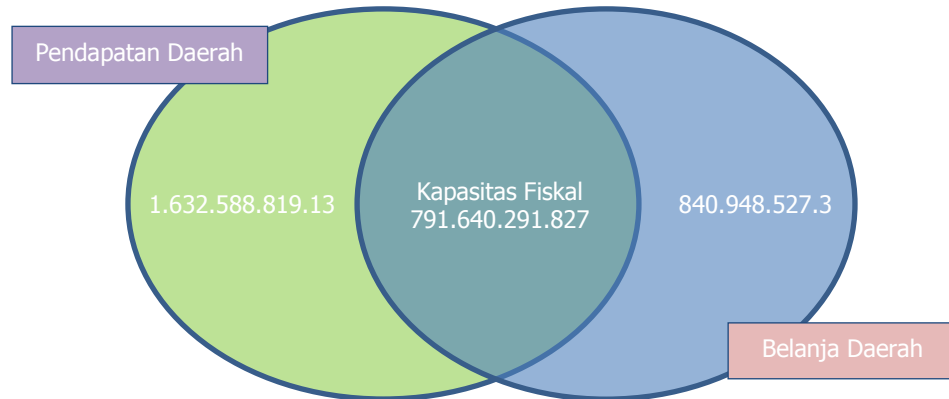
Dalam penyelenggaraan otonomi daerah yang nyata dan seluas-luasnya yang didasari oleh kemandirian daerah, keleluasaan pemerintah daerah dalam menggali dan mengembangkan potensi kapasitas ruang fiskal amat dibutuhkan. Hal ini terkait dengan inisiatif dan inovasi pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang seoptimal mungkin baik kuantitas maupun kualitasnya. Memperbesar ruang fiskal daerah untuk belanja modal sangat penting, karena dapat menjadi stimulus perekonomian daerah. Pemerintah daerah diharapkan, dapat membuat kebijakan yang mampu menciptakan iklim perekonomian yang kondusif. Selain itu, efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran di daerah juga dapat mendukung terciptanya ruang fiskal yang mampu mendorong meningkatnya pendapatan asli daerah.



PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR

Gambaran pertumbuhan ruang fiskal Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur dalam kurun waktu tahun 2012-2014, dapat dilihat sebagaimana data yang ditampilkan pada gambar 3.1 dibawah ini.

Gambar 3.1
Perkembangan Ruang Fiskal
Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2012-2014



Sumber data : DPPKAD Pemkab Seram Bagian Timur, Tahun 2013-2015.

3.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBD Tahun 2012 -2014.

Uraian mengenai kinerja pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur dalam kurun waktu tahun 2012-2014 fokus menjelaskan mengenai analisis pendapatan daerah, yang meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Pendapatan Daerah Lainnya yang Sah pada satu sisi. Sedangkan dari sisi lain juga menjelaskan mengenai analisis belanja daerah, yang terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja langsung, serta analisis pembiayaan daerah. Penjelasan dimaksud, dapat diuraikan secara rinci sebagai berikut :

1. Analisis Pendapatan Daerah.

Kapasitas keuangan daerah dalam mendukung pencapaian target pembangunan daerah selama 3 (tiga) tahun yang lalu dapat dilihat dari anggaran pendapatan dan belanja daerah. Dari sisi APBD, keuangan daerah dipergunakan untuk membiayai program dan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Peningkatan tersebut menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan pembangunan baik dari aspek fisik maupun non fisik.



PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR

Landasan yang dijadikan acuan dalam perhitungan APBD pada 3 (tiga) tahun yang lalu, adalah proyeksi indikator makro ekonomi, antara lain terdiri dari (i) laju pertumbuhan ekonomi; (ii) kemiskinan dan pengangguran; (iii) pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan; (iv) daya saing daerah; (v) pendapatan perkapita masyarakat; (vi) dan laju inflasi lokal.

Penyusunan APBD Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur selama kurun waktu 3 (tiga) tahun yang lalu, dilakukan dan dirumuskan melalui pendekatan berbasis kinerja. Pendekatan ini, diarahkan dan bertujuan untuk dapat menampung aspirasi dan memenuhi seluruh kebutuhan masyarakat sebagai penerima manfaat dari setiap program pembangunan secara optimal. Namun demikian, agar ada jaminan, bahwa dalam penyusunan anggaran dilakukan secara transparan, efisien, efektif, tepat jumlah, tepat waktu dan tepat sasaran dan tepat dalam penggunaannya serta dapat dipertanggung jawabkan, maka dalam perumusannya memperhatikan beberapa faktor, diantaranya faktor keseimbangan antara pendapatan dengan belanja serta pembiayaan.

Terkait dengan prinsip dalam pengelolaan keuangan daerah sebagaimana telah dijelaskan diatas, maka pada Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah telah ditegaskan, bahwa pendapatan daerah terdiri dari (i) Pendapatan Asli Daerah (PAD); (ii) Dana Perimbangan; dan (iii) Lain-lain pendapatan daerah yang sah. Dari uraian diatas, maka pada tabel dibawah ini disajikan data dan informasi tentang perkembangan pertumbuhan pendapatan daerah Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur selama kurun tahun 2012-2014.

Tabel 3.2
Rata-rata Pertumbuhan Pendapatan Daerah
Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2012-2014

No.	Uraian	Tahun 2012 (Rp)	Tahun 2013 (Rp)	Tahun 2014 (Rp)	Rata-rata Pertumbuhan (%)
1	PENDAPATAN	470.291.867.373	536.627.563.265	599.936.636.939	12,95%
1.1.	Pendapatan Asli Daerah	10.835.633.946	10.593.595.920	11.250.111.870	1,98%
1.1.1.	Pajak daerah	2.139.509.973	2.922.160.834	3.152.279.908	22,23%
1.1.2.	Retribusi daerah	699.830.416	1.801.533.694	1.659.500.361	74,77%
1.1.3.	Hasil pengelolaan	169.524.717	-	886.726.682	-



PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR

No.	Uraian	Tahun 2012 (Rp)	Tahun 2013 (Rp)	Tahun 2014 (Rp)	Rata-rata Pertumbuhan (%)
	keuangan daerah yang dipisahkan				
1.1.4.	Lain-lain PAD yang sah	7.826.768.840	5.869.901.392	5.551.604.919	-15,21%
1.2.	Dana Perimbangan	444.238.520.379	503.875.323.678	554.594.774.650	11,75%
1.2.1.	Dana bagi hasil pajak/ bagi hasil bukan pajak	72.599.641.379	72.265.092.678	57.231.870.650	-10,63%
1.2.2.	Dana alokasi umum	328.796.339.000	366.782.861.000	436.637.414.000	15,30%
1.2.3.	Dana alokasi khusus	42.842.540.000	64.827.370.000	60.725.490.000	22,49%
1.2.4.	Dana bagi hasil cukai	-	-	-	-
1.3.	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	15.217.713.048	22.158.643.667	34.091.750.419	49,73%
1.3.1.	Hibah	-	-	-	-
1.3.2.	Dana darurat	-	-	-	-
1.3.3.	Pendapatan Lainnya	1.000.000.000	1.702.811.506	2.678.131.025	63,78%
1.3.4.	Dana penyesuaian dan Dana Otonomi Khusus	8.661.718.000	14.063.218.000	23.364.900.000	64,25%
1.3.5.	Dana bagi hasil pajak dari provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya	5.555.995.048	6.392.614.161	7.377.360.094	15,23%
1.3.6.	Bantuan keuangan dari provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya	-	-	671.359.300	-

Sumber data : DPPKAD Pemkab. Seram Bagian Timur, Tahun 2013-2015.

Dari tabel 3.2 diatas dapat diketahui, bahwa pendapatan daerah dalam kurun waktu tahun 2012-2014 cenderung mengalami kenaikan. Jika dalam tahun 2012 jumlah pendapatan daerah sebesar Rp.470.291.867.373,- , maka dalam tahun 2013 menjadi sebesar Rp.536.627.563.265,-, sehingga ada kenaikan sekitar 14,11%. Demikian juga dalam tahun 2014 total pendapatan daerah menjadi sebesar Rp.599.936.636.939,-, sehingga prosentase kenaikannya jika disandingkan dengan pendapatan daerah dalam tahun 2013 adalah sebesar 11,80%. jika ditotal, maka kenaikan pendapatan daerah rata-rata dalam 3 (tiga) tahun terakhir adalah sebesar 12,95%.

Sementara itu, dari total pendapatan daerah yang sebesar Rp.470.291.867.373,- pada tahun 2012. Sebesar Rp.536.627.563.265,- pada tahun 2013 dan sebesar Rp.599.936.636.939,- pada tahun 2014, berasal dari berbagai sumber, yakni dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan



PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR

Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah. Data dimaksud, dapat dilihat sebagaimana terdapat dalam tabel 3.3 dibawah ini.

Tabel 3.3
Realisasi Pendapatan Daerah Terhadap Total Pendapatan Daerah
Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2012-2014

No	Sumber Pendapatan	Proporsi Pendapatan Terhadap Total Pendapatan Daerah (Rp.)			Rata-rata (%)
		2012	2103	2014	
1.	Pendapatan Asli Daerah	10.835.633.946	10.593.595.920	11.250.111.870	1,98
2.	Dana Perimbangan	444.238.520.379	503.875.323.678	554.594.774.650	11,75
3.	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	15.217.713.048	22.158.643.667	34.091.750.419	49,73
	Jumlah	470.291.867.373	536.627.563.265	599.936.636.939	12,95

Sumber data : DPPKAD Pemkab Seram Bagian Timur, Tahun 2013-2015.

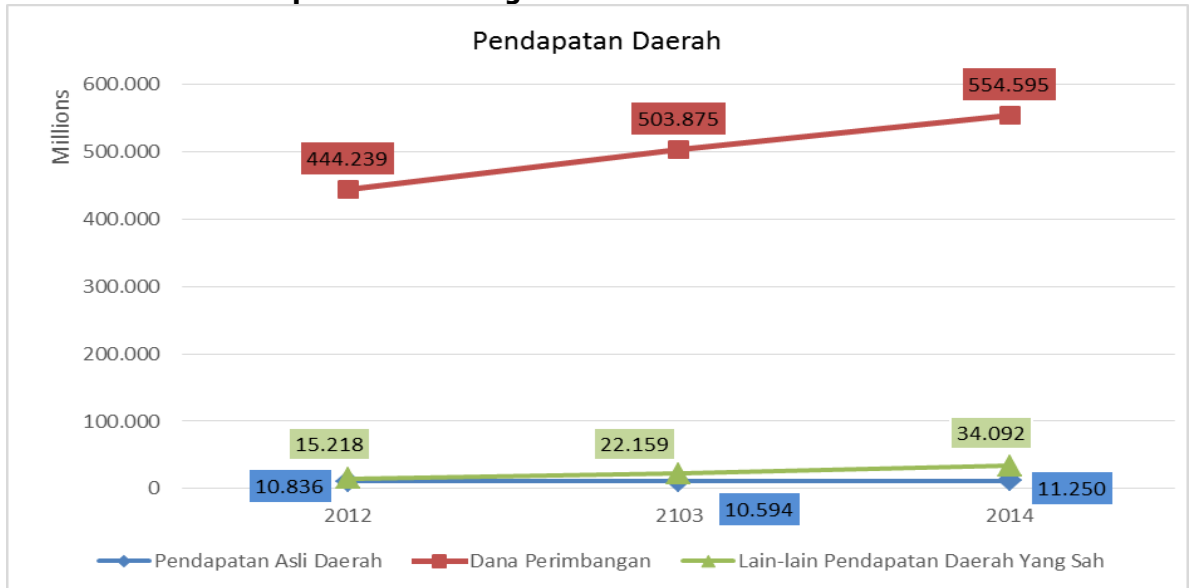
Dengan menelaah data yang terdapat dalam tabel 3.3 diatas, maka dapat diketahui bahwa kontribusi terbesar dalam APBD Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur, bersumber dari Dana Perimbangan yaitu, pada Tahun 2012 sebesar Rp.444.238.520.379,-, tahun 2013 sebesar Rp.503.875.323.678,- dan dalam tahun 2014 sebesar Rp. 554.594.774.650,-. Kontribusi berikutnya adalah bersumber dari Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah, dengan rincian pada tahun 2012 sebesar Rp.15.217.713.048,-, tahun 2013 sebesar Rp.22.158.643.667,- dan dalam tahun 2014 sebesar Rp.34.091.750.419,-. Sedangkan kontribusi yang bersumber dari PAD relatif paling kecil dibanding dua sumber pendanaan lainnya, dengan rincian pendapatan pada tahun 2012 sebesar Rp.10.835.633.946,-. Pada tahun 2013 sebesar Rp.10.593.595.920,- dan dalam tahun 2014 sebesar Rp. 11.250.111.870,-.

Selanjutnya dalam grafik 3.1 dibawah ini ditampilkan data tentang total pendapatan daerah dari berbagai sumber, yang dapat dilihat sebagaimana gambar dibawah ini.



PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR

Grafik 3.1
Proporsi PAD, Dana Perimbangan dan Lain-Lain
Pendapatan Daerah Terhadap Total Pendapatan Daerah
Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2012-2014



Sumber data : DPPKAD Pemkab Seram Bagian Timur, Tahun 2013-2015.

Dari sajian data pada grafik 3.1 dapat diketahui, bahwa sesungguhnya kinerja pelaksanaan APBD dalam tahun 2012-2014 menunjukkan adanya peningkatan yang relatif besar. Dimana pendapatan dari Dana Perimbangan berkontribusi secara signifikan, sedangkan kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah walaupun trennya cenderung meningkat, namun proporsinya tidak terlalu signifikan terhadap total pendapatan daerah.

Dengan proporsi kontribusi sebagaimana tersebut pada tabel 3.3 diatas, maka secara politik anggaran akan sangat berpengaruh pada kemandirian Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur dalam perumusan program dan kegiatan prioritas baik yang terkait langsung dengan upaya pencapaian target visi, misi dan indikator kinerja pemerintah sendiri, maupun terhadap capaian target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan yang telah menjadi kewenangan setiap perangkat daerah sesuai tugas dan fungsinya, dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan kepada publik untuk kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan.

Data rasio kemandirian Pemerintah Kabupaten Seram Bagaian Timur terhadap berbagai program dan kegiatan prioritas dimaksud, dapat dilihat sebagaimana terlihat dalam tabel 3.4 dibawah ini.



PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR

Tabel 3.4
Rasio Kemandirian Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur
Tahun 2012-2014

No	Jenis Pendapatan	Tahun 2012 (Rp.)	Tahun 2013 (Rp.)	Tahun 2014 (Rp.)
1.	Pendapatan Asli Daerah	10.835.633.946	10.593.595.920	11.250.111.870
2.	Dana Perimbangan	451.906.893.925	518.086.103.130	569.617.553.620
	Prosentase Rasio Kemandirin Daerah	2,48 %	2,88 %	2,35 %

Sumber data : APBD Pemkab. Seram Bagian Timur, Tahun 2013-2015.

Jika memperhatikan data pada tabel 3.4 di atas menunjukkan, bahwa rasio kemandirian Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur dari waktu ke waktu semakin meningkat, yaitu pada tahun 2012 prosentase rasio kemandirian sebesar 2,48%. Tahun 2013 rasio kemandirian meningkat menjadi 2,88%, namun dalam tahun 2014 rasio kemandirian turun menjadi 2,35%. Peningkatan rasio kemandirian bermakna, bahwa tingkat ketergantungan Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur kepada pemerintah pusat dalam pengalokasian pagu penganggaran untuk kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan, akan semakin rendah. Hal ini dari aspek perumusan kebijakan penyelenggaraan pembangunan daerah di era otonomi daerah, akan semakin mandiri.

Dengan demikian, maka semakin rendah kemandirian pemerintah daerah semakin kurang mandiri pemerintah daerah dalam menjalan berbagai urusan pemerintahan yang telah diserah dan menjadi kewenangannya sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat kerja.

Seiring dengan semakin meningkatnya kesejahteraan masyarakat Kabupaten Seram Bagian Timur sebagai imbas dari semakin berkualitasnya pembangunan daerah, maka dalam 3 (tiga) tahun terakhir realisasi pendapatan daerahpun juga terus meningkat. Angka-angka peningkatan realisasi pendapatan daerah, dapat dilihat sebagaimana data yang disajikan dalam tabel 3.5 di bawah ini.

Tabel 3.5
Target dan Realisasi Pendapatan Daerah
Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2012-2014

Tahun	Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Bertambah/Berkurang (Rp.)	%
2012	481.522.647.142	470.291.867.373	11.230.779.769	97,67
2013	548.958.380.177	536.985.405.535	11.972.974.642	97,82
2014	602.107.791.818	599.936.636.938,96	2.171.154.879,04	99,64
Total	1.632.588.819.137	1.607.213.909.846,96	25.374.909.290.04	

Sumber data : DPPKAD Kab. Seram Bagian Timur Tahun 2013-2015.

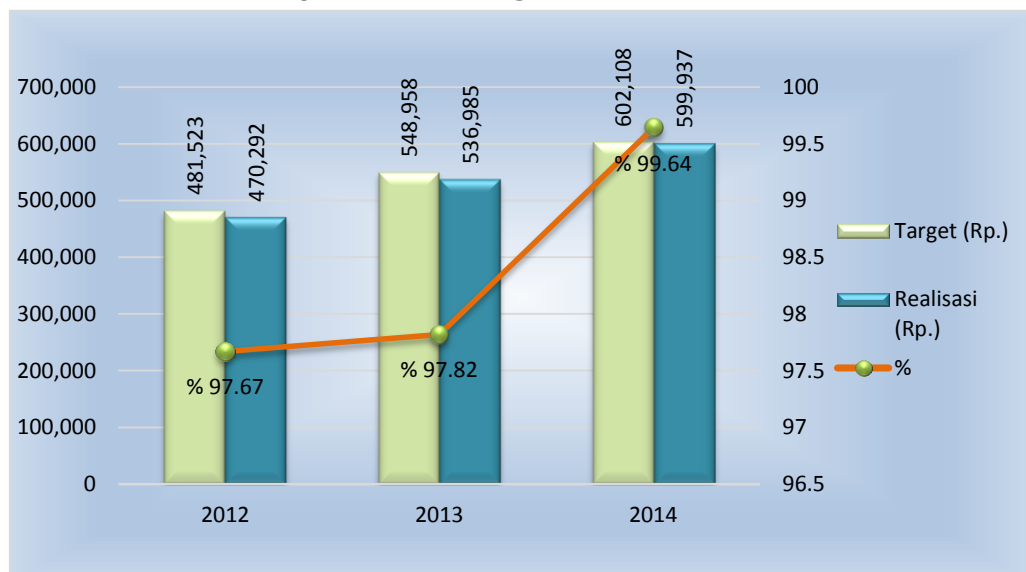


PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR

Dari tabel 3.5 di atas, dapat dilihat adanya peningkatan total target pendapatan dan realisasi pendapatan dari target yang ditetapkan. Dinama pada tahun 2012 target pendapatan daerah dipatok sebesar Rp.481.522.647.142,-, realisasi yang dapat dicapai sebesar Rp.470.291.867.373,-, realisasi daya serapnya sebesar 97,67 % dan dana yang tidak dapat diserap sebesar Rp.11.230.779.769,- atau setara 2,33%. Demikian juga dalam tahun 2013 terjadi peningkatan target pendapatan daerah hingga menjadi sebesar Rp.548.958.380.177,-, dengan realisasi daya serap mencapai sebesar Rp536.985.405.535,- atau setara 97,82% dan yang tidak dapat diserap sebesar Rp. 11.972.974.642,- atau setara 2,18%. Dalam tahun 2014 target pendapatan ditetapkan sebesar Rp.602.107.791.818,-, dengan realisasi daya serap sebesar Rp.599.936.636.938,96 atau setara 99,64% dan yang tidak dapat diserap sebesar Rp. 2.171.154.879,04 atau setara 0,36%

Untuk melengkapi penjelasan mengenai target dan realisasi daya serap pagu anggaran dalam 3 (tiga) tahun terakhir, dibawah ini disajikan data sebagaimana dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

Gambar 3.2
Target dan Realisasi Pendapatan Daerah
Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2012-2014



Sumber data : DPPKAD Pemkab Seram Bagian Timur, Tahun 2013-2015.



PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR

Dari data yang terdapat dalam tabel dan gambar yang disajikan sebagaimana tersebut diatas terlihat, bahwa struktur APBD Kabupaten Seram Bagian Timur pada kurun waktu tahun 2012-2014 sebagian terbesar bersumber dari Dana Perimbangan, kemudian Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah dan Pendapatan Asli Daerah. Dengan komposisi seperti ini, maka kemandirian pemerintah daerah dalam menjalankan roda pembangunan daerah di era otonomi daerah masih rendah, masih sangat tergantung pada kontribusi pendanaan dari pemerintah pusat (APBN).

2. Analisis Belanja Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah.

Analisis belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah dilakukan dalam rangka untuk memperoleh gambaran realisasi dari kebijakan pembelanjaan dan pengeluaran pembiayaan daerah pada periode tahun anggaran sebelumnya yang digunakan sebagai bahan untuk menentukan kebijakan pembelanjaan dan pengeluaran pembiayaan dimasa datang dalam rangka peningkatan kapasitas pendanaan pembangunan daerah.

Dengan langkah kebijakan tersebut, selanjutnya dilakukan perhitungan total kebutuhan belanja daerah sesuai dengan kebutuhan dalam upaya mempercepat pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat. Belanja daerah yang diarahkan baik terkait dengan upaya untuk memenuhi janji politik kepala daerah dan wakil kepala daerah kepada masyarakat, maupun untuk mendorong terwujudnya visi dan misi pemerintahan daerah menjadi bagian penting yang mendapat perhatian serta porsi anggaran yang relatif cukup besar.

Langkah selanjutnya, adalah belanja pembangunan untuk mencapai indikator kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan yang telah menjadi kewenangan pemerintahan daerah dalam rangka mewujudkan pelayanan publik yang optimal. Dengan konstruksi Belanja Daerah yang demikian, maka gambaran mengenai proporsi realisasi belanja terhadap anggaran belanja Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur dalam 3 (tiga) tahun terakhir yakni tahun 2012 sampai dengan tahun 2014, dapat dilihat sebagaimana data yang dituangkan dalam tabel dibawah ini.



PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR

Terkait dengan uraian diatas, maka langkah dan tahapan dalam rangka menghitung kebutuhan belanja untuk memenuhi kebutuhan belanja daerah dimaksud, dapat dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :

a. Proporsi Realisasi Belanja Daerah Dibanding Anggaran.

Berdasarkan data, perkembangan proporsi realisasi belanja daerah dibanding anggaran pada Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur dalam kurun waktu tahun 2012 sampai dengan tahun 2014, dapat dilihat sebagaimana terdapat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.6
Proporsi Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja
Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2012-2014

No.	Uraian	Pagu Tahun 2012	Pagu Tahun 2013	Pagu Tahun 2014	Rata-rata pertumbuhan (%)
1.	Belanja Tidak Langsung	313.521.947.120	380.322.551.706	397.410.865.497	12,90
1.1	Belanja Pegawai	175.912.276.225	189.003.590.822	191.908.736.248	4,49
1.2	Belanja Barang	127.363.215.895	168.714.875.384	176.162.138.649	18,44
1.3	Belanja Bunga	-	-	-	-
1.4	Belanja Subsidi	-	-	-	-
1.5	Belanja Hibah	1.460.000.000	11.307.203.900	12.368.685.000	341,93
1.6	Belanja Bantuan Sosial	900.000.000	2.917.395.000	2.589.400.000	106,46
1.7	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kab/ Kota dan Pemerintah Desa	-	-	-	-
1.8	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/ Kab/Kota dan Pemeritahan Desa	7.536.455.000	6.971.486.600	13.266.113.600	41,40
1.9	Belanja Tidak Terduga	350.000.000	1.408.000.000	1.115.792.000	140,77
2.	Belanja Langsung	138.931.966.623	165.251.654.730	138.658.035.330	1,43
2.1	Belanja Tanah	711.660.000	-	75.000.000	-
2.2	Belanja Peralatan dan Mesin	28.763.270.000	24.852.598.012	21.635.216.469	(13,27)
2.3	Belanja Jalan, Jaringan dan Irigasi	48.737.188.758	91.876.532.832	78.944.290.880	37,22
2.4	Belanja Gedung dan Bangunan	56.927.349.665	44.528.018.486	37.868.606.981	(18,37)
2.5	Belanja Aset Tetap Lainnya	3.792.498.200	3.994.505.400	-	(47,34)
2.6	Belanja Aset Lainnya	-	-	134.921.000	-
	Total	452.453.913.743	545.574.206.436	536.068.900.827	9,42

Sumber data : APBD Pemkab. Seram Bagian Timur, Tahun 2013-2015.



PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR

Dari data yang tersaji dalam tabel 3.6 diatas, dapat dilihat bahwa realisasi belanja daerah baik belanja langsung maupun belanja tidak langsung dalam kurun waktu tahun 2012 sampai dengan tahun 2014 terus mengalami kenaikan. Dalam tahun 2012 total belanja tidak langsung sebesar Rp.313.521.947.120,- dan belanja langsung sebesar Rp.138.931.966.623,-. Demikian juga dalam tahun 2013 total belanja tidak langsung mengalami kenaikan hingga menjadi sebesar Rp.380.322.551.706,- dan total belanja langsung juga mengalami kenaikan hingga menjadi sebesar Rp.165.251.654.730,-. Sedangkan total dalam tahun 2014 total belanja tidak langsung mengalami kenaikan hingga menjadi sebesar Rp.397.410.865.497,-. Sementara itu, pagu total belanja langsung dalm tahun 2014 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan belanja tahun 2013, hingga menjadi sebesar Rp.138.658.035.330,-.

Untuk melengkapi penjelasan mengenai pertumbuhan belanja tidak langsung dan belanja langsung Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur selama kurun tahun 2012 sampai dengan tahun 2014, dapat dilihat sebagaimana data yang terdapat dalam gambar 3.3 dibawah ini.

Gambar 3.3
Proporsi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung
Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2012-2014



Sumber data : DPPKAD Pemkab Seram Bagian Timur, Tahun 2013-2015.

Namun, proyeksi pagu anggaran yang telah dialokasikan untuk keperluan belanja daerah dalam rangka mendukung penyelenggaraan visi dan misi, serta



PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR

memenuhi kebutuhan belanja dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah sesuai tugas dan fungsi masing-masing perangkat daerah, sebagaimana telah ditampilkan dalam tabel 3.6, tidak dapat terealisasi secara maksimal. Sesuai ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan belanja daerah, berlandaskan pada prinsip pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan, dengan memperhatikan prestasi kerja setiap Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran.

Data tentang target pagu anggaran yang dialokasikan dan realisasi pagu anggaran yang dapat direalisasikan/diserap selama kurun tahun 2012-2014, dapat dilihat sebagaimana pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.7
Target dan Realisasi Belanja Daerah
Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2012-2014

Tahun	Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Bertambah/Berkurang (Rp.)	%
2012	584.164.234.122	452.453.913.843	131.710.320.279	77,45
2013	668.497.752.606	545.574.266.436	122.923.486.170	81,61
2014	711.751.754.146	536.068.900.827	175.682.853.319	75,32
Total	1.964.413.740.874	1.534.097.081.106	430.316.659.768	78,13

Sumber data : APBD Pemkab. Seram Bagian Timur, Tahun 2013-2015.

Dengan melihat data yang tertuang dalam tabel 3.7 tersebut diatas, dapat diketahui bahwa target yang telah ditetapkan tidak dapat terealisasi secara maksimal. Pada tahun 2012 total target belanja ditetapkan sebesar Rp. 584.164.234.122,-, namun realisasi daya serapnya hanya sebesar Rp. 452.453.913.843,- atau setara dengan 77,45%. Pada tahun 2013 total target belanja ditetapkan sebesar Rp. 668.497.752.606,-, namun realisasi daya serapnya hanya sebesar Rp. 545.574.266.436,- atau setara dengan 81,61%. Sedangkan pada tahun 2014 total target belanja ditetapkan sebesar Rp.711.751.754.146,-, dengan realisasi daya serapnya hanya sebesar Rp.536.068.900.827,- atau setara dengan 75,32%.

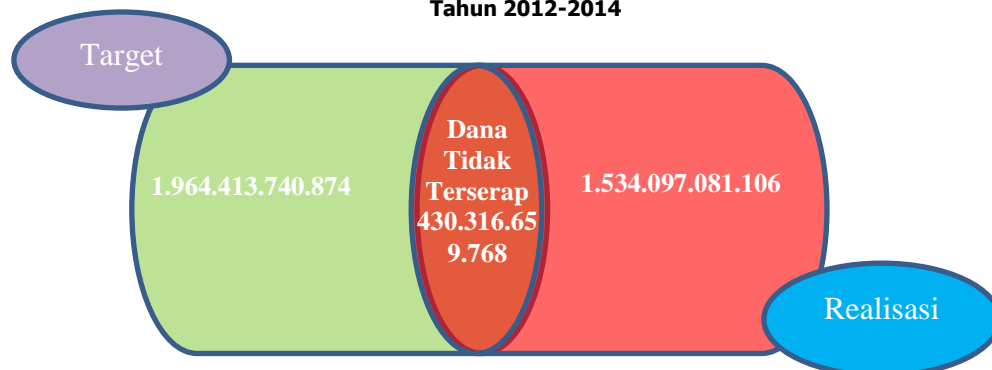


PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR

Ketidak optimalan realisasi daya serap alokasi pagu anggaran karena adanya kendala, antara lain (i) disebabkan keterlambatan dalam proses administrasi, baik administrasi pada proses penetapan APBD, proses dalam penetapan struktur organisasi, maupun keterlambatan dalam proses administrasi tender/pelelangan pekerjaan; (ii) ketidak sinkronan antara dokumen perencanaan dengan penganggaran dan ketidak konsistenan jumlah dan judul program antar dokumen perencanaan; dan (iii) lain-lain kegiatan administrasi terkait dengan proses pencairan dana.

Gambaran mengenai kinerja belanja daerah yang menguraikan tentang sisi pendanaan dan realisasi daya serap selama kurun waktu tahun 2012 sampai dengan tahun 2014, dapat dilihat sebagaimana data yang tersaji dalam gambar dibawah ini.

Gambar 3.4
Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur
Tahun 2012-2014



Sumber data : DPPKAD Pemkab Seram Bagian Timur, Tahun 2013-2015.

b. Analisis Proporsi Belanja Untuk Pemenuhan Kebutuhan Aparatur.

Belanja daerah, yaitu semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana, merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah. Belanja daerah, sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, agar dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek belanja dan dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang



PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR

penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu, yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah, yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan.

Sedangkan belanja penyelenggaraan urusan wajib, diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat tersebut, diwujudkan melalui prestasi kerja dalam pencapaian standar pelayanan minimal sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Belanja, menurut urusan pemerintahan yang penanganannya dalam bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan, dijabarkan dalam bentuk program dan kegiatan yang diklasifikasikan menurut urusan wajib dan urusan pilihan.

Klasifikasi belanja menurut fungsi yang digunakan untuk tujuan keselarasan dan keterpaduan pengelolaan keuangan negara terdiri dari : (i) pelayanan umum; (ii) ketertiban dan ketentraman; (iii) ekonomi; (iv) lingkungan hidup; (v) perumahan dan fasilitas umum; (vi) kesehatan; (vii) pariwisata dan budaya; (viii) pendidikan; dan (ix) perlindungan sosial. Klasifikasi belanja menurut organisasi, disesuaikan dengan susunan organisasi pada masing-masing pemerintah daerah dan Klasifikasi belanja menurut program dan kegiatan, disesuaikan dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Sedangkan belanja berdasarkan kelompok belanja, terdiri atas:

- 1) Belanja Tidak Langsung, merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, yang terdiri dari: Belanja Pegawai, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bagi Hasil, Belanja Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga; dan
- 2) Belanja Langsung, merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan capaian target pelaksanaan program dan kegiatan yang dianggarkan pada belanja Perangkat Daerah, yang terdiri dari : Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Modal.



PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR

3) Secara rinci, data dan informasi yang disajikan dalam tabel dibawah ini, merupakan realisasi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur Pemerintahan Kabupaten Seram Bagian Timur, untuk kurun waktu tahun 2012 sampai dengan tahun 2014. Demikian juga, data pada tabel berikutnya, merupakan uraian mengenai data dan informasi tentang Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2012 sampai dengan tahun 2014, yang menyajikan data dan informasi mengenai total belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur dalam kurun waktu tahun 2012 sampai dengan tahun 2014, serta data mengenai total pengeluaran (belanja dan pembiayaan pengeluaran) dalam kurun waktu tahun 2012 sampai dengan tahun 2014.

Tabel 3.8
Realisasi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur
Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2012-2014

No	Uraian	Tahun 2012 (Rp)	Tahun 2013 (Rp)	Tahun 2014 (Rp)
A	Belanja Tidak Langsung	80.877.055.863	90.134.591.107	148.400.901.763
1	Belanja Pegawai	75.753.828.363	81.289.843.226	133.143.599.783
2	Belanja Hibah	730.000.000	3.196.307.081	6.874.245.180
3	Belanja Bantuan Sosial	450.000.000	1.458.697.500	-
4	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa	3.768.227.500	3.485.743.300	6.633.056.800
5	Belanja Tak Terduga	175.000.000	704.000.000	1.750.000.000
B	Belanja Langsung	145.349.900.560	160.690.644.986	175.441.970.669
1	Belanja Pegawai	12.202.309.250	13.211.952.185	13.382.541.071
2	Belanja Barang dan Jasa	63.681.607.948	83.881.350.467	80.845.069.183
3	Belanja Modal	69.465.983.362	63.597.342.334	81.214.360.415
C	Pengeluaran Pembiayaan	3.000.000.000	500.000.000	500.000.000
1	Penyertaan Modal	3.000.000.000	500.000.000	500.000.000
2	Pembayaran Pokok Utang	-	19.646.222.356	-
	Total	229.226.956.411	250.825.236.094	324.342.872.432

Sumber data : APBD Pemkab. Seram Bagian Timur, Tahun 2013-2015.

Dengan menyimak data yang terdapat dalam tabel 3.8 tersebut diatas, bahwa realisasi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur terus mengalami kenaikan. Kenaikan tersebut disebabkan antara lain (i) peningkatan belanja gaji dan tunjangan pegawai, karena adanya penambahan pegawai baru dan pembayaran tunjangan jabatan terkait dengan adanya penyesuaian tunjangan jabatan pada beberapa pejabat di Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur; (ii) adanya peningkatan sarana dan prasarana untuk



PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR

mendukung kinerja aparatur; (iii) adanya peningkatan belanja untuk peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur: dan (iv) terjadi peningkatan pemenuhan kebutuhan belanja untuk kepentingan pelayanan dasar kepada masyarakat, yaitu terkait dengan adanya kebijakan nasional dari pemerintah pusat dalam penerimaan pegawai baru dilingkungan Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur.

Dari uraian tersebut diatas, maka dalam tabel 3.9 dibawah ini dapat dilihat data tentang proporsi belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur terhadap total APBD untuk kurun waktu 3 (tiga) tahun yang lalu.

Tabel 3.9
Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur
Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2012-2014

No	Tahun	Total belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur (Rp)	Total pengeluaran (Belanja + Pembiayaan Pengeluaran) (Rp)	Prosentase (%)
		(a)	(b)	(a) / (b) x 100%
1.	2012	80.877.055.863	229.226.956.411	35,28
2.	2013	90.134.591.107	250.825.236.094	35,86
3	2014	148.400.901.763	324.342.872.432	44,83

Sumber data : APBD Pemkab. Seram Bagian Timur, Tahun 2013-2015.

Dari data tersebut di atas menunjukkan, bahwa selama kurun waktu 3 (tiga) terakhir tahun 2012 sampai dengan tahun 2014, total belanja daerah dalam rangka pemenuhan kebutuhan aparatur tiap tahunnya terus mengalami peningkatan. Jika pada 2012 total belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur sebesar Rp.80.877.055.863,-, maka dalam tahun 2013 mengalami peningkatan hingga menjadi Rp.90.134.591.107. Sedangkan proporsi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur dalam tahun 2014 mengalami peningkatan secara signifikan hingga menjadi Rp. 148.400.901.763,-.

Belanja pegawai yang terus meningkat dalam kurun waktu 3 (tiga) terakhir, selain karena adanya penerimaan pegawai baru dan belanja untuk pemenuhan tunjangan jabatan, juga untuk pemenuhan belanja terkait dengan kebijakan Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur yang terus menerus berupaya meningkatkan kapasitas dan kompetensi pegawai dalam memberikan pelayanan publik yang semakin profesional. Harapannya, dalam



PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR

5 (lima) tahun kedepan pelayanan dasar kepada masyarakat akan semakin meningkat kuantitas dan kualitasnya.

Data mengenai totalitas prosentase proporsi belanja pegawai Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur tahun 2012-2014 terhadap total belanja daerah, dapat dilihat sebagaimana pada grafik 3.2 dibawah ini.

Grafik 3.2
Prosentase Proporsi Belanja Pegawai terhadap Total Belanja Daerah
Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2012-2014

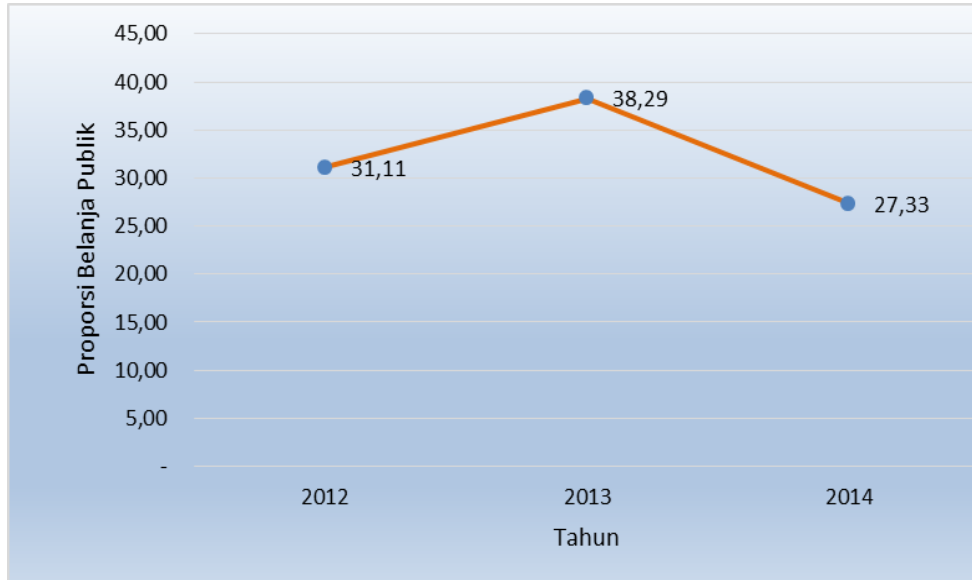


Selain untuk memenuhi kebutuhan belanja (belanja tidak langsung) pegawai, kapasitas riil kemampuan keuangan daerah juga dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan belanja langsung, yaitu alokasi dana untuk memenuhi kebutuhan belanja publik, seperti belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal. Gambaran mengenai proporsi belanja langsung pemerintah daerah (belanja publik) terhadap total belanja daerah Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur dalam kurun waktu tahun 2012 sampai dengan tahun 2014, dapat dilihat sebagaimana data yang terdapat dalam Grafik 3.3 dibawah ini.



PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR

Grafik 3.3
Prosentase Proporsi Belanja Publik terhadap Total Belanja Daerah
Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2012-2014



c. Analisis Belanja Periodik dan Pengeluaran Pembiayaan Yang Wajib dan Mengikat Serta Prioritas Utama.

Analisis terhadap realisasi pengeluaran wajib dan mengikat dilakukan untuk menghitung kebutuhan pendanaan belanja dan pengeluaran pembiayaan yang tidak dapat dihindari atau harus dibayar dalam suatu tahun anggaran. Belanja periodik yang wajib dan mengikat adalah pengeluaran yang wajib dibayar serta tidak dapat ditunda pembayarannya dan dibayar setiap tahun oleh Pemerintah Daerah seperti gaji dan tunjangan pegawai serta anggota dewan, bunga, belanja jasa kantor, sewa kantor yang telah ada kontrak jangka panjang atau belanja sejenis lainnya.

Belanja periodik prioritas utama adalah pengeluaran yang harus dibayar setiap periodik oleh Pemerintah Daerah dalam rangka keberlangsungan pelayanan dasar prioritas Pemerintah Daerah yaitu pelayanan pendidikan dan kesehatan, seperti honorarium guru dan tenaga medis serta belanja sejenis lainnya.

Data perkembangan Pengeluaran Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Kabupaten Seram Bagian Timur kurun waktu tahun 2012 sampai dengan tahun 2014, dapat dilihat sebagaimana yang terdapat pada tabel dibawah ini.



PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR

Tabel 3.10
Perkembangan Pengeluaran Wajib dan Mengikat Serta Prioritas Utama Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2012-2014

No	Uraian	Tahun 2012 (Rp)	Tahun 2013 (Rp)	Tahun 2014 (Rp)
A	Belanja Tidak Langsung	80.877.055.861	90.134.591.107	148.400.901.763
1	Belanja Pegawai	75.753.828.362	81.289.843.226	133.143.599.783
2	Belanja Hibah	730.000.000	3.196.307.080	6.874.245.180
3	Belanja Bantuan Sosial	450.000.000	1.458.697.500	-
4	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa	3.768.227.500	3.485.743.300	6.633.056.800
5	Belanja Tak Terduga	175.000.000	704.000.000	1.750.000.000
B	Belanja Langsung	145.349.900.558	160.690.644.986	175.441.970.669
1	Belanja Pegawai	12.202.309.250	13.211.952.185	13.382.541.071
2	Belanja Barang dan Jasa	63.681.607.947	83.881.350.467	80.845.069.183
3	Belanja Modal	69.465.983.361	63.597.342.334	81.214.360.415
C	Pengeluaran Pembiayaan	3.000.000.000	500.000.000	500.000.000
1	Penyertaan Modal	3.000.000.000	500.000.000	500.000.000
2	Pembayaran Pokok Utang	-	19.646.222.356	-
	Total	229.226.956.419	250.825.236.093	324.342.872.432

Sumber data : APBD Pemkab. Seram Bagian Timur, Tahun 2013-2015.

Dengan telah diketahuinya data mengenai perkembangan pengeluaran wajib dan mengikat serta prioritas utama tahun 2012 sampai tahun 2014 sebagaimana tersaji pada tabel diatas, selanjutnya dijadikan sebagai landasa untuk menentukan kebutuhan anggaran belanja yang tidak dapat dihindari dan tidak dapat ditunda dalam 5 (lima) tahun kedepan, serta sekaligus dijadikan sebagai masukan untuk penghitungan kapasitas riil keuangan daerah dan analisis kerangka pendanaan.

d. Analisis Proyeksi Belanja Daerah.

Analisis proyeksi belanja daerah bertujuan untuk memperoleh gambaran kebutuhan belanja tidak langsung daerah dan pengeluaran pembiayaan yang bersifat wajib dan mengikat serta prioritas utama. Analisis dilakukan dengan proyeksi 5 (lima) tahun ke depan untuk penghitungan kerangka pendanaan pembangunan daerah.

Proyeksi kebutuhan anggaran untuk memenuhi pengeluaran wajib dan mengikat serta prioritas utama pemerintah kabupaten seram bagian timur tahun 2016 sampai dengan tahun 2020, dapat dilihat sebagaimana data yang terdapat pada tabel dibawah ini.



PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR

Tabel 3.11
Proyeksi Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan Yang Wajib dan Mengikat Serta Prioritas Utama Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2016 - 2020

No	Uraian	Proyeksi Pengeluaran				
		Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020
A	Belanja Tidak Langsung	193.158.185.617	221.166.122.531	253.235.210.297	289.954.315.790	331.997.691.579
1	Belanja Pegawai	173.792.340.796	198.992.230.211	227.846.103.591	260.883.788.611	298.711.937.959
2	Belanja Hibah	8.189.288.280	9.376.735.081	10.736.361.667	12.293.134.109	14.075.638.555
3	Belanja Bantuan Sosial	2.290.000.000	2.622.050.000	3.002.247.250	3.437.573.101	3.936.021.200
4	Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintahan Desa	8.658.129.041	9.913.557.752	11.351.023.626	12.996.922.052	14.881.475.749
5	Belanja Tak Terduga	228.427.500	261.549.488	299.474.163	342.897.918	392.618.116
B	Belanja Langsung	230.008.809.597	263.360.086.988	301.547.299.601	345.271.658.043	395.336.048.459
1	Belanja Pegawai	17.544.845.907	20.088.848.564	23.001.731.602	26.336.982.688	30.155.845.178
2	Belanja Barang dan Jasa	105.989.906.826	121.358.443.315	138.955.417.595	159.103.953.146	182.174.026.352
3	Belanja Modal	106.474.056.864	121.912.795.109	139.590.150.399	159.830.722.206	183.006.176.925
C	Pengeluaran Pembiayaan	12.000.000.000	18.000.000.000	20.000.000.000	25.000.000.000	30.000.000.000
1	Pembentukan Dana Cadangan	12.000.000.000	18.000.000.000	20.000.000.000	25.000.000.000	30.000.000.000
2	Pembayaran Pokok Utang	-	-	-	-	-
	Total Belanja Wajib Dan Pengeluaran Yang Wajib Mengikat Serta Prioritas Utama	435.166.995.214	492.526.209.519	574.782.509.898	660.225.973.833	757.333.740.038

3. Analisis Pembiayaan Daerah.

Analisis pembiayaan daerah dilakukan dengan bertujuan untuk memperoleh gambaran dari pengaruh kebijakan pembiayaan daerah pada tahun-tahun anggaran sebelumnya terhadap surplus/defisit belanja daerah sebagai bahan untuk menentukan kebijakan pembiayaan dimasa datang dalam rangka penghitungan kapasitas pendanaan pembangunan daerah.

a. Analisis Sumber Penutup Defisit Riil.

Analisis sumber penutup defisit riil dilakukan untuk memberi gambaran masa lalu tentang kebijakan anggaran untuk menutup defisit riil anggaran pemerintah daerah. Dalam kurun waktu tahun 2012 sampai dengan tahun



PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR

2014. Perkembangan defisit riil Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur, dapat dilihat sebagaimana data yang terdapat dalam tabel dibawah ini.

Tabel 3.12
Penutup Defisit Riil Anggaran
Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2012-2014

No	Uraian	Tahun 2012 (Rp)	Tahun 2013 (Rp)	Tahun 2014 (Rp)
1.	Realisasi Pendapatan Daerah	470.291.867.373	536.985.405.535	599.936.636.938
	Dikurangi realisasi:			
2.	Belanja Daerah	452.453.913.843	545.574.266.436	536.068.900.827
3.	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	3.000.000.000	500.000.000	500.000.000
A	Defisit riil	-	-	-
	Ditutup oleh realisasi Penerimaan Pembiayaan:			
4.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya	-	14.837.953.530	5.749.092.629
5.	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-
6.	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang di Pisahkan	-	-	-
7.	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-
8.	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-
9.	Penerimaan Piutang Daerah	-	-	-
B	Total Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah	455.453.913.843	546.074.266.436	536.568.900.827
A-B	Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan	14.837.953.530	(5.749.092.629)	69.116.828.740

Dari data sebagaimana tersaji pada tabel 3.12 diatas dapat diketahui, bahwa dalam kurun waktu tahun 2012 sampai dengan tahun 2014 terjadi surplus dan defisit anggaran, dengan penjelasan sebagai berikut : (i) dalam tahun 2012 terdapat surplus anggaran sebesar Rp.14.837.953.530,-. Namun pada tahun 2013, defisit anggaran sebesar Rp.5.749.092.629,- dan dalam tahun 2014 terdapat surplus anggaran kembali sebesar Rp.69.116.828.740,-. Selanjutnya berdasarkan data pada tabel dimaksud, dilakukan analisis dengan tujuan untuk mengetahui gambaran komposisi penutup defisit riil anggaran, sebagaimana data yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini.



PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR

Tabel 3.13
Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran
Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2012-2014

No.	Uraian	Proporsi dari total defisit riil		
		Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014
1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya	108.641.586.980	120.516.063.429	110.643.962.328
2.	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-
3.	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang di Pisahkan	1.000.000.000	1.702.811.506	2.678.131.025
4.	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-
5.	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-
6.	Penerimaan Piutang Daerah	-	-	-

Sumber data : APBD Kab. Seram Bagian Timur, 2013-2015.

b. Analisis Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan.

Analisis sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan bertujuan untuk mengetahui dan memperoleh gambaran secara riil mengenai komposisi sisa lebih pembiayaan anggaran sebagai salah satu point penting yang akan dipergunakan dalam penghitungan kapasitas riil untuk memenuhi kebutuhan pendanaan pembangunan daerah.

Analisis sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan pada Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur dalam kurun waktu tahun 2012 sampai dengan tahun 2014, dapat dilihat sebagaimana data yang terdapat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.14
Sisa Lebih (Riil) Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan
Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2012-2014

No.	Uraian	Tahun 2012 (Rp)	Tahun 2013 (Rp)	Tahun 2014 (Rp)
1.	Saldo kas neraca daerah	108.641.586.980	120.539.372.429	110.643.962.328
	Dikurangi:	-	-	-
2.	Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan	-	-	-
3.	Kegiatan lanjutan	-	-	-
	Sisa Lebih (Riil) Pembiayaan Anggaran	108.641.586.980	120.539.372.429	110.643.962.328

Sumber data : APBD Kab. Seram Bagian Timur, 2013-2015.

3. 1.2. Analisis Neraca Daerah.

Neraca daerah, adalah data dan informasi tentang gambaran berbagai hal tentang Aset (aset lancar, aset tetap dan aset lainnya), Kewajiban (jangka



PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR

pendek maupun jangka panjang) dan Ekuitas (ekuitas dana lancar dan ekuitas dana investasi) suatu pemerintah daerah. Oleh karena itu, penyusunan neraca daerah bertujuan untuk mengetahui kemampuan keuangan pemerintah daerah melalui perhitungan rasio likuiditas, solvabilitas dan rasio aktivitas, serta kemampuan aset daerah untuk penyediaan dana pembangunan daerah. Neraca Daerah, juga bertujuan memberikan informasi mengenai posisi keuangan berupa aset, kewajiban (utang), dan ekuitas dana pada tanggal neraca tersebut dikeluarkan.

Sejalan dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, neraca daerah merupakan salah satu laporan keuangan yang harus dibuat oleh setiap pemerintah daerah. Laporan keuangan dimaksud sangat penting bagi manajemen pemerintah daerah, tidak hanya dalam rangka memenuhi kewajiban peraturan perundang-undangan yang berlaku saja, tetapi juga sebagai dasar untuk pengambilan keputusan dalam rangka pengelolaan sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh daerah secara efisien dan efektif.

Berkaitan dengan hal tersebut diatas, perkembangan neraca Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur mengalami pertumbuhan yang positif seiring dengan menggeliatnya berbagai aktivitas pembangunan yang secara gencar dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan. Data yang ada selama 3 (tiga) tahun terakhir menunjukkan, bahwa total pertumbuhan aset Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur dalam kurun waktu tahun 2012-2014 kecuali pada tahun 2014, terus mengalami peningkatan yang signifikan. Jika dalam tahun 2012 pertumbuhan aset masih sebesar Rp.187.730.509.329,-, maka dalam tahun 2013 mengalami pertumbuhan hingga total pertumbuhan sebesar Rp.203.979.001.735,-. Namun dalam tahun 2014, mengalami penurunan hingga total menjadi Rp. 195.553.403.471,-. Pertumbuhan tersebut dipicu oleh tumbuh dan berkembangnya berbagai kegiatan usaha, baik yang dilaksanakan oleh kelompok pengusaha menengah dan besar, maupun usaha oleh masyarakat yang semakin bermunculan dari waktu ke waktu.

Sedangkan perkembangan total kewajiban kepada pihak ketiga dan ekuitas dana Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur dalam 3 (tiga) tahun terakhir



PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR

mengalami pasang surut. Jika dalam tahun 2012 total kewajiban kepada pihak ketiga dan ekuitas dana sebesar Rp.108.641.586.980,-, maka dalam perjalanannya sampai dengan akhir tahun 2013 mengalami peningkatan, sehingga total mencapai sebesar Rp.120.539.372.429,-. Namun dalam tahun 2014 mengalami penurunan kembali, sehingga total mencapai Rp.110.643.962.328,-. Hal ini memberikan indikasi, bahwa Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur memiliki potensi yang cukup menjanjikan jika dikelola secara efektif dan efisien dalam rangka mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakatnya.

Data dan informasi tentang Pertumbuhan Neraca Daerah Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur dalam kurun waktu tahun 2012 – 2014, dapat dilihat sebagaimana data yang tersaji dalam tabel dibawah ini.

Tabel 3.15
Prosentase Rata-Rata Pertumbuhan Neraca
Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2012-2014

No.	Uraian	Tahun 2012 (Rp.)	Tahun 2013 (Rp.)	Tahun 2014 (Rp.)	Prosentase Rata-rata Pertumbuhan
1.	ASET	187.730.509.329	203.979.001.735	195.553.403.471	6,39%
1.1.	Aset Lancar	-	-	-	
1.1.1.	Kas	-	-	-	
1.1.2.	Piutang	-	-	-	
1.1.3.	Persediaan	-	-	-	
1.2.	Aset Tetap	181.730.509.329	202.979.001.735	194.553.403.471	7,92%
1.2.1.	Tanah	711.660.000	-	75.000.000	0,00%
1.2.2.	Peralatan dan mesin	29.167.393.600	25.531.541.382	24.785.609.299	7,69%
1.2.3.	Gedung dan bangunan	66.268.661.894	58.381.926.184	46.173.172.200	16,41%
1.2.4.	Jalan, irigasi, dan jaringan	81.128.903.335	115.015.879.869	123.384.521.472	24,52%
1.2.5.	Aset tetap lainnya	4.453.890.500	4.049.654.300	135.100.500	52,87%
1.2.6.	Konstruksi dalam pengerjaan	-	-	-	0,00%
1.3.	Aset Lainnya	6.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	41,67%
1.3.1.	Tagihan penjualan angsuran	-	-	-	
1.3.2.	Tagihan tuntutan ganti kerugian daerah	-	-	-	
1.3.3.	Kemitraan dengan pihak kedua	6.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	41,67%
1.3.4.	Aset tak berwujud	-	-	-	
	Jumlah Aset Daerah	187.730.509.329	203.979.001.735	195.553.403.735	54,33%
2.	KEWAJIBAN	-	-	-	
2.1.	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	-	-	-	
2.1.1.	Utang perhitungan pihak ketiga	-	-	-	
2.1.2.	Uang muka dari kas daerah	-	-	-	
2.1.3.	Pendapatan diterima dimuka	-	-	-	
3.	Ekuitas Dana	108.641.586.980	120.539.372.429	110.643.962.328	9,58%



PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR

No.	Uraian	Tahun 2012 (Rp.)	Tahun 2013 (Rp.)	Tahun 2014 (Rp.)	Prosentase Rata-rata Pertumbuhan
3.1	Ekuitas Dana Lancar	108.641.586.980	120.539.372.429	110.643.962.328	9,58%
3.1.1	SILPA	108.641.586.980	120.539.372.429	110.643.962.328	9,58%
3.1.2	Cadangan piutang	-	-	-	
3.1.3	Pendapatan Yang Ditangguhkan	-	-	-	
3.1.4	Cadangan persediaan	-	-	-	
3.1.5	Dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka pendek	-	-	-	
3.2.	Ekuitas Dana Investasi	-	-	-	
3.2.1	Diinvestasikan dalam investasi jangka panjang	-	-	-	
3.2.2	Diinvestasikan dalam aset tetap	-	-	-	
3.2.3	Diinvestasikan dalam aset lainnya	-	-	-	
3.2.4	Dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka panjang	-	-	-	
3.3	Ekuitas Dana Cadangan	-	-	-	
3.3.1	Diinvestasikan dalam dana cadangan	-	-	-	
	Jumlah Kewajiban dan Ekuitas Dana	108.641.586.980	120.539.372.429	110.643.962.328	9,58%

Sumber data : DPPKAD Kab. Seram Bagian Timur, 2013-2015.

Dari data yang tertuang pada tabel 3.15 tersebut diatas memberi makna, bahwa sampai dengan tahun 2014, Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur memiliki aset senilai Rp.587.262.914.535,-, dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 6,39% per tahun. Sementara dari sisi kewajiban kepada pihak ketiga yang timbul disebabkan adanya konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggung jawab untuk bertindak di masa lalu sampai akhir tahun 2014 tidak ada. Kewajiban dapat diklasifikasikan menjadi dua, (i) Kewajiban Jangka Pendek; dan (ii) Kewajiban Jangka Panjang.

Sementara itu, ekuitas dana merupakan selisih antara aset dengan kewajiban pemerintah daerah yang meliputi (i) Ekuitas Dana Lancar, adalah selisih antara aset lancar dan kewajiban jangka pendek; (ii) Ekuitas Dana Investasi, merupakan selisih antara jumlah nilai investasi permanen, aset tetap dan aset lainnya (tidak termasuk dana cadangan) dengan jumlah nilai utang jangka panjang; dan (iii) Ekuitas Dana Cadangan, merupakan kekayaan pemerintah daerah yang diinvestasikan dalam dana cadangan untuk tujuan tertentu di masa mendatang. Sampai dengan akhir tahun 2014, nilai ekuitas



PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR

dana Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur telah mencapai Rp.110.643.962.328,-.

3.2. Proyeksi Kerangka Pendanaan Berdasarkan Data Masa Lalu

Dengan mempedomani prinsip perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi, sebagaimana telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan terkait, maka kebijakan penetapan besaran pagu belanja daerah dirumuskan dan disusun dengan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari setiap program yang direncanakan, dengan memperhatikan prestasi kerja setiap perangkat daerah dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya. Tujuannya adalah dalam rangka meningkatkan akuntabilitas perencanaan dan anggaran, serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran ke dalam program. Berdasarkan pertimbangan keterbatasan anggaran yang tersedia satu sisi. Pada sisi lain banyaknya kebutuhan program yang dibutuhkan oleh masyarakat, maka program-program yang akan dibiayai harus selektif dan memberi dampak positif, serta memiliki daya ungkit yang signifikan dalam memecahkan berbagai permasalahan pembangunan dan isu-isu strategis.

Terkait dengan hal tersebut diatas, maka untuk mendukung analisis terhadap proyeksi pendapatan, proyeksi belanja dan proyeksi pembiayaan untuk kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan, diperlukan data dan informasi yang akurat, terkini dan dapat dipertanggung jawab, yang selanjutnya dilakukan telaah dan analisis yang seksama. Data dan informasi yang ditelaah dan di analisis tersebut meliputi data dan informasi tentang pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah kurun waktu sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun yang lalu.

Telaah dan Analisis ini sangat penting dalam upaya untuk mendapatkan gambaran mengenai besaran anggaran belanja daerah dan pembiayaan daerah yang telah dianggarkan pada periode berkenaan, serta langkah-langkah kebijakan yang telah dirumuskan untuk mencapainya, termasuk dukungan terhadap pencapaian target sasaran prioritas nasional dan program prioritas provinsi sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014.

Langkah selanjutnya yakni, penyusunan rumusan kebijakan belanja daerah. Prinsip perumusan belanja daerah dirumuskan melalui berbagai pendekatan yakni, proporsional, efisien, efektif, transparan, akuntabel dan dilaksanakan dengan



PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR

berpedoman pada anggaran berbasis kinerja, serta berdasarkan kepada agenda-agenda pembangunan yang secara umum dapat dicirikan melalui:

1. Pencapaian rencana pembangunan yang tercantum dalam dokumen RPJMD Tahun 2016-2021;
2. Dipergunakan untuk membiayai program prioritas dan kegiatan prioritas dalam upaya mewujudkan target visi dan misi Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur dan program prioritas dan kegiatan prioritas dalam rangka pencapaian target penyelenggaraan urusan pemerintahan sesuai kewenangan, tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
3. Pencapaian target pembangunan daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam dokumen RPJPD Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2005-2025, yang bermuara pada pencapaian target Indeks Pembangunan Manusia (IPM);
4. Mendukung pembiayaan untuk program prioritas dan kegiatan prioritas lanjutan, yaitu program-program unggulan kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, yang belum terselesaikan dan/atau belum ditetapkan dalam dokumen RPJMD Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2010-2015; dan
5. Mendukung target pencapaian program-program nasional yang bersifat strategis yang terdapat dalam Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2020 sebagai penjabaran dari NAWA CITA.

Terkait dengan uraian sebagaimana tersebut diatas, pada tabel 3.16 dibawah ini disajikan data proyeksi pendapatan Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan.

Tabel 3.16
Proyeksi Pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur
Tahun 2016-2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Pendapatan Asli Daerah	16.793.894.042	19.145.039.208	20.998.279.004	23.938.038.065	26.255.240.149
a.	Pajak daerah	3.370.621.573	3.842.508.593	4.214.463.425	4.804.488.305	5.269.562.773
b.	Retribusi daerah	5.606.413.509	6.391.311.400	7.009.990.343	7.991.388.992	8.764.955.446
c.	Hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan	1.108.720.480	1.263.941.347	1.386.290.869	1.580.371.591	1.733.351.561
d.	Lain-lain PAD yang sah	6.708.138.480	7.647.277.867	8.387.534.364	9.561.789.175	10.487.370.368
2.	Dana Perimbangan	712.222.447.403	811.933.590.040	890.528.761.556	1.015.202.788.174	1.113.474.418.069



PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
a.	Dana bagi hasil pajak /bagi hasil bukan pajak	90.343.745.661	102.991.870.054	112.961.483.075	128.776.090.706	141.241.616.286
b.	Dana alokasi umum	545.950.463.869	622.383.528.811	682.630.254.400	778.198.490.016	853.528.103.850
c.	Dana alokasi khusus	75.928.237.872	86.558.191.174	94.937.024.080	108.228.207.451	118.704.697.932
d.	Dana bagi hasil cukai	-	-	-	-	-
3.	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	23.830.340.268	27.166.587.905	29.796.313.615	33.967.797.521	37.255.880.321
a.	Pendapatan Hibah	-	-	-	-	-
b.	Dana darurat	-	-	-	-	-
c.	Pendapatan Lainnya	-	-	-	-	-
d.	Dana penyesuaian dan otonomi khusus	14.785.684.976	16.855.680.873	18.487.310.782	21.075.534.291	23.115.646.010
e.	Dana bagi hasil pajak dari provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya	7.301.000.666	8.323.140.760	9.128.820.785	10.406.855.695	11.414.239.326
f.	Bantuan keuangan dari provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya	1.743.654.624	1.987.766.272	2.180.182.047	2.485.407.534	2.725.994.983
	TOTAL	752.846.681.715	858.245.217.155	941.323.354.176	1.073.108.623.761	1.176.985.538.541

Untuk melengkapi uraian penjelasan mengenai totalitas proyeksi pendapatan daerah Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur, dibawah ini ditampilkan grafik yang mengilustrasikan potensi yang kecenderungan peningkatan pendapatan daerah dari tahun ke tahun kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan, baik yang bersumber dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan dari pemerintah pusat dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Grafik 3.4
Proyeksi Pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2016-2020





PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR

Berdasarkan data tentang total pendapatan daerah dalam 5 (lima) tahun anggaran yang akan datang, sebagaimana telah diuraikan dan disajikan datanya pada tabel-tabel diatas, selanjutnya data dimaksud dipergunakan untuk menghitung proyeksi belanja sepanjang tahun 2016 sampai dengan tahun 2020, baik untuk membiayai belanja tidak langsung, maupun untuk keperluan belanja langsung. Data tentang belanja tidak langsung dan belanja langsung dimaksud, selanjutnya dapat dilihat sebagaimana tabel 3.17 dibawah ini.

Tabel 3.17
Proyeksi Pertumbuhan Belanja Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur
Tahun 2016-2020

No.	Uraian	TAHUN				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Belanja Tidak Langsung	666.199.781.995	772.392.027.245	858.127.542.270	994.913.072.507	1.105.348.423.556
1.1	Belanja Pegawai	376.878.262.268	436.952.657.274	485.454.402.231	562.835.833.947	625.310.611.515
1.2	Belanja Barang	241.240.834.251	279.694.623.231	310.740.726.409	360.272.798.199	400.263.078.799
1.3	Belanja Bunga	-	-	-	-	-
1.4	Belanja Subsidi	-	-	-	-	-
1.5	Belanja Hibah	17.709.339.693	20.532.208.440	22.811.283.576	26.447.402.179	29.383.063.820
1.6	Belanja Bantuan Sosial	5.480.064.561	6.353.586.852	7.058.834.993	8.184.013.290	9.092.438.766
1.7	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kab/Kota dan Pemerintah Desa	-	-	-	-	-
1.8	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kab/Kota dan Pemerintahan Desa	17.087.993.372	19.811.819.515	22.010.931.481	25.519.473.960	28.352.135.569
1.9	Belanja Tidak Terduga	7.803.287.851	9.047.131.934	10.051.363.579	11.653.550.933	12.947.095.087
2.	Belanja Langsung	250.602.954.959	290.549.065.979	322.800.012.303	374.254.334.264	415.796.565.367
2.1	Belanja Tanah	96.607.005	112.006.162	124.438.846	144.274.398	160.288.856
2.2	Belanja Peralatan dan Mesin	31.926.179.753	37.015.212.806	41.123.901.427	47.679.051.315	52.971.426.010
2.3	Belanja Jalan, Jaringan dan Irigasi	158.930.787.770	184.264.355.341	204.717.698.784	237.349.699.970	263.695.516.666
2.4	Belanja Gedung dan Bangunan	59.475.358.368	68.955.730.492	76.609.816.576	88.821.421.339	98.680.599.107
2.5	Belanja Aset Tetap Lainnya	-	-	-	-	-
2.6	Belanja Aset Lainnya	174.022.062	201.761.179	224.156.670	259.887.243	288.734.727
	Total	916.802.736.954	1.062.941.093.224	1.180.927.554.572	1.369.167.406.771	1.521.144.988.923

Tabel 3.17 diatas, dapat dilihat bahwa realisasi belanja daerah kurun waktu tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 terus mengalami kenaikan baik belanja langsung maupun belanja tidak langsung. Dalam tahun 2016 total belanja Rp.916.802.736.954,-. Demikian juga dalam tahun 2017 total belanja mengalami kenaikan sebesar



PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR

Rp.1.062.941.093.224,-. Pada tahun 2018 total belanja masih mengalami kenaikan menjadi sebesar Rp.1.180.927.554.572,-. Pada tahun 2019 terus mengalami kenaikan menjadi sebesar Rp.1.369.167.406.771,-. Dan pada tahun 2020 naik menjadi sebesar Rp.1.521.144.988.923,- atau rata-rata kenaikan sebesar 13,39%.

Selanjutnya, dibawah ini adalah angka-angka proyeksi pertumbuhan belanja Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur kurun waktu tahun 2016 sampai dengan tahun 2020, sebagaimana data yang terdapat pada gambar 3.5.

Gambar 3.5
Proyeksi Pertumbuhan Belanja Daerah
Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2016-2020



3.3. Analisa Kerangka Pendanaan.

Analisis kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan jangka menengah daerah selama 5 (lima) tahun ke depan. Langkah awal yang harus dilakukan adalah mengidentifikasi seluruh penerimaan daerah sebagaimana telah dihitung pada bagian di atas dan ke pos-pos mana sumber penerimaan tersebut akan dialokasikan. Suatu kapasitas riil keuangan daerah adalah total penerimaan daerah setelah dikurangkan dengan berbagai pos atau belanja dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama.



PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR

Sebelum dialokasikan ke berbagai pos belanja dan pengeluaran, besaran masing-masing sumber penerimaan memiliki kebijakan pengalokasian yang harus diperhatikan, antara lain:

1. Penerimaan retribusi pajak diupayakan alokasi belanjanya pada program atau kegiatan yang berhubungan langsung dengan peningkatan layanan dimana retribusi pajak tersebut dipungut.
2. Penerimaan dari pendapatan hasil pengelolaan aset daerah yang dipisahkan dialokasikan kembali untuk upaya-upaya peningkatan kapasitas dimana dana penyertaan dialokasikan sehingga menghasilkan tingkat pengembalian investasi terbaik bagi kas daerah.
3. Penerimaan dana alokasi umum diprioritaskan bagi belanja umum pegawai dan operasional rutin pemerintahan daerah.
4. Penerimaan dari dana alokasi khusus dialokasikan sesuai dengan tujuan dimana dana tersebut dialokasikan.
5. Penerimaan dana bagi hasil agar dialokasikan secara memadai untuk perbaikan layanan atau perbaikan lingkungan sesuai jenis dana bagi hasil didapat.

Data mengenai kapasitas riil kemampuan keuangan Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur untuk kurun waktu tahun 2016 sampai dengan tahun 2020, yang akan dipergunakan untuk membiayai pembangunan daerah, dapat dilihat sebagaimana data yang terdapat dalam tabel 3.18 di bawah ini.

Tabel 3.18
Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah
Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2016-2020

No.	Uraian	Proyeksi				
		Tahun 2016 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)	Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
1.	Pendapatan	752.846.681.715	858.245.217.155	941.323.354.176	1.073.108.623.761	1.176.985.538.541
2.	Pencairan dana cadangan (sesuai Perda)	-	-	-	-	-
3.	Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran	98.679.566.096	88.811.609.486	79.930.448.534	71.937.403.684	64.743.663.316
	Total penerimaan	851.526.247.811	947.056.826.641	1.021.253.802.710	1.145.046.027.445	1.241.729.201.857
	Dikurangi:					
4.	Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama	435.166.995.214	492.526.209.519	574.782.509.898	660.225.973.833	757.333.740.038
	Kapasitas riil kemampuan keuangan	416.359.252.597	454.530.617.122	446.471.292.812	484.820.053.612	484.395.461.819



PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR

Setelah dapat diketahui kapasitas riil kemampuan keuangan daerah untuk membiayai pembangunan Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur untuk jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan, tahap berikutnya adalah rencana penggunaan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah untuk memenuhi kebutuhan anggaran belanja langsung dan belanja tidak langsung dalam rangka pendanaan program pembangunan jangka menengah daerah selama 5 (lima) tahun ke depan.

Kapasitas riil kemampuan keuangan daerah dan program yang telah ditetapkan sebagai agenda kerja bupati dan wakil bupati untuk selama 5 (lima) tahun kedepan masih bersifat indikatif, karena kapasitas riil kemampuan keuangan dimaksud setiap saat dapat berubah. Perubahan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah pada umumnya sangat dipengaruhi oleh antara lain (i) adanya kebijakan pemerintah pusat terkait adanya gejolak perekonomian, baik dalam skala nasional, regional maupun internasional yang terjadi dibelahan dunia lainnya; (ii) adanya asumsi-asumsi pertumbuhan ekonomi makro pemerintah daerah yang telah ditetapkan dalam RPJMD sebagai landasan untuk proyeksi perhitungan penganggaran 5 (lima) tahun kedepan, ternyata tidak bisa terealisasi; dan (iii) terjadi perubahan beberapa indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen RPJMD, yang ternyata tidak dapat dicapai dan/atau tidak sesuai lagi dengan kondisi dilapangan.

Terkait dengan uraian tersebut diatas, maka perlu ada terobosan kebijakan program sebagai solusinya. Kebijakan dimaksud dapat berupa (i) program baru yang mengakomodir berbagai sasaran, strategi dan target indikator kinerja program terdahulu yang mengalami kendala/hambatan; (ii) penggabungan beberapa program menjadi satu program yang fokus dalam upaya pencapaian target indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen RPJMD; dan (iii) menghapus program dimaksud dan mengalihkan pagu anggarannya untuk mempercepat capaian target indikator pada salah satu program prioritas dalam rangka mendorong terwujudnya visi dan misi bupati dan wakil bupati.

Selanjutnya berdasarkan sajian data dan informasi pada tabel diatas, maka rencana penggunaan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah, berupa total penerimaan/pendapatan adalah untuk memenuhi kebutuhan anggaran belanja langsung dan belanja tidak langsung, dalam rangka pendanaan program pembangunan jangka menengah daerah selama 5 (lima) tahun ke depan. Alokasi pagu indikatif yang tersedia, kemudian dialokasikan ke berbagai program sesuai urutan



PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR

prioritas. Prioritas program dipisahkan menjadi prioritas I, prioritas II dan prioritas III, dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Prioritas I

Prioritas I, merupakan program pembangunan daerah dengan tema atau program unggulan (*dedicated*) Kepala daerah dan wakil kepala daerah, sebagaimana diamanatkan dalam RPJMN dan kebijakan nasional yang definitif harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah pada tahun rencana, termasuk untuk prioritas bidang pendidikan 20% (dua puluh persen) an bidang kesehatan 10%.

Program prioritas I harus berhubungan langsung dengan kepentingan publik, bersifat monumental, berskala besar dan memiliki kepentingan dan nilai manfaat yang tinggi, memberikan dampak luas pada masyarakat dengan daya ungkit yang tinggi pada capaian visi dan misi pemerintah daerah. Di samping itu, prioritas I juga diperuntukkan bagi prioritas belanja yang wajib sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Prioritas II

Program Prioritas II, merupakan program prioritas yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran dari analisis per urusan, bersifat mendukung program prioritas I. Disamping itu, Program Prioritas II berhubungan dengan layanan dasar serta tugas dan fungsi Perangkat Daerah, termasuk peningkatan kapasitas kelembagaan masing-masing Perangkat Daerah.

3. Prioritas III

Prioritas III, merupakan prioritas yang dimaksudkan untuk alokasi belanja-belanja tidak langsung seperti: tambahan penghasilan PNS, belanja hibah, belanja bantuan sosial organisasi kemasyarakatan, belanja bantuan keuangan kepada pemerintahan desa, serta belanja tidak terduga. Pengalokasian dana pada prioritas III, harus memperhatikan pemenuhan kebutuhan dana untuk belanja pada prioritas I dan II terlebih dahulu.



PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR

BAB IV

ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS

4.1. Permasalahan Pembangunan.

Pada dasarnya permasalahan pembangunan, adalah kesenjangan (gap expectation) antara indikator capaian kinerja yang dapat dihasilkan pada akhir perodesasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dengan target capaian yang direncanakan dan telah ditetapkan pada dokumen RPJMD. Timbulnya permasalahan pembangunan daerah, pada umumnya disebabkan oleh adanya faktor kekuatan yang belum dikelola dan dimanfaatkan secara optimal, adanya faktor kelemahan yang tidak diantisipasi dan diatasi secara dini serta dicarikan solusinya, serta adanya peluang yang belum teridentifikasi dan dimanfaatkan secara maksimal dan ancaman yang belum dapat dipetakan sejak awal.

Untuk memberikan landasan fundamental yang kokoh dan akurat dalam perumusan strategi, arah kebijakan umum dan isu strategis untuk penetapan program prioritas yang sesuai dengan karakteristik wilayah Kabupaten Seram Bagian Timur sebagai daerah kepulauan, dengan berbagai macam kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan sebagaimana telah diuraikan diatas, maka dari kompilasi berbagai data, terutama data dalam 3 (tiga) tahun terakhir diperoleh kesimpulan, bahwa tantangan yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur dalam penyusunan rancangan pembangunan jangka menengah daerah tahun 2016-2021, dapat dikelompokan, antara lain kedalam (i) permasalahan pada perekonomian makro daerah; (ii) permasalahan sosial; (iii) permasalahan sumber daya manusia dan sumber daya alam; (iv) permasalahan penyelenggaraan pelayanan pemerintahan dan pelayanan dasar; (v) pengelolaan keuangan daerah; (vi) penyusunan, implementasi dan penegakan regulasi daerah; (vii) kerjasama antar daerah dan dunia usaha (private sector); (viii) kerjasama internal penyelenggara pemerintahan dan DPRD; dan (ix) keterbukaan informasi, akuntabilitas publik, dan penguatan partisipasi masyarakat dalam tata kelola pemerintahan.



PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR

Selanjutnya, selain akan diuraikan daftar permasalahan urusan pemerintahan di Kabupaten Seram Bagian Timur sebagaimana telah diuraikan diatas, juga akan diuraikan berbagai permasalahan terkait dengan lingkungan strategis, baik dalam tataran lokal, provinsi, regional maupun nasional. Hal ini sangat penting, agar dari telaah dan analisis melalui pendekatan lingkungan strategis dimaksud, akan diketahui letak posisi Kabupaten Seram Bagian Timur dan konteks pembangunan baik dalam lingkup regional maupun nasional, sehingga perumusan kebijakan dan program yang ditetapkan dalam rancangan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah untuk kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan, dapat menjawab dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Untuk memudahkan dalam memetakan perbagai permasalahan yang timbul, maka perlu dilakukan pengelompokan permasalahan menjadi 2 (dua) kelompok, yaitu:

1. Permasalahan Perekonomian Makro daerah dan Sosial.

Berdasarkan telaah dan analisis terhadap data dan informasi yang ada, maka permasalahan terkait dengan perekonomian Makro Daerah dan sosial dalam 3 (tiga) tahun terakhir di Kabupaten Seram Bagian Timur, dapat dikelompokkan menjadi, antara lain:

a. Perekonomian Makro Daerah.

Permasalahan pertumbuhan perekonomian makro daerah Kabupaten Seram Bagian Timur, meliputi, antara lain :

- 1) Pertumbuhan PDRB;
- 2) Laju Inflasi;
- 3) PDRB Per Kapita;
- 4) Indeks Ketimpangan Regional; dan
- 5) Persentase Penduduk Diatas Garis Kemiskinan.

b. Sosial.

Permasalahan bidang sosial yang ada secara garis besar masih seputar pada pelayanan sosial dasar masyarakat yang masih terbatas, baik kualitas maupun kuantitasnya. Jenis layanan dalam ruang lingkup sosial terdiri dari: pelayanan bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketentraman dan



PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR

ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, serta sosial. Dibidang pekerjaan umum dan penataan ruang, perlu ditingkatkan lagi kuantitas dan kualitasnya. Demikian juga pembangunan dibidang infrastruktur, seperti pembangunan jalan dan jembatan dalam rangka mendorong tumbuhnya aktivitas perekonomian dan sekaligus membuka wilayah yang masih terpencil, terisolir, terbelakang dan tertinggal.

Sebagai daerah yang sebagian besar wilayahnya berupa perairan, maka pembangunan Kabupaten Seram Bagian Timur dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan, dapat difokuskan pada upaya mendorong tumbuhnya potensi sumber daya laut yang diharapkan dapat menjadi andalan untuk peningkatan pendapatan asli daerah. Terkait dengan hal tersebut, maka pembangunan sarana dan prasarana transportasi laut dapat dipertimbangkan untuk ditetapkan sebagai program prioritas dalam dokumen RPJMD Tahun 2016-2021. Dengan karakteristik sebagai wilayah kepulauan, maka perumusan kebijakan dan program yang akan dituangkan dalam perencanaan pembangunan jangka menengah kedepan, diupayakan agar dapat memenuhi kebutuhan untuk menjawab permasalahan pembangunan diwilayah kepulauan dan sekaligus dapat diselaraskan, serta bersinergi dengan program prioritas pemerintah pusat, seperti program pembangunan poros maritim nasional. Hal ini sejalan dengan program prioritas yang telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019.

c. Permasalahan Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Alam.

1) Sumber Daya Manusia.

Permasalahan dibidang sumber daya manusia, antara lain (i) rendahnya angka partisipasi murni; (ii) rendahnya angka partisipasi kasar; (iii) rendahnya rata-rata lama sekolah; (iv) rendahnya tingkat pendidikan yang ditamatkan; dan (v) rendahnya partisipasi orang tua untuk menyekolahkan anaknya kesekolah yang lebih tinggi.

Rendahnya kapasitas sumber daya manusia, berkontribusi secara signifikan terhadap tumbuhnya pengangguran, perkembangnya



PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR

kriminalitas, meningkatnya kemiskinan dan terjadinya ketimpangan sosial lainnya, seperti tumbuhnya penyakit sosial di masyarakat (Pekat), tumbuhnya para penyandang masalah sosial (pengguna Narkoba, pengemis dan gelandangan).

Data dan informasi terkait dengan permasalahan sumber daya manusia di Kabupaten Seram Bagian Timur, sebagaimana terdapat pada Bab II Gambaran Umum Kondisi Daerah pada Rancangan Akhir RPJMD Tahun 2016 - 2021, selanjut disajikan sebagai data awal dan masukan untuk perumusan kebijakan dan program-program prioritas yang akan ditetapkan dalam Rancangan Dokumen RPJMD Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2016-2021, serta penetapan target capaian indikator kinerja Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2016-2021.

2) Sumber Daya Alam.

Data yang ditelaah dan dianalisis sebagaimana terdapat pada Bab II Gambaran Umum Kondisi Daerah, telah memberi informasi, bahwa potensi sumber daya alam Kabupaten Seram Bagian Timur sangat beragam, mulai dari sumber daya alam didaratan, seperti pertanian (padi, jagung, ubi kayu, ubi jalar, kacang tanah, kacang hijau, kacang kedelai, sagu, sayur mayur dan buah-buahan), tamanan perkebunan (seperti : kelapa, cengkeh, pala, karet, kopi, coklat dan jambu mete), serta peternakan (seperti : sapi, kerbau, kambing, kuda, ayam dan itik).

d. Permasalahan Penyelenggaraan Pelayanan Dasar.

Permasalahan yang muncul adalah: (i) pemenuhan standar pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM); (ii) Tindak lanjut pengaduan masyarakat yang dinilai belum sesuai yang diharapkan; (iii) Keakurasian dan keabsahan data dasar untuk penyusunan jenis, kuantitas dan kualitas layanan dasar; (iv) pengembangan sistem inovasi daerah yang belum optimal; (v) belum tersedianya SOP untuk pelaksanaan pelayanan sosial dasar; dan (vi) belum tersedianya data dasar penerima manfaat pelayanan dasar.



e. Permasalahan Pengelolaan Keuangan Daerah.

Kendala yang dihadapi dalam pengelolaan keuangan daerah, adalah belum terintegrasinya data dasar mengenai obyek dan subyek pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan asli daerah lainnya yang sah, sehingga proyeksi kapasitas riil kemampuan keuangan daerah dalam memenuhi kebutuhan pendanaan sesuai perencanaan dan penganggaran tahunan, untuk kurun waktu 5 (lima) tahun, belum dapat dihitung secara akurat sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Demikian juga, efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran untuk belanja daerah yang belum optimal, seperti masih besarnya proporsi belanja untuk memenuhi kebutuhan aparatur (belanja tidak langsung), dibandingkan dengan proporsi untuk belanja yang dimanfaatkan untuk belanja pelayanan kepada masyarakat (belanja langsung). Sementara itu, terkait dengan akuntabilitas, agar publikasi informasi keuangan daerah oleh seluruh perangkat daerah perlu ditingkatkan. Hal ini sejalan dengan Pasal 394, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Permasalahan berikutnya, terkait dengan ketertiban administrasi dalam pengelolaan asset milik pemerintah daerah yang juga perlu ditingkatkan.

f. Permasalahan Penegakan Regulasi Daerah.

Produktivitas kajian Peraturan Daerah yang sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang diterbitkan oleh pemerintah pusat dan sesuai kebutuhan/tuntutan masyarakat masih perlu ditingkatkan. Demikian pula penegakan hukum untuk kasus-kasus sengketa, seperti sengketa lahan, alih fungsi peruntukan lahan dan kajian-kajian produk hukum lainnya, seperti surat edaran kepala daerah, surat edaran kepala Perangkat Daerah dan surat kesepakatan bersama (MoU) dengan lembaga lain (DPRD), lebih ditingkatkan kuantitas dan kualitasnya.

g. Permasalahan Keterbukaan Informasi Publik, Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Tata Kelola Pemerintahan.

Pelibatan masyarakat dan kelembagaan forum warga dalam perencanaan dan pengawasan pembangunan belum dimanfaatkan secara



PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR

optimal. Permasalahan transparansi informasi dan kemudahan akses publik masih perlu ditingkatkan, karena belum semua Perangkat Daerah menggunakan teknologi informasi untuk mempublikasikan data dokumen rencana kerja dan dokumen anggaran secara rutin, mudah diakses, dan mudah dipahami oleh masyarakat umum.

Penanganan tindak lanjut aduan masyarakat sebagai wujud monitoring dan evaluasi pelayanan publik berbasis partisipasi masyarakat, belum optimal. Pelibatan masyarakat dalam fungsi pengawasan dan kualitas dengar pendapat public (public hearing) yang diadakan oleh DPRD dalam pembahasan Perda non APBD dan RAPBD masih perlu ditingkatkan.

h. Permasalahan Kepegawaian dan Penataan Organisasi.

Penempatan aparatur secara proposional berdasarkan kebutuhan organisasi juga masih bermasalah. Proporsi penempatan pegawai di suatu kecamatan dan desa agar dilakukan secara proporsional dengan mempertimbangkan luas wilayah, jumlah penduduk, potensi unggulan yang dimiliki dan kondisi keamanan, kenyamanan dan ketentraman. Penerapan manajemen aparatur berdasarkan pada asas kepastian hukum, profesionalitas, proporsionalitas, keterpaduan, delegasi, netralitas, akuntabilitas, efektif dan efisien, keterbukaan, non diskriminatif, persatuan dan kesatuan, keadilan serta kesetaraan dan kesejahteraan perlu dioptimalkan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).

i. Permasalahan Manajemen Pelayanan.

Cakupan manajemen layanan kepada masyarakat, khususnya terkait dengan pelaksanaan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil masih perlu ditingkatkan. Validitas data penduduk masih rendah. Validitas data bisa disebabkan oleh faktor penduduk dan faktor aparat. Penduduk sering mengabaikan isian data pada formulir pengurusan data kependudukan, sehingga data tidak lengkap atau data janggal.

Sementara itu, aparat pengelola layanan pengurusan kependudukan juga kurang tegas memeriksa validitas data. Kesadaran masyarakat terhadap tertib pelaksanaan administrasi kependudukan masih kurang. Hal



PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR

ini ditunjukkan rasio kepemilikan dokumen kependudukan, seperti: kepemilikan KTP, KK, Akte pernikahan, akte perceraian, akte kelahiran, akte kematian. Demikian pula, pengadministrasiannya belum dilakukan secara cermat dan terintegrasi.

j. Permasalahan Tanggap Darurat Bencana.

Sebagai Kabupaten yang sebagian besar wilayahnya terdiri dari kepulauan, maka perlu dilakukan langkah antisipasi sejak dini terhadap berbagai bencana alam, seperti gempa bumi, banjir dan longsor, serta gelombang pasang yang diprediksi dapat menimbulkan tsunami. Oleh karena itu, kegiatan penanggulangan bencana dapat dilakukan melalui berbagai metode, diantaranya: sosialisasi, pelatihan kepada masyarakat dan aparaturnya yang bertugas untuk itu, serta pengadaan kelengkapan sarana dan prasarana bencana yang diperlukan. Oleh karena itu, agar dipertimbangkan untuk ditingkatkan kuantitas dan kualitasnya.

Langkah selanjutnya adalah kegiatan yang berorientasi pada mitigasi bencana, seperti: identifikasi, kajian dan pemantauan resiko bencana serta penetapan sistem peringatan dini. Demikian pula kesiapan sarana dan prasarana pendukung dalam menghadapi bencana masih perlu ditingkatkan. Terkait dengan hal dimaksud, maka personil Satpol PP, Linmas, dan tenaga relawan perlu dipertimbangkan untuk ditingkatkan kuantitas dan kualitasnya terkait dengan tanggap darurat bencana. Sarana dan prasarana yang terkait dengan teknologi informasi dan persandian juga perlu dipertimbangkan untuk ditingkatkan kuantitas dan kualitasnya.

2. Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan.

Permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang telah menjadi kewenangan setiap perangkat daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing dalam 3 (tiga) tahun terakhir telah dilakukan ditelaah dengan mengacu pada Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan



PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008.

Hasil telaahan terhadap permasalahan pembangunan berdasarkan data dan informasi penyelenggaraan urusan pemerintahan selanjutnya digunakan sebagai masukan untuk perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan untuk periode 5 (lima) tahun kedepan, yang secara rinci akan diuraikan dalam Bab-bab selanjutnya dalam Dokumen RPJMD Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2016-2021. Perumusan kebijakan dimaksud akan berpedoman Pasal 263 ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 yang mengamatkan, bahwa RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2005-2025 dan RPJMN Tahun 2015-2019.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam 5 (lima) tahun terakhir di Kabupaten Seram Bagian Timur dapat dirumuskan sebagai berikut:

4.1.1. Urusan Wajib.

1. Urusan Pendidikan.

Permasalahan urusan pendidikan (i) kurangnya sarana dan prasarana pada lembaga pendidikan dasar; (ii) masih adanya disparitas mutu pendidikan antara lembaga pendidikan negeri dan swasta; (iii) rendahnya kualifikasi dan kompetensi guru; (iv) kurangnya tenaga kependidikan di jenjang pendidikan dasar; (v) belum meratanya sebaran tenaga pendidik terhadap kebutuhan sekolah; (vi) belum maksimalnya output pembelajaran; dan (vii) belum optimalnya penerapan manajemen pendidikan di sekolah.



2. Urusan Kesehatan

Permasalahan urusan kesehatan (i) masih relatif tingginya angka kematian ibu; (ii) masih ditemukannya balita gizi buruk; (iii) masih tingginya penderita DBD; (iv) masih rendahnya pengetahuan tentang penyakit HIV-AIDS; (v) masih tingginya penderita penyakit menular; (vi) rasio tenaga kesehatan yang belum mencapai target; (vii) belum terpantaunya status kesehatan anak usia sekolah secara berkala; (viii) belum optimalnya deteksi dini berkala status kesehatan pada kelompok rawan; (ix) belum optimalnya kegiatan promosi kesehatan; (x) masih belum optimalnya dukungan manajemen untuk peningkatan pelayanan kesehatan; dan (xi) masih tingginya angka kematian bayi akibat masalah gizi selama kehamilan.

3. Urusan Pekerjaan Umum.

Permasalahan urusan pekerjaan umum (i) belum optimalnya fungsi jalan dan jembatan secara optimal; (ii) belum terintegrasinya infrastruktur jalan dan jembatan yang menghubungkan ibukota kabupaten dengan kecamatan dan antar kecamatan dengan perdesaan, serta antara sentra produksi dengan pusat perdagangan; (iii) belum optimalnya kondisi jalan nasional dan jalan provinsi di Kabupaten Seram Bagian Timur; (iv) belum optimalnya sarana prasaranan bidang pekerjaan umum; (v) masih rendahnya kuantitas dan kualitas infrastruktur transportasi perairan yang menghubungkan antar wilayah kepulauan dan antara wilayah kepulauan dengan wilayah daratan; (vi) masih rendahnya kualitas bangunan fisik pelabuhan-pelabuhan perintis; (vii) masih kurangnya moda transportasi perairan; dan (viii) masih rendahnya alokasi pagu anggaran pembangunan yang terfokus untuk peningkatan pembangunan di wilayah kepulauan.

4. Urusan Perumahan.

Permasalahan urusan perumahan (i) masih rendahnya kualitas sanitasi perumahan; (ii) masih adanya rumah tidak layak huni; dan (iii) masih kurang lengkapnya penyediaan fasilitas umum dan fasilitas sosial dalam lingkungan perumahan.



5. Urusan Penataan Ruang.

Permasalahan urusan penataan ruang (i) belum optimalnya implementasi dokumen RTRW dalam perencanaan pembangunan; (ii) belum terwujudnya kerjasama antar daerah di bidang penataan ruang; (iii) belum optimalnya pengendalian pemanfaatan ruang; (iv) belum terpenuhinya media informasi penataan ruang melalui peta digital dan peta analog; (v) belum optimalnya pelaksanaan konsolidasi tanah; (vi) belum adanya regulasi pada kawasan strategis cepat tumbuh; dan (vii) belum dilaksanakannya sosialisasi peruntukan tata ruang.

6. Urusan Perencanaan Pembangunan.

Permasalahan urusan perencanaan pembangunan (i) masih belum berkualitasnya data dan informasi untuk mendukung penyusunan dokumen rencana pembangunan yang berkualitas di Kabupaten Seram Bagian Timur; (ii) masih adanya dokumen perencanaan pembangunan yang kurang sinkron/tidak konsisten/tidak selaras dan tidak bersinergi antara dokumen perencanaan pembangunan pemerintah pusat dengan dokumen perencanaan pembangunan pemerintah provinsi dan dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Seram Bagian Timur; (iii) masih rendahnya kapasitas dan kompetensi, serta masih rendahnya kuantitas sumberdaya manusia dibidang perencanaan; dan (iv) masih adanya penetapan dokumen perencanaan yang tidak tepat waktu.

7. Urusan Perhubungan.

Permasalahan urusan perhubungan (i) masih kurangnya pemahaman masyarakat di bidang lalu lintas dan angkutan jalan (ii) masih kurang optimalnya fungsi terminal; (iii) masih kurangnya fasilitas kelengkapan jalan serta sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan; (iv) masih kurangnya data dan informasi untuk perencanaan dan peningkatan moda transportasi perairan; (v) masih rendahnya kuantitas dan kualitas transportasi laut; dan (vi) masih rendahnya alokasi pagu anggaran untuk pembangunan dan peningkatan sarana



PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR

dan prasarana transportasi perhubungan laut antar pulau dan antara ibukota kecamatan dengan ibukota kabupaten.

8. Urusan Lingkungan Hidup.

Permasalahan urusan lingkungan hidup (i) masih tingginya pencemaran tanah, air dan udara yang diakibatkan adanya penambahan jumlah industri dan/atau usaha lainnya; (ii) masih tingginya eksploitasi sumber daya alam; (iii) kurangnya kesadaran masyarakat dalam upaya pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan; (iv) masih banyak usaha/kegiatan yang belum mempunyai dokumen lingkungan dan/ atau usaha/ kegiatan yang telah mempunyai dokumen lingkungan namun belum membuat laporan pemantauan; dan (v) masih banyak usaha/ kegiatan yang belum memenuhi persyaratan administratif dan teknis tentang pengelolaan B3 dan limbah B3.

9. Urusan Pertanahan.

Permasalahan urusan pertanahan (i) masih banyaknya kepemilikan tanah yang belum bersertifikat; (ii) belum maksimalnya penyelesaian sengketa tanah yang merupakan aset pemerintah daerah yang dikuasai oleh masyarakat dan pihak lain; (iii) masih belum tersedianya data pertanahan yang akurat dan dapat dipertanggung jawabkan; dan (iv) masih rendahnya pemahaman masyarakat terhadap regulasi mengenai pertanahan.

10. Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Permasalahan urusan kependudukan dan pencatatan sipil (i) masih rendahnya pemahaman pendudukan mengenai pentingnya dokumen kependudukan; (ii) masih rendahnya perlindungan dan pengakuan status pribadi dan status hukum atas setiap peristiwa kependudukan dan pencatatan sipil; (iii) masih adanya keterlambatan penduduk dalam melaporkan peristiwa kependudukan dan pencatatan sipil; (iv) belum optimalnya jumlah sumber daya aparatur yang memberikan pelayanan kepemilikan dokumen kependudukan; dan (v) perlu pengembangan aplikasi sistem informasi administrasi



PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR

kependudukan (SIAK) untuk peningkatan pelayanan prima; dan (vi) lokasi tempat pelayanan belum optimal untuk pelayanan bagi penduduk yang mempunyai keterbatasan (lansia dan keterbatasan lainnya).

11. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Permasalahan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (i) masih rendahnya partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan, lembaga swasta, politik, dan organisasi kemasyarakatan; (ii) masih adanya kekerasan terhadap perempuan dan anak; dan (iii) belum optimalnya penanganan pengaduan/laporan kekerasan terhadap perempuan dan anak.

12. Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera.

Permasalahan urusan keluarga berencana dan keluarga sejahtera (i) masih rendahnya MOP dan masih banyaknya unmet need; (ii) kurangnya kesadaran masyarakat untuk menggunakan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP); (iii) adanya kecenderungan peningkatan perkawinan pertama wanita usia muda; (iv) berkurangnya tenaga lini lapangan; (v) belum tersedianya data keluarga yang benar, lengkap dan akurat (vi) masih rendahnya jumlah kader KB yang berkualitas (vii) masih terbatasnya pengetahuan remaja dan siswa sekolah terhadap program KB dan KS; dan (viii) belum optimalnya pembinaan Balita, Remaja, Dewasa dan Lansia dalam upaya peningkatan KS.

13. Urusan Sosial.

Permasalahan urusan sosial (i) masih tingginya jumlah PMKS ; (ii) belum optimalnya penanganan PMKS; (iii) masih terbatasnya sarana prasarana rehabilitasi keajahteraan sosial dan pelayanan sosial; dan (iv) masih belum tersedianya data yang akurat dan terkini tentang jumlah PMKS.

14. Urusan Ketenagakerjaan.

Permasalahan urusan ketenagakerjaan (i) masih kecilnya laju penyerapan tenaga kerja; (ii) masih rendahnya kualitas tenaga kerja



PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR

atau minimnya kompetensi dan keterampilan pencari kerja; (iii) belum terpetakannya ketenagakerjaan; (iv) masih rendahnya pemantauan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri; dan (vii) kurangnya pemahaman tentang norma kerja, keselamatan dan kesehatan kerja serta belum maksimalnya hubungan industri di perusahaan.

15. Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.

Permasalahan urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (i) kurangnya permodalan dan terbatasnya akses pembiayaan; (ii) masih kurangnya bimbingan manajemen usaha kecil dan menengah; (iii) masih sedikitnya fasilitas tata niaga produk UMKM; (iv) masih rendahnya peluang yang diberikan bagi koperasi untuk berkompetisi dalam penyediaan barang dan jasa; (v) masih kurangnya fasilitasi kerjasama KUMKM dengan pelaku usaha yang berskala besar; (vi) belum tersedianya ruang pameran hasil produksi UMKM; (vii) kualitas produk UMKM yang masih dibawah standar provinsi maupun nasional; dan (viii) masih rendahnya penerapan teknologi dan kurangnya inovasi produk UMKM.

16. Urusan Penanaman Modal.

Permasalahan urusan penanaman modal (i) masih rendahnya promosi potensi investasi daerah; (ii) belumnya adanya insentif dan disentif investasi; (iii) belum tersedia regulasi dan sistem informasi pelayanan perizinan penanaman modal di daerah; (iv) masih rendahnya iklim investasi; (v) masih rendahnya pemanfaatan bahan baku lokal dalam investasi; dan (vi) belum berfungsinya secara optimal pelayanan melalui PTSP.

17. Urusan Kebudayaan.

Permasalahan urusan kebudayaan (i) masih kurangnya frekuensi dan intensitas penyelenggaraan festival seni dan budaya; (ii) kurang terpromosikannya budaya lokal; (iii) kurangnya sarana prasarana pagelaran seni dan budaya yang representatif; (iv) kurangnya pemeliharaan benda, situs dan kawasan cagar budaya yang



PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR

dilestarikan; dan (v) kurangnya pelestarian seni dan budaya tradisional.

18. Urusan Kepemudaan dan Olah Raga.

Permasalahan urusan kepemudaan dan olahraga (i) masih rendahnya kepeloporan dan kepemimpinan di lingkungan pemuda; (ii) masih kurangnya penggerakan potensi dan sumber daya kepemudaan dan olahraga yang ada di masyarakat; (iii) masih kurangnya kapasitas pemuda untuk berperan aktif dalam pembangunan; (iv) masih sedikitnya jumlah sarana olah raga yang meliputi lapangan olah raga, dan gelanggang olah raga; dan (v) masih kurangnya pembinaan terhadap potensi olahraga yang ada.

19. Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri.

Permasalahan urusan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri (i) kurangnya pemahaman kehidupan berbangsa dan bernegara pada sebagian kelompok masyarakat; (ii) masih terjadinya fluktuasi partisipasi politik; (iii) masih kurangnya pembinaan ketahanan nasional dan bela negara kepada organisasi masyarakat, organisasi kepemudaan dan organisasi lembaga swadaya masyarakat; dan (iv) masih rendahnya pendidikan politik kepada masyarakat oleh partai-partai politik.

20. Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian.

Permasalahan urusan otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian (i) masih kurangnya kesesuaian penempatan dan promosi dalam jabatan dengan kompetensi dan prestasi kerja; (ii) pengembangan pegawai belum sepenuhnya berdasarkan kebutuhan kompetensi; (iii) penghasilan pegawai belum memenuhi prinsip sistem merit; (iv) masih terbatasnya kemampuan sumber daya aparatur, terutama di kecamatan-kecamatan; (v) belum terwujudnya kemandirian desa-desa; (vi) masih rendahnya kapasitas pemerintahan



PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR

desa; (vii) masih belum terpenuhinya rasio jumlah polisi pamong praja; (viii) masih kecilnya rasio perlindungan masyarakat; (ix) masih rendahnya penegakan peraturan daerah; (x) belum lancarnya pelaksanaan sistem informasi manajemen pemerintah daerah; (xi) belum tercapainya predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk pengelolaan keuangan daerah; (xii) belum maksimalnya pelaksanaan SOP; (xiii) masih ada permasalahan kelembagaan yang menyebabkan kinerja pemerintahan menjadi kurang maksimal; (xiv) belum adanya kontinuitas ketersediaan data kebutuhan PNS berdasarkan Anjab dan ABK; (xv) belum maksimalnya pelaksanaan ketatalaksanaan perangkat daerah; (xvi) belum diterapkannya konsep kelompok budaya kerja (KBK) dalam mengatasi permasalahan kinerja aparatur; (xvii) belum semua unit pelayanan memiliki standar pelayanan; (xviii) masih rendahnya minat unit pelayanan dalam berinovasi; dan (xix) belum maksimalnya pemanfaatan teknologi informasi.

21. Urusan Ketahanan Pangan.

Permasalahan urusan ketahanan pangan (i) beralih fungsinya lahan pertanian menjadi kawasan industri dan pemukiman; (ii) masih tingginya angka konsumsi beras per kapita; (iii) cadangan pangan, terutama beras masih rendah; dan (iv) Pola Pangan Harapan (PPH) masih rendah.

22. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Permasalahan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa (i) masih rendahnya kapasitas sumber daya aparatur pemerintahan desa dalam mengelola administrasi baik tentang keuangan, program dan kegiatan; (ii) masih kurangnya bimbingan, asistensi dan supervisi dalam menumbuh kembangkan keswadayaan atau kemandirian masyarakat; dan (iii) kurang optimalnya kader pemberdayaan masyarakat di masing-masing desa.

23. Urusan Statistik.

Permasalahan urusan statistik (i) masih terjadinya data dan informasi mengenai pembangunan, pemerintahan, kemasyarakatan



PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR

dan perekonomian yang tidak sinkron antara SKPD dengan data dan informasi yang bersumber dari BPS; dan (ii) masih rendahnya akses masyarakat terhadap data statistik.

24. Urusan Kearsipan.

Permasalahan urusan kearsipan (i) kurangnya pemahaman dan rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya arsip ; (ii) masih kurangnya sarana dan prasarana untuk pengelolaan kearsipan; dan (iii) masih rendahnya kapasitas sumber daya manusia bidang kearsipan.

25. Urusan Komunikasi dan Informatika.

Permasalahan urusan komunikasi dan informatika (i) terbatasnya sumber daya aparatur di bidang layanan komunikasi dan informatika; (ii) belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi komunikasi secara tepat guna; dan (iii) masih terbatasnya regulasi daerah tentang penyelenggaraan bidang pos dan telekomunikasi;.

26. Urusan Perpustakaan.

Permasalahan urusan perpustakaan (i) masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perpustakaan; (ii) masih rendahnya minat baca masyarakat; (iii) kurangnya sarana dan prasarana untuk pengelolaan perpustakaan; (iv) terbatasnya kemampuan/kompetensi sumber daya aparatur dalam mengelola perpustakaan; dan (v) belum optimalnya penggunaan IT pada pengelolaan perpustakaan.

4.1.2 Urusan Pilihan.

1. Urusan Kelautan dan Perikanan

Permasalahan urusan kelautan dan perikanan (i) Rendahnya sumber daya manusia dibidang perikanan; (ii) kurangnya penerapan teknologi perikanan; (iii) kurangnya akses permodalan; (iv) kurang optimalnya kelembagaan perikanan; (v) masih terbatasnya kuantitas dan kualitas infrastruktur dibidang perikanan; (vi) rendahnya alokasi pagu anggaran untuk bidang kelautan dan perikanan; dan (vii) masih rendahnya



PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR

kesadaran akan pentingnya perencanaan pembangunan yang berwawasan kepulauan.

2. Urusan Pertanian.

Permasalahan urusan pertanian (i) penurunan kualitas dan kuantitas sumber daya lahan pertanian; (ii) terbatasnya irigasi teknis penunjang pertanian; (iii) masih lemahnya sistem alih teknologi; (iv) terbatasnya akses layanan usaha, terutama di permodalan; (v) masih panjangnya mata rantai tata niaga pertanian; (vi) terjadinya fluktuasi iklim yang tidak bisa di prediksi; (vii) kemampuan SDM petani masih rendah; (viii) rendahnya penerapan teknologi peternakan serba guna; (ix) rendahnya teknologi pengolahan dan pemasaran hasil peternakan; (x) muncul penyakit hewan menular yang bersifat emergensi; (xi) turunya populasi ternak; dan (xii) masih belum tertibnya peredaran obat hewan di masyarakat.

3. Urusan Kehutanan.

Permasalahan urusan kehutanan (i) masih rendahnya peran serta masyarakat dalam perlindungan dan konservasi alam; dan (ii) masih adanya konflik dalam pemanfaatan lahan.

4. Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral.

Permasalahan urusan energi dan sumber daya mineral (i) pemanfaatan energi listrik yang hemat sebagai upaya ketersediaan energi listrik yang berkepanjangan; dan (ii) belum efisiennya pemanfaatan dan pengolahan air tanah.

5. Urusan Pariwisata.

Permasalahan urusan pariwisata (i) belum optimalnya penataan objek wisata sebagai sebuah destinasi; (ii) kurangnya integrasi objek wisata dengan komponen pendukung lainnya; (iii) belum optimal kerjasama antara pemerintah daerah dengan pihak swasta dalam pengembangan objek wisata; (iv) belum optimalnya promosi objek wisata; (v) kurang tersedianya infrastruktur pendukung menuju objek wisata; dan (vi) belum profesionalnya manajemen pengelolaan potensi kepariwisataan daerah.



6. Urusan Perdagangan.

Permasalahan urusan perdagangan (i) masih terbatasnya sarana perdagangan, khususnya distribusi ke pasar, baik pasar pemerintah daerah maupun pasar desa; (ii) belum terumuskannya kebijakan mengenai pengaturan mata rantai dari hulu ke hilir; (iii) kurang memadainya kualitas sumber daya manusia; (iv) pengawasan bidang ekspor/impor masih lemah; dan (v) belum sinkronnya regulasi tentang PKL dengan kondisi di lapangan.

7. Urusan Perindustrian.

Permasalahan urusan perindustrian (i) belum optimalnya pemanfaatan kawasan industri; (ii) masih belum tersedianya bahan baku lokal yang mencukupi; (iii) kurangnya informasi akses permodalan; (iv) inovasi produk masih rendah; (v) penguasaan teknologi yang masih rendah; (vi) masih rendahnya kapasitas sumber daya manusia; (vii) belum tersedia/terfasilitasinya ruang pameran hasil produksi; dan (ix) kualitas produk belum memenuhi standar.

8. Urusan Ketrasmigrasian.

Permasalahan urusan ketrasmigrasian (i) kurangnya motivasi masyarakat untuk mengikuti transmigrasi; (ii) masih rendahnya pemahaman masyarakat mengenai program transmigrasi.

4.2. Isu-isu Strategis.

Isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral dan etika birokratis dapat dipertanggung jawabkan. Isu strategis merupakan salah satu pengayaan analisis lingkungan eksternal terhadap proses perencanaan. Jika dinamika isu strategis baik internal maupun eksternal, khususnya selama 5 (lima) tahun kedepan, diidentifikasi dengan baik, maka pemerintahan daerah akan dapat mempertahankan/meningkatkan pelayanan pada masyarakat. Pemerintahan daerah yang tidak menyelaraskan diri



PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR

secara sepadan atas isu strategisnya akan menghadapi potensi kegagalan dalam melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawabnya atau gagal dalam melaksanakan pembangunan daerah.

Oleh karena itu, untuk memperoleh rumusan isu-isu strategis diperlukan analisis terhadap berbagai fakta dan informasi yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis. Pemerintah daerah yang lebih berhasil menciptakan sistem informasi perencanaan pembangunan daerah, selanjutnya melakukan upaya-upaya rutin untuk memantau peluang dan ancaman yang berasal dari internal maupun eksternal. Dengan demikian, kebijakan Pemerintah Daerah tidak lagi bersifat reaktif tetapi lebih antisipatif dan terencana. Tanpa itu, akan banyak peluang-peluang penting akan hilang, dengan ancaman tidak dikenali atau terlambat diantisipasi.

Hal lain yang juga perlu mendapat perhatian dalam merumuskan isu-isu strategis adalah hasil telaahan dan analisis terhadap visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Hasil rumusan isu yang dihasilkan selaras dengan cita-cita dan harapan masyarakat terhadap kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, serta kebijakan pemerintah dalam jangka menengah (RPJMD). Data dan informasi yang dapat dijadikan isu strategis, jika setiap isu strategis :

- a. Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional;
- b. Merupakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah;
- c. Luasnya dampak yang ditimbulkannya terhadap daerah dan masyarakat;
- d. Memiliki daya ungkit yang signifikan terhadap pembangunan daerah;
- e. Kemungkinan atau kemudahannya untuk dikelola; dan
- f. Prioritas janji politik yang perlu diwujudkan.

Terkait dengan permasalahan pembangunan sebagaimana telah diuraikan diatas, maka isu-isu strategis yang akan dihadapi dalam pelaksanaan pembangunan daerah kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang meliputi :

1. Kemiskinan dan Pengangguran.

Isu kemiskinan sangat terkait dengan masalah kepadatan perkapita dan perubahan struktur lapangan kerja. Sebagian besar penduduk di Kabupaten Seram Bagian Timur bekerja pada sektor pertanian dan nelayan, serta sektor informal lainnya. Berdasarkan data BPS pada tahun 2013, pendapatan perkapita



PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR

penati dan nelayan di Kabupaten Seram Bagian Timur adalah Rp.260.650,25 perbulan. Rendahnya pendapatan dimaksud disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya (i) terbatasnya lahan pertanian yang disediakan untuk pertahian dibandingkan dengan luasnya lahan non pertanian; dan (ii) terbatasnya sarana dan prasarana (perahu motor, perahu motor tempel) yang dimiliki oleh nelayan.

2. Rendahnya Aksesibilitas dan Keterbatasan Infrastruktur.

Ketersediaan suatu infrastruktur yang berkualitas pada suatu daerah dapat dijadikan sebagai salah satu indikator majunya suatu daerah. Dari aspek kuantitas sampai dengan akhir tahun 2014 kondisi infrstruktur di Kabupaten Seram Bagian Timur secara umum mengalami perkembangan yang positif dengan pertumbuhan sebesar 13,15. Tercatat lebih dari 40 proyek seperti jembatan, perbaikan jalan, talud penahan ombak, bangunan gedung pemerintah dan sebagainya telah dikerjakan. Pertumbuhan infrastruktur juga berkontribusi positif pada tumbuhnya berbagai sektor, diantaranya pertumbuhan sektor perdagangan, hotel dan restoran yang mengalami pertumbuhan sebesar 12,61 persen. Sementara sektor pengangkutan dan komunikasi tumbuh sebesar 9,80 persen tahun 2014.

Namun dari aspek kualitas, sampai dengan akhir tahun 2014, masih ada beberapa ruas jalan strategis yang masih dalam kondisi rusak. Berdasarkan data tersebut, maka isu strategis terhadap Aksesibilitas dan keterbatasan infrastruktur secara garis besar antara lain, meliputi (i) masih terbatasnya ruas-ruas jalan dalam kondisi baik; (ii) terbatasnya sarana dan prasarana transportasi, utamanya moda transportasi perairan antar pulau; (iii) keterbatasan pasokan listrik dan gangguan distribusi. Hal ini disebabkan oleh belum terkendalinya distribusi BBM agar tepat sasaran untuk mendukung usaha masyarakat dan pasokan ke fasilitas vital seperti untuk pembangkit listrik. Gangguan distribusi dipicu adanya spekulasi dan tingginya permintaan BBM yang berdampak pada gangguan distribusi barang dan jasa.

3. Rendahnya Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pendapatan asli daerah merupakan cermin kemandirian setiap pemerintah daerah melaksanakan pembangunan daerahnya. Semakin besar pendapatan asli daerah suatu pemerintahan daerah, maka semakin mandiri



PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR

pemerintahan daerah yang bersangkutan dalam membiayai dan melaksanakan pembangunannya, atau sebaliknya. Karena demikian strategisnya pendapatan asli daerah dalam konteks pembiayaan belanja pembangunan daerah, maka sering dikonotasikan, bahwa pendapatan asli daerah menjadi simbol kemajuan suatu daerah. Artinya, semakin besar pendapatan asli daerah, maka semakin maju suatu daerah.

Mengingat pendapatan asli daerah pada Kabupaten Seram Bagian Timur pada periode 5 (lima) tahun yang lalu belum secara maksimal dapat digali, maka untuk membiayai kebutuhan belanja pembangunan daerah baik yang bersifat belanja tidak langsung terutama untuk belanja langsung untuk kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang akan diupayakan dapat dikelola secara maksimal. Kebijakan untuk mengoptimalkan pendapatan asli daerah satu satunya akan ditempuh melalui (i) Dalam merencanakan target pendapatan daerah dari kelompok PAD ditetapkan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi penerimaan tahun lalu, potensi, dan asumsi pertumbuhan ekonomi yang dapat mempengaruhi serta rincian obyek penerimaan; (ii) Dalam upaya peningkatan pendapatan asli daerah, pemerintah daerah tidak menetapkan kebijakan yang memberatkan dunia usaha dan masyarakat; (iii) Upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah serta lain-lain pendapatan yang sah terus ditingkatkan sesuai potensi pungutan; (iv) Penyusunan regulasi peraturan daerah tentang pendapatan asli daerah yang tidak bertentangan dengan kebijakan investasi (pro investasi); (v) Mengoptimalkan kinerja unit pendapatan (seperti : RSUD, PDAM, Perhubungan dan Perusda, dll) untuk meningkatkan kontribusi pada pemerintah daerah; dan (vi) Menyelenggarakan pelayanan prima melalui pengadaan sarana dan prasarana yang dapat memberikan kenyamanan dan keamanan serta pelayanan yang cepat dan sederhana dengan didukung teknologi informasi yang memadai

4. Isu KKN Dalam Pengelolaan Pemerintahan.

Pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang jujur, bersih, dan pro rakyat sebagai pengejawantahan dari prinsip-prinsip dasar *good governance*. *Good Governance*. Dalam mewujudkan *Good Governance* diperlukan semangat dan tekad yang kuat dari para aparatur negara. Fasilitas yang sudah disediakan



PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR

dalam mencapai hal tersebut adalah dengan melaksanakan Reformasi Birokrasi secara utuh dan konsisten sebagai bagian dari perbaikan tata kelola pemerintahan.

Terkait dengan isu KKN dalam pengelolaan pemerintahan, maka dalam 5 (lima) tahun kedepan pengelolaan pemerintahan daerah akan dilakukan secara transparan efektif, efisien, demokratis dan akuntabel. Oleh karena itu, dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah akan diselenggarakan beberapa pedoman, antara lain :

- a. Tidak ada korupsi;
- b. Tidak ada pelanggaran hukum;
- c. Semua program pemerintah daerah berjalan dengan baik;
- d. Perijinan cepat dan mudah serta tidak ada overlap;
- e. Penggunaan waktu efektif dan produktif;
- f. Adanya *reward* dan *punishment* terhadap kinerja aparat pemerintah; dan
- g. Hasil pembangunan dapat dirasakan seluruh lapisan masyarakat.

5. Lambatnya Reformasi Birokrasi dan Pembaharuan.

Birokrasi pemerintahan daerah tidak saja menitik beratkan kepada kualitas atau kinerja aparatur, namun juga kepada kelembagaan dan ketatalaksanaannya. Pada era reformasi birokrasi saat ini, perwujudan pemerintah yang baik merupakan salah satu fokus dari reformasi birokrasi. Pemerintah daerah yang ditopang oleh aparatur dengan kinerja baik, bertanggung jawab, serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, diharapkan mampu menciptakan pemerintahan yang bersih, transparan, profesional, dan efektif dalam menjalankan tugasnya. Kondisi ini diharapkan mampu menjamin kinerja pemerintah dalam menciptakan pelayanan publik yang prima serta menciptakan kepastian hukum dan akuntabilitas publik.

Reformasi birokrasi meliputi beberapa aspek tentang pelayanan masyarakat, peningkatan kinerja, dan penegakan hukum. Untuk menjawab isu strategis tentang lemahnya reformasi birokrasi dan pembaharuan, maka reformasi birokrasi dan pembaharuan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan akan ditopang oleh aparatur dengan kinerja baik, bertanggung jawab, serta



PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR

menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Reformasi birokrasi meliputi beberapa aspek, antara lain pelayanan masyarakat, peningkatan kinerja, dan penegakan hukum. Dalam melakukan reformasi birokrasi, pemerintah melakukan pembenahan sistem birokrasi, mulai dari penataan kewenangan, standar operasi prosedur, kerjasama, sinergi, dan integrasi organisasi, serta penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Di samping itu, Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur juga melakukan pembenahan manajemen kepegawaian, serta upaya-upaya terobosan guna meningkatkan kapasitas, mutu, dan kinerja aparatur pemerintah daerah. Upaya ini dilakukan untuk mengawal pencapaian tata kelola pemerintahan yang lebih baik serta peningkatan kualitas pelayanan publik sebagai "corong" pelayanan kepada masyarakat.

6. Rendahnya Kualitas Pelayanan Publik dan Partisipasi Publik.

Pemerintah daerah dibentuk karena adanya tuntutan terhadap kebutuhan pelayanan kepada masyarakat yang lebih cepat, tepat mudah dan murah. Dengan demikian, maka pelayanan kepada masyarakat, terutama pelayanan yang bersifat mendasar harus menjadi prioritas untuk mendapatkan perhatian dari pemerintah daerah. Terkait dengan hal tersebut, saat ini masih ditemukan adanya pelayanan kepada masyarakat yang belum dapat dilakukan sesuai harapan masyarakat, misalnya pelayanan untuk pembuatan KTP, pembuatan Akte Pernikahan, pembuatan Akte Kelahiran, Akte Kematian dan Akte perceraian.

Masyarakat sebagai pelaku dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan, serta pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan daerah belum dapat dilibatkan secara optimal. Agar hasil pembangunan dapat dinikmati secara maksimal oleh seluruh masyarakat sebagai penerima manfaat, maka pelibatan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan dalam 5 (lima) tahun kedepan perlu lebih ditingkatkan. Oleh karena itu, forum-forum konsultasi publik sebagai wahana untuk menjaring aspirasi masyarakat dilakukan melalui metode yang transparan, demokratis, adil dan akuntabel. Demikian pula pelibatan masyarakat dalam fungsi pengawasan dan mengawal pelaksanaan



PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR

monitoring terhadap pelaksanaan pembahasan Rancangan Perda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), masih perlu ditingkatkan.

Terkait dengan isu-isu strategis diatas, maka dalam 5 (lima) tahun kedepan penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat dan meningkatkan peran serta dan partisipasi masyarakat, pemerintah daerah akan menerbitkan Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagai pedoman bagi seluruh perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada seluruh masyarakat secara transparan, adil, demokratis dan akuntabel. Oleh karena itu, keberhasilan capaian target kinerja dari setiap perangkat daerah akan diukur dengan kriteria dalam SOP dimaksud.

Disamping isu-isu strategis sebagaimana diuraikan diatas, maka dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan isu-isu strategis dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan baik yang bersifat wajib, maupun pilihan tetap akan menjadikan perhatian Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur. Isu-isu strategis dimaksud meliputi :

4.2.1. Urusan Wajib.

1. Urusan Pendidikan.

Isu-isu strategis urusan pendidikan (i) rendahnya kualitas sumber daya manusia. (ii) rendahnya kompetensi tenaga pendidikan; (iii) masih adanya disparitas antar lembaga pendidikan antara negeri dengan swasta; (iv) belum semua tenaga pendidik telah bersertifikasi; dan (v) belum optimalnya penerapan manajemen pendidikan di sekolah.

2. Urusan Kesehatan

Isu-isu strategis urusan kesehatan (i) rendahnya status kesehatan dan gizi masyarakat; (ii) masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk menciptakan lingkungan bersih dan sehat (iii) masih rendahnya kuantitas tenaga medis dan non medis; (iv) belum terpantaunya status kesehatan anak usia sekolah secara berkala; (v) belum tersedianya data terkait dengan jumlah penduduk yang bermasalah dengan kesehatan; (vi) masih rendahnya kuantitas pelaksanaan promosi kesehatan; (vi) penerapan manajemen bidang kesehatan belum optimal.



3. Urusan Pekerjaan Umum.

Isu-isu strategis urusan pekerjaan umum (i) belum optimalnya ketersediaan infrastruktur yang dapat memperpendek rentang kendali antar kecamatan, antar desa dan dusun; (ii) belum optimalnya sarana prasarana bidang Pekerjaan Umum; (iii) masih rendahnya kuantitas dan kualitas infrastruktur perairan; (iv) masih rendahnya kualitas fisik pelabuhan; (v) masih kurangnya moda transportasi perairan; dan (vi) masih rendahnya alokasi pagu anggaran untuk pembangunan infrastruktur yang terfokus ke wilayah kepulauan/pulau.

4. Urusan Perumahan.

Isu-isu strategis urusan perumahan (i) masih adanya rumah penduduk yang tidak layak huni; dan (ii) masih kurangnya ruang terbuka untuk aktivitas publik.

5. Urusan Penataan Ruang.

Isu-isu strategis urusan penataan ruang (i) belum kurangnya sosialisasi perda RTRW; (ii) perlu peningkatan dan penguatan penegakan hukum perda tata ruang; (iii) belum terpenuhinya media informasi penataan ruang melalui peta digital dan peta analog; dan (iv) belum optimalnya pelaksanaan konsolidasi tanah.

6. Urusan Perencanaan Pembangunan.

Isu-isu strategis urusan perencanaan pembangunan (i) masih belum berkualitasnya dokumen perencanaan pembangunan; (ii) masih rendahnya kapasitas dan kompetensi sumberdaya manusia dibidang perencanaan; dan (iii) masih adanya penetapan dokumen perencanaan yang tidak tepat waktu.

7. Urusan Perhubungan.

Isu-isu strategis urusan perhubungan (i) masih lengkapnya sarana dan prasarana lalu lintas; (ii) belum dimanfaatkannya data dan informasi untuk perencanaan pembangunan bidang urusan perhubungan; (iii) perlu dikembangkan blue print pembangunan transportasi laut secara terpadu; dan (iv) masih rendahnya alokasi pagu anggaran untuk pembangunan bidang urusan perhubungan.



8. Urusan Lingkungan Hidup.

Isu-isu strategis urusan lingkungan hidup (i) masih tingginya pencemaran tanah, air dan udara yang diakibatkan adanya penambahan jumlah kawasan untuk perumahan, industri dan/atau usaha lainnya; (ii) perlu ada penegakan hukum terhadap pelanggaran lingkungan hidup; dan (iii) perlunya meningkatkan peran serta dan partisipasi masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup.

9. Urusan Pertanahan.

Isu-isu strategis urusan pertanahan (i) perlu dilakukan pemutakhiran data pertanahan; (ii) belum maksimalnya penyelesaian sengketa tanah yang merupakan aset pemerintah daerah yang dikuasai oleh masyarakat dan pihak lain; (iii) perlu dilakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang pertanahan.

10. Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Isu-isu strategis urusan kependudukan dan pencatatan sipil (i) perlu dilakukan sosialisasi undang-undang tentang kependudukan; (ii) perlu pengembangan aplikasi sistem informasi administrasi kependudukan (SIAK) untuk peningkatan pelayanan prima; dan (iii) lokasi tempat pelayanan belum optimal untuk pelayanan bagi penduduk yang mempunyai keterbatasan (lansia dan keterbatasan lainnya).

11. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Isu-isu strategis urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (i) masih rendahnya kapasitas dan kompetensi perempuan; (ii) perlunya penegakan hukum dan perlindungan terhadap perempuan dan anak; dan (iii) belum optimalnya penanganan pengaduan/laporan kekerasan terhadap perempuan dan anak.

12. Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera.

Isu-isu strategis urusan keluarga berencana dan keluarga sejahtera (i) perlu dilakukan sosialisasi mengenai pentingnya keluarga berencana; (ii) perlu adanya upaya pencegahan perkawinan dini; (iii) perlu ada penambahan tenaga relawan; (v) belum tersedianya data keluarga yang benar, lengkap dan akurat (vi) masih rendahnya jumlah kader KB yang



PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR

berkualitas (vii) masih terbatasnya pengetahuan remaja dan siswa sekolah terhadap program KB dan KS; dan (viii) belum optimalnya pembinaan Balita, Remaja, Dewasa dan Lansia dalam upaya peningkatan KS.

13. Urusan Sosial.

Isu-isu strategis urusan sosial (i) masih tingginya jumlah PMKS ; (ii) belum optimalnya penanganan PMKS; (iii) masih terbatasnya sarana prasarana rehabilitasi keajahteraan sosial dan pelayanan sosial; dan (iv) masih belum tersedianya data yang akurat dan terkini tentang jumlah PMKS.

14. Urusan Ketenagakerjaan.

Isu-isu strategis urusan ketenagakerjaan (i) masih rendahnya investor yang menanamkan modalnya di Kabupaten Seram Bagian Timur; (ii) masih rendahnya kompetensi dan keterampilan pencari kerja; (iii) belum tersedianya data dan informasi mengenai ketenagakerjaan; (iv) kurangnya pemahaman tenaga kerja terhadap regulasi tentang ketenagakerjaan.

15. Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.

Isu-isu strategis urusan koperasi dan usaha kecil menengah (i) kurang optimalnya pelaksanaan penegakan hukum sesuai regulasi terkait; (ii) masih kurangnya bimbingan manajemen usaha kecil dan menengah; (iii) masih rendahnya peluang yang diberikan bagi koperasi untuk berkompetisi dalam penyediaan barang dan jasa; (iv) masih kurangnya fasilitasi kerjasama KUMKM dengan pelaku usaha yang berskala besar; (v) masih rendahnya penerapan teknologi dan kurangnya inovasi.

16. Urusan Penanaman Modal.

Isu-isu strategis urusan penanaman modal (i) masih rendahnya promosi potensi investasi daerah; (ii) belum optimalnya pelayanan perizinan sistem satu pintu/PTSP; (iii) masih rendahnya muatan untuk produksi barang.

17. Urusan Kebudayaan.

Isu-isu strategis urusan kebudayaan (i) masih rendahnya alokasi pagu anggaran; (ii) kurangnya promosi budaya lokal; dan (iii) kurangnya pelestarian seni dan budaya lokal untuk pengembangan pariwisata.



18. Urusan Kepemudaan dan Olah Raga.

Isu-isu strategis urusan kepemudaan dan olahraga (i) masih terbatasnya penggerakan potensi dan sumber daya manusia; (ii) masih kurangnya partisipasi pemuda berperan aktif dalam pembangunan; (iii) masih kurangnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana olah raga; dan (iii) masih kurangnya pembinaan terhadap potensi olahraga.

19. Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri.

Isu-isu strategis urusan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri (i) kurangnya sosialisasi mengenai kehidupan berbangsa dan bernegara; (ii) masih kurangnya pembinaan ketahanan nasional dan bela negara terhadap organisasi masyarakat, organisasi kepemudaan dan organisasi lembaga swadaya masyarakat; dan (iii) masih rendahnya pendidikan politik oleh partai politik.

20. Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian.

Isu-isu strategis urusan otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian (i) masih kurangnya kesesuaian penempatan dan promosi dalam jabatan dengan kompetensi dan prestasi kerja; (ii) pengembangan pegawai belum sepenuhnya berdasarkan kebutuhan kompetensi; (iii) penghasilan pegawai belum memenuhi prinsip sistem merit; (iv) masih terbatasnya kemampuan sumber daya aparatur, terutama di kecamatan-kecamatan; (v) belum terwujudnya kemandirian desa-desa; (vi) masih rendahnya kapasitas pemerintahan desa; (vii) masih belum terpenuhinya rasio jumlah polisi pamong praja; (viii) masih kecilnya rasio perlindungan masyarakat; (ix) masih rendahnya penegakan peraturan daerah; (x) belum lancarnya pelaksanaan sistem informasi manajemen pemerintah daerah; (xi) belum tercapainya predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk pengelolaan keuangan daerah; (xii) belum maksimalnya pelaksanaan SOP; (xiii) masih ada permasalahan kelembagaan yang menyebabkan kinerja pemerintahan menjadi kurang maksimal; (xiv) belum adanya kontinuitas ketersediaan data kebutuhan PNS berdasarkan Anjab dan ABK; (xv) belum maksimalnya



PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR

pelaksanaan ketatalaksanaan perangkat daerah; (xvi) belum diterapkannya konsep kelompok budaya kerja (KBK) dalam mengatasi permasalahan kinerja aparatur; (xvii) belum semua unit pelayanan memiliki standar pelayanan; (xviii) masih rendahnya minat unit pelayanan dalam berinovasi; dan (xix) belum maksimalnya pemanfaatan teknologi informasi.

21. Urusan Ketahanan Pangan.

Isu-isu strategis urusan ketahanan pangan (i) masih adanya alih fungsi lahan pertanian; dan (ii) adanya iklim cuaca yang sulit diprediksi, sehingga hasil panen belum optimal.

22. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Isu-isu strategis urusan pemberdayaan masyarakat dan desa (i) masih rendahnya pemahaman sumber daya aparatur pemerintahan desa mengenai program dan kegiatan; dan (ii) terbatasnya kualitas dan kuantitas kader dilapangan.

23. Urusan Statistik.

Isu strategis urusan statistik, yaitu masih terbatasnya kualitas dan kuantitas data dan informasi yang dibutuhkan untuk penyusunan perencanaan pembangunan daerah.

24. Urusan Kearsipan.

Isu-isu strategis urusan kearsipan (i) perlu dilakukan sosialisasi mengenai kearsipan; dan (ii) terbatasnya kuantitas dan kualitas sarana/prasarana untuk meningkatkan kinerja bidang kearsipan.

25. Urusan Komunikasi dan Informatika.

Isu-isu strategis urusan komunikasi dan informatika (i) masih rendahnya kualitas dan kuantitas sumber daya untuk menunjang kinerja bidang komunikasi dan informatika; dan (ii) perlu adanya regulasi yang mengatur tentang penyelenggaraan bidang komunikasi dan telekomunikasi.

26. Urusan Perpustakaan.

Isu-isu strategis urusan perpustakaan (i) perlu adanya sosialisasi mengenai perpustakaan; (ii) masih terbatasnya kuantitas dan kualitas sarana/prasarana untuk meningkatkan kinerja bidang perpustakaan; (iii) perlu peningkatan kompetensi sumber daya aparatur bidang perpustakaan.



4.2.2. Urusan Pilihan.

1. Urusan Kelautan dan Perikanan

Isu-isu strategis urusan kelautan dan perikanan (i) terbatasnya kapasitas sumber daya dan sarana/prasarana bidang kelautan dan perikanan; (ii) belum adanya mekanisme permodalan untuk pengembangan potensi kelautan dan perikanan; (iii) perlu adanya komitmen meningkatkan alokasi pagu anggaran untuk pengelola sumber daya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan; dan (iv) belum sinerginya perencanaan pembangunan wilayah kepulauan dengan daratan.

2. Urusan Pertanian.

Isu-isu strategis urusan pertanian (i) masih adanya alih fungsi pemanfaatan lahan pertanian; (ii) terbatasnya irigasi teknis penunjang pertanian; (iii) masih terbatasnya akses permodalan untuk pengembangan bidang pertanian; (iv) terjadinya fluktuasi iklim yang tidak bisa di prediksi; (v) masih terbatasnya kuantitas dan kualitas sarana/prasarana untuk pengembangan potensi bidang pertanian dalam arti luas; dan (vi) masih rendahnya penegakan hukum.

3. Urusan Kehutanan.

Isu-isu strategis urusan kehutanan (i) masih rendahnya penegakan hukum; dan (ii) masih rendahnya koordinasi antar pihak yang berkepentingan.

4. Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral.

Isu-isu strategis urusan energi dan sumber daya mineral (i) masih rendahnya kapasitas listrik terpasang untuk penerangan; dan (ii) belum efisiennya pemanfaatan dan pengolahan air tanah.

5. Urusan Pariwisata.

Isu-isu strategis urusan pariwisata (i) masih kurang promosi bidang pariwisata; (ii) belum tersedianya sarana dan prasarana yang memadai untuk menunjang potensi wisata; (iii) masih rendahnya koordinasi dengan berbagai pihak dalam pengelolaan potensi kepariwisataan daerah.

6. Urusan Perdagangan.

Isu-isu strategis urusan perdagangan (i) masih terbatasnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana yang mendukung pengembangan bidang



PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR

perdagangan; dan (ii) masih rendahnya koordinasi dalam mendorong pengelolaan bidang perdagangan.

7. Urusan Perindustrian.

Isu-isu strategis urusan perindustrian (i) belum terpetakannya kawasan untuk pengembangan bidang perindustrian; (ii) masih belum terpenuhi kebutuhan bahan baku lokal untuk pengembangan bidang perindustrian; (iii) masih belum tersedianya akses untuk pengembangan bidang perindustrian; (iv) masih rendahnya kapasitas sumber daya manusia.

8. Urusan Ketrasmigrasian.

Isu strategis urusan ketrasmigrasian, yaitu masih belum optimalnya pelaksanaan sosialisasi bidang ketrasmigrasian kepada masyarakat.

4.3. Isu Lingkungan Strategis.

Telaah dan analisis terhadap isu lingkungan dalam dokumen RPJMD Kabupaten Seram Bagaian Timur Tahun 2016 - 2021 amat penting dilakukan, karena merupakan salah satu pengayaan analisis lingkungan, baik internal maupun eksternal terhadap proses perencanaan. Jika data dan informasi, serta dinamika isu internal dan eksternal untuk kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan telah dapat diidentifikasi dan dipetakan dengan baik, maka pemerintah daerah akan dapat merumuskan kebijakan dan langkah-langkah strategis untuk mengelola berbagai potensi yang dimilikinya untuk meningkatkan pelayanan pada masyarakat. Sebaliknya, pemerintah daerah yang tidak merespons dan menyesuaikan dengan dinamika isu strategisnya, akan menghadapi potensi kegagalan dalam melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang telah diserahkan kepada pemerintah daerah untuk dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat.

Untuk menentukan jenis dan karakteristik suatu isu strategis sebagai isu lingkungan internal dan eksternal, khususnya Kabupaten Seram Bagian Timur, perlu dilakukan melalui beberapa pendekatan, antara lain :



4.3.1. Isu Strategis Lingkungan Internal.

Dalam konteks penyusunan perencanaan pembangunan daerah dan penganggaran untuk 5 (lima) tahun kedepan, isu strategis lingkungan internal merupakan salah satu bagian yang sangat penting untuk diuraikan. Berbagai isu strategis lingkungan internal, akan menjadi masukan untuk menetapkan rumusan kebijakan yang perlu dimasukkan kedalam dokumen RPJMD, beserta tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan yang akan dicapai sampai dengan akhir periodisasi perencanaan.

Sementara dalam konteks program, isu strategis lingkungan internal akan menjadi masukan untuk menetapkan judul program prioritas yang terkait dengan pencapaian target visi, misi dan judul program prioritas terkait dengan pencapaian target indikator kinerja penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan setiap Perangkat Daerah, sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing untuk memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat. Sebagai kabupaten yang sebagian besar wilayahnya terdiri dari pulau dan gugusan kepulauan, maka program prioritas yang juga mendesak dan perlu mendapatkan pertimbangan dan perhatian, adalah program prioritas nasional yang telah ditetapkan dalam Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang RPJMN Tahun 2015-2019, diantaranya program prioritas yang terkait dengan pengembangan Poros Maritim.

Data dan informasi yang perlu digali dan diuraikan dalam isu strategis lingkungan internal, mencakup antara lain (i) posisi geografis dan geoekonomi; (ii) kondisi demografi; (iii) geologi; (iv) topografi; (v) klimatologi; (vi) lingkungan sosial budaya; (vii) kondisi makro ekonomi daerah; dan (ix) fasilitas infrastruktur wilayah.

Isu strategis lingkungan internal di Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur, terkait dengan telah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, antara lain yaitu (1) mengelola penataan organisasi pemerintah daerah yang efisien, efektif, transparan dan akuntabel; (2)



PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR

mengelola aparatur supaya agar dapat bekerja lebih profesional, kompetitif dan akuntabel; (3) pengelolaan keuangan daerah yang memprioritaskan porsi belanja langsung untuk pemenuhan pelayanan dasar kepada masyarakat secara efisien, efektif, transparan dan akuntabel; dan (4) tata kelola pemerintahan yang berkualitas, sehingga dalam memberikan pelayanan dapat cepat, tepat, mudah dan murah.

4.3.2. Isu Strategis Lingkungan Eksternal.

Isu strategis lingkungan eksternal dapat datang dari berbagai dinamika, baik adanya kebijakan dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi. Terlepas dari berbagai bentuknya, setiap isu harus dapat dicarikan solusinya, terutama solusi dalam bentuk program/kegiatan. Isu strategis lingkungan eksternal, disamping dapat dipandang sebagai kendala/tantangan dalam pengembangan institusi, juga dapat dijadikan sebagai landasan untuk pengembangan berbagai potensi unggulan daerah.

Oleh karena itu, setiap rumusan kebijakan yang akan dituangkan dan ditetapkan kedalam rancangan dokumen RPJMD untuk 5 (lima) tahun kedepan, harus dapat dan sejalan dengan dinamika perkembangan isu strategis lingkungan eksternal yang terjadi. Dengan pola berfikir dan pola tindak yang demikian sistematis, diharapkan setiap kebijakan yang dijadikan sebagai landasan untuk penetapan program dan alokasi pagu anggaran indikatif dalam dokumen RPJMD Tahun 2016-2021, konsisten, selaras, bersinergi dan harmonis antara realisasi kebutuhan masyarakat, serta antar dokumen perencanaan pembangunan ini sendiri.

Terkait dengan uraian tersebut diatas, maka hasil telaah dan analisis terhadap data dan informasi, serta dinamika yang berkembang, identifikasi terhadap isu strategis lingkungan eksternal dapat dikelompokkan antara lain sebagai berikut :

1. Kebijakan Nasional dan Kebijakan Provinsi Maluku.

Keputusan politik pemerintah pusat untuk mengurangi subsidi BBM dan tarif Dasar listrik berimplikasi pada inflasi, kerentanan kelompok hampir miskin,



PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR

penentuan standar satuan harga belanja barang dan jasa, dan kenaikan belanja rutin. Oleh karena itu, alokasi anggaran untuk belanja rutin dan belanja modal, terkait dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang bersifat wajib dalam rangka pelayanan dasar kepada masyarakat dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan, perlu lebih di efisienkan.

Demikian pula kebijakan moratorium PNS sepanjang Tahun 2015-2019, kiranya dapat dijadikan sebagai momentum bagi Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur yang menginspirasi lahirnya berbagai inovasi dan kreasi mendidik masyarakat untuk berwirausaha, sehingga dapat tercipta lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat. Terkait dengan hal tersebut, maka perlu dipertimbangkan adanya program-program terobosan yang lebih inspiratif dengan melibatkan peran serta kalangan dunia usaha.

2. Integrasi Pasar Bebas (AFTA, AFT dan MEA).

Sesuai dengan kesepakatan diantara negara se asia, bahwa pada akhir tahun 2015 akan diberlakukan kerjasama AFTA, AFT dan MEA. Masyarakat Ekonomi Asean (MEA). Terkait dengan berlakunya AFTA, AFT dan MEA, Kabupaten Seram Bagian Timur sebagai salah satu wilayah digugusan nusantara, harus mempersiapkan mental, meningkatkan keterampilan dan meningkatkan kualitas sumber dayanya. Langkah yang perlu mendapat pertimbangan dalam menghadapi integrasi pasar bebas dimaksud, maka perlu dilakukan langkah-langkah antisipasi antara lain sebagai berikut : (i) memiliki wawasan kebangsaan yang tinggi untuk mencintai dan mendukung produk dalam negeri; (ii) mengupayakan standarisasi dan sertifikasi keterampilan yang dipersyaratkan untuk kompetisi pasar tenaga kerja; dan (iii) meningkatkan arus investasi, meningkat kualitas dan kuantitas promosi produk unggulan ke pasar-pasar di ASEAN; dan (iv) meningkatkan kuantitas dan kualitas promosi kunjungan wisata, terutama wisata laut yang merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah.



3. Sustainable Development Goals (SDG's)

Isu strategis internasional yang relevan pada sebagian besar perencanaan pembangunan daerah adalah pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) yang setelah berakhir periode kegiatannya akan dilanjutkan pada laporan panel tingkat tinggi (High-Level Panel of Eminent Persons/HLPEP) dengan lima pergeseran transformatif seperti:

- a. Mengakhiri kelaparan dan extreme poverty;
- b. Melaksanakan tiga dimensi pembangunan berkelanjutan yang berbasis sosial, ekonomi, dan lingkungan;
- c. Menciptakan kesempatan pekerjaan dan penghidupan serta mengaitkan growth dengan pembangunan berkelanjutan;
- d. Bebas dari konflik dan kekerasan, transparansi dan institusi publik yang efektif dan akuntabel; dan
- e. Visi dan semangat baru kemitraan global. Peran spesifik bagi setiap aktor – pemerintah, akademisi, bisnis, CSO, dan lain-lain.

Kesepakatan global Sustainable Development Goals (**SDGs**), merupakan langkah untuk melanjutkan berbagai program yang telah dilaksanakan dalam agenda MDG's. Indikator target yang ingin dicapai dalam kesepakatan tersebut, adalah tetap terjaganya iklim yang kondusif. Oleh karena itu, dalam perumusan kebijakan pembangunan daerah dan program-program prioritas yang akan ditetapkan dalam RPJMD dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan, harus dalam kerangka konsepsi pembangunan berkelanjutan (Sustainable development).

Untuk mencapai target tersebut, maka penyusunan perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Seram Bagian Timur sepanjang Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2021 yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD, supaya diarahkan untuk mencapai berbagai target indikator sasaran, antara lain (i) menurunkan angka kemiskinan; (ii) meningkatkan keterampilan sumberdaya manusia; (iii) meningkatkan kuantitas dan kualitas bidang urusan pendidikan, kesehatan dan ketahanan pangan; (iv) menciptakan lapangan kerja baru,



PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR

dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat; (v) mengupayakan secara maksimal kualitas ekosistem lingkungan hidup; (vi) mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, berkelanjutan, berkeadilan dan akuntabel; (vii) menciptakan kondisi wilayah tertib, nyaman dan aman; dan (viii) terlaksananya penegakan hukum yang profesional.

4.3.3. Isu-isu Strategis Nasional.

Kebijakan Pemerintah Pusat dalam pelaksanaan pembangunan nasional menjadi isu nasional yang memiliki potensi besar untuk mempengaruhi arah pembangunan Kabupaten Seram Bagian Timur pada masa mendatang. Dokumen perencanaan tingkat nasional akan menjadi salah satu sumber kebijakan yang memiliki kepastian tinggi dan dalam amanat peraturan perundangan harus diikuti karena penyusunan RPJMD harus terintegrasi dengan berbagai dokumen perencanaan pembangunan baik regional maupun nasional.

1. Isu-isu Strategis RPJM Nasional Tahun 2015-2019.

Dalam merumuskan dan merealisasikan berbagai komitmen Presiden dan Wakil Presiden yang terpilih pada periode tahun 2015-2019, serta berdasarkan kajian maupun analisis mengenai permasalahan dan isu strategis nasional yang menjadi prioritas untuk ditangani dalam lima tahun ke depan, termasuk dalam penyelarasan dengan sasaran-sasaran pokok pembangunan jangka panjang dalam RPJP Nasional tahun 2005-2025, maka untuk memajukan Negara Indonesia ke depan ditetapkan Visi RPJM Nasional tahun 2015-2019 sebagai berikut:

“Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”

Visi dalam rangkaian dalam bait-bait kata secara implisit memiliki makna yang sangat strategis dalam mewujudkan rakyat Indonesia yang adil dan makmur. Makna dimaksud adalah sebagai berikut :

- a. Gotong Royong**, merupakan intisari dari ideologi Pancasila. Tanggung jawab untuk membangun bangsa harus dilakukan dengan cara musyawarah dalam memutuskan dan gotong royong dalam kerja. Kekuatan rakyat adalah Gotong Royong, dimana rakyat selalu bahu-



PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR

membahu dan bekerjasama menyelesaikan berbagai hambatan dan tantangannya ke depan.

- b. Berdaulat,** adalah hakikat dari kemerdekaan, yaitu hak setiap bangsa untuk menentukan nasibnya sendiri dan menentukan apa yang terbaik bagi bangsanya sendiri. Oleh karena itu, pembangunan sebagai usaha untuk mewujudkan kedaulatan sebagai negara merdeka, merupakan upaya membangun kemandirian. Bangsa yang berdaulat dan mandiri adalah bangsa yang mampu mewujudkan kehidupan sejajar dan sederajat dengan bangsa lain. Oleh karena itu, untuk membangun kemandirian diperlukan kekuatan dan kemampuan nasional di segala lini baik bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan.
- c. Kemandirian,** memiliki makna antara lain pada ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas dan mampu memenuhi tuntutan kebutuhan dan kemajuan pembangunannya; kemandirian aparatur pemerintah dan aparatur penegak hukum dalam menjalankan tugasnya; kemampuan untuk memenuhi pembiayaan pembangunan yang bersumber dari dalam negeri yang makin kokoh dan berkurangnya ketergantungan kepada sumber luar negeri; dan kemampuan memenuhi kebutuhan pokok.
- d. Berkepribadian,** harus dicerminkan dalam setiap aspek kehidupan baik hukum, ekonomi, politik, sosial budaya, maupun pertahanan keamanan. Kemandirian dan kemajuan suatu bangsa tidak boleh hanya diukur dari perkembangan ekonomi semata, namun kemandirian dan kemajuan juga tercermin dalam kelembagaan, pranata-pranata, dan nilai-nilai yang mendasari kehidupan politik dan sosial. Secara lebih mendasar lagi, kemandirian sesungguhnya mencerminkan sikap seseorang atau sebuah bangsa mengenai jati dirinya, masyarakatnya, serta semangatnya dalam menghadapi berbagai tantangan.

Dalam upaya untuk mewujudkan Visi sebagaimana telah diuraikan diatas, maka perlu ditempuh melalui rumusan Misi sebagai berikut:

- 1) Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan



PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR

sumberdaya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan;

- 2) Mewujudkan masyarakat maju, berkesinambungan dan demokratis berlandaskan Negara Hukum;
- 3) Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim;
- 4) Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera;
- 5) Mewujudkan bangsa yang berdaya saing;
- 6) Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berlandaskan kepentingan nasional; dan
- 7) Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Selanjutnya dalam upaya mencapai visi dan misi serta untuk menunjukkan prioritas dalam jalan perubahan menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan, dirumuskan sembilan agenda prioritas. Kesembilan agenda prioritas itu disebut NAWA CITA, yaitu:

- 1) Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara;
- 2) Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya;
- 3) Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan;
- 4) Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
- 5) Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia;
- 6) Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya;
- 7) Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik;
- 8) Melakukan revolusi karakter bangsa; dan



PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR

9) Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Dalam pelaksanaan agenda prioritas nasional tersebut, dirumuskanlah kebijakan pengembangan wilayah pulau-pulau besar yang diarahkan untuk mendorong percepatan pembangunan di wilayah Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua dengan tetap mempertahankan momentum pembangunan di wilayah Jawa-Bali dan Sumatera. Percepatan pembangunan wilayah ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta mengurangi kesenjangan.

2. Isu-isu Strategis RPJMD Provinsi Maluku Tahun 2014-2019

Isu strategis dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah merupakan gambaran kondisi riil yang perlu menjadi perhatian dan merupakan isu untuk dapat diantisipasi dalam setiap perencanaan pembangunan untuk periode tahun 2014-2019. Isu strategis dimaksud, meliputi:

a. Isu-isu Strategis Global.

- 1) Perubahan iklim dan bencana alam;
- 2) Terorisme global;
- 3) Perdagangan bebas;
- 4) Demokrasi dan HAM; dan
- 5) Trafficking; dan
- 6) Sustainable Development Goals (SDGs).

b. Isu-isu Strategis Daerah.

- 1) Tata kelola pemerintahan dan manajemen keuangan daerah belum efektif dan efisien;
- 2) Tingginya angka kemiskinan dan pengangguran;
- 3) Terbatasnya infrastruktur dasar;
- 4) Belum optimalnya pelayanan pendidikan;
- 5) Belum optimalnya pelayanan kesehatan;
- 6) Masih rendahnya ketahanan pangan daerah;
- 7) Belum optimalnya iklim usaha dan investasi;
- 8) Belum berkembangnya budaya kreativitas, inovasi, ekonomi kreatif dan teknologi;



PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR

- 9) Rendahnya daya saing ekonomi daerah dan komoditas keunggulan daerah;
- 10) Belum optimalnya pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang, pengelolaan lingkungan hidup dan penanggulangan bencana, serta daya dukung pulau-pulau kecil dan kawasan perbatasan terluar dan terdepan;
- 11) Ketimpangan antar wilayah;
- 12) Belum optimalnya aktualisasi nilai-nilai kehidupan umat beragama;
- 13) Belum sinerginya perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah;
- 14) Belum optimalnya implementasi pengarusutamaan gender dan perlindungan anak.



PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR

BAB IX

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH

Untuk mengetahui tingkat capaian kinerja pembangunan jangka menengah daerah, maka perlu menetapkan indikator yang terukur sebagai tolok ukur pencapaian kinerja setiap kepala daerah. Dengan demikian, maka tujuan penetapan indikator kinerja daerah adalah dalam rangka memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Bupati Seram Bagian Timur pada akhir periode masa jabatannya yaitu pada Tahun 2021, khususnya dalam mengukur keberhasilan capaian target kinerja selama 5 (lima) tahun memimpin. Indikator kinerja daerah secara teknis pada dasarnya dirumuskan dengan mengambil indikator dari program prioritas yang telah ditetapkan (*out-comes*). Suatu indikator kinerja daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (*outcome*) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah berkenaan setelah program prioritas ditetapkan.

Berdasarkan pencapaian indikator kinerja yang merupakan penjabaran dari keberhasilan dari tujuan dan sasaran pembangunan daerah periode 2016-2021 sebagaimana telah diuraikan pada Bab-Bab terdahulu, maka untuk mencapainya diperlukan upaya dari seluruh Perangkat Daerah dan para pemangku kepentingan untuk mendukung dan mendorong tercapainya target-target indikator yang meliputi :

1. Indikator aspek kesejahteraan masyarakat;
2. Indikator aspek pelayanan dasar; dan
3. Indikator aspek daya saing daerah.

Terkait dengan uraian diatas, maka target capaian kinerja setiap indikator haruslah terkait secara langsung dengan pencapaian aspek-aspek tertentu. Dalam Bab ini akan uraikan secara rinci tentang pencapaian target indikator kinerja pada aspek-aspek tersebut diatas, sebagai berikut :



9.1. Aspek Kesejahteraan Masyarakat.

Pada aspek Kesejahteraan Masyarakat. Penentuan capaian target indikator kinerja tiap tahunnya meliputi kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, kesejahteraan masyarakat, serta seni budaya dan olah raga. Pertumbuhan ekonomi dapat diukur dari pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan PDRB Atas Dasar Harga Konstan diharapkan akan tumbuh setiap tahunnya untuk kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan. Demikian pula dengan persentase laju inflasi setiap tahunnya sepanjang 5 (lima) tahun kedepan diharapkan dapat ditekan sampai akhir perodesasi RPJMD yaitu tahun 2021. Sedangkan Angka kemiskinan dan pengangguran ditargetkan dapat turun setiap tahunnya sepanjang kurun 5 (lima) tahun kedepan.

Hasil evaluasi kinerja pada aspek kesejahteraan dimaksud, selanjutnya dituangkan dalam tabel tentang Indikator Kinerja Daerah berdasarkan Aspek kesejahteraan masyarakat. Data dan informasi dalam tabel tersebut selanjutnya dipublikasikan kepada masyarakat umum. Hal ini sebagai penjabaran dari Misi ke 1, yaitu "Mengembangkan Aktivitas Ekonomi Lokal Berbasis Komoditi Unggulan dan Kelembagaan Lokal di Daerah Perdesaan" dan penjabaran dari Misi ke 3, yaitu "Mengembangkan Jejaring Kerjasama Multi Level Stakeholder Untuk Pengembangan Perekonomian Daerah yang Kuat dan Kompetitif", serta penjabaran dari Misi ke 7 yaitu : "Memperkuat Kapasitas SDM dan Kelembagaan Lokal Dalam Integrasi Pasar Bebas, Khususnya Asia Pasifik (AFTA) dan Asean Free Trade (AFT)".

9.2. Aspek Pelayanan Umum

Selanjutnya, indikator kinerja aspek Pelayanan Umum dalam 5 (lima) tahun mendatang akan terus didorong untuk menghasilkan performance kinerja yang semakin meningkat dari tahun ke tahun. Strategi yang akan dirumuskan untuk meningkatkan performance kinerja pelayanan umum adalah dengan mengelola secara profesional setiap urusan pemerintahan baik yang bersifat wajib maupun urusan bersifat pilihan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, peengelolaan setiap urusan pemerintahan dimaksud akan dikendalikan dan dievaluasi secara periodik baik oleh setiap Perangkat Daerah



PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR

sebagai penanggung jawab maupun oleh Bupati. Hasil evaluasi dimaksud akan dijadikan sebagai bahan masukan untuk perumusan kebijakan selanjutnya.

Hasil evaluasi kinerja pada aspek pelayanan umum dimaksud, selanjutnya akan dituangkan dalam tabel tentang Penetapan Indikator Kinerja Daerah berdasarkan Aspek Pelayanan Umum, untuk selanjutnya akan dipublikasikan kepada masyarakat umum. Hal ini terkait dengan upaya untuk mengimplementasikan Misi ke 2, yaitu "Menjalankan Reformasi Birokrasi Dalam Tata Kelola Birokrasi, Serta Reformasi Agraria Dalam Tata Ruang Wilayah", penjabaran dari Misi ke 4, yaitu "Mendorong Penguatan Demokrasi dan Partisipasi Publik Dalam Sistem Tata Kelola Pemerintahan yang Terbuka, Akuntabel dan Bertanggungjawab", serta penjabaran dari Misi ke 6, yaitu "Mengembangkan Aksesibilitas Infrastruktur Serta Akses Luas Terhadap Iptek, Permodalan, Keuangan dan Pasar".

9.3. Aspek Daya Saing Daerah

Meningkatkan kinerja pada aspek daya saing daerah merupakan salah satu upaya yang tidak kalah beratnya dengan meningkatkan aspek-aspek lainnya. Jika aspek ini dapat didorong tumbuh secara berkelanjutan, maka akan membawa dampak ganda yang sangat positif dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Seram Bagian Timur. Ada beberapa dampak positif yang akan didapat oleh masyarakat tidak sebatas pada masyarakat di Kabupaten Seram Bagian Timur saja, tetapi masyarakat disekitar Kabupaten Seram Bagian Timur juga akan mendapatkan nilai tambah yang cukup signifikan, antara lain :

1. Meningkatnya perekonomian masyarakat disebabkan meningkatnya pendapatan masyarakat dari berbagai usaha kecil masyarakat;
2. Mengurangi angka kriminalitas, karena berkurangnya tingkat pengangguran;
3. Meningkatnya pendapatan asli daerah, karena tumbuhnya ekonomi masyarakat; dan
4. Berkurangnya angka buta huruf dikarenakan semakin bertambahnya orang yang mampu membiayai anaknya untuk melanjutkan kesekolah yang lebih tinggi.



PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR

Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang transparan, hasil evaluasi kinerja pada aspek daya saing daerah akan dituangkan dalam tabel tentang Indikator Kinerja Daerah berdasarkan aspek daya saing daerah. Selanjutnya data dan informasi dalam tabel tersebut akan dipublikasikan kepada masyarakat umum, para pemangku kepentingan dan akan dilaporkan kepada pemerintah provinsi. Hal ini sebagai penjabaran dari Misi ke 5, yaitu "Mendorong Pengembangan Sektor Unggulan Kelautan dan Perikanan", penjabaran dari Misi ke 6, yaitu "Mengembangkan Aksesibilitas Infrastruktur Serta Akses Luas Terhadap Iptek, Permodalan, Keuangan dan Pasar", dan penjabaran dari Misi ke 7, yaitu : "Memperkuat Kapasitas SDM dan Kelembagaan Lokal Dalam Integrasi Pasar Bebas, Khususnya Asia Pasifik (AFTA) dan Asean Free Trade (AFT)".



PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR

Tabel 9.1
Penetapan Indikator Kinerja Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2016-2021

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD (2016)	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
				Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT								
A	Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi								
1	Otonomi Daerah								
1.1	Pertumbuhan Ekonomi	%	7,57	7,57	7,58	7,59	8,00	8,20	8,20
1.2	Indeks Pembangunan Manusia	%	70,55	70,55	70,57	71,12	71,36	72,03	72,03
1.3	Laju Inflasi	%	6,45	6,45	6,49	6,56	6,55	6,76	6,76
1.4	PDRB Perkapita	Rp.	3.878.303	4.355.721	4.355.721	4.355.721	4.750.675	4.930.250	4.930.250
B	Fokus Kesejahteraan Sosial								
1	Pendidikan								
1.1	Angka Melek Huruf	%	96,96	96,96	97,11	97,44	97,65	97,89	97,89
1.2	Angka Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	9,24	9,24	9,76	10,31	10,68	11,49	11,96
1.3	Angka Partisipasi Kasar SD/MI	%	99,60	99,60	99,64	99,64	99,85	99,85	99,85
1.4	Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs	%	88,59	93,06	93,36	93,63	93,94	94,36	93,36
1.5	Angka Partisipasi Kasar SMA/SMK/MA	%	69,45	72,16	72,46	72,84	73,16	73,39	73,39
1.6	Angka partisipasi murni SD/MI	%	91,65	91,65	91,95	92,35	92,56	92,88	92,88
1.7	Angka partisipasi murni SMP/MTs	%	64,56	64,86	64,99	65,26	65,56	65,56	65,56
1.8	Angka partisipasi murni SMA/SMK/MA	%	55,38	55,38	55,66	55,88	56,18	56,38	56,38
2	Kesehatan								
2.1	Angka Kelangsungan Hidup bayi	%	82,9	82,9	93,1	93,3	93,5	93,7	93,7
2.2	Angka Harapan Hidup	Tahun	71,55	71,55	71,75	71,85	71,95	72,03	72,03



PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD (2016)	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
				Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.3	Persentase Balita Gizi Buruk	%	17,17	17,17	17,11	17,08	17,05	17,01	17,01
3	Pertanahan								
3.1	Persentase Penduduk Yang Memiliki Tanah Bersertifikat	%	0,54	0,54	1,23	1,64	2,11	2,77	2,77
4	Ketenagakerjaan								
4.1	Rasio Penduduk yang Bekerja	%	53,34	53,34	53,44	53,49	53,54	53,59	53,59
C	Fokus Seni Budaya dan Olah Raga								
1	Kebudayaan								
1.1	Jumlah grup kesenian	Grup	11	4	4	4	4	4	31
1.2	Jumlah gedung kesenian	Gedung	8	2	2	2	2	2	18
2	Pemuda dan Olah Raga								
2.1	Jumlah Klub Olah Raga	Klub	13	2	2	2	2	2	23
2.2	Jumlah gedung olahraga	Gedung	3	1	1	1	1	1	8
II	ASPEK PELAYANAN UMUM								
A	Fokus Layanan Urusan Wajib								
1	Urusan Pendidikan								
1.1	Angka Melek Huruf	%	96,96	96,96	97,11	97,44	97,65	97,89	97,89
1.2	Angka Rata-Rata Lama Sekolah	%	24,14	24,67	24,98	25,32	25,32	25,72	25,72
1.3	Angka Partisipasi Kasar (APK)								
	- SD/MI	%	78,11	78,34	78,78	78,78	79,24	79,24	77,24
	- SMP/MTs	%	64,15	64,45	64,87	65,12	64,96	65,23	65,23
	- SMA/SMK/MA	%	53,24	52,66	52,87	53,32	53,55	53,91	53,91
1.4	Angka Partisipasi Murni (APM)								



PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD (2016)	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
				Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	- SD/MI - SMP/MTs - SMA/SMK/MA	% % %	100 83,34 62,22	100 83,46 62,46	100 83,88 62,67	100 84,34 62,85	100 84,34 63,17	100 85,11 63,77	100 85,11 63,77
1.5	Angka Kelulusan - SD/MI - SMP/MTs - SMA/SMK/MA	% % %	100 100 100	100 100 100	100 100 100	100 100 100	100 100 100	100 100 100	100 100 100
1.6	Angka melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTS	%	100	100	100	100	100	100	100
1.7	Jumlah guru dengan kualifikasi S1/D4	Guru	300	50	50	50	50	50	550
1.8	Rasio sekolah / siswa - SD/MI - SMP/MTS - SMA/SMK/MA	% % %	80 70 66	80 70 66	80 70 66	80 75 68	83 75 68	83 75 68	83 75 68
1.9	Rasio guru / siswa - SD/MI - SMP/MTS - SMA/SMK/MA	% % %	80 70 65	80 70 65	80 70 65	80 70 70	83 75 70	85 75 70	85 75 70
1.10	Angka partisipasi PAUD	%	85	85	85	90	90	90	90
1.11	Angka Putus Sekolah - SD/MI - SMP/MTS - SMA/SMK/MA	% % %	25 25 25	25 25 25	23 20 25	23 20 25	20 20 20	20 20 20	20 20 20
1.12	Jumlah sekolah kondisi bangunan baik (sarana dan prasarana lengkap) - SD/MI - SMP/MTS - SMA/SMK/MA	% % %	80 85 85	80 85 85	80 85 85	85 90 90	85 90 90	85 90 90	85 90 90
1.13	Angka melanjutkan dari SMP/MTS ke SMA/SMK/MA	%	80	80	80	80	85	85	85



PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD (2016)	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
				Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Urusan Kesehatan								
2.1	Angka kematian ibu (per 1000 KH)	%	1,14	1,14	1,14	1,13	1,13	1,13	1,13
2.2	Angka Kematian Bayi (per 1000 KH)	%	4	4	3	3	3	2	2
2.3	Angka Kematian Balita (per 1000 KH)	%	1,03	1,03	1,04	0,19	0,36	0,58	0,58
2.4	Angka Usia Harapan Hidup	%	63,77	63,77	63,97	64,53	64,77	65,26	65,26
2.5	Prosentase gizi buruk	%	3,52	3,75	4,95	5,05	6,15	6,27	6,27
2.6	Cakupan balita gizi buruk yang mendapatkan perawatan	%	-	-	-	-	-	-	-
2.7	Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin	%	-	-	-	-	-	-	-
2.8	Cakupan rumah tangga ber-pola hidup bersih dan sehat	%	65,5	65,5	70	75	80	85	85
2.9	Cakupan rumah yang memenuhi sanitasi dasar	%	-	-	-	-	-	-	-
2.10	Jumlah kunjungan rawat inap Rumah Sakit per hari (orang per hari)	%	64,17	65,34	66,50	67,67	68,83	70	70
2.11	Jumlah kunjungan rawat jalan Rumah Sakit per hari (orang per hari)	%	-	-	-	-	-	-	-
2.12	Jumlah kunjungan UGD per hari (orang per hari)		14	14	14	14	14	14	14
3	Urusan Pekerjaan Umum								
3.1	Persentase kondisi jalan dalam mantap.	%	87,76	88,15	88,69	88,95	89,55	90	90
3.2	Persentase jembatan dalam kondisi mantap.	%	83,14	83,14	83,14	83,47	84,05	84,05	84,05
3.3	Panjang irigasi, rawa dan pengairan dalam kondisi baik.	M ²	-	-	-	-	-	-	-



PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD (2016)	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
				Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.4	Persentase pengembangan infrastruktur di kawasan strategis dan cepat tumbuh.	%	63	63	64	64	66	66	66
3.5	Persentase lingkungan kumuh di pedesaan.	%	66,97	66,54	64,65	59,35	50,25	41,44	41,44
3.6	Tingkat ketersediaan infrastruktur daerah dalam kondisi baik.								
4	Perumahan								
4.1	Jumlah rumah tidak layak huni	Unit	67,77	58	48,25	48,25	48,25	39	39
4.2	Persentase rumah tangga pengguna air bersih	%	79,75	80	81	82,55	84	85	85
4.3	Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan didalam Unit Pelayanan Terpadu	%	94,13	95	95,75	96,25	97	98	98
4.4	Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	%	92,4	93	94	94,5	95	95,5	95,5
4.5	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum	%	60,33	65	69	73	77	80	80
4.6	Jumlah PKK aktif	Kelompok	-	-	-	-	-	-	-
5	Urusan Penataan Ruang								
5.1	Prosentase dokumen RDTR yang tersusun	%	-	-	-	-	-	-	-
6	Urusan Perencanaan Pembangunan								
6.1	Ketepatan waktu penerbitan dokumen perencanaan yang ditetapkan dengan Perda : - RPJPD;	Ya/tidak	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya



PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD (2016)	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
				Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	- RPJMD; - RKPD.	Ya/tidak Ya/tidak	Ya Ya	Ya Ya	Ya Ya	Ya Ya	Ya Ya	Ya Ya	Ya Ya
6.2	Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi.	%	100	100	100	100	100	100	100
6.3	Dokumen Perencanaan Pembangunan bidang Sosial Budaya.	%	100	100	100	100	100	100	100
7	Urusan Perhubungan								
7.1	Persentase pemasangan rambu-rambu (warning light, marka, guardrail)	%	-	-	-	-	-	-	-
7.2	- Rambu- rambu	Meter	-	-	-	-	-	-	-
7.3	- Warning Light	Unit	-	-	-	-	-	-	-
7.4	- Marka	Buah	-	-	-	-	-	-	-
7.5	- Guard Rail	Buah	-	-	-	-	-	-	-
7.6	Panjang median jalan kondisi baik	Meter	66.206	66.019	65.812	65.432	65.027	64.805	64.805
8	Urusan Lingkungan Hidup								
8.1	Persentase penanganan sampah/ Persentase sampah yang terangkut	%	-	-	-	-	-	-	-
8.2	Persentase lingkungan hidup yang lestrasi.								
8.3	Persentase kawasan konservasi SDA.								
9	Urusan Pertanahan								
9.1	Penyelesaian Konflik – konflik Pertanahan	Kali	4	7	7	6	5	5	5
10	Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil								
10.1	Penduduk ber KTP	%	78	78	78	79	79	82	82



PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD (2016)	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
				Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10.2	Bayi berakte kelahiran	%	94	95	96	97	98	99	99
10.3	Pasangan berakte nikah	%	53	53	63	63	66	74	74
11	Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak								
11.1	Prosentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan	%	29,89	30,23	30,75	31,29	32	32,61	32,61
11.2	Prosentase partisipasi perempuan di lembaga swasta	%	39,64	40,01	40,25	40,55	40,75	41,00	41,00
11.3	Partisipasi angkatan kerja perempuan	%	35,15	36,14	37,19	38,12	39,15	40,00	40,00
11.4	Persentase Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan	%	-	-	-	-	-	-	-
12	Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera								
12.1	Cakupan penyediaan alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat.	%	48	48	47	48	49	49	49
13	Urusan Sosial								
13.1	Prosentase penanganan penyandang masalah Kesejahteraan Sosial	%	24	24	24	24	24	24	24
13.2	PMKS yang tertangani (orang)	Orang	124	124	124	124	124	124	124
13.3	Cakupan rumah bagi korban bencana alam dan PMKS.	Unit							
14	Urusan Ketenagakerjaan								
14.1	Pencari kerja yang ditempatkan	%	64,18	67	70	73	76	79	79
14.2	Keselamatan dan perlindungan	%	-	-	-	-	-	-	-
15	Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan								



PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD (2016)	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
				Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Menengah								
15.1	Usaha kecil dan menengah unggulan	%	47,57	47,89	48,35	48,76	49,01	49,30	49,30
15.2	Koperasi Aktif	%	32	32	35	35	35	36	36
16	Usuran Penanaman Modal								
16.1	Jumlah ijin yang diterbitkan	Buah	25	21	31	34	35	35	35
16.2	Jumlah Investor	PMA/PMDN	5	6	7	7	8	8	8
16.3	Perkembangan nilai realisasi PMDN	Rp.	-	-	-	-	-	-	-
16.4	Perkembangan nilai realisasi PMA	US							
17	Usuran Kebudayaan								
17.1	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	Kali	2	3	4	5	6	7	7
17.2	Benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	Unit	2	3	3	3	3	3	3
18	Usuran Pemuda dan Olahraga								
18.1	Jumlah organisasi olah raga yang aktif	Klub	3	3	3	3	3	3	3
18.2	Jumlah aktivitas dan pengembangan kepemudaan	Kali	1	1	1	1	1	1	1
18.3	Presentase olahraga berprestasi	%							
19	Usuran Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Negeri								
19.1	Jumlah pembinaan politik daerah	Parpol	3	4	6	6	6	8	8
19.2	Rasio Pos Siskampling yang aktif per jumlah desa/kelurahan	%	-	-	-	-	-	-	-



PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD (2016)	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
				Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
19.3	Jumlah pembinaan politik terhadap LSM, Ormas OKP	kali	-	-	-	-	-	-	-
20	Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian;								
20.1	Rasio jumlah polisi pamong praja per 10.000 penduduk	%	13,5	14	14,5	5	6	6,5	6,5
20.2	Jumlah linmas per jumlah 10.000 penduduk	%	5,04	5,25	5,5	5,75	5,99	6,05	6,05
20.3	Rasio pos siskamling per jumlah desa	%	7,37	7,39	7,44	7,62	7,57	7,95	7,95
20.4	Sistem informasi pelayanan perijinan dan administrasi pemerintah	Ada/tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
20.5	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3(Ketertiban, Ketentraman, Keindahan)	%	87,44	87,34	87,01	85,55	85,05	85,05	85,05
20.6	Tingkat waktu tanggap (renpons time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen.	jam	3	3	2	2	1,5	1,5	1,5
20.7	Indeks Kepuasan Masyarakat	%	80,15	81,13	82,19	83,2	84,01	85	85
20.8	Opini BPK terhadap laporan Keuangan	WDP/WTP	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
20.9	persentase Penegakan Perda	%	97,95%	97,45%	97%	98%	99%	100%	100%
20.10	Pengesahan Perda APBD tepat waktu (Desember Tahun ke n-1)	Ya/tidak	ya	ya	ya	ya	ya	ya	ya
20.11	Persentase SKPD yang menyelesaikan Lap Keuangan (maks 31 Januari) Tepat Waktu	%	100	100	100	100	100	100	100



PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD (2016)	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
				Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20.12	Persentase temuan audit yang ditindak lanjuti	%	100	100	100	100	100	100	100
20.13	Persentase SKPD yang menyelesaikan Lap Kinerja (max 31 Maret) tepat waktu	%	100	100	100	100	100	100	100
20.14	Persentase Perda yang dilakukan konsultasi Publik	%	100	100	100	100	100	100	100
20.15	Persentase SKPD yang telah dilakukan Anjab dan ABK	%	95	96	97	98	99	100	100
20.16	Persentase kasus pelanggaran disiplin pegawai	%	11	11	11	12	12	12	12
20.17	Persentase pejabat struktural yang telah mengikuti diklat kepemimpinan sesuai jenjangnya	%	64	71	79	86	93	100	100
20.18	Laporan keuangan Pemda disusun tepat waktu	Ya/tidak	ya	ya	ya	ya	ya	ya	ya
20.19	Persentase peningkatan PAD	%	8,5	8,7	8,9	9,3	9,6	9,7	9,7
21	Urusan Ketahanan Pangan								
21.1	Ketersediaan pangan utama (Ton)	Ton	-	-	-	-	-	-	-
22	Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa								
22.1	Swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat	%	81	81	81	81	81	81	81
22.2	Jumlah aparatur desa yang mendapat pembinaan	orang	-	-	-	-	-	-	-
22.3	Jumlah kelembagaan masyarakat /organisasi masyarakat pedesaan yang dibina	Unit	11	11	11	13	13	14	14
23	Urusan Statistik								
23.1	Buku Kabupaten Seram Bagian Timur Dalam Angka	Buku	1	1	1	1	1	1	1



PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD (2016)	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
				Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23.2	Buku PDRB Kabupaten Seram Bagian Timur.	Buku	1	1	1	1	1	1	1
23.3	Persentase keterisian SIPP	%	-	-	-	-	-	-	-
24	Urusan Kersipan								
24.1	Jumlah arsip yang dikelola	Buah	-	-	-	-	-	-	-
25	Urusan Komunikasi dan Informatika								
25.1	SKPD yang terkoneksi dalam jaringan Sever Pemerintah Daerah	SKPD	25	25	30	35	35	38	44
25.2	Persentase peningkatan informasi kepada masyarakat.	%	60	65	70	75	80	85	56
25.3	Jumlah web/blog SKPD yang aktif (unit)	unit	14	14	14	14	14	14	14
25.4	Persentase penyelesaian pengaduan (lempung dumas)	%	-	-	-	-	-	-	-
25.5	Media interpersonal sarasehan	Ada/tidak	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada
26	Urusan Perpustakaan								
26.1	Jumlah koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	Buku	250	275	345	345	395	395	395
B	Fokus Layanan Urusan Pilihan								
1	Urusan Kelautan dan Perikanan								
1.1	Produksi berbagai jenis perikanan	Ton	128.692,2	128.692,2	128.692,2	128.692,2	128.692,2	128.692,2	128.692,2
1.2	Konsumsi Ikan	Kg	-	-	-	-	-	-	-
1.3	Pendapatan daerah dari sektor perikanan.	Rp.							
1.4	Persentase pertumbuhan perekonomian di wilayah pesisir	%							



PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD (2016)	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
				Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.5	Persentase pengelolaan potensi sumber daya kelautan	%							
1.6	Cakupan hasil perikanan laut.	ton							
1.7	Cakupan hasil perikanan tangkap.	ton							
1.8	Cakupan lapangan kerja di sektor perikanan.	Orang							
1.9	pengelolaan potensi kelautan di pulau-pulau kecil.	ton							
2	Urusan Pertanian								
2.1	Nilai Tukar Petani (NTP)	Rp.	-	-	-	-	-	-	-
2.2	Kontribusi pertanian terhadap PDRB	%	29,33	33,66	33,66	38,17	38,79	39,11	39,11
2.3	Produktivitas padi dan jagung	(kw/ha)	-	-	-	-	-	-	-
2.4	Produktivitas kedelai dan kedelai hitam	(kw/ha)	-	-	-	-	-	-	-
2.5	Cakupan hewan ternak sehat	%	-	-	-	-	-	-	-
2.6	Jumlah populasi sapi potong	Ekor	110	110	120	130	1130	130	130
2.7	Panjang jaringan irigasi, rawa dan pengairan dalam kondisi baik	km							
2.8	Jumlah sarana/prasarana pertanian								
2.9	Jumlah ketersediaan pangan pokok masyarakat.	ton							
2.10	Cakupan hasil pertanian yang dipasarkan	ton							
3	Urusan Kehutanan								
3.1	Rehabilitasi hutan dan lahan kritis	%	-	-	-	-	-	-	-
3.2	Luas lahan kritis dan lahan tidak produktif yang tertanami	Ha	-	-	-	-	-	-	-
3.3	Jumlah produksi kayu rakyat (jati dan	M ³	-	-	-	-	-	-	-



PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD (2016)	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
				Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	sengon)								
4	Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral								
4.1	Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB	%	12	12	12	12	13	13	13
4.2	Cakupan kawasan pertambangan berkelanjutan.								
4.3	Persentase Rumah tangga pengguna listrik.								
4.4	Persentase potensi geologi.								
5	Urusan Pariwisata								
5.1	Jumlah kunjungan wisata	Orang	8.850	8.484	9.118	8.752	9.386	9.022	9.022
5.2	Ketersediaan fasilitas destinasi kepariwisataan								
5.3	Peningkatan promosi kepariwisataan								
6	Urusan Perdagangan								
6.1	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	%	29	32	35	35	35	34	44
6.2	Revitalisasi pasar tradisional	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Urusan Perindustrian								
7.1	Pertumbuhan Industri	%	3	6	6	6	6	9	9
8	Urusan Ketransmigrasian								
8.1	Persentase transmigrasi swakarsa	%							
III	ASPEK DAYA SAING DAERAH								
A	Fokus Kemampuan Ekonomi daerah								
1	Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah,								



PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD (2016)	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
				Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian.								
2	Pertanian								
B	Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur								
1	Perhubungan								
2	Penataan Ruang								
2.1	Ketaatan terhadap RTRW	%	84	85	85	90	90	90	90
2.2	Luas wilayah produktif	Ha	-	-	-	-	-	-	-
2.3	Luas wilayah industri	%	-	-	-	-	-	-	-
2.4	Luas wilayah banjir	%	-	-	-	-	-	-	-
3	Fasilitas Bank dan Non Bank								
3.1	Jenis dan jumlah bank dan cabang	Unit	4	4	4	5	5	5	5
3.2	jumlah perusahaan asuransi dan cabang	Unit	3	3	4	4	4	4	5
3.3	Jenis, kelas dan jumlah restoran	Unit	9	9	9	12	12	12	12
3.4	jumlah penginapan/hotel	Unit	6	6	6	6	7	8	8
4	Lingkungan Hidup								
4.1	Pencemaran Status Mutu Air	%	40	40	50	50	50	60	60
5	Komunikasi dan Informatika								
5.1	Rasio ketersediaan daya listrik	%	69,6	69,6	69,6	69,6	77	77	77
5.2	Prosentase penduduk yang menggunakan HP/Telp	%	70	70	75	80	85	90	90
C	Fokus Iklim Investasi								
1	Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan								



PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD (2016)	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
				Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian.								
1.1	Angka kriminalitas	%	66,7	66	65	64	61	60	60
1.2	Jumlah demonstrasi	Kali	11	11	11	12	11	10	10
1.3	Lama proses perijinan	Hari	5	5	5	5	5	5	5
1.4	Jumlah dan macam pajak dan retribusi daerah	Buah	7	7	7	7	7	7	7
1.5	Jumlah perda yang mendukung iklim investasi	Buah	1	1	1	1	1	1	1
1.6	Persentase Perda yang disahkan tepat waktu	%	100	100	100	100	100	100	100
D	Fokus Sumber Daya Manusia								
1	Ketenagakerjaan								
1.1	Rasio ketergantungan	%	42,23	43,15	43,59	43,99	44,25	44,79	44,79
1.2	Rasio lulusan S1/S2/S3	%	9,56	9,58	9,6	9,62	9,65	9,68	9,68



PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR

BAB V

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN

Kabupaten Seram Bagian Timur merupakan salah satu wilayah administratif di Provinsi Maluku yang memiliki berbagai sumber daya alam beranekaragam termasuk kebudayaan masyarakat yang cukup kental dan berkarakter kuat. Oleh karena itu, potensi-potensi tersebut merupakan salah satu modal berharga bagi setiap pelaksana pembangunan daerah untuk memulai rangkaian program dan kegiatan pembangunan sebagai upaya untuk menyejahterakan masyarakat. Kesejahteraan rakyat akan terbangun secara konsisten dan merata jika segenap insan di Kabupaten Seram Bagian Timur berpartisipasi aktif dalam mengembangkan kemampuan dirinya untuk mandiri, sekaligus berdaya saing sehingga memiliki kesempatan yang lebih besar dalam menggapai cita-citanya yakni meningkatnya taraf kehidupan keluarga secara sosial ekonomi dalam masyarakat.

Percepatan pencapaian kesejahteraan ekonomi, sosial, dan lingkungan memerlukan kebijakan dan peran pemerintah yang kuat dan efektif dalam mengatur jalannya pembangunan yang berkelanjutan sesuai dengan visi dan misi pembangunan. Untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, dilakukan perencanaan yang efektif dengan partisipasi para pelaku pembangunan secara terkoordinir. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan, bahwa polarisasi rumusan konsep perencanaan pembangunan difokuskan pada penguatan peran Pemerintah Daerah dan peningkatan partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, visi dan misi kepala daerah terpilih dijabarkan secara mendetail ke dalam rumusan yang dapat dimengerti dan diukur capaian keberhasilannya. Penjabaran tersebut dilakukan dengan memerhatikan visi, misi dan arah kebijakan pembangunan jangka menengah Kabupaten Seram Bagian Timur, serta menyelaraskan, mensinergikan dan mengharmonisasikannya dengan sasaran dan arah kebijakan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat sebagaimana telah ditetapkan dengan Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019, sebagai penjabaran dari NAWA CITA.



PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR

5.1. Visi.

Memasuki periode pembangunan jangka menengah kepala daerah yang baru, Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur dalam merumuskan perencanaan pembangunan daerah memiliki visi pembangunan yang merepresentasikan keinginan kepala daerah terpilih selama masa kepemimpinannya. Visi pembangunan merupakan hal penting dan utama untuk menyatukan cita dan cipta bersama seluruh komponen dalam pencapaian pembangunan daerah sesuai dengan perkembangan permasalahan pembangunan dan isu strategis yang dihadapi oleh Kabupaten Seram Bagian Timur. Selain itu, visi juga dibangun sebagai usaha bersama seluruh pemangku kepentingan untuk menyamakan dan menyelaraskan pandangan tentang apa yang ingin dicapai dalam satu periode pembangunan jangka menengah dalam tahun 2016 sampai dengan tahun 2021.

Sesuai dengan analisis isu strategis pembangunan Kabupaten Seram Bagian Timur, rencana pembangunan daerah memiliki fokus pada peningkatan dan pemerataan kesejahteraan wilayah secara berkesinambungan dan konsisten. Hal ini dikarenakan cukup banyaknya wilayah perdesaan, terutama dipulau-pulau terpencil, tertinggal dan terpencil, maupun pelosok-pelosok pedesaan lainnya di Kabupaten Seram Bagian Timur yang masih cukup sulit dijangkau untuk menikmati hasil pembangunan daerah, baik dari segi sosial maupun ekonomi. Oleh karena itu, perhatian penuh pemerintah daerah bagi peningkatan kualitas aksesibilitas wilayah menjadi salah satu pondasi utama dalam perumusan perencanaan pembangunan Kabupaten Seram Bagian Timur dalam 5 (lima) tahun kedepan.

Demikian pula, keseimbangan pembangunan daerah baik dari segi sosial budaya, perekonomian, hingga lingkungan hidup juga menjadi bagian tak terpisahkan dalam rangkaian pembangunan Kabupaten Seram Bagian Timur. Untuk mewujudkan keseimbangan tersebut, pembangunan Kabupaten Seram Bagian Timur diarahkan pada model pembangunan horizontal dimana pelaksanaan pembangunan di setiap bidang pembangunan akan memiliki porsi yang proporsional dengan tetap mempertahankan kualitas lingkungan hidup dan mempertimbangkan masih adanya kesenjangan antara pembangunan di wilayah daratan dengan berbagai kebutuhan infrastruktur



PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR

pembangunan di wilayah kepulauan. Melalui pendekatan pembangunan yang demikian, diharapkan akan tercipta suatu keseimbangan antara pilar ekonomi, lingkungan, sosial dan keseimbangan antar dan antara wilayah, serta mendorong terwujudnya kondisi masyarakat yang lebih baik dan berkeadilan social.

Mempertimbangkan hal-hal sebagaimana telah diuraikan diatas dan mewujudkan janji-janji politik Bupati dan Wakil Bupati terpilih ketika masa kampanye terdahulu, serta selaras dengan hasil analisis permasalahan dan isu strategis pembangunan Kabupaten Seram Bagian Timur, maka untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Seram Bagian Timur dalam 5 (lima) tahun kedepan, maka Visi yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Seram Bagian Timur dalam kurun waktu tahun 2016 sampai dengan tahun 2021 adalah :

“TERWUJUDNYA KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR YANG SEJAHTERA, MANDIRI DAN BERDAYA SAING BERBASIS SUMBERDAYA LOKAL”

Visi tersebut diatas, memiliki makna yang sangat dalam dan mendasar serta strategis, sebagai landasan bagi seluruh masyarakat dalam melaksanakan pembangunan di Kabupaten Seram Bagian Timur pada satu sisi. Disisi lain merupakan target capaian yang menjadi keinginan dan cita-cita serta impian yang akan diwujudkan oleh Bupati dan Wakil Bupati Seram Bagian Timur dalam 5 (lima) tahun kedepan. Oleh karena itu, rumusan visi tersebut diatas secara tersirat memiliki kandungan makna sebagai berikut :

- 1. Terwujudnya**, memiliki makna, bahwa segala sesuatu yang telah dirumuskan dan ditetapkan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran yang telah dalam dokumen rencana pembangunan Kabupaten Seram Bagian Timur dalam Tahun 2016-2021, harus dapat direalisasikan secara maksimal dengan menggunakan berbagai potensi sumber daya secara efektif dan efisien. Oleh karena itu, untuk dapat merealisasikannya perlu dilakukan melalui bekerja keras, kerja cerdas dan kerja bersinergitas baik oleh seluruh aparatur pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur mulai dari tingkat kabupaten, kecamatan sampai tingkat desa, bahkan sampai pada struktur pemerintahan yang terendah yaitu Rukun Tetangga (RT) dan Rukun



PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR

Warga (RW), maupun partisipasi dan dukungan/dorongan dari seluruh pemangku kepentingan. Dengan menetapkan kata “bekerja” sebagai titik fokus target capaian kinerja pemerintahan 5 (lima) tahun mendatang serta didukung oleh berbagai elemen masyarakat yang bahu membahu, diharapkan tujuan dan sasaran akhir kinerja dibawah kendali kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Seram Bagian Timur akan tercapai secara optimal.

2. **Sejahtera**, memiliki makna, bahwa seluruh kehidupan masyarakat yang berdimensikan nilai sosial, budaya, ekonomi, politik dengan didukung oleh tata kelola pemerintahan daerah, sepenuhnya diarahkan untuk semata-mata pada terwujudnya masyarakat Kabupaten Seram Bagian Timur yang sejahtera, sehingga diharapkan akan memiliki kemampuan individu yang terampil dalam rangka mendorong terwujudnya daya saing pemerintahan daerah. dan kemandirian secara sosial ekonomi. Kesejahteraan dimaksud sudah barang tentu memiliki dimensi yang luas dan kompleks dengan indikatornya dapat berupa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dengan variable ukurnya adalah pendapatan masyarakat, pendidikan dan pelayanan kesehatan. Dengan pemahaman makna tersebut, maka inti dari kesejahteraan adalah kondisi masyarakat yang relatif terpenuhi kebutuhan hidupnya baik spiritual maupun material secara layak dan berkeadilan sesuai dengan perannya dalam kehidupan. Kebutuhan dimaksud tidak semata-mata diukur dengan kebutuhan kebendaan/material semata, tetapi juga kebutuhan yang bersifat non kebendaan, seperti rasa tenang, aman dan tentram walaupun secara material tidak memiliki harta benda yang berlimpah ruah.
3. **Kata Mandiri**, dalam kosa kata bahasa indonesia dapat mengandung beberapa makna. **Pertama**, kata mandiri dapat dimaknai sebagai sikap yang memungkinkan seseorang untuk bertindak bebas, melakukan sesuatu atas dorongan sendiri dan untuk kebutuhannya sendiri tanpa bantuan dari orang lain, maupun berpikir dan bertindak original/kreatif, dan penuh inisiatif, mampu mempengaruhi lingkungan, mempunyai rasa percaya diri dan memperoleh kepuasan dari usahanya. **Kedua**, kata mandiri dapat diartikan kemampuan untuk bertindak sesuai keadaan tanpa meminta atau tergantung pada orang lain. Dengan demikian kata Mandiri dapat



PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR

artikan, bahwa seseorang mau dan mampu mewujudkan kehendak/keinginan dirinya yang terlihat dalam tindakan/perbuatan nyata guna menghasilkan sesuatu (barang/jasa) demi pemenuhan kebutuhan hidupnya dan sesamanya.

Ketiga, kata mandiri dapat juga diterjemahkan sebagai kondisi psikologis dan mentalis seseorang yang dalam kehidupannya mampu memutuskan dan mengerjakan sesuatu tanpa bantuan dari orang lain. Kemampuan demikian hanya mungkin dimiliki jika seseorang berkemampuan memikirkan dengan seksama tentang sesuatu yang dikerjakannya atau diputuskannya, baik dalam segi-segi manfaat atau keuntungannya, maupun segi-segi negatif dan kerugian yang akan dialaminya. Setiap kegiatan yang dilakukan oleh seseorang agar berhasil sesuai keinginan dirinya maka diperlukan adanya kemandirian yang kuat. Sedangkan makna Keempat, kata mandiri dapat diartikan sebagai suatu perasaan otonomi, sehingga pengertian perilaku mandiri adalah suatu kepercayaan diri sendiri, dan perasaan otonomi diartikan sebagai perilaku yang terdapat dalam diri seseorang yang timbul karena kekuatan dorongan dari dalam tidak karena terpengaruh oleh orang lain.

Dari perspektif kosa kata diatas, maka kata Mandiri mengandung makna, bahwa pembangunan yang dilaksanakan dalam 5 (lima) tahun kedepan adalah dalam upaya mewujudkan masyarakat sejahtera jasmani dan rohani akan dilaksanakan secara mandiri, baik dalam penggunaan sumber daya manusia dan penggunaan sumber daya alam. Dengan prinsip kemandirian tersebut diharapkan akan memperkuat bangunan fondasi perekonomian masyarakat. Dengan kuatnya fondasi perekonomian masyarakat akan berkontribusi secara signifikan terhadap kemandirian pemerintah daerah dalam merumuskan berbagai kebijakan pembangunan, kemandirian pemerintah daerah dalam menentukan sasaran dan target program prioritas, kemandirian pemerintah daerah dalam pengalokasian pagu anggaran untuk memenuhi kebutuhan belanja pembangunan dan yang terpenting adalah kemandirian pemerintah daerah dalam pengembangan inovasi daerah untuk meningkatkan daya saing daerah.



PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR

- 4. Berdaya Saing**, memiliki makna, bahwa pembangunan yang dilaksanakan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan selain bertujuan untuk mempercepat ketertinggal Kabupaten Seram Bagian Timur dibandingkan kabupaten/kota lainnya se Provinsi Maluku dalam pembangunan daerah, juga dalam upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama masyarakat di pedesaan dan nelayan. Dengan pembangunan berbagai sarana dan prasarana infrastruktur yang menunjang percepatan pembangunan daerah, diharapkan akan mendorong percepatan peningkatan daya saing daerah. Meningkatnya daya saing daerah ditandai antara lain oleh meningkatnya pertumbuhan perekonomian makro daerah, meningkatnya arus investasi ke daerah dan terbukanya lapangan kerja baru, serta meningkatnya kualitas pelayanan publik.
- 5. Berbasis Sumberdaya Lokal**, memiliki maknanya, bahwa untuk mendukung pelaksanaan pembangunan daerah diberbagai bidang disamping memerlukan dukungan sumber daya manusia, juga memerlukan dukungan sumber daya alam dalam jumlah yang relatif besar. Kebutuhan akan sumber daya alam yang diperlukan untuk menunjang kelancaran pembangunan harus bersumber dari sumber daya alam setempat (lokal). Hal ini penting, agar pelaksanaan pembangunan mempunyai efek ganda antara lain yaitu (i) meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal; dan (ii) terkendalinya eksploitasi sumber daya alam lokal.

Selanjutnya untuk mencapai target Visi Terwujudnya Sbt Yang Sejahtera, Mandiri Dan Berdaya Saing Berbasis Sumberdaya Lokal dalam 5 (lima) tahun kedepan, maka diperlukan dukungan berbagai instrumen lainnya sebagai modal pembangunan. Dukungan modal pembangunan dimaksud merupakan dimensi yang saling terkait antara satu dengan lainnya sebagai satu kesatuan yang utuh. Dimensi dimaksud meliputi :

1. Modal pembangunan Sumber Daya Manusia. Pembangunan daerah yang dilaksanakan sepanjang tahun 2016-2021 melibatkan partisipasi seluruh masyarakat di Kabupaten Seram Bagian Timur. Targetnya adalah mewujudkan kehidupan masyarakat yang berkualitas dan sejahtera (bebas dari kemiskinan);
2. Modal Alam dan Fisik. Pembangunan daerah yang dilaksanakan sepanjang tahun 2016-2021 di Kabupaten Seram Bagian Timur, akan memanfaatkan Sumber Daya



PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR

- Alam lokal secara optimal sesuai daya dukungnya dan melalui pendekatan prinsip pembangunan berkelanjutan; dan
3. Modal Sosial. Pembangunan daerah yang dilaksanakan sepanjang kurun waktu tahun 2016-2021 di Kabupaten Seram Bagian Timur berlandaskan pada nilai-nilai kearifan lokal dan kelembagaan lokal.

Berlandaskan pada 3 (tiga) modal pembangunan sebagaimana telah diuraikan diatas, diharapkan target utama pembangunan di Kabupaten Seram Bagian Timur yaitu meningkatkan daya saing daerah dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat akan dapat dicapai secara optimal. Jalan sutera yang harus ditempuh oleh Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur, dapat dilakukan melalui, antara lain :

- a. Masuk dalam 5 (lima) besar kekuatan ekonomi regional di Provinsi Maluku;
- b. Terwujudnya kualitas hidup modern yang merata, antara lain masuk dalam 5 (lima) besar Indeks Pembangunan Manusia (IPM) regional;
- c. Penurunan angka kemiskinan dan pengangguran.

Secara sistematis makna dan nilai strategis dari rangkain setiap kata dalam Visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih dalam mewujudkan berkeadilan berbasis desa di Kabupaten Seram Bagian Timur, dapat dilihat sebagaimana gambar 5.1 dibawah ini.



PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR

Gambar 5.1
Gambar Hubungan Antar Elemen Visi Pembangunan
Kabupaten Seram Bagian Timur



5.2. Misi

Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan dalam mewujudkan sebuah Visi dengan cara-cara yang efektif dan efisien. Misi juga dapat dipandang sebagai pilihan jalan (*the choosen track*) bagi pemerintah daerah dalam menyediakan dan menyelenggarakan layanan bagi masyarakat dan aktivitas pembangunan pada umumnya bagi *stakeholders* pembangunan secara keseluruhan.

Suatu rumusan Misi pembangunan daerah menjadi alasan utama suatu organisasi (pemerintah daerah) harus berdiri dengan membawa komitmen dan konsistensi kinerja yang terus dijaga oleh segenap *stakeholders* pembangunan. Berdasarkan identifikasi visi pembangunan serta penjabaran secara umum, maka ditetapkan misi pembangunan daerah jangka menengah Kabupaten Seram Bagian Timur sebagai berikut:

1. Mengembangkan Aktivitas Ekonomi Lokal Berbasis Komoditi Unggulan dan Kelembagaan Lokal di Daerah Perdesaan;



PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR

2. Menjalankan Reformasi Birokrasi Dalam Tata Kelola Birokrasi, Serta Reformasi Agraria Dalam Tata Ruang Wilayah;
3. Mengembangkan Jejaring Kerjasama Multi Level Stakeholder Untuk Pengembangan Perekonomian Daerah yang Kuat dan Kompetitif;
4. Mendorong Penguatan Demokrasi dan Partisipasi Publik Dalam Sistem Tata Kelola Pemerintahan yang Terbuka, Akuntabel dan Bertanggungjawab;
5. Mendorong Pengembangan Sektor Unggulan Kelautan dan Perikanan;
6. Mengembangkan Aksesibilitas Infrastruktur Serta Akses Luas Terhadap Iptek, Permodalan, Keuangan dan Pasar; dan
7. Memperkuat Kapasitas SDM dan Kelembagaan Lokal Dalam Integrasi Pasar Bebas dan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA).

Penjelasan masing-masing dari misi di atas dijabarkan sebagai berikut:

1. Mengembangkan aktivitas ekonomi lokal berbasis komoditi unggulan dan kelembagaan lokal di daerah perdesaan.

Perekonomian daerah dibangun atas dasar peningkatan kualitas produk unggulan daerah dan semakin berfungsinya kelembagaan lokal di pedesaan. Penguatan kedua elemen dimaksud, diharapkan dapat menciptakan kesejahteraan masyarakat secara merata, konsisten, dan berkualitas. Pembangunan melalui pengembangan perekonomian menjadi penunjang utama pelaksanaan pembangunan daerah. Kualitas perekonomian daerah akan menjadi sorotan berbagai pelaksana pembangunan dalam meningkatkan daya saing ekonomi Kabupaten Seram Bagian Timur. Pembangunan dan peningkatan perekonomian daerah Kabupaten Seram Bagian Timurdititikberatkan pada daya saing dalam pengembangan ekonomi yang berbasis pada keunggulan komoditi lokal di perdesaan.

Dalam rangka menumbuh kembangkan ekonomi kerakyatan, maka perekonomian makro maupun mikro terus dilaksanakan pemerintah daerah. Hal ini perlu didukung dengan adanya penciptaan iklim usaha baik dan kompetitif serta pendampingan usaha bagi masyarakat agar peningkatan dan stabilitas perekonomian dapat terealisasi. Peningkatan sektor pariwisata juga bisa menjadi alternatif strategis dalam pengembangan UMKM utamanya masyarakat di area obyek wisata. Selain itu,



PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR

wisatawan yang masuk akan menjadi salah satu investasi dalam peningkatan nilai tambah sektor tersebut.

Pada perekonomian makro, perluasan pembangunan ekonomi diselenggarakan berdasarkan pendekatan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi, baik yang telah ada maupun yang baru. Pendekatan ini merupakan integrasi dari pendekatan sektoral dan regional sehingga setiap wilayah dapat mengembangkan produk yang menjadi keunggulan daerahnya. Sedangkan dalam pengembangan perekonomian mikro, masyarakat dituntut untuk menggerakkan diri dengan berfokus pada pergerakan perekonomian kerakyatan yang memiliki stabilitas lebih tinggi serta memiliki dampak signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata.

Masih tingginya kesenjangan pendapatan masyarakat mengindikasikan rendahnya pemerataan kesejahteraan penduduk di Kabupaten Seram Bagian Timur. Oleh karena itu, perlu adanya perhatian khusus pemerintah dalam menggerakkan perekonomian masyarakat secara merata, optimal dan konsisten dengan tetap berpegang pada keberlanjutan lingkungan hidup.

2. Menjalankan reformasi birokrasi dalam tata kelola birokrasi, serta reformasi agraria dalam tata ruang wilayah.

Pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang jujur, bersih, dan pro rakyat sebagai pengejawantahan dari prinsip-prinsip dasar *good governance*. *Good Governance*. Dalam mewujudkan *Good Governance* diperlukan semangat dan tekad yang kuat dari para aparatur negara. Fasilitas yang sudah disediakan dalam mencapai hal tersebut adalah dengan melaksanakan Reformasi Birokrasi secara utuh dan konsisten sebagai bagian dari perbaikan tata kelola pemerintahan. Setidaknya ada sembilan parameter keberhasilan reformasi birokrasi, yaitu :

- a. Tidak ada korupsi;
- b. Tidak ada pelanggaran hukum;
- c. APBD baik;
- d. Semua program pemerintah daerah berjalan dengan baik;
- e. Perijinan cepat dan mudah serta tidak ada overlap;



PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR

- f. Komunikasi dengan publik berjalan baik;
- g. Penggunaan waktu efektif dan produktif;
- h. Adanya *reward* dan *punishment* terhadap kinerja aparat pemerintah; dan
- i. Hasil pembangunan dapat dirasakan seluruh lapisan masyarakat.

Birokrasi pemerintahan daerah tidak saja menitikberatkan kepada kualitas atau kinerja aparatur, namun juga kepada kelembagaan dan ketatalaksanaan. Pada era reformasi birokrasi saat ini, perwujudan pemerintah yang baik merupakan salah satu fokus dari reformasi birokrasi. Pemerintah daerah yang ditopang oleh aparatur dengan kinerja baik, bertanggung jawab, serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, diharapkan mampu menciptakan pemerintahan yang bersih, transparan, profesional, dan efektif dalam menjalankan tugasnya. Kondisi ini diharapkan mampu menjamin kinerja pemerintah dalam menciptakan pelayanan publik yang prima serta menciptakan kepastian hukum dan akuntabilitas publik.

Reformasi birokrasi meliputi beberapa aspek tentang pelayanan masyarakat, peningkatan kinerja, dan penegakan hukum. Dalam melakukan reformasi birokrasi, pemerintah melakukan pembenahan sistem birokrasi, mulai dari penataan kewenangan, prosedur operasi standar, kerjasama, sinergi, dan integrasi organisasi, serta penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas di samping itu, Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur juga melakukan pembenahan manajemen kepegawaian, serta upaya-upaya terobosan guna meningkatkan kapasitas, mutu, dan kinerja aparatur pemerintah daerah. Upaya ini dilakukan untuk mengawal pencapaian tata kelola pemerintahan yang lebih baik serta peningkatan kualitas pelayanan publik sebagai "corong" pelayanan kepada masyarakat.

3. Mengembangkan Jejaring Kerjasama Multi Level Stakeholder Untuk Pengembangan Perekonomian Daerah Yang Kuat Dan Kompetitif.

Keunggulan suatu bangsa atau daerah sangat erat kaitannya dengan keunggulan dalam membangun jejaring dan kemitraan dengan berbagai pihak, utamanya dengan masyarakat dari berbagai tingkatan di daerah yang berangkutan (stakeholders). Namun demikian, pada akhirnya semua keberhasilan tersebut sangat ditentukan oleh



PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR

faktor sumber daya manusia (birokrasi) sebagai operator yang mengimplementasikan berbagai kerjasama kemitraan dengan para pemangku kepentingan tersebut. Melihat pengalaman di negara-negara yang telah maju termasuk di kawasan Asia memperlihatkan, bahwa kualitas SDM yang dimiliki memungkinkan suatu bangsa atau daerah tersebut untuk mampu secara efisien menerapkan dan mengendalikan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan produktivitas tinggi.

Perkembangan teknologi saat ini menuntut adanya integrasi dalam pengembangan jejaring kemitraan antar level stakeholder yang saling melengkapi dan saling mengisi. Oleh karena itu, faktor penting yang harus sejak dini dipersiapkan adalah kesiapan masyarakat untuk menerima dan mengadaptasi integrasi kemitraan dimaksud. Dengan demikian, masyarakat Kabupaten Seram Bagian Timur harus mampu memanfaatkan kemajuan-kemajuan dari hasil implikasi langsung perkembangan teknologi. Untuk itu, upaya mewujudkan kualitas sumber daya manusia Kabupaten Seram Bagian Timur yang mandiri dan berdaya saing tinggi dalam rangka mewujudkan pengembangan perekonomian daerah yang kuat dan kompetitif.

Kebijakan untuk mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang mandiri dan berdaya saing tinggi berupa pengembangan pendidikan secara merata di Kabupaten Seram Bagian Timur baik pendidikan formal di sekolah maupun pendidikan informal diluar sekolah. Namun, sumber daya manusia yang mandiri dan berdaya saing tinggi saja tidak cukup dalam pembangunan daerah, karena diperlukan juga sumber daya manusia berakhlak mulia yang dapat membentuk identitas dan karakter manusia berkualitas. Oleh karena itu, pendidikan agama penting untuk dipahami dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari agar terbentuk karakter masyarakat Kabupaten Seram Bagian Timur yang selaras dengan perwujudan pembangunan daerah.

Dengan demikian rencana pembangunan sumber daya manusia Kabupaten Seram Bagian Timur bersifat komprehensif yang telah mempertimbangkan baik aspek jasmani (sandang, pangan dan perumahan) maupun aspek rohani (pendidikan mental dan spiritual) sesuai dengan potensi sumberdaya yang dimiliki, lingkungan sosial maupun kultural daerah.



4. Mendorong penguatan demokrasi dan partisipasi publik dalam sistem tata kelola pemerintahan yang terbuka, akuntabel dan bertanggungjawab.

Fungsi pemerintahan sebagai agen pembangunan merupakan salah satu fungsi yang strategis dalam mewujudkan pemerataan kesejahteraan. Dengan fungsi dimaksud, maka kewenangan pemerintahan dalam melaksanakan pembangunan tidak semata-mata menjadi hak prerogatif pemerintah semata, tetapi ada stakeholders lain yang juga mempunyai peran yang kurang lebih sama dengan peran strategis yang dimiliki oleh pemerintah, yaitu partisipasi masyarakat (publik) dalam proses perencanaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.

Melalui mekanisme pelibatan partisipasi publik inilah, maka sesungguhnya pemerintah daerah telah mendorong terwujudnya penguatan demokrasi dalam sistem tata kelola pemerintahan transparan dan akuntabel. Untuk terciptanya masyarakat demokratis sebagaimana dimaksud, maka ada beberapa langkah yang dilakukan oleh pemerintahan daerah, yaitu (i) Membangun masyarakat yang demokratis berlandaskan hukum melalui proses karakterisasi dan institusionalisasi dalam segala lingkup baik secara kelembagaan maupun secara individu sebagai warga masyarakat; (ii) Mengusahakan agar semua atau setiap anggota masyarakat memiliki kedudukan yang sama dalam bidang politik dan hukum; (iii) Memantapkan fungsi desentralisasi dan otonomi daerah; (iv) Meningkatkan kebebasan pers yang bertanggungjawab; dan (v) Meningkatkan kualitas aparatur melalui peningkatan kompetensi, kinerja, etos kerja, reformasi struktur birokrasi yang efektif dan efisien untuk layanan prima kepada masyarakat.

5. Mendorong pengembangan sektor unggulan kelautan dan perikanan.

Kabupaten Seram Bagian Timur yang sebagian besar wilayahnya merupakan perairan dan kepulauan disamping memiliki kekayaan sumber daya alam didaratan yang beraneka ragam, seperti jagung, pala, coklat, cengkeh dan kacang tanah juga dikarunai berbagai kekayaan sumber daya kelautan dan perikanan yang melimpah ruah. Kekayaan laut dan perikanan yang beraneka ragam dalam jumlah yang besar, diharapkan dapat dikelola secara berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, hingga saat ini kekayaan laut dimaksud belum memberi manfaat



PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR

yang optimal kepada masyarakat. Penyebabnya adalah kekayaan dimaksud belum dapat dikelola secara profesional. Nelayan, yang sehari-hari menggantungkan hidup pada kekayaan laut, belum dapat mengelola kekayaan laut secara maksimal.

Beberapa kendala ketidak maksimalan dalam mengelola hasil laut, disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya (i) Sebagian besar masyarakat di Kabupaten Seram Bagian Timur masih menempatkan kekayaan sumber daya daratan sebagai lahan untuk mengais rejeki yang paling mudah dan menjanjikan; (ii) Masih terbatasnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana untuk mendukung pengelolaan sumber daya laut; dan (iii) Masih adanya pandangan dikalangan masyarakat, termasuk nelayan bahwa kekayaan sumber daya laut sebagai produk unggulan yang dalam pengelolaannya memerlukan tehnologi yang mahal.

Atas dasar kondisi sebagaimana telah diuraikan diatas, maka dalam 5 (lima) tahun kedepan Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur akan didorong untuk dikembangkannya produk-produk hasil kelautan menjadi sektor unggulan yang memiliki nilai tambah ekonomi yang tinggi. Untuk mewujudkan target dimaksud, maka langkah yang akan diambil oleh pemerintah daerah, antara lain (i) meningkatkan kuantitas dan kualitas dukungan sarana dan prasarana; (ii) meningkatkan kapasitas dan keterampilan para nelayan; (iii) menerbitkan berbagai regulasi terkait untuk mendukung pengelolaan sumber daya perikanan; dan (iv) membuka berbagai akses kemudahan kepada para nelayan dalam mengelola sumber daya perikanan.

6. Mengembangkan aksesibilitas infrastruktur serta akses luas terhadap iptek, permodalan, keuangan dan pasar.

Pembangunan daerah yang dilakukan secara masif berbagai sektor untuk masa 5 (lima) tahun kedepan diharapkan akan berdampak positif terhadap berbagai target, diantaranya meningkatkan daya saing pemerintah daerah. Strategi ini sangat penting dalam upaya untuk mendorong percepatan pembangunan di Kabupaten Seram Bagian Timur. Selain dari pada itu, meningkatnya daya saing pemerintah daerah akan membawa dampak positif terhadap arus investasi, terbukanya lapangan kerja baru bagi masyarakat, meningkatnya pendapat asli daerah dan hidupnya aktivitas perekonomian makro daerah dan pekonomian rakyat.



PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR

Terkait dengan maksud tersebut, maka dalam 5 (lima) tahun kedepan pemerintah daerah akan berupaya untuk membangun dan mengembangkan kuantitas dan kualitas berbagai aksesibilitas infrastruktur, serta membangun dan mengembangkan berbagai jaringan dalam rangka penerapan teknologi informasi. Juga akan dilakukan berbagai kemudahan akses terhadap permodalan bagi seluruh masyarakat, terutama untuk koperasi, usaha kecil dan menengah. Hal lain yang juga akan didorong akses terhadap sektor keuangan dan membuka pasar untuk komoditi unggulan daerah.

Penyediaan infrastruktur yang handal dalam perencanaan wilayah dan kotadilakukan dengan menerapkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan seperti pemerataan pembangunan, penghematan energi, pelestarian ekologi atau lingkungan, pembangunan ekonomi yang menitikberatkan pada peningkatan performa, dan menyerap peran serta masyarakat dalam proses pembangunan secara maksimal. Secara harfiah, pembangunan infrastruktur merupakan suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang dilakukan secara terencana untuk membangun prasarana atau segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses pembangunan. Infrastruktur memegang peranan penting sebagai salah satu roda penggerak pertumbuhan ekonomi dan pembangunan.

Membangun infrastruktur bertujuan mengembangkan kualitas, infrastruktur yang handal, berkelanjutan dan tangguh, termasuk infrastruktur regional dan lintas batas, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses terjangkau dan merata bagi semua. Keberadaan infrastruktur yang memadai sangat diperlukan karena merupakan bagian yang sangat penting dalam sistem pelayanan masyarakat. Berbagai fasilitas fisik merupakan hal yang vital guna mendukung berbagai kegiatan pemerintahan, perekonomian, industri dan kegiatan sosial di masyarakat dan pemerintahan.

7. Memperkuat Kapasitas SDM dan Kelembagaan Lokal Dalam Integrasi Pasar Bebas dan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA).

Integrasikan ekonomi antara negara Asean yang secara efektif akan dimulai pada tahun 2015, harus disikapi dengan berbagai pengembangan strategi. Integrasi



PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR

ekonomi diantara negara Asean selain menjadi tantangan, juga membuka peluang pasar baru atas produk-produk unggulan daerah yang selama ini kurang terpromosi secara baik. Oleh karena itu, untuk dapat merebut pangsa pasar yang terbuka luas tersebut maka kualitas produk-produk unggulan daerah yang akan diandalkan menjadi sumber bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan juga sumber bagi peningkatan pendapatan asli daerah harus ditingkatkan kinerjanya.

Untuk mewujudkan target sebagaimana telah diuraikan diatas, maka langkah kebijakan yang ditempuh oleh pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan 5 (lima) tahun kedepan, adalah (i) meningkatkan dan memperkuat kapasitas dan keterampilan sumber daya manusia; (ii) memperkuat dan mengembangkan kelembagaan lokal, terutama kelembagaan pada masyarakat diperdesaan dan kelembagaan koperasi, usaha kecil dan menengah sehingga dapat dapat memenangkan dalam pasar persaingan, baik pada tingkat regional, nasional maupun persaingan global pada tingkat asia tenggara.

5.3. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah

Penetapan tujuan dan sasaran merupakan tahap terpenting dalam perencanaan pembangunan dan akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah. Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan suatu tingkatan prioritas tertinggi dalam rumusan kebijakan pada perencanaan pembangunan jangka menengah daerah.

Tujuan pembangunan adalah penjabaran atau implementasi dari pernyataan visi dan misi yang menunjukkan hasil akhir jangka waktu tertentu. Hal ini mengindikasikan, bahwa tujuan adalah suatu pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab seluruh isu strategis dan permasalahan pembangunan daerah. Pernyataan tujuan harus menunjukkan suatu kondisi optimal yang ingin dicapai dimasa datang dan juga diselaraskan dengan amanat pembangunan nasional.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan yaitu hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Kabupaten Seram Bagian Timurdari masing-masing tujuan dalam rumusan yang lebih spesifik dan terukur dalam suatu indikator beserta targetnya. Oleh karena itu, sasaran



PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR

dinyatakan sesuai indikator secara spesifik, fokus, terukur, dan dapat dicapai dengan indikator kinerja atau tolok ukur keberhasilan pencapaian sasaran yang akan diwujudkan selama 5 (lima) tahun pelaksanaan pembangunan jangka menengah.

Selanjutnya, sasaran dipisahkan menjadi sasaran makro dan sasaran spesifik pembangunan daerah sebagai arsitektur kinerja *'impact'* yang saling terhubung dimana sasaran makro merupakan *lagging indicator* yang dipicu oleh sasaran spesifik sebagai *leading indicator*. Dengan demikian, sasaran makro pembangunan merupakan representasi langsung keberhasilan pencapaian tujuan pembangunan daerah yang sekaligus menjadi indikator utama pencapaian pembangunan jangka menengah Kabupaten Seram Bagian Timur.

Berdasarkan visi dan misi sebagaimana telah dijelaskan di atas, maka arahan tujuan pembangunan Kabupaten Seram Bagian Timur terkait dengan pernyataan misi untuk kurun waktu pembangunan daerah periode tahun 2016-2021 dapat diuraikan sebagai berikut.

1. Misi 1 :Mengembangkan aktivitas ekonomi lokal berbasis komoditi Unggulan dan kelembagaan lokal di daerah pedesaan.

Untuk mencapai target Misi 1, maka uraian rumusan tujuan dirumuskan sebagai berikut :

- a. Memetakan dan mengembangkan potensi unggulan di daerah pedesaan;
- b. Mengembangkan ekonomi di pedesaan berbasis kawasan dan komoditi unggulan;
- c. Mengembangkan kapasitas kelembagaan lokal dalam mendukung ekonomi kawasan;
- d. Penataan tata ruang desa dalam mendukung aktivitas ekonomi di pedesaan;
- e. Membangun sistem perdagangan dalam pembentukan BUMDesa dan BUMDesa antar desa dalam suatu kawasan ekonomi;
- f. Mengembangkan daya saing produk pasca panen di kawasan ekonomi; dan
- g. Mendorong kerjasama antar pihak dalam percepatan pengembangan ekonomi pedesaan.



PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR

Berdasarkan uraian rumusan tujuan pembangunan jangka menengah Kabupaten Seram Bagian Timur sebagaimana pada misi 1 diatas, makarumusan sasaran ditetapkan masing-masing sebagai berikut:

- 1) Terpetakannya dan berkembangnya produk-produk unggulan daerah;
- 2) Berkembangnya perekonomian masyarakat berbasis kawasan dan komoditi unggulan;
- 3) Berkembangnya dan meningkatnya kapasitas kelembagaan lokal dan mendukung ekonomi kawasan;
- 4) Tertatanya tata ruang pedesaan dalam mendukung aktivitas ekonomi pedesaan;
- 5) Terbangunnya sistem perdagangan yang terintegrasi dengan BUMDes dalam upaya menciptakan kelembagaan perdagangan di pedesaan yang kuat;
- 6) Meningkatnya daya saing produk unggulan daerah, seperti pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan dan pariwisata; dan
- 7) Terciptanya kerjasama dengan multi pihak dalam pengelolaan koperasi, usaha kecil dan menengah untuk percepatan pengembangan ekonomi masyarakat di pedesaan.

2. Misi 2 :Menjalankan reformasi birokrasi dalam tata kelola birokrasi, serta Reformasi agraria dalam tata ruang wilayah.

Untuk mencapai target Misi 2, maka uraian rumusan tujuan dirumuskan sebagai berikut :

- a. Mendesain, reaktualisasi dan implementasi nilai dan prinsip-prinsip pengelolaan pemerintahan daerah yang bersih, transparan, bertanggung jawab dan bebas KKN;
- b. Meningkatkan kualitas dan performa pelayanan publik aparatur pemerintahan daerah berbasis kinerja;
- c. Mendorong peningkatan belanja publik yang proporsional;
- d. Meningkatkan koordinasi dan sinergitas antar Perangkat Daerah (PD) dalam mengembangkan tata kelola pemerintahan;
- e. Meningkatkan legislasi pertanahan bagi pembangunan milik masyarakat;
- f. Mendorong sertifikasi lahan bagi lahan pertanian/perkebunan milik masyarakat;



PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR

g. Melindungi lahan untuk tujuan pertanian yang berkelanjutan.

Berdasarkan uraian rumusan tujuan pembangunan jangka menengah Kabupaten Seram Bagian Timur sebagaimana pada Misi 2 diatas, makarumusan sasaran ditetapkan masing-masing sebagai berikut:

- 1) Tersusunya dan terlaksananya nilai dan prinsip penyelenggaraan yang bersih dan baik;
- 2) Meningkatnya pelayanan publik dalam rangka meningkatkan performa kinerja pemerintahan daerah;
- 3) Meningkatnya belanja untuk publik secara proporsional sesuai dengan kapasitas riil keuangan daerah;
- 4) Terbangunnya sistem koordinasi dan sinergi antar Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih;
- 5) Terbinya peraturan daerah tentang pertanahan bagi pembangunan milik rakyat;
- 6) Tersertifikasinya lahan untuk pertanian dan perkebunan milik masyarakat; dan
- 7) Terbangunnya sistem pengelolaan pertanian yang terintegrasi dengan pengelolaan lingkungan hidup berkelanjutan.

3. Misi 3 :Mengembangkan investasi dan jejaring kerjasama multi level Stakeholder untuk pengembangan perekonomian daerah yang kuat-dan kompetitif.

Untuk mencapai target Misi 3, maka uraian rumusan tujuan dirumuskan sebagai berikut :

- a. Mendorong iklim investasi yang kondusif bagi dunia usaha;
- b. Desain tata kelola perizinan dan pengembangan dunia usaha yang cepat dan transparan;
- c. Mengembangkan forum mitra usaha antar stakeholder di daerah, kawasan dan nasional;
- d. Akselerasi dan penyesuaian regulasi dan kebijakan daerah yang mendukung investasi dunia usaha;
- e. Mendorong tumbuhnya wirausaha muda daerah yang kuat dan mandiri;



PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR

- f. Memfasilitasi pengembangan korporasi petani-nelayan di daerah pedesaan yang terhubung dengan dunia usaha; dan
- g. Mengembangkan usaha sektor riil dan ekonomi kreatif.

Berdasarkan uraian rumusan tujuan pembangunan jangka menengah Kabupaten Seram Bagian Timur sebagaimana pada Misi 3 diatas, maka rumusan sasaran ditetapkan masing-masing sebagai berikut:

- 1) Meningkatnya jumlah investor ke Kabupaten Seram Bagian Timur;
- 2) Tersusunnya pedoman perijinan didunia usaha mudah, murah, cepat dan transparan;
- 3) Terbangunnya kerjasama kemitraan antar pemangku kepentingan di daerah, Kawasan dan Nasional;
- 4) Tersusunnya regulasi kebijakan daerah yang mendukung investasi di daerah;
- 5) Tumbuhnya wirausaha muda di daerah yang kuat dan mandiri;
- 6) Terbangunnya korporasi petani-nelayan di daerah pedesaan yang terkoneksi dengan dunia usaha; dan
- 7) Berkembangnya dunia usaha dan ekonomi kreatif.

4. Misi 4 :Mendorong penguatan demokrasi dan partisipasi publik dalam Sistem tata kelola pemerintahan yang terbuka, akuntabel dan Bertanggung jawab.

Untuk mencapai target Misi 4, maka uraian rumusan tujuan dirumuskan sebagai berikut :

- a. Membuka akses yang luas bagi partisipasi publik dalam perencanaan, implementasi dan pengawasan pembangunan daerah;
- b. Membangun kemitraan strategis dengan lembaga-lembaga non government, seperti Organanisasi Kemasyarakatan, Lembaga Swadaya Masyarakat, serta Organisasi Mahasiswa dan Kepemudaan;
- c. Mengembangkan forum Musrenbang yang demokratis dan partisipatif dalam perencanaan pembangunan daerah;
- d. Mengembangkan sistem informasi manajemen daerah sebagai media sosialisasi dan pengawasan program daerah; dan



PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR

- e. Membangun relasi yang dan sinergis dengan pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa melalui asistensi dan konsultasi.

Berdasarkan uraian rumusan tujuan pembangunan jangka menengah Kabupaten Seram Bagian Timur sebagaimana pada Misi 4 diatas, maka rumusan sasaran ditetapkan masing-masing sebagai berikut:

- 1) Terbukanya akses partisipasinya masyarakat dalam proses perencanaan, implementasi dan pengawasan pembangunan daerah;
- 2) Terbangunnya kemitraan strategis antara pemerintah daerah dengan LSM, Ormas, Organisasi kemahasiswaan dan organisasi kepemudaan;
- 3) Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah;
- 4) Terbangunnya sistem informasi manajemen daerah yang berkualitas sebagai media sosialisasi dan pengawasan program daerah; dan
- 5) Terciptanya relasi yang strategis dengan pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa.

5. Misi 5 :Mendorong pengembangan sektor unggulan kelautan dan perikanan.

Untuk mencapai target Misi 5, maka uraian rumusan tujuan dirumuskan sebagai berikut :

- a. Penataan kawasan dan potensi unggulan kelautan dan perikanan;
- b. Pembentukan rezim investasi sektor kelautan dan perikanan untuk mempercepat pengembangan sektoral;
- c. Mempercepat alih tehnologi dan pengetahuan sektor kelautan dan perikanan;
- d. Meningkatkan promosidan sosialiasasi potensi unggulan kelautan dan perikanan melalui berbagai media dan forum;
- e. Mengembangkan sektor hulu perikanan melalui revitalisasi sarana penangkapan nelayan, serta pengembangan sektor hilir perikanan melalui industri pengolahan;
- f. Mengembangkan sektor wisata eco marine tourisme.



PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR

Berdasarkan uraian rumusan tujuan pembangunan jangka menengah Kabupaten Seram Bagian Timur sebagaimana pada Misi 5 diatas, makarumusan sasaran ditetapkan masing-masing sebagai berikut:

- 1) Tepetakannya kawasan dan potensi unggulan bidang kelautan dan perikanan;
- 2) Meningkatnya investasi sektor kelautan dan perikanan untuk mempercepat pengembangan sektor kelautan dan perikanan;
- 3) Terwujudnya alih tehnologi dan pengetahuan pengelolaan potensi kelautan dan perikanan;
- 4) Meningkatnya produk potensi unggulan kelautan dan perikanan;
- 5) Berkembangnya sektor hulu perikanan melalui revitalisasi sarana penangkapan nelayan;
- 6) Berkembangnya sektor hilir perinakan melalui industri pengolahan dan sektor pariwisata perairan.

6. Misi 6 : Mengembangkan aksesibilitas infrastruktur, serta akses luas terhadap IPTEK, permodalan, keuangan dan pasar.

Untuk mencapai target Misi 6, maka uraian rumusan tujuan dirumuskan sebagai berikut :

- a. Meningkatkan aksesibilitas antar wilayah yang mendukung aktivitas perekonomian daerah;
- b. Mengembangkan infrastruktur jalan, jembatan dan pelabuhan;
- c. Meningkatkan akses transportasi laut yang cepat dan aman;
- d. Mengembangkan pelabuhan hub sebagai pusat transportasi dan perdagangan antar daerah;
- e. Mendorong peningkatan akses terhadap ilmu pengetahuan dan inovasi tehnologi yang mendukung aktivitas ekonomi melalui kerjasama multi stakeholder;
- f. Meningkatkan akses terhadap lembaga keuangan dan pasar dalam mendukung aktivitas ekonomi; dan
- g. Memfasilitasi pembangunan perguruan tinggi di daerah melalui kerjasama dengan perguruan tinggi terakreditasi.



PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR

Berdasarkan uraian rumusan tujuan pembangunan jangka menengah Kabupaten Seram Bagian Timur sebagaimana pada Misi 6 diatas, maka rumusan sasaran ditetapkan masing-masing sebagai berikut:

- 1) Meningkatnya aksesibilitas perhubungan laut antar wilayah untuk mendukung aktivitas perekonomian daerah;
- 2) Berkembangnya berbagai infrastruktur darat, laut dan udara;
- 3) Berkembangnya sarana dan prasarana transportasi laut yang handal, cepat dan aman;
- 4) Berkembangnya pelabuhan hub sebagai pusat transportasi dan perdagangan antar daerah;
- 5) Meningkatnya akses terhadap ilmu pengetahuan dan inovasi teknologi yang mendukung aktivitas ekonomi;
- 6) Meningkatnya akses terhadap lembaga keuangan dan pasar dalam mendukung aktivitas ekonomi; dan
- 7) Berkembangnya sektor pendidikan secara terintegrasi mulai jenjang pendidikan dasar hingga perguruan tinggi.

7. Misi 7 : Memperkuat kapasitas SDM dan kelembagaan lokal dalam Integrasikan pasar bebas, khususnya AFTA dan MEA.

Untuk mencapai target Misi 6, maka uraian rumusan tujuan dirumuskan sebagai berikut :

- a. Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM lokal sesuai standar kualifikasi kompetensi nasional indonesia;
- b. Memfasilitasi SDM lokal pada berbagai bursa tenaga kerja ditingkat daerah, nasional maupun internasional;
- c. Mengembangkan dan memfasilitasi akses pendidikan ketenagakerjaan sesuai standar kompetensi bagi SDM lokal;
- d. Meningkatkan kapasitas dan kemampuan lembaga daerah dalam menghadapi pasar bebas Asia Pasifik dan Asean (AFTA dan MEA);
- e. Meningkatkan kapasitas dan kompetensi Balai Latihan Kerja; dan



PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR

- f. Memfasilitasi sertifikasi SDM lokal dalam menghadapi persaingan bursa tenaga kerja.

Berdasarkan uraian rumusan tujuan pembangunan jangka menengah Kabupaten Seram Bagian Timur sebagaimana pada Misi 7 diatas, maka rumusan sasaran ditetapkan masing-masing sebagai berikut:

- 1) Meningkatnya kualitas SDM lokal sesuai dengan standar kualifikasi kompetensi nasional;
- 2) Terfasilitasinya SDM lokal ke berbagai bursa tenaga kerja di tingkat daerah, nasional maupun internasional;
- 3) Berkembangnya dan terfasilitasinya akses pendidikan ketenagakerjaan sesuai standar kompetensi SDM lokal;
- 4) Meningkatnya kapasitas dan kemampuan lembaga daerah dalam menghadapi pasar bebas Asia Pasifik (AFTA) dan MEA;
- 5) Meningkatnya kapasitas dan kompetensi Balai Latihan Kerja; dan
- 6) Terfasilitasinya sertifikasi SDM lokal dalam menghadapi persaingan bursa tenaga kerja.

Berdasarkan uraian keterkaitan antara visi, misi dengan tujuan dan sasaran sebagaimana tersebut diatas, selanjutnya untuk memudahkan mengetahui keterkaitan tersebut, maka dibawah ini secara sistematis akan diuraikan kedalam tabel sebagaimana dapat dilihat pada tabel dibawah ini.



PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR

Tabel 5.1
Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran
Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2016-2021

Visi : "Terwujudnya Sbt Yang Sejahtera, Mandiri Dan Berdaya Saing Berbasis Sumberdaya Lokal"							
Misi 1 : Mengembangkan aktivitasekonomi lokal berbasis komoditi unggulan dan kelembagaan lokal di daerah pedesaan.							
Tujuan	Sasaran	Target Sasaran Tahun					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
a. Memetakan dan mengembangkan potensi unggulan di daerah pedesaan.	1) Terpetakannya dan berkembangnya produk-produk unggulan daerah.						
b. Mengembangkan ekonomi di pedesaan berbasis kawasan dan komoditi unggulan.	2) Berkembangnya perekonomian masyarakat berbasis kawasan dan komoditi unggulan.						
c. Mengembangkan kapasitas kelembagaan lokal dalam mendukung ekonomi kawasan.	3) Berkembangnya dan meningkatnya kapasitas kelembagaan lokal dan mendukung ekonomi kawasan.						
d. Penataan tata ruang desa dalam mendukung aktivitas ekonomi di pedesaan.	4) Tertatanya tata ruang pedesaan dalam mendukung aktivitas ekonomi pedesaan.						
e. Terbangunnya sistem perdagangan dalam pembentukan BUMDesa dan BUMDesa antar desa	5) Terbangunnya sistem perdagangan yang terintegrasi dengan BUMDes dalam upaya menciptakan kelembagaan						



PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR

dalam suatu kawasan ekonomi.	perdagangan di pedesaan yang kuat.						
f. Mengembangkan daya saing produk pasca panen di kawasan ekonomi.	6) Meningkatnya daya saing produk unggulan daerah, seperti pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan dan pariwisata.						
g. Mendorong kerjasama antar pihak dalam percepatan pengembangan ekonomi pedesaan.	7) Terciptanya kerjasama dengan multi pihak dalam pengelolaan koperasi, usaha kecil dan menengah untuk percepatan pengembangan ekonomi masyarakat di pedesaan.						
Misi 2 : Menjalankan Reformasi Birokrasi Dalam Tata Kelola Birokrasi, Serta Reformasi Agraria Dalam Tata Ruang Wilayah.							
a. Mendesain, reaktualisasi dan implementasi nilai dan prinsip-prinsip pengelolaan pemerintahan daerah yang bersih, transparan, bertanggung jawab dan bebas KKN.	1) Tersusunnya dan terlaksananya nilai dan prinsip penyelenggaraan yang bersih dan baik.						
b. Meningkatkan kualitas dan performa pelayanan publik aparatur pemerintahan daerah berbasis kinerja.	2) Meningkatnya pelayanan publik dalam rangka meningkatkan performa kinerja pemerintahan daerah.						
c. Mendorong peningkatan belanja publik yang proporsional.	3) Meningkatnya belanja untuk publik secara proporsional sesuai dengan kapasitas riil						



PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR

	keuangan daerahl.						
d. Meningkatkan koordinasi dan sinergitas antar Perangkat Daerah (PD) dalam mengembangkan tata kelola pemerintahan.	4) Terbangunnya sistem koordinasi dan sinergi antar Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.						
e. Meningkatkan legislasi pertanahan bagi pembangunan milik masyarakat.	5) Terbinya peraturan daerah tentang pertanahan bagi pembangunan milik rakyat.						
f. Mendorong sertifikasi lahan bagi lahan pertanian/perkebunan milik masyarakat.	6) Tersertifikasinya lahan untuk pertanian dan perkebunan milik msyarakat.						
g. Melindungi lahan untuk tujuan pertanian yang berkelanjutan.	7) Terbangunnya sistem pengelolaan pertanian yang terintegrasi dengan pengelolaan lingkungan hidup berdimensi pembangunan berkelanjutan.						
Misi 3 : Mengembangkan investasi dan jejaring kerjasama multi level Stakeholder untuk pengembangan perekonomian Daerah yang kuat dan kompetitif.							
a. Mendorong iklim investasi yang kondusif bagi dunia usaha.	1) Meningkatnya jumlah investor ke Kabupaten Seram Bagian Timur.						
b. Desain tata kelola perizinan dan pengembangan dunia usaha yang cepat dan transparan.	2) Tersusunnya pedoman perijinan didunia usaha mudah, murah, cepat dan transparan.						



PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR

c. Mengembangkan forum mitra usaha antar stakeholder di daerah, kawasan dan nasional.	3) Terbangunnya kerjasama kemitraan antar pemangku kepentingan di daerah, Kawasan dan nasional.						
d. Akselerasi dan penyesuaian regulasi dan kebijakan daerah yang mendukung investasi dunia usaha.	4) Tersusunnya regulasi kebijakan daerah yang mendukung investasi di daerah.						
e. Mendorong tumbuhnya wirausaha muda daerah yang kuat dan mandiri.	5) Tumbuhnya wirausaha muda di daerah yang kuat dan mandiri.						
f. Memfasilitasi pengembangan korporasi petani-nelayan di daerah pedesaan yang terhubung dengan dunia usaha.	6) Terbangunnya korporasi petani-nelayan di daerah pedesaan yang terkoneksi dengan dunia usaha.						
g. Mengembangkan usaha sektor riil dan ekonomi kreatif.	7) Berkembangnya dunia usaha dan ekonomi kreatif.						
Misi 4 : Mendorong penguatan demokrasi dan partisipasi publik dalam sistem tata kelola pemerintahan yang terbuka, akuntabel dan Bertanggung jawab.							
a. Membuka akses yang luas bagi partisipasi publik dalam perencanaan, implementasi dan pengawasan pembangunan daerah.	1) Terbukanya akses partisipasinya masyarakat dalam proses perencanaan, implementasi dan pengawasan pembangunan daerah.						
b. Membangun kemitraan strategis dengan lembaga-lembaga non government, seperti Organisasi	2) Terbangunnya kemitraan strategis antara pemerintah daerah dengan LSM, Ormas, Organisasi mahasiswa						



PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR

Kemasyarakatan, Lembaga Swadaya Masyarakat, serta Organisasi Kemahasiswaan dan Kepemudaan.	dan organisasi kepemudaan.						
c. Mengembangkan forum Musrenbang yang demokratis dan partisipatif dalam perencanaan pembangunan daerah.	3) Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah.						
d. Mengembangkan sistem informasi manajemen daerah sebagai media sosialisasi dan pengawasan program daerah.	4) Terbangunnya sistem informasi manajemen daerah yang berkualitas sebagai media sosialisasi dan pengawasan program daerah.						
e. Membangun relasi yang dan sinergis dengan pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa melalui asistensi dan konsultasi.	5) Terciptanya relasi yang strategis dengan pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa.						
Misi 5 :Mendorong pengembngan sektor unggulan kelautan dan perikanan.							
a. Penataan kawasan dan potensi unggulan kelautan dan perikanan.	1) Tepetakannya kawasan dan potensi unggulan bidang kelautan dan perikanan.						
b. Pembentukan rezim investasi sektor kelautan dan perikanan untuk mempercepat pengembangan sektoral.	2) Meningkatnya investasi sektor kelautan dan perikanan untuk mempercepat pengembangan sektor kelautan dan perikanan.						



PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR

c. Mempercepat alih teknologi dan pengetahuan sektor kelautan dan perikanan.	3) Terwujudnya alih teknologi dan pengetahuan pengelolaan potensi kelautan dan perikanan.						
d. Meningkatkan promosi dan sosialisasi potensi unggulan kelautan dan perikanan melalui berbagai media dan forum.	4) Meningkatnya produk potensi unggulan kelautan dan perikanan.						
e. Mengembangkan sektor hulu perikanan melalui revitalisasi sarana penangkapan nelayan, serta pengembangan sektor hilir perikanan melalui industri pengolahan.	5) Berkembangnya sektor hulu perikanan melalui revitalisasi sarana penangkapan nelayan.						
f. Mengembangkan sektor wisata eco marine tourism.	6) Berkembangnya sektor hilir perikanan melalui industri pengolahan dan sektor pariwisata perairan.						
Misi 6 : Mengembangkan aksesibilitas infrastruktur, serta akses luas terhadap IPTEK, permodalan, keuangan dan pasar.							
a. Meningkatkan aksesibilitas antar wilayah yang mendukung aktivitas perekonomian daerah.	1) Meningkatnya aksesibilitas perhubungan laut antar wilayah untuk mendukung aktivitas perekonomian daerah.						
b. Mengembangkan infrastruktur jalan,	2) Berkembangnya berbagai infrastruktur darat, laut dan						



PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR

jembatan dan pelabuhan.	udata.						
c. Meningkatkan akses transportasi laut yang cepat dan aman.	3) Berkembangnya sarana dan prasarana transportasi laut yang handal, cepat dan aman.						
d. Mengembangkan pelabuhan hub sebagai pusat transportasi dan perdagangan antar daerah.	4) Berkembangnya pelabuhan hub sebagai pusat transportasi dan perdagangan antar daerah.						
e. Mendorong peningkatan akses terhadap ilmu pengetahuan dan inovasi teknologi yang mendukung aktivitas ekonomi melalui kerjasama multi stakeholder.	5) Meningkatnya akses terhadap ilmu pengetahuan dan inovasi teknologi yang mendukung aktivitas ekonomi.						
f. Meningkatkan akses terhadap lembaga keuangan dan pasar dalam mendukung aktivitas ekonomi,	6) Meningkatnya akses terhadap lembaga keuangan dan pasar dalam mendukung aktivitas ekonomi.						
g. Memfasilitasi pembangunan perguruan tinggi di daerah melalui kerjasama dengan perguruan tinggi terakreditasi.	7) Berkembangnya sektor pendidikan secara terintegrasi mulai jenjang pendidikan dasar hingga perguruan tinggi.						
Misi 7 : Memperkuat kapasitas SDM dan kelembagaan lokal dalam Integrasi pasar bebas, khususnya AFTA dan MEA.							
a. Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM lokal sesuai	1) Meningkatnya kualitas SDM lokal sesuai dengan standar						



PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR

standar kompetensi indonesia.	kualifikasi nasional	kualifikasi nasional.	kompetensi						
b. Memfasilitasi SDM lokal pada berbagai bursa tenaga kerja ditingkat daerah, nasional maupun internasional.		2) Terfasilitasinya SDM lokal ke berbagai bursa tenaga kerja di tingkat daerah, nasional maupun internasional.							
c. Mengembangkan dan memfasilitasi akses pendidikan ketenagakerjaan sesuai standar kompetensi bagi SDM lokal.		3) Berkembangnya dan terfasilitasinya akses pendidikan ketenagakerjaan sesuai standar kompetensi SDM lokal.							
d. Meningkatkan kapasitas dan kemampuan lembaga daerah dalam menghadapi pasar bebas Asia Pasifik dan Aseam (AFTA dan MEA).		4) Meningkatnya kapasitas dan kemampuan lembaga daerah dalam menghadapi pasar bebas Asia Pasifik (AFTA) dan MEA.							
e. Meningkatkan kapasitas dan kompetensi Balai Latihan Kerja.		5) Meningkatnya kapasitas dan kompetensi Balai Latihan Kerja.							
f. Memfasilitasi sertifikasi SDM lokal dalam menghadapi persaingan bursa tenaga kerja.		6) Terfasilitasinya sertifikasi SDM lokal dalam menghadapi persaingan bursa tenaga kerja.							



PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR

BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Sebelum diuraikan lebih lanjut mengenai strategi, maka hal penting yang perlu dipahami terlebih dahulu, bahwa strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Strategi harus dijadikan salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah. Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Rumusan strategi juga harus menunjukkan keinginan yang kuat dari Pemerintahan Kabupaten Seram Bagian Timur untuk menciptakan nilai tambah bagi para pemangku kepentingan dalam pembangunan daerah. Melalui parameter tertentu, dapat dikenali indikasi keberhasilan atau kegagalan suatu strategi sekaligus untuk menciptakan budaya "berpikir strategi" dalam menjamin, bahwa transformasi menuju pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang lebih baik, transparan, akuntabel dan berkomitmen terhadap kinerja, strategi harus dikendalikan dan dievaluasi.

Sedangkan perencanaan merupakan terjemahan dari visi dan misi kepala daerah ke dalam rencana kerja yang dapat dioperasionalkan. Segala sesuatu yang secara langsung dimaksudkan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran RPJMD, maka dianggap strategis. Rumusan strategi dan arah kebijakan bertujuan untuk memberikan rujukan supaya dalam merumuskan capaian target kinerja pembangunan, maka langkah-langkah yang dilakukan dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah harus melalui pendekatan komprehensif.

Oleh karena itu, perlu ada penjelasan tentang bagaimana pemerintah daerah mencapai tujuan dan sasaran RPJMD dengan efektif dan efisien. Strategi menjabarkan langkah-langkah sistematis mencapai visi dan misi melalui program-program prioritas indikatif yang selanjutnya diperjelas dengan kebijakan umum. Untuk mendapatkan gambaran nyata bagaimana langkah-langkah strategik dilakukan dari waktu ke waktu untuk kurun waktu 5 (lima) tahun, maka arah kebijakan akan mengarahkan langkah



PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR

kapank indikator capaian masing-masing sasaran harus dicapai dan sekaligus memberi pedoman, pada rentang waktu mana strategi harus dijalankan dalam kurun 2016 sampai dengan 2021 sebagai perodesasi dari dokumen RPJMD Kabupaten Seram Bagian Timur.

Dari uraian diatas dapat dipahami, bahwa strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Seram Bagian Timur. Strategi harus dijadikan salah satu landasan yang amat penting dalam perencanaan pembangunan daerah. dengan demikian rumusan strategi dapat berupa pernyataan yang menjelaskana bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Rumusan strategi juga harus menunjukkan keinginan kuat bagaimana Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur menciptakan nilai tambah bagi para pemangku kepentingan

Terkait dengan pembangunan daerah telah digariskan, bahwa apa yang menjadi visi-misi daerah harus selaras dengan visi-misi pembangunan jangka menengah nasional sebagaimana telah dituangkan dalam Keputusan Presiden Nomor 2 Tahn 2015 tentang RPJMN 2015-2019 dan sejalan pula dengan RPJMD provinsi Maluku Tahun 2014-2019. Sementara itu, Visi dan Misi Pemerintahan Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2016-2021 sebagai pedoman perumusan kebijakan pembangunan daerah untuk 5 (lima) tahun kedepan oleh seluruh stakeholder adalah **"Terwujudnya SBT Yang Sejahtera, Mandiri dan Berdaya Saing Berbasis Sumberdaya Lokal"**. Visi dimaksud selanjutnya telah dijabarkan kedalam misi Pemeritahan Kabupaten Seram Bagian Timur untuk 5 (lima) tahun kedepan, yaitu :

- a. Mengembangkan Aktivitas Ekonomi Lokal Berbasis Komoditi Unggulan dan Kelembagaan Lokal di Daerah Perdesaan;
- b. Menjalankan Reformasi Birokrasi Dalam Tata Kelola Birokrasi, Serta Reformasi Agraria Dalam Tata Ruang Wilayah;
- c. Mengembangkan Jejaring Kerjasama Multi Level Stakeholder Untuk Pengembangan Perekonomian Daerah yang Kuat dan Kompetitif;
- d. Mendorong Penguatan Demokrasi dan Partisipasi Publik Dalam Sistem Tata Kelola Pemerintahan yang Terbuka, Akuntabel dan Bertanggungjawab;



PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR

- e. Mendorong Pengembangan Sektor Unggulan Kelautan dan Perikanan;
- f. Mengembangkan Aksesibilitas Infrastruktur Serta Akses Luas Terhadap Iptek, Permodalan, Keuangan dan Pasar; dan
- g. Memperkuat Kapasitas SDM dan Kelembagaan Lokal Dalam Integrasi Pasar Bebas dan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA).

Berdasarkan penjelasan di atas dan dengan mempedomani rumusan keterkaitan antara visi dan misi dengan rumusan tujuan, dan sasaran sebagaimana telah diuraikan pada Bab sebelumnya, maka rumusan strategi dan arah kebijakan dalam dokumen RPJMD Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2016-2021 yang merupakan penjabaran dari setiap sasaran sebagaimana telah diuraikan terdahulu. Dalam perumusan strategi didasarkan pada kriteria (i) Strategi yang realistis untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan; (ii) Menganalisis dan mengevaluasi faktor faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan ketidak keberhasilan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan; dan (iii) Mengevaluasi berbagai faktor internal (kekuatan dan kelemahan), eksternal (peluang dan tantangan) dalam upaya merumuskan strategi yang tepat.

Selanjutnya strategi dan arah kebijakan pembangunan jangka menengah 5 (lima) tahun Kabupaten Seram Bagian Timur diselaraskan dengan sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan jangka panjang Kabupaten Seram Bagian Timur untuk periode 5 (lima) tahun ketiga, yaitu tahun 2015-2019 dan periode 5 (lima) tahun keempat yaitu tahun 2020-2025. Dengan menterpadukan kedua perodesasai ketiga dan keempat 5 (lima) tahunan sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan jangka panjang tersebut, maka rumusan strategis dan arah kebijakan dalam dokumen RPJMD Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2016-2021 dijadikan sebagai landasan oleh seluruh Perangkat Daerah dan para pemangku kepentingan dalam perumusan kebijakan pembangunan daerah, yaitu dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah (rencana 5 tahunan PD), dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan dokumen Rencana Kerja tahunan Perangkat Daerah (Renja PD).



6.1. Strategi dan Arah Kebijakan.

Strategi merupakan rumusan perencanaan komprehensif dalam mencapai tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2016 – 2021 dengan target capaian semaksimal mungkin untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia, sehingga dapat sejajar dengan sumber daya manusia kabupaten/kota lainnya baik dilingkup Provinsi Maluku, maupun dengan kabupaten/kota lainnya ditingkat regional.

6.2. Arah Kebijakan.

Arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 5 (lima) tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Kriteria suatu rumusan arah kebijakan, adalah (i) memperjelas kapan suatu sasaran dapat dicapai dari waktu ke waktu; (ii) dirumuskan bersamaan dengan formulasi strategi, sebelum atau setelah alternatif strategi dibuat; (iii) membantu menghubungkan tiap-tiap strategi kepada sasaran secara lebih rasional; dan (iv) mengarahkan pemilih strategi agar selaras dengan arahan dan sesuai/tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Langkah-langkah dalam merumuskan arah kebijakan dapat dilakukan dengan mengidentifikasi tiap sasaran dan target kinerja tiap tahun. Setelah sasaran dan target kinerja telah dapat dirumuskan, langkah selanjutnya adalah mengidentifikasi permasalahan dan isu strategis terkait tiap tahun. Setelah isu strategis telah dapat diidentifikasi dan dirumuskan, langkah berikutnya yaitu merumuskan draft arah kebijakan, menguji apakah rancangan arah kebijakan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan langkah terakhir yang sangat penting dan menentukan dalam upaya mencari solusi terhadap permasalahan pembangunan adalah memutuskan arah kebijakan.



PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR

Berkaitan dengan langkah-langkah tersebut diatas, dan dalam upaya untuk mewujudkan Visi dan Misi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2016-2021, maka rumusan strategi dan arah kebijakan berdasarkan urutan misi dapat dirumuskan dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Mengembangkan Aktivitas Ekonomi Lokal Berbasis Komoditi Unggulan dan Kelembagaan Lokal di Daerah Perdesaan.

a. Rumusan Strategi.

Untuk mewujudkan target Misi ke 1 “Mengembangkan Aktivitas Ekonomi Lokal Berbasis Komoditi Unggulan dan Kelembagaan Lokal di Daerah Perdesaan”, maka dirumuskan melalui strategis sebagai berikut :

- 1) Melakukan pendataan dan mengembangkan produk-produk unggulan daerah;
- 2) Menciptakan inovasi ekonomi berbasis kawasan dan komoditi unggulan kawasan desa;
- 3) Penguatan kelembagaan lokal untuk mendukung ekonomi pedesaan;
- 4) Melakukan penataan terhadap tata ruang di pedesaan untuk mendukung aktivitas ekonomi di pedesaan;
- 5) Membangun jaringan sistem perdagangan yang terkoneksi dengan BUMDes;
- 6) Meningkatkan kualitas layanan publik untuk mendukung daya saing daerah; dan
- 7) Membangun kerjasama dengan multipihak dalam penguatan lembaga koperasi, usaha kecil dan menengah.

b. Rumusan Arah Kebijakan.

Rumusan arah kebijakan yang ditempuh dalam 5 (lima) tahun kedepan untuk mewujudkan strategi yang telah ditetapkan diatas, dilakukan melalui :

- a) Pendataan dan pengembangan produk-produk unggulan yang memiliki nilai ekonomis;
- b) Meningkatkan keterampilan masyarakat dalam mengelola potensi pertanian, kehutanan, perikanan, pariwisata, perdagangan dan industri rumah tangga;
- c) Meningkatkan kapasitas kelembagaan masyarakat di pedesaan dalam mengelola berbagai potensi unggulan di setiap desa;



PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR

- d) Menerbitkan dan penegakan regulasi untuk mendukung aktivitas ekonomi di pedesaan;
- e) Membangun jaringan komunikasi dan informasi untuk mendukung integrasi perdagangan dengan BUMDes;
- f) Membangun dan meningkatkan berbagai infrastruktur ke PU-an, perijinan dan menciptakan ketentraman dan ketertiban umum; dan
- g) Membangun kemitraan dengan multipihak dalam mendukung penguatan lembaga koperasi, usaha kecil dan menengah.

2. Menjalankan Reformasi Birokrasi Dalam Tata Kelola Birokrasi, Serta Reformasi Agraria Dalam Tata Ruang Wilayah.

a. Rumusan Strategi.

Untuk mewujudkan target Misi ke 2 "Menjalankan Reformasi Birokrasi Dalam Tata Kelola Birokrasi, Serta Reformasi Agraria Dalam Tata Ruang Wilayah", maka dirumuskan melalui strategis sebagai berikut :

- 1) Perlu adanya fakta integritas dari seluruh jajaran eksekutif dan legislatif;
- 2) Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana/prasarana kerja berbasis teknologi informasi;
- 3) Meningkatkan proporsi belanja langsung untuk mendorong kualitas pelayanan publik;
- 4) Memperkuat sistem koordinasi antar Perangkat Daerah;
- 5) Melakukan pedataan tanah-tanah milik masyarakat;
- 6) Pendataan lahan-lahan pertanian dan perkebunan milik masyarakat; dan
- 7) Mengintegrasikan pengelolaan pertanian dengan lingkungan hidup secara berkelanjutan.

b. Rumusan Arah Kebijakan.

Rumusan arah kebijakan yang ditempuh dalam 5 (lima) tahun kedepan untuk mewujudkan strategi yang telah ditetapkan diatas, dilakukan melalui :

- a) Perlu dibangun budaya kerja organisasi yang transparan, demokratis dan akuntabel;



PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR

- b) Pengadaan sarana dan prasarana teknologi informasi untuk mendukung kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- c) Meningkatkan kualitas penge lolaan keuangan daerah secara profesional;
- d) Menerbitkan SOP yang mengatur tentang pembagi an tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah;
- e) Melakukan sertifikasi tanah-tanah milik masyarakat;
- f) Melakukan sertifikasi lahan-lahan pertanian dan perkebu nan milik masyarakat; dan
- g) Menerbitkan panduan penge lolaan lahan pertanian yang berbasis lingkungan hidup.

3. Mengembangkan Investasi dan Jejaring Kerjasama Multi Level Stakeholder Untuk Pengembangan Perekonomian Daerah yang Kuat dan Kompetitif.

a. Rumusan Strategi.

Untuk mewujudkan target Misi ke 3 “Mengembangkan Jejaring Kerjasama Multi Level Stakeholder Untuk Pengembangan Perekonomian Daerah yang Kuat dan Kompetitif”, maka dirumuskan melalui strategis sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan kualitas dan kuantitas promosi investasi ke berbagai stakeholders;
- 2) Menerbitkan pedoman perijinan berinvestasi yang mudah, cepat, murah dan transparan;
- 3) Menjembatani tata kelola pembangunan multi level (desa-daerah);
- 4) Penyusunan Regulasi daerah tentang sistem investasi yang mendukung dunia usaha;
- 5) Mendorong tumbuhnya pengusaha daerah yang kuat dan mandiri;
- 6) Memperkuat kebijakan dan program pengembangan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat; dan
- 7) Mengembangkan dunia usaha dan ekonomi kreatif..

b. Rumusan Arah Kebijakan.

Rumusan arah kebijakan yang ditempuh dalam 5 (lima) tahun kedepan untuk mewujudkan strategi yang telah ditetapkan diatas, dilakukan melalui :

- a) Mempercepat penerbitan perijinan dibidang penanaman modal.



PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR

- b) Menerbitkan peraturan daerah tentang pedoman perijinan berinvestasi yang mudah, cepat, murah dan transparan.
- c) Menerbitkan peraturan daerah tentang pembangunan di perdesaan.
- d) Menerbitkan peraturan daerah tentang sistem investasi daerah.
- e) Memfasilitasi tumbuhnya pengusaha daerah yang kuat dan mandiri.
- f) Mengembangkan kapasitas dan kompetensi masyarakat untuk pengembangan dan pemberdayaan masyarakat.
- g) Mendorong tumbuhnya dunia usaha dan ekonomi kreatif dikalangan masyarakat.

4. Mendorong Penguatan Demokrasi dan Partisipasi Publik Dalam Sistem Tata Kelola Pemerintahan yang Terbuka, Akuntabel dan Bertanggungjawab;

a. Rumusan Strategi.

Untuk mewujudkan target Misi ke 4 "Mengembangkan Jejaring Kerjasama Multi Level Stakeholder Untuk Pengembangan Perekonomian Daerah yang Kuat dan Kompetitif", maka dirumuskan melalui strategis sebagai berikut :

- 1) Menjembatani partisipasi publik dalam perencanaan dan implementasi pembangunan;
- 2) Membangun kemitraan strategis untuk menghasilkan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas;
- 3) Menciptakan kebijakan inovatif yang demokratis dan inklusif;
- 4) Membangun sistem informasi manajemen untuk terlaksananya pengawasan terhadap program pembangunan daerah; dan
- 5) Menciptakan relasi strategis dengan pemerintahan daerah dalam pengelolaan dana desa..

b. Rumusan Arah Kebijakan.

Rumusan arah kebijakan yang ditempuh dalam 5 (lima) tahun kedepan untuk mewujudkan strategi yang telah ditetapkan diatas, dilakukan melalui :

- a) Meningkatkan partisipasi publik dalam mewujudkan dokumen perencanaan pembangunan yang berkualitas;



PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR

- b) Membangun kemitraan strategis dengan stakeholder untuk menghasilkan dokumen perencanaan pembangunan daerah sesuai kebutuhan masyarakat;
- c) Pelaksanaan Musrenbang yang demokratis, transparan dan akuntabel dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan dasar kepada publik;
- d) Pengadaan perangkat sistem informasi manajemen untuk terlaksananya pengawasan program-program pembangunan daerah; dan
- e) Membangun kemitraan yang strategis dengan pemerintahan desa dalam pengelolaan dana desa.

5. Mendorong Pengembangan Sektor Unggulan Kelautan dan Perikanan.

a. Rumusan Strategi.

Untuk mewujudkan target Misi ke 5 "Mendorong Pengembangan Sektor Unggulan Kelautan dan Perikanan", maka dirumuskan melalui strategis sebagai berikut :

- 1) Melakukan pendataan terhadap potensi unggulan bidang kelautan dan perikanan;
- 2) Mendorong percepatan pengembangan sektor kelautan dan perikanan dengan dukungan infrastruktur yang handal;
- 3) Mewujudkan alih teknologi dalam pengelolaan potensi kelautan dan perikanan;
- 4) Melakukan sosialisasi tentang potensi perikanan dan pentingnya konsumsi hasil laut untuk kesehatan dan mencetak generasi muda yang cerdas;
- 5) Mengembangkan sektor hulu perikanan melalui revitalisasi sarana dan prasarana penangkapan nelayan; dan
- 6) Mengembangkan sektor hilir perikanan melalui industri pengolahan dan pariwisata bahari.

b. Rumusan Arah Kebijakan.

Rumusan arah kebijakan yang ditempuh dalam 5 (lima) tahun kedepan untuk mewujudkan strategi yang telah ditetapkan diatas, dilakukan melalui :

- a) Meningkatkan kualitas pengelolaan potensi pariwisata laut, perikanan, industri dan perdagangan perikanan;



PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR

- b) Memfasilitasi berkembangnya sektor kelautan dan perikanan yang didukung data dan infrastruktur yang handal;
- c) Menyiapkan generasi muda dan nelayan dalam alih teknologi pengelolaan potensi kelautan dan perikanan;
- d) Menggalakan promosi potensi kelautan dan konsumsi hasil laut untuk kesehatan dan mencetak generasi muda yang cerdas;
- e) Mendata dan pengadaan sarana penangkapan nelayan untuk mendukung kualitas pelayanan sosial dasar; dan
- f) mengembangkan potensi sektor hilir kelautan dan perikanan, termasuk sektor pariwisata bahari.

6. Mengembangkan Aksesibilitas Infrastruktur Serta Akses Luas Terhadap Iptek, Permodalan, Keuangan dan Pasar.

a. Rumusan Strategi.

Untuk mewujudkan target Misi ke 6 "Mengembangkan Aksesibilitas Infrastruktur Serta Akses Luas Terhadap Iptek, Permodalan, Keuangan dan Pasar", maka dirumuskan melalui strategis sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan aksesibilitas perhubungan laut antar pulau/kepulauan;
- 2) Mengembangkan berbagai infrastruktur perhubungan darat, laut dan udara;
- 3) Mengembangkan sistem transportasi laut dan handal, cepat dan aman;
- 4) Membangun dan meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana perhubungan;
- 5) Meningkatkan kemudahan akses terhadap informasi teknologi dan inovasi teknologi;
- 6) Mempermudah akses lembaga keuangan dan pasar untuk mendukung aktivitas ekonomi masyarakat
- 7) Mewujudkan kerjasama pembangunan perguruan tinggi dengan perguruan tinggi yang telah terakreditasi.

b. Rumusan Arah Kebijakan.

Rumusan arah kebijakan yang ditempuh dalam 5 (lima) tahun kedepan untuk mewujudkan strategi yang telah ditetapkan diatas, dilakukan melalui :



PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR

- a) Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana perhubungan laut yang memadai;
- b) Mengembangkan terminal, pelabuhan dan bandara;
- c) Mengembangkan sistem moda transportasi laut handal, cepat dan aman;
- d) Membangun berbagai infra struktur perhubungan yang handal dalam rangka mendukung aktivitas perekonomian.
- e) Membuka akses ke jaringan teknologi informasi untuk mendorong tumbuhnya inovasi teknologi.
- f) Mendorong dan memfasilitasi akses ke lembaga keuangan dan pasar untuk mendukung aktivitas ekonomi masyarakat; dan
- g) Menyiapkan regulasi untuk pembangunan perguruan tinggi yang terakreditasi.

7. Memperkuat Kapasitas SDM dan Kelembagaan Lokal Dalam Integrasi Pasar Bebas dan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA).

a. Rumusan Strategi.

Untuk mewujudkan target Misi ke 7 "Memperkuat Kapasitas SDM dan Kelembagaan Lokal Dalam Integrasi Pasar Bebas dan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA), maka dirumuskan melalui strategis sebagai berikut :

- 1) Memperkuat kapasitas SDM serta kelembagaan daerah dan lokal;
- 2) Memfasilitasi SDM lokal untuk dapat bersaing diberbagai bursa tenaga kerja;
- 3) Mengembangkan dan memfasilitasi akses pendidikan dan ketenagakerjaan SDM lokal;
- 4) Meningkatkan pengetahuan dan kemampuan masyarakat dalam menghadapi persaingan global;
- 5) Meningkatkan kualitas dan kapasitas keterampilan tenaga pengajar di BLK; dan
- 6) Meningkatkan kapasitas SDM lokal untuk menghadapi persaingan bursa tenaga kerja.

b. Rumusan Arah Kebijakan.

Rumusan arah kebijakan yang ditempuh dalam 5 (lima) tahun kedepan untuk mewujudkan strategi yang telah ditetapkan diatas, dilakukan melalui :



PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR

- a) Meningkatkan kapasitas dan pengetahuan SDM lokal dalam rangka penguatan kelembagaan daerah;
- b) Meningkatkan kualitas SDM lokal untuk dapat bersaing di bursa tenaga kerja;
- c) Membangun, mengembangkan dan memfasilitasi akses pendidikan dan ketenagakerjaan SDM lokal;
- d) Meningkatkan kualitas dan kuantitas lembaga pendidikan formal dan non formal;
- e) Menerbitkan sertifikasi untuk tenaga kerja yang telah mengikuti pelatihan di BLK;
- f) Meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan dan balai-balai pelatihan tenaga kerja.

Keterkaitan antara misi, tujuan, sasaran dengan strategi dan arah kebijakan pembangunan jangka menengah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2016-2021, dapat dilihat sebagaimana data dan informasi yang terdapat pada tabel dibawah ini.



PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR

Tabel 6.1.
Keterkaitan Antara Misi, Tujuan, Sasaran dengan Strategi dan Arah Kebijakan
Dalam RPJMD Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2016 – 2021.

No	Tujuan	Sasaran	strategi	Arah Kebijakan	Arah Kebijakan Tahunan					
					2016	2017	2018	2019	2020	2021
Misi : 1. Mengembangkan Aktivitas Ekonomi Lokal Berbasis Komoditi Unggulan dan Kelembagaan Lokal di Daerah Pedesaan.										
1	Memetakan dan mengembangkan potensi unggulan di daerah pedesaan.	Terpetakannya dan berkembangnya produk-produk unggulan daerah.	Melakukan pendataan dan mengembangkan produk-produk unggulan daerah.	Pendataan dan pengembangan produk-produk unggulan yang memiliki nilai ekonomis.	v	v	v	v	v	v
2	Pengembangan ekonomi di pedesaan berbasis kawasan dan komoditi unggulan.	Berkembangnya perekonomian masyarakat berbasis kawasan dan komoditi unggulan.	Menciptakan inovasi ekonomi berbasis kawasan dan komoditi unggulan kawasan desa	Meningkatkan keterampilan masyarakat dalam mengelola potensi pertanian, kehutanan, perikanan, pariwisata, perdagangan dan industri rumah tangga.	v	v	v	v	v	v
3	Mengembangkan kapasitas kelembagaan lokal dalam mendukung ekonomi kawasan.	Berkembangnya dan meningkatnya kapasitas kelembagaan lokal dan mendukung ekonomi kawasan;	Penguatan kelembagaan lokal untuk mendukung ekonomi pedesaan.	Meningkatkan kapasitas kelembagaan masyarakat di pedesaan dalam mengelola berbagai potensi unggulan di setiap desa.	v	v	v	v	v	v
4	Penataan tata ruang desa dalam mendukung aktivitas ekonomi di pedesaan.	Tertatanya tata ruang pedesaan dalam mendukung aktivitas ekonomi pedesaan.	Melakukan penataan terhadap tata ruang di pedesaan untuk mendukung aktivitas ekonomi di pedesaan.	Menerbitkan dan penegakan regulasi untuk mendukung aktivitas ekonomi di pedesaan.	v	v	v	v	v	v
5	Terbangunnya sistem perdagangan dalam pembentukan BUMDesa dan BUMDesa antar desa dalam suatu kawasan ekonomi.	Terbangunnya sistem perdagangan yang terintegrasi dengan BUMDes dalam upaya menciptakan kelembagaan perdagangan di pedesaan yang kuat.	Membangun jaringan sistem perdagangan yang terkoneksi dengan BUMDes.	Membangun jaringan komunikasi dan informasi untuk mendukung integrasi perdagangan dengan BUMDes.	v	v	v	v	v	v
6	Mengembangkan daya saing produk pasca panen di kawasan ekonomi.	Meningkatnya kualitas produk pasca panen untuk meningkatkan daya saing daerah,	Meningkatkan kualitas layanan publik untuk mendukung daya saing daerah.	Membangun dan meningkatkan berbagai infrastruktur ke PU-an, perijinan dan menciptakan ketentraman dan ketertiban umum.	v	v	v	v	v	v
7	Mendorong kerjasama antar pihak dalam	Terciptanya kerjasama dengan multi pihak dalam	Membangun kerjasama dengan multipihak dalam	Membangun kemitraan dengan multipihak dalam	v	v	v	v	v	v



PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR

	percepatan pengembangan ekonomi pedesaan.	pengelolaan koperasi, usaha kecil dan menengah untuk percepatan pengembangan ekonomi masyarakat di pedesaan.	penguatan lembaga koperasi, usaha kecil dan menengah.	mendukung penguatan lembaga koperasi, usaha kecil dan menengah.						
Misi 2 : Menjalankan Reformasi Birokrasi Dalam Tata Kelola Birokrasi, Serta Reformasi Agraria Dalam Tata Ruang Wilayah.										
1	Mendesain, reaktualisasi dan implementasi nilai dan prinsip-prinsip pengelolaan pemerintahan daerah yang bersih, transparan, bertanggung jawab dan bebas KKN.	Tersusunnya dan terlaksananya nilai dan prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan baik.	Perlu adanya fakta integritas dari seluruh jajaran eksekutif dan legislatif.	Perlu dibangun budaya kerja organisasi yang transparan, demokratis dan akuntabel.	V	V	V	V	V	V
2	Meningkatkan kualitas dan performa pelayanan publik aparatur pemerintahan daerah berbasis kinerja.	Meningkatnya pelayanan publik dalam rangka meningkatkan performa kinerja pemerintahan daerah.	Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana/prasarana kerja berbasis teknologi informasi.	Pengadaan sarana dan prasarana teknologi informasi untuk mendukung kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.	V	V	V	V	V	V
3	Mendorong peningkatan belanja publik yang proporsional.	Meningkatnya belanja untuk publik secara proporsional sesuai dengan kapasitas riil keuangan daerah.	Meningkatkan proporsi belanja langsung untuk mendorong kualitas pelayanan publik.	Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah secara profesional.	V	V	V	V	V	V
4	Meningkatkan koordinasi dan sinergitas antar Perangkat Daerah (PD) dalam mengembangkan tata kelola pemerintahan.	Terbangunnya sistem koordinasi dan sinergi antar Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.	Memperkuat sistem koordinasi antar Perangkat Daerah.	Menerbitkan SOP yang mengatur tentang pembagian tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.	V	V	V	V	V	V
5	Meningkatkan legislasi pertanahan bagi pembangunan milik masyarakat.	Terbinya peraturan daerah tentang pertanahan milik masyarakat.	Melakukan pedataan tanah-tanah milik masyarakat	Melakukan sertifikasi tanah-tanah milik masyarakat.	V	V	V	V	V	V
6	Mendorong sertifikasi lahan bagi lahan pertanian/perkebunan milik masyarakat.	Tersertifikasinya lahan untuk pertanian dan perkebunan milik masyarakat.	Pendataan lahan-lahan pertanian dan perkebunan milik masyarakat	Melakukan sertifikasi lahan-lahan pertanian dan perkebunan milik masyarakat.	V	V	V	V	V	V



PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR

7	Melindungi lahan untuk tujuan pertanian yang berkelanjutan.	Terbangunnya sistem pengelolaan pertanian yang terintegrasi dengan pengelolaan lingkungan hidup berkelanjutan.	Mengintegrasikan pengelolaan pertanian dengan lingkungan hidup secara berkelanjutan.	Menerbitkan panduan pengelolaan lahan pertanian yang berbasis lingkungan hidup.	V	V	V	V	V	V
Misi 3 : Mengembangkan Jejaring Kerjasama Multi Level Stakeholder Untuk Pengembangan Perekonomian Daerah yang Kuat dan Kompetitif.										
1	Mendorong iklim investasi yang kondusif bagi dunia usaha.	Meningkatnya jumlah investor ke Kabupaten Seram Bagian Timur.	Meningkat kualitas dan kuantitas promosi investasi ke berbagai stakeholders.	Mempercepat penerbitan perijinan di bidang penanaman modal.	V	V	V	V	V	V
2	Desain tata kelola perizinan dan pengembangan dunia usaha yang cepat dan transparan.	Tersusunnya pedoman perijinan di dunia usaha mudah, murah, cepat dan transparan.	Menerbitkan pedoman perijinan berinvestasi yang mudah, cepat, murah dan transparan.	Menerbitkan peraturan daerah tentang pedoman perijinan berinvestasi yang mudah, cepat, murah dan transparan.	V	V	V	V	V	V
3	Mengembangkan forum mitra usaha antar stakeholder di daerah, kawasan dan nasional.	Terbangunnya kerjasama kemitraan antar pemangku kepentingan di daerah, Kawasan dan nasional.	Menjembatani tata kelola pembangunan multi level (desa-daerah).	Menerbitkan peraturan daerah tentang pembangunan di perdesaan.	V	V	V	V	V	V
4	Akselerasi dan penyesuaian regulasi dan kebijakan daerah yang mendukung investasi dunia usaha.	Tersusunnya regulasi kebijakan daerah yang mendukung investasi di daerah.	Penyusunan Regulasi daerah tentang sistem investasi yang mendukung dunia usaha.	Menerbitkan peraturan daerah tentang sistem investasi daerah.	V	V	V	V	V	V
5	Mendorong tumbuhnya wirausaha muda daerah yang kuat dan mandiri.	Tumbuhnya wirausaha muda di daerah yang kuat dan mandiri.	Mendorong tumbuhnya pengusaha daerah yang kuat dan mandiri.	Memfasilitasi tumbuhnya pengusaha daerah yang kuat dan mandiri.	V	V	V	V	V	V
6	Memfasilitasi pengembangan korporasi petani-nelayan di daerah pedesaan yang terhubung dengan dunia usaha.	Terbangunnya korporasi petani-nelayan di daerah pedesaan yang terkoneksi dengan dunia usaha.	Memperkuat kebijakan dan program pengembangan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat.	Mengembangkan kapasitas dan kompetensi masyarakat untuk pengembangan dan pemberdayaan masyarakat.	V	V	V	V	V	V
7	Mengembangkan usaha sektor riil dan ekonomi kreatif.	Berkembangnya dunia usaha dan ekonomi kreatif.	Mengembangkan dunia usaha dan ekonomi kreatif.	Mendorong tumbuhnya dunia usaha dan ekonomi kreatif dikalangan masyarakat.	V	V	V	V	V	V
Misi 4 : Mendorong penguatan demokrasi dan partisipasi publik dalam Sistem tata kelola pemerintahan yang terbuka, akuntabel dan Bertanggung jawab.										
1	Membuka akses yang luas	Terbukanya akses	Menjembatani partisipasi	Meningkatkan partisipasi	V	V	V	V	V	V



PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR

	bagi partisipasi publik dalam perencanaan, implementasi dan pengawasan pembangunan daerah.	partisipasinya masyarakat dalam proses perencanaan, implementasi dan pengawasan pembangunan daerah.	publik dalam perencanaan dan implementasi pembangunan.	publik dalam mewujudkan dokumen perencanaan pembangunan yang berkualitas.						
2	Membangun kemitraan strategis dengan lembaga-lembaga non government, seperti Organisasi Kemasyarakatan, Lembaga Swadaya Masyarakat, serta Organisasi Kemahasiswaan dan Kepemudaan.	Terbangunnya kemitraan strategis antara pemerintah daerah dengan LSM, Ormas, Organisasi kemahasiswaan dan organisasi kepemudaan.	Membangun kemitraan strategis untuk menghasilkan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas.	Membangun kemitraan strategis dengan stakeholder untuk menghasilkan dokumen perencanaan pembangunan daerah sesuai kebutuhan masyarakat.	V	V	V	V	V	V
3	Mengembangkan forum Musrenbang yang demokratis dan partisipatif dalam perencanaan pembangunan daerah.	Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah.	Menciptakan kebijakan inovatif yang demokratis dan inklusif.	Pelaksanaan Musrenbang yang demokratis, transparan dan akuntabel dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan dasar kepada publik.	V	V	V	V	V	V
4	Mengembangkan sistem informasi manajemen daerah sebagai media sosialisasi dan pengawasan program daerah.	Terbangunnya sistem informasi manajemen daerah yang berkualitas sebagai media sosialisasi dan pengawasan program daerah.	Membangun sistem informasi manajemen untuk terlaksananya pengawasan terhadap program pembangunan daerah.	Pengadaan perangkat sistem informasi manajemen untuk terlaksananya pengawasan program-program pembangunan daerah	V	V	V	V	V	V
5	Membangun relasi yang dan sinergis dengan pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa melalui asistensi dan konsultasi.	Terciptanya relasi yang strategis dengan pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa.	Menciptakan relasi strategis dengan pemerintahan daerah dalam pengelolaan dana desa.	Membangun kemitraan yang strategis dengan pemerintahan desa dalam pengelolaan dana desa.	V	V	V	V	V	V
Misi 5 : Mendorong pengembangan sektor unggulan kelautan dan perikanan.										
1	Penataan kawasan dan potensi unggulan kelautan dan perikanan.	Terpetakannya potensi kawasan dan produk unggulan bidang kelautan	Melakukan pendataan terhadap potensi unggulan bidang kelautan dan perikanan.	Meningkatkan kualitas pengelolaan potensi pariwisata laut, perikanan, industri dan perdagangan perikanan.	V	V	V	V	V	V



PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR

		dan perikanan.								
2	Pembentukan rezim investasi sektor kelautan dan perikanan untuk mempercepat pengembangan sektoral.	Meningkatnya investasi sektor kelautan dan perikanan untuk mempercepat pengembangan sektor kelautan dan perikanan.	Mendorong percepatan pengembangan sektor kelautan dan perikanan dengan dukungan infrastruktur yang handal.	Memfasilitasi berkembangnya sektor kelautan dan perikanan yang didukung data dan infrastruktur yang handal.	V	V	V	V	V	V
3	Mempercepat alih teknologi dan pengetahuan sektor kelautan dan perikanan.	Terwujudnya alih teknologi dan pengetahuan pengelolaan potensi kelautan dan perikanan.	Mewujudkan alih teknologi dalam pengelolaan potensi kelautan dan perikanan.	Menyiapkan generasi muda dan nelayan dalam alih teknologi pengelolaan potensi kelautan dan perikanan.	V	V	V	V	V	V
4	Meningkatkan promosi dan sosialisasi potensi unggulan kelautan dan perikanan melalui berbagai media dan forum.	Meningkatnya produk potensi unggulan kelautan dan perikanan.	Melakukan sosialisasi tentang potensi perikanan dan pentingnya konsumsi hasil laut untuk kesehatan dan mencetak generasi muda yang cerdas..	Menggalakan promosi potensi kelautan dan konsumsi hasil laut untuk kesehatan dan mencetak generasi muda yang cerdas.	V	V	V	V	V	V
5	Mengembangkan sektor hulu perikanan melalui revitalisasi sarana penangkapan nelayan, serta pengembangan sektor hilir perikanan melalui industri pengolahan.	Berkembangnya sektor hulu perikanan melalui revitalisasi sarana penangkapan nelayan.	Mengembangkan sektor hulu perikanan melalui revitalisasi sarana dan prasarana penangkapan nelayan.	Mendata dan pengadaan sarana penangkapan nelayan untuk mendukung kualitas pelayanan sosial dasar.	V	V	V	V	V	V
6	Mengembangkan sektor wisata eco marine tourisme.	Berkembangnya sektor hilir perikanan melalui industri pengolahan dan sektor pariwisata perairan.	Mengembangkan sektor hilir perikanan melalui industri pengolahan dan pariwisata bahari.	mengembangkan potensi sektor hilir kelautan dan perikanan, termasuk sektor pariwisata bahari.	V	V	V	V	V	V
Misi 6 : Mengembangkan aksesibilitas infrastruktur, serta akses luas terhadap IPTEK, permodalan, keuangan dan pasar.										
1	Meningkatkan aksesibilitas antar wilayah yang mendukung aktivitas perekonomian daerah.	Meningkatnya aksesibilitas perhubungan laut antar wilayah untuk mendukung aktivitas perekonomian daerah.	Meningkatkan aksesibilitas perhubungan laut antar pulau/kepulauan.	Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana perhubungan laut yang memadai.	V	V	V	V	V	V
2	Mengembangkan infrastruktur jalan,	Berkembangnya berbagai infrastruktur darat, laut dan	Mengembangkan berbagai infrastruktur perhubungan	Mengembangkan terminal, pelabuhan dan bandara	V	V	V	V	V	V



PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR

	jembatan dan pelabuhan.	udara.	darat, laut dan udara.							
3	Meningkatkan akses transportasi laut yang cepat dan aman.	Berkembangnya sarana dan prasarana transportasi laut yang handal, cepat dan aman.	Mengembangkan sistem transportasi laut dan handal, cepat dan aman.	Mengembangkan sistem moda transportasi laut handal, cepat dan aman	V	V	V	V	V	V
4	Mengembangkan pelabuhan hub sebagai pusat transportasi dan perdagangan antar daerah.	Berkembangnya pelabuhan hub sebagai pusat transportasi dan perdagangan antar daerah.	Membangun dan meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana perhubungan.	Membangun berbagai infrastruktur perhubungan yang handal dalam rangka mendukung aktivitas perekonomian.	V	V	V	V	V	V
5	Mendorong peningkatan akses terhadap ilmu pengetahuan dan inovasi teknologi yang mendukung aktivitas ekonomi melalui kerjasama multi stakeholder.	Meningkatnya akses terhadap ilmu pengetahuan dan inovasi teknologi yang mendukung aktivitas ekonomi.	Meningkatkan kemudahan akses terhadap informasi teknologi dan inovasi teknologi.	Membuka akses ke jaringan teknologi informasi untuk mendorong tumbuhnya inovasi teknologi.	V	V	V	V	V	V
6	Meningkatkan akses terhadap lembaga keuangan dan pasar dalam mendukung aktivitas ekonomi.	Meningkatnya akses terhadap lembaga keuangan dan pasar dalam mendukung aktivitas ekonomi.	Memper memudahkan akses ke lembaga keuangan dan pasar untuk mendukung aktivitas ekonomi masyarakat.	Mendorong dan memfasilitasi akses ke lembaga keuangan dan pasar untuk mendukung aktivitas ekonomi masyarakat.	V	V	V	V	V	V
7	Memfasilitasi pembangunan perguruan tinggi di daerah melalui kerjasama dengan perguruan tinggi terakreditasi.	Terwujudnya pembangunan perguruan tinggi melalui kerjasama dengan perguruan tinggi yang terakreditasi.	Mewujudkan kerjasama pembangunan perguruan tinggi dengan perguruan tinggi yang telah terakreditasi.	Menyiapkan regulasi untuk pembangunan perguruan tinggi yang terakreditasi.	V	V	V	V	V	V
Misi 7 : Memperkuat kapasitas SDM dan kelembagaan lokal dalam Integrasi pasar bebas, khususnya AFTA dan MEA.										
1	Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM lokal sesuai standar kualifikasi kompetensi nasional Indonesia.	Meningkatnya kualitas SDM lokal sesuai dengan standar kualifikasi kompetensi nasional.	Memperkuat kapasitas SDM serta kelembagaan daerah dan lokal.	Meningkatkan kapasitas dan pengetahuan SDM lokal dalam rangka penguatan kelembagaan daerah.	V	V	V	V	V	V
2	Memfasilitasi SDM lokal pada berbagai bursa	Terfasilitasinya SDM lokal ke berbagai bursa tenaga kerja	Memfasilitasi SDM lokal untuk dapat bersaing	Meningkatkan kualitas SDM lokal untuk dapat bersaing di	V	V	V	V	V	V



PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR

	tenaga kerja ditingkat daerah, nasional maupun internasional.	di tingkat daerah, nasional maupun internasional.	diberbagai bursa tenaga kerja.	bursa tenaga kerja.						
3	Mengembangkan dan memfasilitasi akses pendidikan ketenagakerjaan sesuai standar kompetensi bagi SDM lokal.	Berkembangnya dan terfasilitasinya akses pendidikan ketenagakerjaan sesuai standar kompetensi SDM lokal.	Mengembangkan dan memfasilitasi akses pendidikan dan ketenagakerjaan SDM lokal	Membangun, mengembangkan dan memfasilitasi akses pendidikan dan ketenagakerjaan SDM lokal.	v	v	v	v	v	v
4	Meningkatkan kapasitas dan kemampuan lembaga daerah dalam menghadapi pasar bebas Asia Pasifik dan Aseam (AFTA dan MEA).	Meningkatnya kapasitas dan kemampuan lembaga daerah dalam menghadapi pasar bebas Asia Pasifik (AFTA) dan MEA.	Meningkatkan pengetahuan dan kemampuan masyarakat dalam menghadapi persaingan global.	Meningkatkan kualitas dan kuantitas lembaga pendidikan formal dan non formal.	v	v	v	v	v	v
5	Meningkatkan kapasitas dan kompetensi Balai Latihan Kerja.	Meningkatnya kapasitas dan kompetensi Balai Latihan Kerja.	Meningkatkan kualitas dan kapasitas ke terampilan tenaga pengajar di BLK.	Menerbitan sertifikasi untuk tenaga kerja yang telah mengikuti pelatihan di BLK.	v	v	v	v	v	v
6	Memfasilitasi sertifikasi SDM lokal dalam menghadapi persaingan bursa tenaga kerja.	Terfasilitasinya sertifikasi SDM lokal dalam menghadapi persaingan bursa tenaga kerja.	Meningkatkan kapasitas SDM lokal untuk menghadapi persaingan bursa tenaga kerja	Meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan dan balai-balai pelatihan tenaga kerja.	v	v	v	v	v	v



PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR

BAB VII

KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

7.1. Rumusan Kebijakan Umum.

Perumusan Kebijakan Umum pembangunan daerah bertujuan agar program-program pembangunan dalam rangka pencapaian Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih dapat diimplementasikan dilapangan. Oleh karena itu, rumusan kebijakan umum pembangunan daerah sejalan dan saling melengkapi dengan rumusan arah kebijakan sebagai penjabaran dari strategi yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dalam 5 (lima) tahun kedepan. Rumusan kebijakan umum dalam upaya pencapaian visi dan misi terkait dengan program prioritas dimaksud.

Dalam pemahaman lain, perumusan kebijakan umum bertujuan menjelaskan cara yang ditempuh untuk menerjemahkan strategi kedalam rencana program-program prioritas pembangunan. Kebijakan umum pembangunan memberikan arah perumusan rencana program prioritas pembangunan yang disertai kerangka pengeluaran jangka menengah daerah dan menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun program dan kegiatan pada Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD).

Bupati dan Wakil Bupati Seram Bagian Timur Tahun 2016 – 2021 terpilih pada masa kampanye pemilihan kepala daerah telah menyampaikan visi dan misinya kepada seluruh masyarakat Kabupaten Seram Bagian Timur. Visi yang ditawarkan kepada seluruh masyarakat yaitu "***Terwujudnya Kabupaten Seram Bagian Timur Yang Sejahtera, Mandiri Dan Berdaya Saing Berbasis Sumberdaya Lokal***". Dengan terpilihnya sebagai Bupati dan Wakil Bupati Seram Bagian Timur periode Tahun 2016 -2021, maka visi dimaksud dijadikan sebagai acuan dalam pelaksanaan pembangunan selama 5 (lima) tahun kedepan oleh seluruh Perangkat Daerah dan seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*).

Oleh karena itu, supaya visi dalam RPJMD dapat diimplementasikan perlu dirumuskan kedalam misi. Misi yang telah dirumuskan terkait dengan Visi Bupati dan Wakil Bupati Seram Bagian Timur defenitif yang telah dilantik oleh Gubernur Maluku, di Ambon pada tanggal 17 Pebruari 2016, adalah :



PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR

1. Mengembangkan Aktivitas Ekonomi Lokal Berbasis Komoditi Unggulan dan Kelembagaan Lokal di Daerah Perdesaan;
2. Menjalankan Reformasi Birokrasi Dalam Tata Kelola Birokrasi, Serta Reformasi Agraria Dalam Tata Ruang Wilayah;
3. Mengembangkan Jejaring Kerjasama Multi Level Stakeholder Untuk Pengembangan Perekonomian Daerah yang Kuat dan Kompetitif;
4. Mendorong Penguatan Demokrasi dan Partisipasi Publik Dalam Sistem Tata Kelola Pemerintahan yang Terbuka, Akuntabel dan Bertanggungjawab;
5. Mendorong Pengembangan Sektor Unggulan Kelautan dan Perikanan;
6. Mengembangkan Aksesibilitas Infrastruktur Serta Akses Luas Terhadap Iptek, Permodalan, Keuangan dan Pasar; dan
7. Memperkuat Kapasitas SDM dan Kelembagaan Lokal Dalam Integrasi Pasar Bebas dan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA).

Program prioritas Bupati ditetapkan sesuai dengan janji Bupati selama kampanye Pemilihan Kepala Daerah dan disusun berdasarkan bidang urusan yang menjadi prioritas pertama dalam program pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun kedepan. Adapun rumusan kebijakan umum yang akan ditempuh untuk memenuhi janji kampanye Bupati Seram Bagian Timur periode masa jabatan Tahun 2016-2021, dapat disajikan sebagaimana terdapat pada tabel dibawah ini.



PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR

Tabel 7.1

Keterkaitan Antara Program Prioritas Dengan Target Sasaran, Kebijakan Umum dan Indikator Capaian Kinerja

Sasaran	strategi	Arah Kebijakan	Kebijakan Umum	Program Prioritas	Indikator	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Meningkatnya kualitas sumber daya manusia Kabupaten Seram Bagian Timur.	Meningkatkan kuantitas dan kualitas lembaga-lembaga pendidikan.	Membangun dan meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan formal dan non formal.	Meningkatkan pengetahuan masyarakat Kabupaten Seram Bagian Timur.	Program Pendidikan Non Formal.	Menurunya penduduk yang buta aksara.	Dinas Pendidikan.
Meningkatnya mutu pendidikan dalam upaya meningkatkan daya saing pemerintah daerah.	Meningkatkan kapasitas dan kompetensi tenaga pendidik, serta sarana dan prasarana pendidikan.	Mengoptimalkan Kapasitas tenaga pendidikan dan sarana dan prasarana pendukung bidang pendidikan.	Meningkatkan kapasitas tenaga pendidik dan sarana pendukungnya.	Program Peningkatan Mutu, Relevansi dan Daya Saing.	Meningkatnya daya saing pemerintah daerah.	Dinas Pendidikan.
Meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan dasar masyarakat dibidang kesehatan.	Meningkatkan ketersediaan obat dan perlengkapan dibidang kesehatan.	Menambah ketersediaan obat dan perlengkapannya yang dibutuhkan masyarakat	Meningkatkan ketersediaan obat dan perlengkapan kesehatan.	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan.	Meningkatnya ketersediaan obat dan perlengkapannya.	Dinas Kesehatan.
Meningkatkannya promosi kesehatan dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan kesehatan.	Melakukan sosialisasi dibidang kesehatan dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam bidang kesehatan.	Melakukan penyuluhan kesehatan kepada masyarakat.	Penyuluhan kesehatan kepada masyarakat	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat.	Meningkatnya masyarakat yang sehat.	Dinas Kesehatan
Berkurangnya lingkungan kumuh tidak sehat.	Melakukan penyuluhan tentang lingkungan sehat kepada masyarakat	Menambah tenaga jumlah tenaga penyuluh dibidang kesehatan.	Menambah sarana dan prasarana untuk penyuluhan kesehatan	Program Pengembangan Lingkungan Sehat.	Bertambahnya jumlah lingkungan sehat.	Dinas Kesehatan.
Terfasilitasinya pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan penyakit menular di masyarakat.	Penyuluhan tentang bahaya penyakit menular kepada masyarakat.	Melakukan penyuluhan penyakit menular kepada masyarakat.	Menggerakkan partisipasi masyarakat dalam pemberantasan penyakit penular.	Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Menular.	Berkurangnya masyarakat yang terkena penyakit menular.	Dinas Kesehatan.
Meningkatnya fungsi	Meningkatkan kualitas	Meningkatkan fungsi dan	Merehabilitasi berat dan	Program Peningkatan	Bertambahnya panjang	Dinas Pekerjaan Umum.



PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR

jalan dan jembatan dalam mendukung aktivitas perekonomian makro daerah.	dan kapasitas jalan dan jembatan dalam upaya mendukung tumbuhnya perekonomian makro daerah.	kapasitas jalan dan jembatan.	sedang jalan dan jembatan yang sudah dalam kondisi tidak	Jalan dan Jembatan.	jalan dan jembatan dalam kondisi baik.	
Bertambahnya infrastruktur dalam upaya mendukung daya saing Pemerintah Kabupaten Seram Bagaian Timur	Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur untuk mendukung daya saing pemerintah daerah	Pembangunan infrastruktur yang handal untuk mendukung daya saing pemerintah daerah.	Pembangunan jalan dan jembatan dalam upaya meningkatkan daya saing pemerintah daerah.	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan.	Bertambahnya jumlah panjang jalan dan jembatan dalam kondisi baik.	Dinas Pekerjaan Umum.
Meningkatnya kuantitas dan kualitas berbagai infrastruktur daerah dalam upaya meningkatkan pendapatan daerah menuju kemandirian fiskal daerah.	Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur daerah yang madniri.	Memelihara dan meningkatkan berbagai infrastruktur daerah	Meningkatkan kuantitas dan kualitas berbagai infrastruktur daerah.	Program Pemeliharaan dan Peningkatan Infrastruktur.	Bertambahnya jumlah berbagai infrastruktur daerah dalam kondisi baik.	a. Dinas Pekerjaan Umum; b. Dinas Perhubungan, Informasi dan Komunikasi; c. Dinas Lingkungan Hidup dan Tata Kota; d. Dinas Kelautan dan Perairan; e. Dinas Pertanian dan Peternakan; f. Dinas kehutanan dan perkebunan; g. Dinas Pertambangan dan Sum ber Daya Mineral; h. Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda Dan Olahraga.
Terbangunnya	Meningkatkan kapasitas	Meningkatkan	Memperkuat	Program Peningkatan	Memingkatnya kualitas	Dinas Koperasi, Industri



PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR

kelembagaan koperasi yang kuat dalam upaya mendukung kapasitas dan kompetensi di era persaingan global	kelembagaan koperasi dalam persiangan global	pengetahuan pengurus koperasi dalam rangka menguatkan kelembagaan koperasi.	kelembagaan koperasi untuk menghadapi persaingan global	Kualitas Kelembagaan Koperasi	kelembagaan koperasi.	dan Perdagangan.
Terbangunnya Jiwa wira usaha di kalangan masyarakat yang unggul yang didukung keterampilan yang handal.	Membangun jiwa wirausaha dikalangan masyarakat.	Melakukan pelatihan tentang kewusahaan dikalangan masyarakat.	Meningkatkan kapasitas dan kompetensi para wirausaha dikalangan masyarakat.	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan	Meningkatnya jumlah wirausaha yang unggul.	Dinas Koperasi, Industri dan Perdagangan.
Meningkatnya kualitas dan kuantitas promosi investasi daerah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.	Meningkatkan kualitas data dan informasi tentang investasi daerah.	Melakukan road map promosi investasi daerah.	Menerbitkan buku tentang data potensi unggulan daerah dan panduan tentang investasi daerah.	Program Pengembangan Investasi Daerah	Meningkatnya jumlah investor (PMDN/PMA).	Kantor Pelayanan Terpadu.
Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana untuk mengelola kekayaan dan budaya.	Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana untuk kelestarian kekayaan budaya.	Meningkatkan kuantitas pentas-pentas budaya.	Meningkatkan festival budaya secara periodik.	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Lestarnya kekayaan buidaya lokal.	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda Dan Olahraga.
Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana untuk mengelola keragaman budaya.	Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana untuk kelestarian keragaman budaya.	Menanggapi berbagai potensi keragaman budaya lokal.	Melakukan diskusi/seminar untuk menanggapi keragaman budaya lokal	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Bertambahnya jumlah dan jenis budaya lokal.	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda Dan Olahraga.
Meningkatnya kinerja pemerintahan daerah dalam upaya mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang baik	Menciptakan penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, efektif, efisien, demokratis, adil	Meningkatkan kualitas pelayanan dasar kepada masyarakat.	Meningkatkan kualitas pelayanan publik.	Program Penerapan Kepemerintahan Yang Baik (Good Governance)	Meningkatnya kualitas layanan publik.	Sekretariat Daerah.



PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR

dan benar.	dan akuntabel.					
Tertatanya kelembagaan dan ketatalaksanaan dalam upaya mendukung terlaksanaan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan benar.	Penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan yang efektif, efisien, transparan dan demokratis, serta akuntabel.	Mempercepat pelaksanaan reformasi birokrasi secara transparan, adil, demokratis dan akuntabel.	Mempercepat reformasi birokrasi.	Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Meningkatnya kinerja kelembagaan birokrasi.	Sekretariat Daerah.
Meningkatkan kuantitas dan kualitas terhadap kinerja aparatur pemerintahan untuk mendukung efisien dan efektivitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.	Meningkatkan kapasitas dan kompetensi aparatur pengawasan dan aparatur dalam melaksanakan pelayanan publik.	Meningkatkan pengetahuan aparatur pengawas dan non pengawas.	Menyediakan bea siswa pendidikan untuk aparatur	Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Negara	Meningkatnya jumlah aparatur yang memiliki kompetensi.	Sekretariat Daerah
Meningkatnya kapasitas aparatur dalam rangka mendukung peningkatan kualitas kinerja aparatur.	Meningkatkan pengetahuan aparatur untuk mendukung kualitas pelayanan kepada masyarakat.	Melakukan kerjasama dengan lembaga pendidikan dalam upaya meningkatkan kapasitas dan kompetensinya.	Memberi bea siswa kepada aparatur yang memiliki kapasitas.	Program Pengelolaan Sumberdaya Manusia Aparatur	Meningkatnya jumlah aparatur yang memiliki kapasitas.	Sekretariat Daerah.
Meningkatnya pendapatan daerah dari sektor kelautan dan perikanan dalam upaya mempercepat pembangunan daerah.	Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana kelautan dan perikanan.	Mengoptimalkan pengelolaan potensi sektor kelautan dan perikanan.	Meningkatkan kualitas dan kuantitas, serta kapasitas aparatur dan keterampilan nelayan.	Program Peningkatan Peran Sektor Perikanan Sebagai Sumberdaya Kelautan	Meningkatnya jumlah potensi kelautan yang dapat dikelola.	Dinas Kelautan dan Perikanan.



7.2. Program Pembangunan Daerah Tahun 2016 – 2021.

Setelah Bupati dan Wakil Bupati menjabarkan janji-ianjinya ketika kampanye kedalam visi dan misi sebagaimana diuraikan diatas, maka untuk mencapai indikator target kinerja visi dan misi diperlukan rumusan program yang akan menjadi acuan selama 5 (lima) tahun kedepan oleh seluruh Perangkat Daerah sesuai dengan bidang tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Selanjutnya setiap program prioritas yang akan dilaksanakan oleh setiap Perangkat Daerah terkait, guna mendapatkan "sekumpulan" program prioritas yang *inheren* di setiap arah kebijakan, dibutuhkan kebijakan umum. Program-program prioritas di masing-masing strategi disebut program pembangunan daerah untuk menggambarkan capaian atau dukungannya secara langsung terhadap sasaran pembangunan daerah Kabupaten Seram Bagian Timur kedalam program-program prioritas.

Pelaksanaan program-program pembangunan daerah bertujuan untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah, sesuai dengan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Dalam rangka pencapaian misi, tujuan dan sasaran pembangunan yang berpedoman kepada strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya. Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka program pembangunan Kabupaten Seram Bagian Timur sepanjang 5 (lima) kedepan, meliputi antara lain :

1. Program-program yang terkait dengan pencapaian target Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Seram Bagian Timur terpilih untuk periode Tahun 2016 – 2021, terdiri dari :

a. Urusan Pendidikan :

- 1) Program Pendidikan Non Formal; dan
- 2) Program Peningkatan Mutu, Relevansi dan Daya Saing.

b. Urusan Kesehatan :

- 1) Program Obat dan Perbekalan Kesehatan;
- 2) Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat;
- 3) Program Pengembangan Lingkungan Sehat; dan
- 4) Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Menular.

c. Urusan Pekerjaan Umum.

- 1) Program Peningkatan Jalan dan Jembatan;
- 2) Program Pembangunan Jalan dan Jembatan; dan



PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR

3) Program Pemeliharaan dan Peningkatan Infrastruktur.

d. Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah :

- 1) Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi; dan
- 2) Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan.

e. Urusan Penanaman Modal :

- 1) Program Pengembangan Investasi Daerah.

f. Urusan Kebudayaan :

- 1) Program Pengelolaan Kekayaan Budaya; dan
- 2) Program Pengelolaan Keragaman Budaya.

g. Sekretariat Daerah :

- 1) Program Penerapan Kepemerintahan Yang Baik (Good Governance);
- 2) Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan;
- 3) Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Negara; dan
- 4) Program Pengelolaan Sumberdaya Manusia Aparatur.

h. Urusan Kelautan dan Perikanan :

- 1) Program Peningkatan Peran Sektor Perikanan Sebagai Sumberdaya Kelautan.

2. Program-program yang terkait dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang bersifat wajib, terdiri dari :

a. Urusan Pendidikan :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;
4. Program Pendidikan Non Formal;
5. Program Peningkatan Mutu, Relevansi dan Daya Saing;
6. Program Pendidikan Anak Usia ini;
7. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun;
8. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan; dan
9. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan.

UPTD Diknas Kecamatan Bula :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran; dan
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.



PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR

UPTD Diknas Kecamatan Seram Timur :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran: dan
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.

UPTD Diknas Kecamatan Pulau Gorom :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran: dan
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.

UPTD Diknas Kecamatan Werinama :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran; dan
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.

UPTD Diknas Kecamatan Tutuk Tolu :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran; dan
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.

UPTD Diknas Kecamatan Wakate :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran; dan
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.

UPTD Diknas Kecamatan Siwalalat :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran; dan
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

UPTD Diknas Kecamatan Kilmuri :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran; dan
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.

UPTD Diknas Kecamatan Bula Barat :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.

UPTD Diknas Kecamatan Gorom Timur :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.

UPTD Diknas Kecamatan Pulau Teor :



PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

UPTD Diknas Kecamatan Teluk Waru :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.

UPTD Diknas Kecamatan Kian Darat :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.

UPTD Diknas Kecamatan Lian Fituh :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.

b. Urusan Kesehatan :

- 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
- 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
- 3) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;
- 4) Program Upaya Kesehatan Masyarakat;
- 5) Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan;
- 6) Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskesmas pembantu dan jaringannya;
- 7) Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata;
- 8) Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia; dan
- 9) Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak.

10) Puskesmas Geser :

- a) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran; dan
- b) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.

11) Puskesmas Kataloka :

- a) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran; dan
- b) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.

12) Puskesmas Werinama :

- a) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran; dan
- b) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.

13) Puskesmas Bula :

- a) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran; dan
- b) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.



PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR

14) Puskesmas Banggoi :

- a) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran; dan
- b) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.

15) Puskesmas Kilga :

- a) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran; dan
- b) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.

16) Puskesmas Amarsekaru :

- a) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.

17) Puskesmas Tamher Timur :

- a) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.

18) RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD)

- a) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
- b) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
- c) Program Peningkatan Disiplin Aparatur;
- d) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;
- e) Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata;
- f) Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata; dan
- g) Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan.

c. Urusan Pekerjaan Umum.

- 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
- 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
- 3) Program Peningkatan Disiplin Aparatur;
- 4) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;
- 5) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan;
- 6) Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya;
- 7) Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh; dan
- 8) Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan.



PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR

d. Urusan Penataan Ruang :

- 1) Program Penataan Ruang;
- 2) Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang; dan
- 3) Program Perencanaan Ruang.

e. Urusan Perumahan :

- 1) Program Lingkungan Sehat Perumahan; dan
- 2) Program Pengembangan Perumahan.

f. Urusan Perencanaan Pembangunan :

- 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
- 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
- 3) Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- 4) Program Perencanaan Pembangunan Daerah;
- 5) Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi; dan
- 6) Program Perencanaan Sosial dan Budaya.

g. Urusan Perhubungan :

- 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
- 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
- 3) Program Peningkatan Disiplin Aparatur;
- 4) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;
- 5) Program Peningkatan Pelayanan Angkutan;
- 6) Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi;
- 7) Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan; dan
- 8) Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas.

h. Urusan Lingkungan Hidup :

- 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
- 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
- 3) Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan;
- 4) Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup; dan
- 5) Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam.

i. Urusan Pemuda dan Olahraga :



PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR

- 1) Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan;
 - 2) Program Pembinaan dan Per masyarakatan Olah Raga; dan
 - 3) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga.
- j. Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil :**
- 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
 - 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
 - 3) Program Peningkatan Disiplin Aparatur;
 - 4) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur; dan
 - 5) Program Penataan Administrasi Kependudukan.
- k. Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera :**
- 1) Program Pelayanan Kontrasepsi.
- l. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak :**
- 1) Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan;
 - 2) Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan; dan
 - 3) Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Jender dalam Pembangunan.
- m. Urusan Sosial :**
- 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
 - 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
 - 3) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;
 - 4) Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya;
 - 5) Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial; dan
 - 6) Program Perbaikan Perumahan Akibat Bencana Alam/Sosial.
- n. Urusan Ketenagakerjaan :**
- 1) Program Peningkatan Kesempatan Kerja; dan
 - 2) Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan.
- o. Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah :**
- 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
 - 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
 - 3) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;
- p. Urusan Penanaman Modal :**
- 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;



PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR

- 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
 - 3) Program Peningkatan Disiplin Aparatur;
 - 4) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;
 - 5) Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi;
 - 6) Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi; dan
 - 7) Program Peningkatan Kapasitas Pelayanan Perizinan.
- q. Urusan Pertanahan :**
- 1) Program Pendataan dan Sertifikasi Tanah Masyarakat.
- r. Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri.**
- 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
 - 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
 - 3) Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal;
 - 4) Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan;
 - 5) Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan;
 - 6) Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat); dan
 - 7) Program Pendidikan Politik Masyarakat.
- 8) Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Dan Linmas :**
- a) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
 - b) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
 - c) Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan; dan
 - d) Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal.
- 9) Badan Penanggulangan Bencana Daerah :**
- a) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
 - b) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
 - c) Program Peningkatan Disiplin Aparatur; dan
 - d) Program Pecegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam.
- s. Urusan Otonomi Daerah, Pemeintahan Umum, Administraasi Kepegawaian, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian.**
- 1. Sekretariat Daerah :**
- a) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
 - b) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur; dan



PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR

- c) Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah.

1) Bagian Hukum :

- a) Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan;
- b) Program Peningkatan Sistem Pengawasan Interna;l dan
- c) Program Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat.

2) Bagian Humas :

- a) Program Peningkatan Disiplin Aparatur;
- b) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur; dan
- c) Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah.

3) Bagian Umum :

- a) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
- b) Program Peningkatan Disiplin Aparatur;
- c) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan;
- d) Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi; dan
- e) Program Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

4) Bagian Tata Pemerintahan :

- a) Program Penataan Daerah Otonomi Baru

5) Bagian Kesra :

- a) Program Peningkatan Pelayanan Keagamaan.

6) Bagian Organisasi :

- a) Program Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah;
- b) Program Peningkatan Kinerja Aparatur Pemerintah; dan

7) Bagian Ekonomi Dan Pembangunan :

- a) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;
- b) Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah; dan
- c) Program Peningkatan Perekonomian dan Pembangunan Daerah.

2. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah :

- 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
- 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
- 3) Program Peningkatan Disiplin Aparatur;



PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR

- 4) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur; dan
- 5) Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah.

3. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah :

- 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
- 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
- 3) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;
- 4) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan; dan
- 5) Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah.

4. Inspektorat Daerah :

- 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
- 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
- 3) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;
- 4) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan;
- 5) Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa; dan
- 6) Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH.

5. Badan Kepegawaian Daerah :

- 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
- 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
- 3) Program Pendidikan Kedinasan; dan
- 4) Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur.

6. Kecamatan Bula :

- 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
- 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
- 3) Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa;
- 4) Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan; dan
- 5) Program Perencanaan Pembangunan Daerah.

7. Kecamatan Seram Timur :

- 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
- 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
- 3) Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa;



PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR

- 4) Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan; dan
- 5) Program Perencanaan Pembangunan Daerah.

8. Kecamatan Pulau Gorom :

- 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
- 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
- 3) Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa;
- 4) Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan; dan
- 5) Program Perencanaan Pembangunan Daerah.

9. Kecamatan Werinama :

- 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
- 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
- 3) Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa;
- 4) Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan; dan
- 5) Program Perencanaan Pembangunan Daerah.

10. kecamatan Tutuk Tolu.

- 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
- 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
- 3) Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa;
- 4) Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan; dan
- 5) Program Perencanaan Pembangunan Daerah.

11. Kecamatan Wakate :

- 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
- 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
- 3) Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa;
- 4) Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan; dan
- 5) Program Perencanaan Pembangunan Daerah.

12. Kecamatan Siwalalat :

- 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
- 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
- 3) Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa;
- 4) Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan; dan
- 5) Program Perencanaan Pembangunan Daerah.

13. Kecamatan Kilmuri :



PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR

- 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
- 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
- 3) Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa;
- 4) Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan; dan
- 5) Program Perencanaan Pembangunan Daerah.

14. Kecamatan Bula Barat :

- 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
- 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
- 3) Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa;
- 4) Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan; dan
- 5) Program Perencanaan Pembangunan Daerah.

15. Kecamatan Gorom Timur :

- 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
- 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
- 3) Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa;
- 4) Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan; dan
- 5) Program Perencanaan Pembangunan Daerah.

16. Kecamatan Pulau Panjang :

- 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
- 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
- 3) Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa;
- 4) Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan; dan
- 5) Program Perencanaan Pembangunan Daerah.

17. Kecamatan Pulau Teor :

- 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
- 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
- 3) Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa;
- 4) Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan; dan
- 5) Program Perencanaan Pembangunan Daerah.

18. Kecamatan Teluk Waru :

- 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
- 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
- 3) Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa;



PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR

- 4) Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan; dan
- 5) Program Perencanaan Pembangunan Daerah.

19. Kecamatan Kian Darat :

- 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
- 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
- 3) Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa;
- 4) Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan; dan
- 5) Program Perencanaan Pembangunan Daerah.

20. Kecamatan Lian Fituh :

- 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
- 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
- 3) Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa;
- 4) Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan; dan
- 5) Program Perencanaan Pembangunan Daerah.

t. Urusan Ketahanan Pangan :

- 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
- 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur; dan
- 3) Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan).

u. Urusan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa Dan KB:

- 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
- 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
- 3) Program Peningkatan Disiplin Aparatur;
- 4) Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan;
- 5) Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa; dan
- 6) Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa..

v. Urusan Komunikasi Dan Informatika :

- 1) Program Kerjasama Informasi dengan Mas Media.

w. Urusan Statistik :

- 1) Program pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah;

x. Urusan Kearsipan :

- 1) Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah.

y. Urusan Perpustakaan :

- 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;



PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR

- 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
 - 3) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur; dan
 - 4) Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan.
3. Program-program yang terkait dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang bersifat pilihan , terdiri dari :

a. Urusan Kelautan Dan Perikanan

- 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
- 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
- 3) Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir;
- 4) Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan;
- 5) Program Pengembangan Budidaya Perikanan;
- 6) Program Pengembangan Perikanan Tangkap;
- 7) Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan; dan
- 8) Program Pengembangan Laut Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

b. Urusan Pertanian :

- 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
- 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
- 3) Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan;
- 4) Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan;
- 5) Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan;
- 6) Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak;
- 7) Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan;
- 8) Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya;
- 9) Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Pertanian;
- 10) Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan);
- 11) Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Peternakan;
- 12) Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan; dan
- 13) Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan;

c. Urusan Kehutanan :

- 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
- 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;



PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR

- 3) Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan;
- 4) Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan; dan
- 5) Program Pembinaan dan Penerbitan Industri Hasil Hutan.

d. Urusan Energi Dan Sumberdaya Mineral :

- 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
- 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
- 3) Program Peningkatan Disiplin Aparatur;
- 4) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;
- 5) Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan;
- 6) Program Pengawasan dan Penertiban Kegiatan Rakyat yang Berpotensi Merusak Lingkungan;
- 7) Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan; dan
- 8) Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Geologi.

e. Urusan Pariwisata :

- 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
- 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
- 3) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;
- 4) Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata;
- 5) Program Pengembangan Destinasi Pariwisata; dan
- 6) Program Pengembangan Kemitraan.

f. Urusan Perdagangan :

- 1) Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan; dan
- 2) Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri.

g. Urusan Perindustrian :

- 1) Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah.

h. Urusan Transmigrasi :

- 1) Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi.



PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR

BAB VIII

INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN

Mengacu pada arsitektur perencanaan pembangunan yang memisahkan antara aspek strategis dan operasional, maka program prioritas dipisahkan pula menjadi 2 (dua), yaitu program prioritas untuk perencanaan strategis dan program prioritas untuk perencanaan operasional. Suatu program prioritas yang dimaksudkan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah pada dasarnya adalah perencanaan operasional. Suatu urusan menjadi strategis tergantung tujuan dan sasaran pembangunannya dan bagaimana strategi pencapaiannya. Suatu urusan pemerintahan daerah dapat menjadi strategis di satu tahun atau periode, dan sebaliknya menjadi operasional pada periode berikutnya.

Suatu program prioritas, baik strategis maupun operasional, kinerjanya merupakan tanggung jawab Kepala Perangkat Daerah. Namun, bagi program prioritas yang dikategorikan strategis merupakan tanggung jawab bersama Kepala Perangkat Daerah dengan kepala daerah pada tingkat kebijakan. Berbeda dengan penyelenggaraan aspek strategis, program prioritas bagi penyelenggaraan urusan pemerintahan dilakukan agar setiap urusan (wajib) dapat diselenggarakan setiap tahun, tidak langsung dipengaruhi oleh visi dan misi kepala daerah terpilih. Artinya, suatu prioritas pada beberapa urusan untuk mendukung visi dan misi serta program kepala daerah terpilih, tidak berarti bahwa urusan lain ditinggalkan.

Indikasi rencana program prioritas Kabupaten Seram Bagian Timur berisi program-program prioritas untuk mencapai visi dan misi Bupati, pemenuhan Standar Pelayanan Minimum (SPM) dan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah. Program prioritas merupakan bentuk instrumen kebijakan yang terdiri dari satu atau lebih kegiatan pembangunan daerah. Kegiatan ini mendapat prioritas dalam pendanaan untuk melaksanakan kegiatan sesuai perencanaan masing-masing Perangkat Daerah, sehingga pencapaian sasaran dan tujuan pembangunan daerah dapat terwujud. Keseluruhan rangkaian perencanaan pembangunan daerah bermuara pada penentuan program prioritas yang selanjutnya diterjemahkan oleh tiap-tiap Perangkat Daerah ke dalam kegiatan prioritas. Perencanaan program prioritas dalam dokumen RPJMD harus dirumuskan dengan



PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR

seksama mengingat pentingnya esensi program prioritas bagi rujukan utama pelaksanaan perencanaan kegiatan tiap tahun yang dituangkan kedalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Adapun pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program tahunan dimana program-program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan atau pagu indikatifnya kemudian dijadikan sebagai acuan bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah, termasuk penjabaran kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaannya. Pagu indikatif merupakan rancangan maksimal atas rencana belanja atau anggaran yang akan dituangkan dalam APBD. Pagu indikatif dialokasikan ke setiap program prioritas masing-masing urusan untuk mencapai target setiap indikator yang telah ditetapkan. Dengan demikian, pengelompokan pagu pada program masing-masing Perangkat Daerah dapat dilakukan dimana masing-masing pagu menjadi batas maksimal bagi Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan kegiatan prioritas selama 5 (lima) tahun ke depan.

Mengacu pada hubungan klasifikasi belanja menurut urusan pemerintah daerah dan satuan kerja perangkat daerah di atas, maka program pembangunan yang menjadi prioritas dalam 5 (lima) tahun disusun berdasarkan program prioritas dan beserta pagu indikatif pelaksanaannya. Rencana program prioritas dan kebutuhan pendanaan RPJMD Kabupaten Seram Bagian Timur tahun 2016-2021 selengkapnya dapat dilihat pada tabel 8.1 dibawah ini.



PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR

Tabel 8.1
Indikasi Rencana Program Prioritas Yang Disertai Pagu Pendanaan Kabupaten Seram Bagian Timur 2016-2021

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kerja Program (Out Come)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2016)	Target Kerja												PD Penanggung jawab			
				Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD					
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1			URUSAN WAJIB				500,335,892,106		558,544,977,100		623,121,408,627		695,992,395,893		776,956,439,933				
1	1		URUSAN PENDIDIKAN				42,492,015,316		47,433,856,700		52,590,391,903		59,108,522,480		65,982,843,646				Dinas Pendidikan
1	1	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan peyananan adm perkantoran.	12 bln	12 bln	4,156,319,790	12 bln	4,639,699,782	12 bln	5,179,296,866	12 bln	5,781,649,092	12 bln	6,454,054,881	60 bln			
1	1	2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah sarana/presarana aparatur.	paket	paket	793,482,785	paket	885,764,832	paket	988,779,282	paket	1,103,774,313	paket	1,232,143,265	paket			
1	1	3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Kinerja SDM aparatur.	Orang	Orang	2,279,511,391	orang	2,544,618,566	orang	2,480,557,706	orang	3,170,914,566	orang	3,539,691,930	orang			
1	1	4	Program Pendidikan Non Formal	Kualitas sarana prasarana pembelajaran PAUD, Paket A, Paket B dan Paket C meningkat.		Orang	3.450.129.200	orang	3.842.063.877	orang	4.278.522.334	orang	4.764.562.471	orang	5.305.816.767				
1	1	5	Program Peningkatan Mutu, Relevansi dan Daya Saing	Kualitas SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MAN pada tahun 2021 mencapai 75% .	Guru		6,787,001,859		7,576,330,175		8,457,457,374		9,441,059,667		10,539,054,906				
1	1	6	Program Pendidikan Anak Usia ini	APS PAUD pada tahun 2021 mencapai 100%..			1,442,775,331		1,610,570,102		1,797,879,404		2,006,972,779		2,240,383,713				
1	1	7	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	APK SD, MI pada tahun 2021 mencapai 99,85% dan APK SMP sederajat pada tahun 2021 mencapai 93,36%.			19,722,622,071		22,016,363,018		24,576,866,037		27,435,155,557		30,625,864,149				
1	1	9	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah guru SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MAN dengankualifikasi S1/D4 tahun 2021 mencapai 65% .			1,580,077,998		1,763,841,069		1,968,975,786		2,197,967,669		2,453,591,309				
1	1	10	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	jumlah SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MAN yang terakreditasi A pada tahun 2021meningkat.			2,909,389,806		3,247,751,840		3,625,465,379		4,047,107,003		4,517,785,547				
1	1	11	UPTD Diknas Kecamatan Bula				123,406,965		137,759,195		153,780,589		171,665,272		191,629,943				



PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR

		a	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan adm perkantoran.			120,058,065	134,020,818	149,607,439	167,006,784	186,429,673					
		b	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah sarana/prasarana aparatur.			3,348,900	3,738,377	4,173,150	4,658,488	5,200,270					
1	1	12	UPTD Diknas Kecamatan Seram Timur				279,744,780	312,299,098	348,597,157	389,139,006	434,395,873					
		a	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan adm perkantoran.	12 bln	12 bln	268,581,780	12 bln	299,817,841	12 bln	334,686,656	12 bln	373,610,714	12 bln	417,061,640	60 bln
		b	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah sarana/prasarana Aparatur.	paket	paket	11,163,000	paket	12,481,257	paket	13,910,501	paket	15,528,292	paket	17,334,233	paket
1	1	13	UPTD Diknas Kecamatan Pulau Gorom				279,744,780	312,279,098	348,597,157	389,139,006	434,395,873					
		a	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan adm perkantoran.	12 bln	12 bln	268,581,780	12 bln	299,817,841	12 bln	334,686,656	12 bln	373,610,714	12 bln	417,061,640	60 bln
		b	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah sarana/prasarana Aparatur.	paket	paket	11,163,000	paket	12,461,257	paket	13,910,501	paket	15,528,292	paket	17,334,233	paket
1	1	14	UPTD Diknas Kecamatan Werinama				195,352,500	218,071,996	243,433,769	271,745,116	303,349,073					
		a	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan adm perkantoran.	12 bln	12 bln	184,189,500	12 bln	205,610,739	12 bln	229,523,268	12 bln	256,216,824	12 bln	286,014,840	60 bln
		b	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah sarana/prasarana aparatur.	paket	paket	11,163,000	paket	12,461,257	paket	13,910,501	paket	15,528,292	paket	17,334,233	paket
1	1	15	UPTD Diknas Kecamatan Tutuk Tolu				264,563,100	295,331,789	329,678,875	368,020,528	410,821,317					
		a	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan adm perkantoran.	12 bln	12 bln	253,400,100	12 bln	282,870,532	12 bln	315,768,374	12 bln	352,492,236	12 bln	393,487,084	60 bln
		b	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah sarana/prasarana aparatur.	paket	paket	11,163,000	paket	12,461,257	paket	13,910,501	paket	15,528,292	paket	17,334,233	paket
1	1	16	UPTD Diknas Kecamatan Wakate				279,075,000	311,531,423	347,762,527	388,207,308	433,355,819					
		a	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan adm perkantoran.	12 bln	12 bln	267,912,000	12 bln	299,070,166	12 bln	333,852,026	12 bln	372,679,016	12 bln	416,021,586	60 bln
		b	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah sarana/prasarana aparatur.	paket	paket	11,163,000	paket	12,461,257	paket	13,910,501	paket	15,528,292	paket	17,334,233	paket
1	1	17	UPTD Diknas Kecamatan Siwalalat				193,343,160	215,828,970	240,929,879	268,950,024	300,228,911					
		a	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan adm perkantoran.	12 bln	12 bln	182,180,160	12 bln	203,367,713	12 bln	227,019,378	12 bln	253,421,732	12 bln	282,894,679	60 bln
		b	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah sarana/prasarana aparatur.	paket	paket	11,163,000	paket	12,461,257	paket	13,910,501	paket	15,528,292	paket	17,334,232	paket
1	1	18	UPTD Diknas Kecamatan Kilmuri				183,240,645	204,551,533	228,340,875	254,896,919	284,541,431					
		a	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan adm perkantoran.	12 bln	12 bln	179,891,745	12 bln	200,813,156	12 bln	224,167,725	12 bln	250,238,431	12 bln	279,341,161	60 bln



PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR

1	1	19	b Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur UPTD Diknas Kecamatan Bula Barat	Jumlah sarana/prasarana aparaturn.	paket	paket	3,348,900	paket	3,738,377	paket	4,173,150	paket	4,658,488	paket	5,200,270	paket		
							111,630,000		124,612,569		139,105,011		155,282,924		173,342,328			
		a	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan adm perkantoran	12 bln	12 bln	111,630,000	12 bln	124,612,569	12 bln	139,105,011	12 bln	155,282,924	12 bln	173,342,328	60 bln		
1	1	20	a UPTD Diknas Kecamatan Gorom Timur	Cakupan pelayanan adm perkantoran.	12 bln	12 bln	194,347,830	12 bln	216,950,483	12 bln	242,181,824	12 bln	270,347,570	12 bln	301,788,992	60 bln		
		a	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan adm perkantoran.	12 bln	12 bln	194,347,830	12 bln	216,950,483	12 bln	242,181,824	12 bln	270,347,570	12 bln	301,788,992	60 bln		
1	1	21	a UPTD Diknas Kecamatan Pulau Teor	Cakupan pelayanan adm perkantoran.	12 bln	12 bln	195,352,500	12 bln	218,071,996	12 bln	243,433,769	12 bln	271,745,116	12 bln	303,349,073	60 bln		
		a	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan adm perkantoran.	12 bln	12 bln	195,352,500	12 bln	218,071,996	12 bln	243,433,769	12 bln	271,745,116	12 bln	303,349,073	60 bln		
1	1	22	a UPTD Diknas Kecamatan Teluk Waru	Cakupan pelayanan adm perkantoran.	12 bln	12 bln	237,325,380	12 bln	264,926,322	12 bln	295,737,253	12 bln	330,131,495	12 bln	368,525,788	60 bln		
		a	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan adm perkantoran.	12 bln	12 bln	237,325,380	12 bln	264,926,322	12 bln	295,737,253	12 bln	330,131,495	12 bln	368,525,788	60 bln		
1	1	23	a UPTD Diknas Kecamatan Kian Darat	Cakupan pelayanan adm perkantoran.	12 bln	12 bln	139,537,500	12 bln	155,765,711	12 bln	173,881,263	12 bln	194,103,654	12 bln	216,677,909	60 bln		
		a	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan adm perkantoran.	12 bln	12 bln	139,537,500	12 bln	155,765,711	12 bln	173,881,263	12 bln	194,103,654	12 bln	216,677,909	60 bln		
1	1	24	a UPTD Diknas Kecamatan Lian Fituh	Cakupan pelayanan adm perkantoran.	12 bln	12 bln	144,170,145	12 bln	160,937,133	12 bln	179,654,121	12 bln	200,547,896	12 bln	223,871,616	60 bln		
		a	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan adm perkantoran.	12 bln	12 bln	144,170,145	12 bln	160,937,133	12 bln	179,654,121	12 bln	200,547,896	12 bln	223,871,616	60 bln		
1	2		URUSAN KESEHATAN				61,660,308,165		68,831,513,535		76,836,618,530		85,772,717,634		95,768,313,219			
1	2	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan adm perkantoran.	12 bln	12 bln	2,147,613,848	12 bln	2,397,381,339	12 bln	2,676,196,789	12 bln	2,987,438,475	12 bln	3,334,877,570	60 bln		DINAS KESEHATAN
1	2	2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah sarana/prasarana aparaturn.	paket	paket	8,750,206,854	paket	9,767,855,911	paket	10,903,857,554	paket	12,171,976,187	paket	13,587,677,018	paket		
1	2	3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Peningkatan kapasitas aparaturn.	orang	orang	655,882,065	orang	732,161,149	orang	817,311,491	orang	912,364,817	orang	1,018,472,845	orang		
1	2	4	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Jumlah persediaan obat dan ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan bagi pasien Umum, RS dan Jamkesda.	paket	paket	9,248,936,205	paket	10,324,587,486	paket	11,525,337,010	paket	12,865,733,705	paket	14,362,018,534	paket		
1	2	5	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan kunjungan ibu dan bayike RS/Puskesmas/Pustu dan jaringannya.	orang	orang	11,996,967,637	orang	13,392,214,973	orang	14,949,729,574	orang	16,688,383,490	orang	18,629,242,081	orang		
1	2	6	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Cakupan rumah tangga ber-pola hidup bersih dan sehat	orang	orang	243,241,770	orang	271,530,788	orang	303,109,818	orang	338,361,490	orang	377,712,932	orang		



PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR

1	2	7	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Cakupan sarana air bersih (SAB), rumah sehat, akses jamban kelu arga dan pembuangan air limbah keluarga.	orang	orang	135,630,450	orang	151,404,271	orang	169,012,588	orang	188,668,752	orang	210,610,928	orang
1	2	8	Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Menular	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit menular.	orang	orang	485,143,980	orang	541,566,225	orang	604,550,377	orang	674,859,586	orang	753,345,755	orang
1	2	9	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin.	orang	orang	258,590,895	orang	288,665,016	orang	322,236,757	orang	359,712,892	orang	401,547,502	orang
1	2	10	Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskesmas pembantu dan jaringannya	Peningkatan fasilitas pelayanan kesehatan Puskesmas/Pustu dan jaringannya	orang	orang	16,662,561,347	orang	18,600,417,232	orang	20,763,645,756	orang	23,178,457,758	orang	25,874,112,395	orang
1	2	11	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata	Peningkatan fasilitas pelayanan kesehatan Rumah Sakit/RS Jiwa/RS Paru-paru/RS mata.	paket	paket	7,068,235,225	paket	7,890,270,981	paket	8,807,909,496	paket	9,832,269,371	paket	10,975,762,299	paket
1	2	12	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia	Angka Harapan Hidup pada tahun 2021 mencapai 72,03 tahun.	Orang	orang	1,562,820,000	orang	1,744,575,966	orang	1,947,470,151	orang	2,173,960,929	orang	2,426,792,585	orang
1	2	13	Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak	Angka kematian ibu (per 1000 KH) pada tahun 2021 sebesar 1,13% dan Angka Kematian Bayi (per 1000 KH) sebesar 3%.	orang	orang	1,331,961,569	orang	1,486,868,700	orang	1,659,791,529	orang	1,852,825,284	orang	2,088,308,865	orang
1	2	14	Puskesmas Geser				139,537,600		155,765,732		173,881,263		194,103,655		216,806,841	
		a	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan adm perkantoran.	12 bln	12 bln	115,871,940	12 bln	129,347,847	12 bln	144,391,001	12 bln	161,183,675	12 bln	179,929,336	60 bln
		b	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah sarana/prasarana aparatur.	paket	paket	23,665,660	paket	26,417,885	paket	29,490,262	paket	32,919,980	paket	36,877,505	paket
1	2	15	Puskesmas Kataloka				134,414,150		150,158,146		167,621,538		187,115,923		208,877,505	
		a	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan adm perkantoran	12 bln	12 bln	115,871,940	12 bln	129,347,847	12 bln	144,391,001	12 bln	161,183,675	12 bln	179,929,336	60 bln
		b	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah sarana/prasarana apartur.	Paket	paket	18,542,210	paket	20,810,299	paket	23,230,537	paket	25,932,248	paket	28,948,169	paket
1	2	16	Puskesmas Werinama				168,784,580		188,414,204		210,326,776		234,787,780		262,093,599	
		a	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan adm perkantoran.	12 bln	12 bln	139,537,500	12 bln	155,765,711	12 bln	173,881,263	12 bln	194,103,654	12 bln	216,677,909	60 bln
		b	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah sarana/prasarana aparatur.	paket	paket	29,247,080	paket	32,648,493	paket	36,445,513	paket	40,684,126	paket	45,415,690	paket
1	2	17	Puskesmas Bula				139,537,490		155,765,711		173,881,263		194,103,654		216,677,909	



PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR

1	2	a	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan adm perkantoran.	12 bln	12 bln	103,592,640	12 bln	115,640,464	12 bln	129,089,450	12 bln	144,102,553	12 bln	160,861,680	60 bln		
		b	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah sarana/prasarana aparatur.	Paket	paket	35,944,850	paket	40,125,247	paket	44,791,813	paket	50,001,101	paket	55,816,229	paket		
		18	Puskesmas Banggoi				106,048,500		118,381,941		132,149,760		147,518,778		164,675,212			
1	2	a	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan adm perkantoran.	12 bln	12 bln	83,722,500	12 bln	93,459,427	12 bln	104,328,758	12 bln	116,462,193	12 bln	130,006,746	60 bln		
		b	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah sarana/prasarana apartur.	paket	paket	22,326,000	paket	24,922,514	paket	27,821,002	paket	31,056,585	paket	34,668,466	paket		
		19	Puskesmas Kilga				106,048,500		118,381,941		132,149,760		147,518,777		164,675,211			
1	2	a	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan adm perkantoran.	12 bln	12 bln	74,792,100	12 bln	83,490,422	12 bln	93,200,357	12 bln	104,039,558	12 bln	116,139,359	60 bln		
		b	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah sarana/prasarana aparatur	paket	paket	31,256,400	paket	34,891,519	paket	38,949,403	paket	43,479,219	paket	48,535,852	paket		
		20	Puskesmas Amarsekaru				212,097,000		236,763,882		264,299,520		295,037,554		329,350,422			
1	2	a	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan adm perkantoran.	12 bln	12 bln	106,048,500	12 bln	118,381,941	12 bln	132,149,760	12 bln	147,518,777	12 bln	164,675,211	60 bln		
		a	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan adm perkantoran.	12 bln	12 bln	106,048,500	12 bln	118,381,941	12 bln	132,149,760	12 bln	147,518,777	12 bln	164,675,211	60 bln		
		21	Puskesmas Tamher Timur				106,048,500		118,381,941		132,149,760		147,518,777		164,675,211			
1	2	22	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD)				24,470,138,806		27,316,015,950		30,492,868,604		34,039,189,223		37,997,946,930			
		a	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		12 bln	12 bln	1,357,203,010	12 bln	1,515,045,720	12 bln	1,691,245,537	12 bln	1,887,937,393	12 bln	2,107,504,512	60 bln		RSUD
		b	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah sarana/prasarana aparatur.	orang	orang	496,957,671	orang	554,753,848	orang	619,271,721	orang	691,293,022	orang	771,690,401	orang		
		c	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	peningkatan kinerja aparatur	1 kegiatan	1 kegiatan	55,815,000	1 kegiatan	62,306,285	1 kegiatan	69,552,505	1 kegiatan	77,641,462	1 kegiatan	86,671,164	5 kegiatan		
		d	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Peningkatan kapasitas aparatur.	15 orang	25 orang	223,260,000	37 orang	249,225,138	50 orang	278,210,022	59 orang	310,565,847	71 orang	346,684,655	242 orang		
		e	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata	Jumlah sarana/prasarna di RS/RS jiwa/RS paru-paru/RS mata.	8 paket	9 paket	19,204,375,554	5 paket	21,437,844,431	5 paket	23,931,065,739	5 paket	26,714,248,684	4 paket	29,821,115,806	28 paket		
		f	Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata	Cakupan pelayanan kesehatan di RS/RS jiwa/RS paru-paru/RS mata.	2 paket	3 paket	341,777,571	4 paket	381,526,303	2 paket	425,897,811	3 paket	475,429,727	2 paket	530,722,204	14 paket		



PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR

		g	Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan	Cakupan pelayanan kesehatan.	orang	orang	2,790,750,000	orang	3,115,314,225	orang	3,477,625,269	orang	3,882,073,088	orang	4,333,558,188	orang	
1	3		URUSAN PEKERJAAN UMUM				181,641,165,263		202,786,032,782		226,347,722,392		252,671,962,510		282,057,711,748		
1	3	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	cakupan pelayanan adm perkantoran.	12 bln	12 bln	2,305,159,500	12 bln	2,573,249,550	12 bln	2,872,518,472	12 bln	3,206,592,371	12 bln	3,579,519,064	60 bln	DINAS PEKERJAAN UMUM
1	3	2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah sarana/prasarana aparatur.	paket	paket	2,093,062,500	paket	2,336,485,669	paket	2,608,218,952	paket	2,911,554,816	paket	3,250,168,641	paket	
1	3	3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Peningkatan kinerja aparatur.	orang	orang	435,357,000	orang	485,989,019	orang	542,509,542	orang	605,603,402	orang	676,035,077	orang	
1	3	4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Peningkatan kapasitas aparatur.	orang	orang	2,344,230,000	orang	2,616,863,949	orang	2,921,205,226	orang	3,260,941,394	orang	3,640,188,878	orang	
1	3	5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah.			530,242,500		591,909,703		660,748,801		737,593,887		823,376,056		
1	3	6	Program Peningkatan Jalan & Jembatan	Persentase jalan dalam kondisi baik pada tahun 2021 mencapai 90%.			7,233,171,899		8,074,389,790		9,013,441,323		10,061,704,549		11,231,880,788		
1	3	7	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Persentase jembatan dalam kondisi baik pada tahun 2021 mencapai 84,05%.			86,232,934,869		96,261,825,194		107,457,075,464		119,954,333,341		133,905,022,308		
1	3	8	Program Pemeliharaan dan Peningkatan Infrastruktur	Tingkat ketersediaan infrastruktur daerah dalam kondisi baik.			38,705,059,102		43,206,457,475		48,231,368,479		53,840,676,634		60,102,347,326		
1	3	9	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya	Panjang irigasi, rawa dan jaringan pengairan dalam kondisi baik pada tahun 2021 mencapai 66%			13,070,521,161		14,590,622,772		16,287,512,200		18,181,749,869		20,296,287,379		
1	3	10	Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	Pengembangan infrastruktur di kawasan strategis dan cepat tumbuh.			23,440,123,215		26,166,209,545		29,209,339,715		32,606,385,924		36,398,508,607		
1	3	11	Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan	Persentase lingkungan kumuh di pedesaan pada tahun 2021 mencapai 41,44%.			5,251,303,517		5,882,030,116		6,543,784,218		7,304,826,323		8,154,377,624		
1	4		URUSAN TATA RUANG				2,509,574,905		2,801,438,467		3,127,245,760		3,490,944,442		3,896,941,281		BAPPEDA DAN BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAN TATA KOTA
1	4	1	Program Penataan Ruang	Persentase RDTR yang tersusun.	doc	doc	1,093,974,000	doc	1,221,203,176	doc	1,363,229,106	doc	1,521,772,651	doc	1,698,754,810		
1	4	2	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Ketaatan pemanfaatan ruang.			1,194,316,756		1,333,215,795		1,488,268,791		1,661,354,452		1,854,569,975		
1	4	3	Program Perencanaan Ruang	Perda tentang RTRW.	perda	perda	221,284,149	perda	247,019,496	perda	275,747,863	perda	307,817,339	perda	343,616,496		
1	5		URUSAN PERUMAHAN				7,578,091,854		8,459,423,937		9,443,254,941		10,541,505,490		11,767,482,578		



PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR

1	5	1	Program Lingkungan Sehat Perumahan	Persentase Lingkungan pemukiman kumuh pada tahun 2021 turun menjadi 41,44%.			7,354,831,854		8,210,198,799		9,165,044,919		10,230,939,643		11,420,797,923			
1	5	2	Program Pengembangan Perumahan	Persentase rumah tangga pengguna air bersih pada tahun 2021 mencapai 85%,			223,260,000		249,225,138		278,210,022		310,565,847		346,684,655			
1	6		URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN				5,805,596,109		6,480,786,937		7,234,502,457		8,075,875,091		9,015,099,365			
1	6	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan adm perkantoran.	12 bln	12 bln	1,129,249,080	12 bln	1,260,580,748	12 bln	1,407,186,289	12 bln	1,570,842,054	12 bln	1,753,530,985	60 bln		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
1	6	2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah sarana/prasarana aparatur.	paket	paket	291,354,300	paket	325,238,805	paket	363,064,078	paket	405,288,430	paket	452,423,475	paket		
1	6	3	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah	Peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan.	org	org	167,445,000	org	186,918,854	org	208,657,516	org	232,924,385	org	260,013,491	org		
1	6	4	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Ketepatan waktu penerbitan Perda tentang RPJPD, RPJMD dan Perkada tentang RKPD.	doc	doc	3,420,622,275	doc	3,818,440,646	doc	4,262,525,293	doc	4,758,256,984	doc	5,311,642,271	dok		
1	6	5	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Dokumen perencanaan pembangunan ekonomi.	doc	doc	519,079,500	doc	579,448,446	doc	646,838,300	doc	722,065,594	doc	806,041,823	doc		
1	6	6	Program Perencanaan Sosial dan Budaya	Dokumen perencanaan bidang sosial dan budaya	doc	doc	277,845,954	doc	310,159,438	doc	346,230,981	doc	386,497,644	doc	431,447,320	doc		
1	7		URUSAN PERHUBUNGAN				17,158,008,012		19,153,484,344		21,381,034,573		23,867,648,892		26,643,456,459			
1	7	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan adm perkantoran	12 bln	12 bln	690,492,740	12 bln	770,797,046	12 bln	860,440,742	12 bln	960,510,000	12 bln	1,072,217,313	60 bln		DINAS PERHUBUNGAN, INFORMASI DAN KOMUNIKASI
1	7	2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah sarana/prasarana aparatur.	orang	orang	690,492,740	orang	770,797,046	orang	860,440,742	orang	960,510,000	orang	1,072,217,313	orang		
1	7	3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Peningkatan kinerja aparatur.	orang	orang	55,816,786	orang	62,308,278	orang	69,554,731	orang	77,643,946	orang	86,673,937	orang		
1	7	4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Peningkatan kapasitas aparatur.	orang	orang	223,260,000	orang	249,225,138	orang	278,210,022	orang	310,565,847	orang	346,684,655	orang		
1	7	5	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	Cakupan pelayanan angkutan umum.			263,625,408		294,285,043		328,510,393		366,716,152		409,365,241			
1	7	6	Program Fasilitasi Peningkatan Jaringan Komunikasidan Informasi	SKPD yang terkoneksi dalam jaringan Sever Pemerintah Daerah pada tahun 2021 telah mencapai 44 SKPD.			156,282,000		174,457,597		194,747,015		217,396,093		242,679,259			
1	7	7	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	Panjang median jalan dalam kondisi baik pada tahun 2021 mencapai 64.805 meter			14,525,056,807		16,214,320,913		18,100,046,436		20,205,081,836		22,554,932,853			
1	7	8	Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	Persentase pemasangan rambu-rambu lalu lintas.			552,981,531		617,293,283		689,084,492		769,225,018		858,685,888			



PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR

1	12	1	Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	Persentase partisipasi angkatan kerja perempuan.			234,757,890		262,060,233		292,537,838		326,559,988		364,538,915		
1	12	2	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Persentase penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan.			124,188,375		138,631,483		154,754,324		172,752,252		192,843,339		
1	12	3	Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Jender dalam Pembangunan	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan pada tahun 2021 mencapai 32,61% dan dalam embaga swasta pada tahun 2021 menca pai 41%			446,520,000		498,450,276		556,420,043		621,131,694		693,369,310		
1	13		URUSAN SOSIAL				7,157,593,421		7,990,021,536		8,919,261,040		9,956,571,100		11,114,520,319		
1	13	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan adm perkantoran.	12 bln	12 bln	832,759,800	12 bln	929,609,765	12 bln	1,037,723,380	12 bln	1,158,410,610	12 bln	1,293,133,763	60 bln	DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
1	13	2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah sarana/prasarana aparatur.	paket	paket	351,076,350	paket	391,906,530	paket	437,485,259	paket	488,364,794	paket	545,161,620	paket	
1	13	3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Peningkatan kapasitas aparatur.	orang	orang	116,764,980	orang	130,344,747	orang	145,503,841	orang	162,425,938	orang	181,316,075	orang	
1	13	4	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Persentase penanganan fakir miskin, KAT dan PMKS pada tahun 2021 mencapai 24%. Lainnya	orang	orang	3,233,307,135	orang	3,609,340,755	orang	4,029,107,085	orang	4,497,692,239	orang	5,020,773,846	orang	
1	13	5	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Jumlah PMKS yang tertangani pada tahun 2021 mencapai 124 orang .	Orang	Orang	2,201,332,437	Orang	2,457,347,399	Orang	2,743,136,902	Orang	3,062,163,724	Orang	3,418,293,365	Orang	
1	13	6	Program Perbaikan Perumahan Akibat Bencana Alam/Sosial	Cakupan rumahbagi korban bencana alam dan PMKS.	unit	unit	422,352,719	unit	471,472,340	unit	526,304,573	unit	587,513,795	unit	655,841,650	unit	
1	14		URUSAN KETENAGAKERJAAN				758,305,102		846,495,985		944,943,468		1,054,840,394		1,177,518,331		DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
1	14	1	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Persentase pencari kerja yang ditempatkan pada tahun 2021 mencapai 79%.	orang	orang	558,652,335	orang	623,623,602	orang	696,151,026	orang	777,113,391	orang	867,491,678	orang	
1	14	2	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Persentase keselamatan dan perlindungan tenaga kerja meningkat.	orang	orang	199,652,767	orang	222,872,383	orang	248,792,442	orang	277,727,003	orang	310,026,653	orang	
1	15		URUSAN KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH				2,057,462,019		2,296,744,851		2,563,856,277		2,862,032,763		3,194,887,174		DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
1	15	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan adm perkantoran.	12 bln	12 bln	844,425,135	12 bln	942,631,778	12 bln	1,052,259,854	12 bln	1,174,637,675	12 bln	1,311,248,037	60 bln	



PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR

1	15	2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah sarana/prasarana aparatur.	paket	paket	466,418,606	paket	520,663,089	paket	581,216,207	paket	648,811,652	paket	724,268,447	paket		
1	15	3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Peningkatan kapasitas aparatur.	orang	orang	502,335,000	orang	560,756,561	orang	625,972,548	orang	698,773,156	orang	780,040,474	orang		
1	15	4	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Persentase koperasi aktif pada tahun 2021 mencapai 35%.	2 paket	3 paket	244,283,278	3 paket	272,693,423	3 paket	304,407,668	4 paket	339,810,280	4 paket	379,330,216	17 paket		
1	15	5	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan	Persentase usaha kecil dan menengah pada tahun 2021 mencapai 49,30%.	paket	4 paket	967.250.000.	5 paket	1.077.129.600	5 paket	1.199.491.523	5 paket	1.335.753.760	6 paket	1.487.495.387	25 paket		
1	16		URUSAN PENANAMAN MODAL				2,154,788,310		2,405,390,190		2,685,137,068		2,997,418,508		3,346,018,281			
1	16	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan adm perkantoran.	12 bln	12 bln	518,616,236	12 bln	578,931,304	12 bln	646,261,014	12 bln	721,421,170	12 bln	805,322,452			KANTOR PELAYANAN TERPADU
1	16	2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah sarana/prasarana aparatur.	12 bln	12 bln	255,655,026	12 bln	285,387,706	12 bln	318,578,296	12 bln	355,628,951	12 bln	396,988,599			
1	16	3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Peningkatan kinerja aparatur.	12 bln	12 bln	22,326,000	12 bln	24,922,514	12 bln	27,821,002	12 bln	31,056,585	12 bln	34,668,466			
1	16	4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Peningkatan kapasitas aparatur.	40 HOK	54 hok	217,566,870	58 HOK	242,869,897	68 HOK	271,115,666	78 HOK	302,646,418	78 HOK	337,844,196			
1	16	5	Program Pengembangan Investasi Daerah	Perkembangan nilai realisasi PMDN.	PMDN/PMA		1.544.126.000											
1	16	6	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Perkembangan nilai realisasi PMA.	PMDN/PMA		167,445,000	7 kec	186,918,854	8 kec	208,657,516	10 kec	232,924,385	10 kec	260,013,491			
1	16	7	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Jumlah Investor	15 kec	15 kec	589,825,013	15 kec	658,421,661	15 kec	734,996,101	15 kec	820,476,147	15 kec	915,897,523			
1	16	8	Program Peningkatan Kapasitas Pelayanan Perizinan	Jumlah ijin yang diterbitkan	8 kec	9 kec	383,354,165	9 kec	427,938,254	9 kec	477,707,473	10 kec	533,264,852	12 kec	595,283,554			
1	17		URUSAN KEBUDAYAAN				540,043,614		602,850,687		672,962,221		751,227,727		838,595,512			DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
1	17	1	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Jumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan.			185,305,800		206,856,865		230,914,318		257,769,653		287,748,264			
1	17	2	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya.			354,737,814		395,993,822		442,047,903		493,458,074		550,847,248			
1	18		URUSAN PERTANAHAN				1.898.534.000		2.114.207.462		2.354.381.430		2.621.839.161		2.919.680.090			
1	18	1	Program Pendataan dan Sertifikasi Tanah Masyarakat	Penyelesaian Konflik – konflik Pertanahan.			1.898.534.000		2.114.207.462		2.354.381.430		2.621.839.161		2.919.680.090			



PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR

1	19		URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI				2,622,612,894		2,927,623,774		3,268,105,301		3,648,185,948		4,072,469,975			
1	19	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan adm perkantoran.	12 bln	12 bln	346,053,000	12 bln	386,298,964	12 bln	431,225,533	12 bln	481,377,063	12 bln	537,361,215	60 bln		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
1	19	2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah sarana/prasarana aparatur.	paket	paket	312,564,000	paket	348,915,193	paket	389,494,030	paket	434,792,186	paket	485,358,517	paket		
1	19	3	Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	Rasio Pos Siskamling yang aktif per jumlah desa/kelurahan.			446,520,000		498,450,276		556,420,043		621,131,694		693,369,310			
1	19	4	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Pemahaman wawasan kebangsaan.			922,822,884		1,030,147,185		1,149,953,303		1,283,692,872		1,432,986,353			
1	19	5	Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan	Jumlah pembinaanterhadap LSM, Ormas OKP.			185,696,505		207,293,009		231,401,185		258,313,143		288,354,962			
1	19	6	Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)	Jumlah pembinaan terhadap LSM, Ormas OKP			185,696,505		207,293,009		231,401,185		258,313,143		288,354,962			
1	19	7	Program Pendidikan Politik Masyarakat	Jumlah pembinaan politik daerah..			223,260,000		249,226,138		278,210,022		310,565,847		346,684,656			
1	19	8	KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN LINMAS				1,953,525,000		2,180,719,958		2,434,337,689		2,717,451,162		3,033,490,732			KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN LINMAS
1	19	a	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan adm perkantoran.	12 bln	12 bln	316,605,006	12 bln	353,426,168	12 bln	394,529,632	12 bln	440,413,428	12 bln	491,633,509	60 bln		KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN LINMAS
1	19	b	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah sarana/prasarana aparatur.	paket	paket	132,259,224	paket	147,640,972	paket	164,811,617	paket	183,979,208	paket	205,375,990	paket		
1	19	c	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Rasio jumlah polisi pamong praja dan Linmas per 10.000 penduduk			1,354,964,940		1,512,547,363		1,688,456,621		1,884,824,126		2,104,029,172			
1	19	d	Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	Rasio pos siskamling per jumlah desa.			149,695,830		167,105,455		186,539,819		208,234,400		232,452,061			
1	19	9	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH				5,793,769,334		6,467,584,709		7,219,764,809		8,059,423,458		8,996,734,405			BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	19	a	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan adm perkantoran.	12 bln	12 bln	978,317,506	12 bln	1,092,095,832	12 bln	1,219,106,577	12 bln	1,360,888,672	12 bln	1,519,160,025	60 bln		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	19	b	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah sarana/prasarana aparatur.	paket	paket	652,146,925	paket	727,991,613	paket	812,657,037	paket	907,169,051	paket	1,012,672,811	paket		
1	19	c	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Peningkatan kinerja aparatur.	paket	paket	55,815,000	paket	62,306,285	paket	69,552,505	paket	77,641,462	paket	86,671,164	paket		
1	19	d	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	Tingkat waktu tanggap (renpons time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen	12 bln	12 bln	4,107,489,903	12 bln	4,585,190,979	12 bln	5,118,448,690	12 bln	5,713,724,273	12 bln	6,378,230,405	60 bln		



PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR

1	20		OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADM KEUDA, PERANGKAT DAERAH															
		1	SEKRETARIAT DAERAH															
		a	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan adm peerkantoran.	19,572,434,718	21,848,708,877	24,389,713,720	27,226,237,424	30,392,648,838									
		b	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah sarana/prasarana aparatur.	14,886,519,883	16,617,822,145	18,550,474,861	20,707,895,087	23,116,223,286									
		c	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Cakupan pelayanan dinas kepala/wakil kepala daerah.	4,451,491,835	4,969,200,337	5,547,118,336	6,192,248,198	6,912,406,664									
					234,423,000	261,686,395	292,120,523	326,094,139	364,018,888									
1	20	2	BAGIAN HUKUM															
		a	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase penegakan Perda..	2,176,785,001	2,429,945,096	2,712,547,710	3,028,017,009	3,380,175,387									
		b	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal.	Sosialisasi produk hukum daerah .	1,658,983,664	1,851,923,464	2,067,302,162	2,307,729,404	2,576,118,334									
		c	Program Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat	Penegakan produk hukum daerah.	167,445,000	186,918,854	208,657,516	232,924,385	260,013,491									
					350,356,337	391,102,778	436,588,032	487,363,220	544,043,562									
1	20	3	BAGIAN HUMAS															
		a	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Peningkatan kinerjaaparatur.	852,285,226	951,405,998	1,062,054,516	1,185,571,456	1,323,453,416									
		b	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Peningkatan kapasitas aparatur.	13,663,512	15,252,578	17,026,453	19,006,630	21,217,101									
		c	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Cakupan pelayanan kedinasan KHD/wakil KDH.	169,093,440	188,759,007	210,711,680	235,217,448	262,573,237									
					669,528,274	747,394,413	834,316,383	931,347,378	1,039,663,078									
1	20	4	BAGIAN UMUM															
		a	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah sarana/prasara na aparatur.	21,772,052,870	24,304,142,617	27,130,714,405	30,286,016,490	33,808,280,663									
		b	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya kinerja aparatur.	18,636,991,298	20,804,473,385	23,224,033,640	25,924,988,752	28,940,064,944									
		c	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Kualitas kinerja pengelolaan keuangan daerah.	2,140,884,792	2,389,869,693	2,667,811,539	2,978,078,021	3,324,428,949									
		d	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Kuailita pelayanan kepada perangkat daerah..	185,975,580	207,604,540	231,748,948	258,701,351	288,788,318									
		e	Program Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Penyelenggaraan reformasi birokrasi.	275,279,580	307,294,595	343,032,957	382,927,689	427,462,180									
					532,921,620	594,900,404	664,087,321	741,320,677	827,536,272									



PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR

1	20	10	DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH				10,738,865,388		11,987,795,432		13,381,976,041		14,938,299,854		16,675,624,126			DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
		a	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kualitas pelayanan adm perkantoran.	12 bln	12 bln	1,645,353,641	12 bln	1,836,708,269	12 bln	2,050,317,441	12 bln	2,288,769,359	12 bln	2,554,953,235	60 bln		
		b	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah sarana/prasarana aparatur.	paket	paket	580,476,000	paket	647,985,359	paket	723,346,056	paket	807,471,202	paket	901,380,103	paket		
		c	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya kapasitas aparatur.	orang	orang	132,767,141	orang	148,207,959	orang	165,444,545	orang	184,685,745	orang	206,164,697	orang		
		d	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Kualitas pengelolaan keuangan daerah.	orang	orang	472,741,887	orang	527,721,768	orang	589,095,810	orang	657,607,653	orang	734,087,423	orang		
		e	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Kualitas pengelolaan keuangan daerah.	dokumen	dokumen	7,907,526,719	dokumen	8,827,172,077	dokumen	9,853,772,189	dokumen	10,999,765,895	dokumen	12,279,038,668	dokumen		
1	20	11	INSPEKTORAT DAERAH				5,023,350,000		5,607,565,604		6,259,725,485		6,987,731,558		7,800,404,739			INSPEKTORAT DAERAH
		a	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan adm perkantoran.	12 bln	12 bln	1,235,847,358	12 bln	1,379,576,405	12 bln	1,540,021,141	12 bln	1,719,125,600	12 bln	1,919,059,907	60 bln		
		b	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah sarana/prasarana aparatur.	2 paket	2 paket	276,674,955	2 paket	308,852,252	2 paket	344,771,769	2 paket	384,868,726	2 paket	429,628,959	10 paket		
		c	Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Negara	Peningkatan kinerja aparatur.	orang	10 orang	2.010.250.000	10 orang	2.238.614.400	10 orang	2.492.920.996	10 orang	2.776.116.821	10 orang	3.091.483.692	50 org		
		d	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Peningkatan kapasitas aparatur.	10 org	4 org	165,206,260	4 org	184,419,748	4 org	205,867,765	4 org	229,810,186	4 org	256,537,111	30 org		
		e	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah.	1 dok	3 dok	30,787,554	3 dok	34,368,147	3 dok	38,365,162	3 dok	42,827,030	3 dok	47,807,814	16 dok		
		f	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan desa.	8 dok	15 dok	1,031,394,222	15 dok	1,151,345,370	15 dok	1,285,246,837	15 dok	1,434,721,044	15 dok	1,601,579,101	83 dok		
		g	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Optimalisasi implementasi kebijakan KDH.	dok	130 dok	2,283,439,651	130 dok	2,549,003,682	130 dok	2,845,452,811	130 dok	3,176,378,972	130 dok	3,545,791,847	650 dok		
1	20	12	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH				3,758,949,363		4,196,115,175		4,684,123,368		5,228,886,915		5,837,006,464			BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
		a	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan adm perkantoran.			631,308,172		704,729,312		786,689,331		878,181,300		980,313,785			
		b	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah sarana/prasarana aparatur.			198,318,509		221,382,952		247,129,789		275,870,983		307,954,779			
		c	Program Pengelolaan Sumberdaya Manusia Aparatur	Peningkatan kapasitas aparatur.			2,015,581,010		2,249,993,082		2,511,667,277		2,803,774,181		3,129,853,118			
		d	Program Pendidikan Kedinasan	Peningkatan pengetahuan dan kompetensi aparatur			278,178,276		310,530,410		346,645,096		386,959,921		431,963,360			



PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR

		e	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Peningkatan kapasitas aparatur.		635,563,396		709,479,419		791,991,875		884,100,530		986,921,422			
1	20	13	KECAMATAN BULA			554,829,008		619,355,620		691,386,680		771,794,950		861,554,704			
		a	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan adm perkantoran.		369,467,393		412,436,450		460,402,809		513,947,656		573,719,769			KECAMATAN BULA
		b	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	jumlah sarana/prasarana aparatur.		16,744,500		18,691,885		20,865,752		23,292,439		26,001,349			
		c	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	Peningkatan partisipasi masyarakat.		11,776,965		13,146,626		14,675,579		16,382,348		18,287,616			
		d	Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Peningkatan pengetahuan wawasan kebangsaan.		135,630,450		151,404,271		169,012,588		188,668,752		210,610,928			
		e	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Dokumen perencanaan pembangunan Daerah		21,209,700		23,676,388		26,429,952		29,503,755		32,935,042			
1	20	14	KECAMATAN SERAM TIMUR			509,870,025		569,167,909		635,362,137		709,254,754		791,741,080			
		a	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan adm perkantoran.		308,545,320		344,429,141		384,486,250		429,202,001		479,118,193			KECAMATAN SERAM TIMUR
		b	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah sarana/prasarana aparatur.		35,721,600		39,876,022		44,513,603		49,690,536		55,469,545			
		c	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	Peningkatan partisipasi masyarakat.		19,591,065		21,869,506		24,412,929		27,252,153		30,421,578			
		d	Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Peningkatan Pengetahuan wawasan kebangsaan.		109,174,140		121,871,092		136,044,701		151,866,699		169,528,796			
		e	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	dokumen perencanaan pembangunan daerah.		36,837,900		41,122,148		45,904,654		51,243,365		57,202,968			
1	20	15	KECAMATAN PULAU GOROM			584,578,403		652,564,870		728,458,164		813,177,850		907,750,434			
		a	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan adm perkantoran.		320,043,210		357,264,235		398,814,066		445,196,142		496,972,453			KECAMATAN PULAU GOROM
		b	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Bertambahnya sarana/prasarana aparatur.		73,675,800		82,244,296		91,809,307		102,486,730		114,405,936			
		c	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	Peningkatan partisipasi masyarakat.		14,177,010		15,825,796		17,666,336		19,720,931		22,014,476			
		d	Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Peningkatan pengetahuan wawasan kebangsaan.		128,151,240		143,055,229		159,692,552		178,264,796		198,996,992			
		e	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Dokumen perencanaan pembangunan daerah.		48,531,143		54,175,314		60,475,903		67,509,251		75,360,577			



PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR

		e	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Dokumen perencanaan pembangunan daerah.		41,386,823		46,200,110		51,573,183		57,571,144		64,266,668			
1	20	19	KECAMATAN SIWALALAT			721,855,395		805,807,176		899,522,552		1,004,137,025		1,120,918,161			
		a	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan adm perkantoran.		481,516,005		537,516,316		600,029,464		669,812,891		747,712,130			KECAMATAN SIWALALAT
		b	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah sarana/prasarana aparatur.		52,466,100		58,567,907		65,379,355		72,982,974		81,470,894			
		c	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	Peningkatan partisipasi masyarakat.		20,093,400		22,430,262		25,038,902		27,950,926		31,201,619			
		d	Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Peningkatan pengetahuan wawasan kebangsaan.		115,202,160		128,600,171		143,556,371		160,251,977		178,889,282			
		e	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	dokumen perencanaan pembangunan daerah.		52,577,730		58,692,520		65,518,460		73,138,257		81,644,236			
1	20	20	KECAMATAN KILMURI			675,013,215		753,517,252		841,151,308		938,977,203		1,048,180,254			
		a	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan adm perkantoran.		335,367,776		374,371,049		417,910,402		466,513,381		520,768,888			KECAMATAN KILMURI
		b	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah sarana/prasarana aparatur.		32,930,850		36,760,708		41,035,978		45,808,462		51,135,987			
		c	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	Peningkatan partisipasi masyarakat.		27,963,315		31,215,449		34,845,805		38,898,372		43,422,253			
		d	Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Peningkatan pengetahuan wawasan kebangsaan.		230,834,096		257,680,101		287,648,297		321,101,793		358,445,932			
		e	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	dokumen perencanaan pembangunan daerah.		47,917,178		53,489,945		59,710,826		66,655,195		74,407,194			
1	20	21	KECAMATAN BULA BARAT			515,116,635		575,024,698		641,900,073		716,553,051		799,888,169			
		a	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan adm perkantoran.		257,083,890		286,982,746		320,358,840		357,616,573		399,207,380			KECAMATAN BULA BARAT
		b	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Bertambahnya sarana/prasarana aparatur.		69,489,675		77,571,324		86,592,869		96,663,620		107,905,599			
		c	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	Peningkatan partisipasi masyarakat.		14,567,715		16,261,940		18,153,204		20,264,422		22,621,174			



PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR

		d	Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Peningkatan pengetahuan wawasan kebangsaan.		141,546,840		158,008,737		176,385,154		196,898,747		219,798,071			
		e	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Dokumen perencanaan pembangunan daerah.		32,428,515		36,199,951		40,410,006		45,109,689		50,355,945			
1	20	22	KECAMATAN GOROM TIMUR			662,272,883		739,295,218		825,275,253		921,254,764		1,028,396,693			
		a	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan adm perkantoran.		423,803,295		473,091,618		528,112,173		589,531,619		658,094,146			KECAMATAN GOROM TIMUR
		b	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah sarana/prasarana aparatur.		49,117,200		54,829,530		61,206,205		68,324,486		76,270,624			
		c	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	Peningkatan partisipasi masyarakat.		41,972,880		46,854,326		52,303,484		58,386,379		65,176,715			
		d	Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Peningkatan Pengetahuan wawasan kebangsaan.		91,871,490		102,556,144		114,483,424		127,797,846		142,660,736			
		e	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Dokumen perencanaan pembangunan daerah.		55,508,018		61,963,600		69,169,967		77,214,434		86,194,472			
1	20	23	KECAMATAN PULAU PANJANG			417,942,720		466,549,459		520,809,161		581,479,266		648,993,674			KECAMATAN PULAU PANJANG
		a	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan adm perkantoran.		262,609,575		293,151,069		327,244,538		365,303,078		407,787,826			
		b	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah sarana/prasarana aparatur.		29,023,800		32,399,268		36,167,303		40,373,560		45,069,005			
		c	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	Peningkatan partisipasi masyarakat.		8,818,770		9,844,393		10,989,296		12,267,351		13,694,044			
		d	Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Peningkatan Pengetahuan wawasan kebangsaan.		88,076,070		98,319,317		109,753,854		122,618,227		136,767,096			
		e	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Dokumen perencanaan pembangunan daerah.		29,414,505		32,835,412		36,654,170		40,917,050		45,675,703			
1	20	24	KECAMATAN PULAU TEOR			562,311,566		627,708,402		700,710,888		782,203,565		873,173,840			KECAMATAN PULAU TEOR
		a	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan adm perkantoran.		319,739,576		356,925,289		398,435,700		444,773,772		496,500,962			
		b	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Bertambahnya sarana/prasarana aparatur.		35,721,600		39,876,022		44,513,603		49,690,536		55,469,545			
		c	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	Peningkatan partisipasi masyarakat.		33,489,000		37,383,771		41,731,503		46,584,877		52,002,698			



PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR

		d	Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Peningkatan pengetahuan wawasan kebangsaan.		120,002,250	133,958,512	149,537,887	166,929,143	186,343,002				
		e	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Dokumen perencanaan pembangunan daerah.		53,359,140	59,564,808	66,492,195	74,225,237	82,857,633				
1	20	25	KECAMATAN TELUK WARU			439,180,328	490,257,000	547,273,889	610,921,844	681,972,052				
		a	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan adm perkantoran.		222,534,405	248,415,156	277,305,839	309,556,508	345,557,930				KECAMATAN TELUK WARU
		b	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Bertambahnya sarana/prasarana aparatur.		41,303,100	46,106,651	51,468,854	57,454,682	64,136,661				
		c	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	Peningkatan partisipasi masyarakat.		30,028,470	33,520,781	37,419,248	41,771,106	46,629,086				
		d	Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Peningkatan pengetahuan wawasan kebangsaan.		96,057,615	107,229,116	119,699,862	133,620,958	149,161,073				
		e	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Dokumen perencanaan pembangunan daerah.		49,256,738	54,985,296	61,380,086	68,518,590	76,487,302				
1	20	26	KECAMATAN KIAN DARAT			656,747,198	733,126,898	818,389,554	913,568,259	1,019,816,248				KECAMATAN KIAN DARAT
		a	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan adm perkantoran.		447,859,560	499,945,627	558,089,303	622,995,089	695,449,418				
		b	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah sarana/prasarana aparatur.		11,163,000	12,461,257	13,910,501	15,528,292	17,334,233				
		c	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	Peningkatan partisipasi masyarakat.		33,489,000	37,383,771	41,731,503	46,584,877	52,002,698				
		d	Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Peeningkatan pengetahuan wawasan kebangsaan.		113,304,450	126,481,758	141,191,586	157,612,167	175,942,462				
		e	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Dokumen perencanaan pembangunan daerah.		50,931,188	56,854,485	63,466,661	70,847,834	79,087,437				
1	20	27	KECAMATAN LIAN FITUH			657,863,498	734,373,023	819,780,605	915,121,090	1,021,549,671				KECAMATAN LIAN FITUH
		a	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan adm perkantoran.		431,952,285	482,188,336	538,266,839	600,867,273	670,748,136				
		b	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah sarana/prasarana aparatur.		38,289,090	42,742,111	47,713,019	53,262,043	59,456,418				
		c	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	Peningkatan partisipasi masyarakat.		28,465,650	31,776,205	35,471,778	39,597,145	44,202,294				



PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR

		d	Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Peningkatan pengetahuan wawasan kebangsaan.			119,388,285	133,273,143	148,772,809	166,075,087	185,389,619					
		e	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Dokumen perencanaan pembangunan daerah.			39,768,188	44,393,228	49,556,160	55,319,542	61,753,204					
1	21		URUSAN KETAHANAN PANGAN				919,273,050	1,026,184,506	1,145,529,763	1,278,754,875	1,427,474,067					
1	21	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan adm perkantoran.	12 bln	12 bln	502,335,000	560,756,561	625,972,548	698,773,156	780,040,474	60 bln				BADAN PELAKSANA PENYULUHAN DAN KETAHANAN PANGAN
1	21	2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	jumlah sarana/prasara na aparatur.	unit	unit	416,938,050	465,427,945	519,557,215	579,981,719	647,433,593	unit				
1	21	3	Program Peningkatan Ketahan Pangan (Pertanian/Perkebunan)	Cakupan ketersediaan pangan utama masyarakat.	desa	desa	2,199,111,000	2,454,867,609	2,740,368,712	3,059,073,593	3,414,843,852	desa				
1	22		URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMERINTAHAN DESA DAN KB				6,437,317,534	7,185,977,403	8,021,706,755	8,954,631,250	9,996,054,864					
1	22	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan adm perkantoran.			860,667,300	960,762,907	1,072,499,633	1,197,231,340	1,336,469,345					BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
1	22	2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah sarana/prasarana aparatur.			3,121,755,276	3,484,815,415	3,890,099,447	4,342,518,013	4,847,552,858					
1	22	3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Peningkatan dkinerja aparatur.			109,443,168	122,171,409	136,379,944	152,240,931	169,946,551					
1	22	4	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	Jumlah kelembagaan masyarakat /organisasi masyarakat pedesaan yang dibina.			881,647,042	984,182,593	1,098,643,029	1,226,415,213	1,369,047,302					
1	22	5	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	Swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat .			922,399,248	1,029,674,281	1,149,425,400	1,283,103,574	1,432,328,519					
1	22	6	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah aparatur desa yang mendapat pembinaan.			541,405,500	604,370,798	674,659,302	753,122,179	840,710,289					
1	23		URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				78,141,000	87,228,798	97,373,508	108,698,046	121,339,629					DINAS PERHUBUNGAN, INFORMASI DAN KOMUNIKASI
1	23	1	Program Kerjasama Informasi dengan Mas Media	Peningkatan informasi kepada masyarkat.			78,141,000	87,228,798	97,373,508	108,698,046	121,339,629					
1	24		URUSAN STATISTIK				663,082,200	740,198,660	826,283,764	922,380,566	1,029,653,426					BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
1	24	1	Program pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah	Buku Kabupaten Seram Bagian Timur Dalam Angka dan Buku PDRB Kabupaten Seram Bagian Timur..	buku	buku	663,082,200	740,198,660	826,283,764	922,380,566	1,029,653,426	buku			buku	



PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR

1	25		URUSAN KEARSIPAN					139,537,500		155,765,711		173,881,263		194,103,654		216,677,909			KANTOR PERPUSTAKAAN, ARSIP DAN DOKUMENTASI
1	25	1	Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah	Jumlah arsip yang dikelola.				139,537,500		155,765,711		173,881,263		194,103,654		216,677,909			
1	26		URUSAN PERPUSTAKAAN					822,043,320		917,646,959		1,024,369,300		1,143,503,448		1,276,492,900			KANTOR PERPUSTAKAAN, ARSIP DAN DOKUMENTASI
1	26	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan adm perkantoran.				420,175,320		469,041,710		523,591,261		584,484,924		652,460,521			
1	26	2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah sarana/prasarana na aparatur.				267,912,000		299,070,166		333,852,026		372,679,016		416,021,586			
1	26	3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Peningkatan kapasitas aparatur.				133,956,000		149,535,083		166,926,013		186,339,508		208,010,793			
1	26	4	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Jumlah koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah.				433,794,180		844,244,443		540,562,072		603,429,441		673,608,285			
2			URUSAN PILIHAN					64,457,243,754		71,953,665,848		80,321,877,160		89,663,331,508		99,701,134,334			
2	1		URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN					8,443,160,725		9,425,100,317		10,521,239,484		11,744,859,636		13,110,786,812			DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
2	1	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan adm perkantoran.				535,154,220		597,392,656		666,869,422		744,426,335		831,003,118			
2	1	2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah sarana/prasarana aparatur.				725,885,238		810,305,691		904,544,243		1,009,742,739		1,127,175,819			
2	1	3	Program Peningkatan Peran Sektor Perikanan Sebagai Sumberdaya Kelautan	Pendapatan daerah dari sektor perikanan.				3.676.357.000		4.093.991.152		4.559.068.547		5.076.978.734		5.653.723.518			
2	1	4	Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir	Persentase pertumbuhan perekonomian di wilayah pesisir				2,341,204,827		2,613,486,948		2,917,435,480		3,256,733,227		3,635,491,301			
2	1	5	Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan	Pengelolaan potensi sumber daya kelautan				200,934,000		224,302,624		250,389,019		279,509,262		312,016,190			
2	1	6	Program Pengembangan Budidaya Perikanan	Cakupan hasil perikanan laut.				223,260,000		249,225,138		278,210,022		310,565,847		346,684,655			
2	1	7	Program Pengembangan Perikanan Tangkap	Cakupan perikanan tangkap.				3,243,856,170		3,621,116,643		4,042,252,508		4,512,366,475		5,037,154,696			
2	1	8	Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan	Cakupan lapangan kerja di sektor perikanan.				483,972,981		540,259,039		603,091,165		673,230,668		751,527,394			
2	1	9	Program Pengembangan Laut Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	pengelolaan potensi kelautan di pulau-pulau kecil.				688,893,289		769,011,578		858,447,625		958,285,083		1,069,733,639			
2	2		URUSAN PERTANIAN					17,348,467,047		19,366,138,415		21,618,420,313		24,132,642,596		26,549,248,628			DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN
2	2	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan adm perkantoran.	12 bln	12 bln		583,226,750	12 bln	651,100,673	12 bln	726,823,681	12 bln	811,353,275	12 bln	905,713,661			



PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR

2	2	2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah sarana/prasarana aparatur.	3 PKT	3 PKT	281,419,230	3 PKT	314,148,286	4 PKT	350,683,732	4 PKT	391,468,250	4 PKT	436,996,008			
2	2	3	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan	Produktivitas padi dan jagung..	1 PKT	2 PKT	167,445,000	2 PKT	186,918,854	2 PKT	208,657,516	2 PKT	232,924,385	2 PKT	260,013,491			
2	2	4	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan	Produktivitas kedelai.	2 PKT	5 PKT	1,479,097,500	5 PKT	1,651,116,539	5 PKT	1,843,141,393	5 PKT	2,057,498,737	5 PKT	2,296,785,840			
2	2	5	Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	Produktivitas kedelai hitam.	3 KEC	5 KEC	680,719,740	5 KEC	759,887,446	5 KEC	848,262,356	5 KEC	946,915,268	5 KEC	1,057,041,513			
2	2	6	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak	Cakupan herwan ternak sehat.	2 PKT	2 PKT	279,075,000	3 PKT	311,531,423	3 PKT	347,762,527	3 PKT	388,207,309	3 PKT	43,335,519			
2	2	7	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	Jumlah populasi sapi potong.	3 PKT	4 PKT	870,155,850	4 PKT	971,354,975	5 PKT	1,084,323,559	6 PKT	1,210,430,389	6 PKT	1,351,203,443			
2	2	8	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya	Panjang jaringan irigasi, rawa dan pengairan dalam kondisi baik..	2 PKT	5 PKT	1,220,093,574	5 PKT	1,361,990,457	5 PKT	1,520,389,947	5 PKT	1,697,211,298	5 PKT	1,894,596,971			
2	2	9	Pengembangan Sarana dan Prasarana Pertanian	Jumlah sarana/prasarana pertanian.	4 PKT	8 PKT	6,210,490,398	8 PKT	6,932,770,431	10 PKT	7,739,051,632	10 PKT	8,639,103,337	10 PKT	9,643,831,055	10 PKT		
2	2	10	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)	Jumlah ketersediaan pangan pokok masyarakat.	5 PKT	5 PKT	1,303,633,559	6 PKT	1,455,246,142	7 PKT	1,624,491,268	10 PKT	1,813,419,603	15 PKT	2,024,320,302			
2	2	11	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Peternakan	Cakupan hasil pertanian yang dipasarkan .	-	2 PKT	415,444,441	2 PKT	463,760,629	2 PKT	517,695,990	2 PKT	577,904,034	2 PKT	645,114,273			
2	2	12	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan	Nilai Tukar Petani	petani	.	465,644,452		519,798,901		580,251,514		647,734,765		723,066,318			
2	2	13	Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	Kontribusi sektor pertanian/perkebunan.	-	5 PKT	3,392,021,553	5 PKT	3,786,513,659	5 PKT	4,226,885,198	5 PKT	4,718,471,946	5 PKT	5,267,230,234			
2	3		URUSAN KEHUTANAN				20,340,940,083		22,706,591,414		25,347,367,996		28,295,286,895		31,586,006,435			
2	3	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan adm perkantoran.	12 BLN	12 BLN	581,759,745	12 BLN	649,418,403	12 BLN	724,945,764	12 BLN	809,256,956	12 BLN	903,373,540	60 BLN		
2	3	2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah sarana/prasarana aparatur.	12 BLN	12 BLN	2,124,408,204	12 BLN	2,371,476,878	12 BLN	2,647,279,639	12 BLN	2,955,158,261	12 BLN	3,298,843,167	60 BLN		
2	3	3	Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan	Luas lahan kritis dan lahan tidak produktif yang tertanami	3 KEC	3 KEC	2,447,475,404	3 KEC	2,732,116,793	3 KEC	3,049,861,976	3 KEC	3,404,580,924	1 KEC	3,800,511,360	16 KEC		
2	3	4	Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Rehabilitasi hutan dan lahan kritis	835 ha	850 ha	14,738,544,130	865 ha	16,452,636,813	100 ha	18,366,078,474	150 ha	20,502,053,401	200 ha	22,886,442,211	2165 ha		
2	3	5	Program Pembinaan dan Penerbitan Industri Hasil Hutan	Jumlah produksi kayu rakyat (jati dan sengon)	3 kec	4 kec	448,752,600	5 kec	500,942,527	6 kec	559,202,143	7 kec	624,237,353	8 kec	696,836,157	30 kec		

DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN



PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR

2	6	1	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Revitalisasi pasar tradisional	2 paket	4 paket	347,110,136	4 paket	387,479,045	5 paket	432,542,858	5 paket	482,847,592	6 paket	539,002,767	24 paket	DAN PERDAGANGAN
2	6	2	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB.	3 paket	4 paket	3,702,453,978	4 paket	4,133,049,375	5 paket	4,613,723,018	6 paket	5,150,299,005	6 paket	5,749,278,779	25 paket	
2	7	1	URUSAN PERINDUSTRIAN	Persentase pertumbuhan Industri.	3 paket	5 paket	5,813,115,506	6,489,180,839	7,243,872,570	8,086,334,950	9,026,775,705	5 paket	8,086,334,950	9,026,775,705	25 paket		DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2	7		Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah				5,813,115,506	6,489,180,839	7,243,872,570	8,086,334,950	9,026,775,705						
2	8	1	URUSAN TRANSMIGRASI	Persentase transmigrasi swakarsa.	orang	orang	574,031,823	640,791,724	715,315,802	798,507,030	891,373,397	orang	798,507,030	891,373,397	orang		DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	8		Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi				574,031,823	640,791,724	715,315,802	798,507,030	891,373,397						
TOTAL							564,793,135,860	630,498,642,948	703,443,285,787	785,655,727,401	876,657,574,267						



PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR

BABX

PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2016–2021 merupakan satu kesatuan dari sistem Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Maluku Tahun 2014-2019, yang memuat visi, misi, dan program Bupati dan Wakil Bupati Seram Bagian Timur terpilih beserta tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

10.1. Pedoman Transisi.

Masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati Seram Bagian Timur terpilih Tahun 2016 – 2021 akan berakhir pada tanggal 17 Februari 2021. Sementara itu, dokumen RPJMD Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2016-2021 akan berakhir pada akhir bulan Desember 2021. Oleh karena itu, untuk menjamin adanya kesinambungan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dan memastikan, bahwa pada akhir periodisasi dari dokumen RPJMD ini tidak akan terjadi kekosongan regulasi, maka ditetapkan antara lain sebagai berikut :

1. Bupati dan Wakil Bupati terpilih Tahun 2016-2021 dapat terus melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah sesuai program dan kegiatan yang telah tertuang dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2021;
2. Sambil menunggu penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2021-2025, maka penyusunan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2022 selain menjabarkan Sasaran Pokok dan Arah Kebijakan 5 (lima) tahunan ke 4 (empat) sebagaimana telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten



PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR

Seram Bagian Timur Tahun 2005-2025 dan Rancangan Awal RKPD Provinsi Maluku Tahun 2022, juga memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2022 dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 263 ayat (4) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

3. Terkait dengan angka 2 di atas, maka substansi yang tertuang dalam dokumen RKPD Tahun 2022, menjadi substansi tahun pertama dari Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2021-2025;
4. Periode tahun pertama dokumen RPJMD Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2021-2025, adalah Tahun 2022 dan seterusnya untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun.

Hal ini sesuai dengan Pasal 263 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan dan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008.

10.2. Kaidah Pelaksanaan.

Dokumen RPJMD Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2016-2021 selanjutnya dijadikan sebagai landasan oleh Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur dan seluruh pemangku kepentingan dalam merumuskan kebijakan yang akan dituangkan kedalam dokumen rencana pembangunan tahunan Kabupaten Seram Bagian Timur untuk kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan, mulai tahun 2017 sampai dengan tahun 2021, termasuk dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Tahun 2016-2021 dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) tahunan untuk selama 5 (lima) tahun kedepan.

Berkaitan dengan hal tersebut, dalam dokumen RPJMD Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2016-2021 perlu dirumuskan beberapa kebijakan terkait dengan kaidah pelaksanaan, sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR

1. Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur dan seluruh pemangku kepentingan seperti masyarakat umum, dunia usaha, para akademis dan seluruh Perangkat Daerah (PD) dilingkungan Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur, berkewajiban untuk melaksanakan seluruh program dan kegiatan, serta pagu indikatif sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2016-2021 dengan penuh tanggung jawab;
2. Bupati dan Wakil Bupati Seram Bagian Timur, dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan daerah wajib melakukan pembinaan dan pengawasan agar dalam implementasinya selaras dan bersinergi dengan dokumen RPJMD Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2016-2021;
3. Untuk menjamin agar target capaian setiap program dapat dicapai secara optimal, maka sesuai kewenangannya Sekretaris Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur berkewajiban mengkoordinasikan pelaksanaan RPJMD Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2016-2021;
4. Seluruh Perangkat Daerah (PD) dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur berkewajiban untuk menjabarkan RPJMD kedalam dokumen Renstra PD dan Renja PD;
5. Dalam upaya menjamin efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan RPJMD Kabupaten Seram Bagian Timur tahun 2016-2021, Bappeda Kabupaten Seram Bagian Timur berkewajiban mengkoordinasikan, mensinergikan dan mengharmonisasikan dokumen perencanaan seluruh Perangkat Daerah, baik untuk perencanaan 5 (lima) tahunan (Renstra PD) maupun perencanaan tahunan (Renja PD). Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 260 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Sesuai Pasal 43 dan 46 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan dan Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Bupati wajib melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap setiap dokumen rencana perangkat daerah (Renstra dan Renja PD) yang disusun oleh seluruh Perangkat Daerah;
7. Bupati dan/atau Wakil Bupati sesuai dengan kewenangan, berkewajiban untuk menyebarkan luaskan informasi RPJMD Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2016 – 2021 kepada seluruh masyarakat Kabupaten Seram Bagian Timur;



PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR

8. Dalam hal target capaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen RPJMD tidak dapat/sulit dicapai yang disebabkan oleh berbagai kendala sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 282 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, maka dokumen RPJMD ini perlu dilakukan penyesuaian/revisi;
9. RPJMD Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2016 - 2021 akan menjadi dasar dalam penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan (LKPJ-AMJ) Bupati dan Wakil Bupati Seram Bagian Timur di akhir periode masa jabatan, serta menjadi dasar bagi DPRD dan anggota masyarakat untuk melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah;
10. Pada akhirnya keberhasilan/ketidak berhasilan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Seram Bagian Timur, sangat tergantung pada partisipasi aktif seluruh lapisan masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan, serta sikap, mental, etika, tekad dan semangat, ketaatan dan taat azas para penyelenggara pemerintahan daerah;
11. Guna mewujudkan visi Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur, yaitu **"Terwujudnya Kabupaten Seram Bagian Timur Yang Sejahtera, Mandiri Dan Berdaya Saing Berbasis Sumberdaya Lokal"**, serta mewujudkan keberhasilan Pembangunan Jangka Menengah di Kabupaten Seram Bagian Timur, maka perlu didukung oleh:
 - a. Komitmen dari kepemimpinan daerah yang kuat dan demokratis;
 - b. Konsistensi kebijakan pemerintah daerah;
 - c. Keberpihakan pembangunan kepada rakyat;
 - d. Peran serta segenap pemangku kepentingan dalam pembangunan Kabupaten Seram Bagian Timur; dan
 - e. Menjaga keseimbangan pembangunan dan menjaga kesinambungan rencana pembangunan daerah.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2016 - 2021 adalah dokumen perencanaan yang merupakan bagian integral dari rencana pembangunan Provinsi Maluku dan Nasional dalam rangka mewujudkan tujuan berbangsa dan bernegara Indonesia secara



PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR

keseluruhan. Implementasi pelaksanaan RPJMD ini harus dilaksanakan secara terintegrasi dalam suatu koordinasi, sinergi dan harmonisasi antara tiga pilar tata kelola negara, yakni: pemerintahan, dunia usaha (swasta), dan warga masyarakat (civil society).

10.3. Penutup.

Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 263 ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dokumen RPJMD Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2016-2021 merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN.

Dokumen RPJMD dimaksud, sebelum dijadikan landasan penyusunan Rancangan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) oleh seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur, terlebih dahulu telah mendapat masukan dari berbagai stakeholders, diantaranya masukan dari DPRD, masukan dari para pakar akademisi, masukan dari tokoh masyarakat dan tokoh agama, masukan dari ormas, LSM, organisasi kepemudaan dan masukan dari stakeholder lainnya.

Menurut skalanya, RPJMD Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2016-2021 merupakan perencanaan jangka menengah daerah yang perlu dipahami dan dipedomani sebagai dokumen bersama seluruh pemangku kepentingan masyarakat Kabupaten Seram Bagian Timur dalam rangka melaksanakan pembangunan. Selanjutnya, dokumen RPJMD secara teknis menjadi pedoman dan dijabarkan dalam rangka perencanaan tahunan pemerintahan daerah yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD) selama 5 (lima) tahun kedepan.



PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR

Dalam upaya menjamin terjadinya keselarasan, sinergi dan konsistensi, Pemerintahan Kabupaten Seram Bagian Timur akan menjaga konsistensi antara rencana jangka menengah dengan implementasi tahunannya agar rencana pembangunan yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Upaya tersebut dilakukan untuk menjaga agar hasil pembangunan dapat dinikmati secara merata dan berkeadilan oleh seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Seram Bagian Timur sebagai bagian dari proses meningkatkan kesejahteraan lahir dan batin dalam upaya untuk **"Terwujudnya SBT Yang Sejahtera, Mandiri dan Berdaya Saing Berbasis Sumberdaya Lokal"**.

Mengingat proses penyusunan dokumen RPJMD juga terkait dengan penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Daerah lainnya sebagai satu kesatuan yang saling terkait antara satu dengan yang lainnya, maka keberhasilan pencapaian target kinerja dari RPJMD akan sangat ditentukan oleh keberhasilan pencapaian target kinerja Renstra PD, RKPD dan Renja PD. Oleh karena itu, sebegitu apapun kualitas dokumen RPJMD jika tidak dapat diterjemahkan kedalam dokumen rencana pembangunan daerah lainnya secara berkualitas, maka dapat dipastikan, bahwa target capaian yang telah ditetapkan tidak dapat dicapai secara maksimal.

Oleh karena itu, maka kunci keberhasilan pencapaian target kinerja RPJMD Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2016-2021 terletak pada konsistensi, keselarasan dan sinergitas diantara dokumen rencana pembangunan dimaksud. Dalam konteks konsistensi, keselarasan dan sinergitas, maka ukurannya adalah konsistensi target sasaran, perumusan strategi dan kebijakan antara Renstra PD dengan RPJMD, antara RKPD dengan RPJMD, serta antara Renja PD dengan Renstra PD dan RKPD tahun berkenaan.